



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.895, 2021

KEMEN-ATR/BPN. Peta Proses Bisnis.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- (2) Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Perencanaan anggaran;
 - c. Penataan organisasi;
 - d. Penyusunan dan penyempurnaan uraian jabatan; dan
 - e. Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.
- (3) Peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional termuat dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis terdiri dari tingkatan sebagai berikut:

- a. Peta Proses Bisnis level 0;
- b. Peta Proses Bisnis level 1;
- c. Peta Proses Bisnis level 2; dan
- d. Peta Proses Bisnis level 3.

Pasal 3

- (1) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari:

- a. proses bisnis inti;
 - b. proses bisnis pendukung; dan
 - c. proses bisnis lainnya.
- (2) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.
 - (3) Peta Proses Bisnis level 0 mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan pemangku kepentingan.
 - (4) Peta Proses Bisnis level 0 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Peta Proses Bisnis level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0.
- (2) Peta Proses Bisnis level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit kerja dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- (3) Peta Proses Bisnis level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 1.
- (4) Peta Proses Bisnis level 2 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis wilayah dan daerah sebagai penjabaran Peta Proses Bisnis level 1.
- (5) Peta Proses Bisnis level 1 dan level 2 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Peta Proses Bisnis level 3 ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit eselon 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Peta Proses Bisnis level 3 sebagaimana ayat (1) berpedoman pada Peta Proses Bisnis dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

- 6 -

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
 RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Daftar Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peta Proses Bisnis Level 0	Peta Proses Bisnis Level 1	Peta Proses Bisnis Level 2
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1 ATR/BPN 07 Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Kompetitif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik	ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.03 Pembinaan Admintrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan,

		Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.09 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 02.01.01 Penyajian Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ATR/BPN 02.01.02 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik ATR/BPN 02.01.03 Penyajian Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Pusat dan Daerah serta Pedoman Tata Ruang ATR/BPN 01.01.01 Pengelolaan Data Dasar Pertanahan dan Surveyor ATR/BPN 01.01.02 Pengembangan Sistem Geospasial Tematik Multiguna ATR/BPN 01.01.03 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral ATR/BPN 01.03.01 Penetapan Hak Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.02 Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.03 Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT
2	ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	
3	ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	
4	ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang	

- 8 -

		ATR/BPN 01.03.04 Pengaturan Tanah Pemerintah
5	ATR/BPN 01.02 Penyelenggara Reforma Agraria	ATR/BPN 01.02.01 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria ATR/BPN 01.02.03 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
6	ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanian	ATR/BPN 01.06.01 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07.01 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Tanah ATR/BPN 01.07.02 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanian
7	ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	ATR/BPN 02.02.01 Pengendalian Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.02 Penertiban Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05.01 Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulaian dan Wilayah Tertentu ATR/BPN 01.05.02 Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah
8	ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanian	ATR/BPN 01.04.01 Penanganan Sengketa Pertanian

		<p>ATR/BPN 01.04.02 Penanganan Perkara Pertanahan</p> <p>ATR/BPN 01.04.03 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan</p> <p>ATR/BPN 07.08.01 Pengawasan Internal Berbasis Risiko (<i>Quality Assurance, Consulting</i> dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP))</p> <p>ATR/BPN 07.08.02 Penanganan Kasus Administratif dan Disiplin Serta Penanganan Pengaduan</p> <p>ATR/BPN 07.08.03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas dan Dukungan Manajemen/Pelaksanaan Tugas Teknis</p>
9	<p>ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan</p>	
10	<p>BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah</p>	<p>BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Wilayah</p> <p>BPN 01.02 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Wilayah</p> <p>BPN 01.03 Penyelenggaraan Reforma Agraria Wilayah</p> <p>BPN 01.04 Pengadaan Tanah, Pencadangan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Wilayah</p> <p>BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan, Pemanfaatan Tanah dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Wilayah</p>

- 10 -

			BPB 01.06 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Wilayah
			BPB 01.07 Pelaksanaan Koordinasi, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Daerah

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peta Proses Bisnis Level 0 (Nol) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DEPUT	BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL						OUTPUT
	ORGANISASI	PROSES	PROSES	PROSES	PROSES	PROSES	
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Wilayah Nasional	LAPAN Perencanaan, Pengoperasian, Jarak, Jauh	ATK/BPN 07.02 Perencanaan, Pengoperasian, Kembali Program dan Adukasi serta Administrasi Kerja Sama	ATK/BPN 07.03 Pengelolaan, Pengoperasian, Adaptasi, dan Pengelolaan Kemitraan dan PIRK	ATK/BPN 07.04 Pengelolaan, Pengoperasian, Manajemen Sumber Data Maritim	ATK/BPN 07.05 Pengelolaan, Pengoperasian, Manajemen, dan Pengelolaan Kegiatan Terkini	ATK/BPN 07.06 Pengelolaan, Pengoperasian, Publik dan Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • KTR Nasional • KTR Wilayah/Kepulauan • KTR Kota • Peta Bidang Tanah Kadaster • Peta Dasar Pertanahan • MPR Tematik Pertanahan • MPR • Bahan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi • Peta Geopengawasan Keseluruhan Tanah • Data Tanah Terintegrasi Terbitur • Data Pengolahan • Data Tanah Objek Pertanahan • Data Tanah Objek Reforma Agraria • Proyek Strategis Nasional dan Non Nasional • Data Tanah Cadangan Negara • Lainnya • Data Tanah Absorpsi • Data Tanah Objek Reforma Agraria • Data Perizinan Tanah • Kolempok Usaha Bersama • Skriptur Kelembagaan Tanah • MPR Tematik Pertanahan • PAT (termasuk WP3M T) • Cugala Tugias KA • Kawasan Awar Reformasi • Sertifikat Hak Atas Tanah • Penanganan Sengketa dan Konflik • Penanganan Perkara • Pendaftaran Lahan
		ATK/BPN 07.06 Pengelolaan, Pengoperasian, Publik dan Hubungan Masyarakat	ATK/BPN 07.07 Pengelolaan, Pengoperasian, Hukum, Pengoperasian dan Penyusunan Peraturan perundang-uran	ATK/BPN 07.08 Pengelolaan, Pengoperasian dan Pengelolaan Pengelolaan	ATK/BPN 07.09 Pengelolaan, Pengoperasian, Dudung dan Pengelolaan Tanah	ATK/BPN 07.10 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan, dan Pengelolaan Masyarakat	
KEMENTERIAN/LEMBAGA Kegiatan Primer Intertanah		ATK/BPN 01.01 Pengelolaan, Pengoperasian, Data Geospasial Perencanaan dan Pengelolaan	ATK/BPN 01.02 Pengelolaan, Pengoperasian, Reforma Agraria	ATK/BPN 01.03 Pengelolaan, Pengoperasian, Tanah dan Ruang	ATK/BPN 01.04 Pengelolaan, Pengoperasian, Sengketa dan Pengelolaan Pertanahan	ATK/BPN 01.05 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan dan Pengelolaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Kepertahanan Tanah • Yang Berkonflik • Bantuan Ruang Yang Adil, Aman, dan Berkeadilan • Pertanahan Nihil Ekonomi • Pertanahan Bagi Kesejahteraan • Penyelenggaraan Kualitas Pelayanan • Publik dan Tata Kelola • Kementerian Yang Bertanya Saling
PEMERINTAH DAERAH Data Perizinan Daerah		ATK/BPN 01.06 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan dan Pengelolaan Tanah	ATK/BPN 01.07 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan	ATK/BPN 02.01 Pengelolaan, Pengoperasian, Ruang	ATK/BPN 02.02 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan Ruang	BPN 01 Pengelolaan dan Pengelolaan Wilayah	
LEMBAGA KEUANGAN Layanan Terkini PIRK		ATK/BPN 07.09 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan dan Pengelolaan Ruang	ATK/BPN 07.10 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan dan Pengelolaan Ruang	ATK/BPN 07.11 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan dan Pengelolaan Masyarakat	ATK/BPN 07.12 Pengelolaan, Pengoperasian, Pengelolaan dan Pengelolaan Tinggi Pertanahan		
MASYARAKAT Perencanaan Layanannya							
BADAN HUKUM/INDIVIDU PROFESI Perencanaan Layanannya							

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

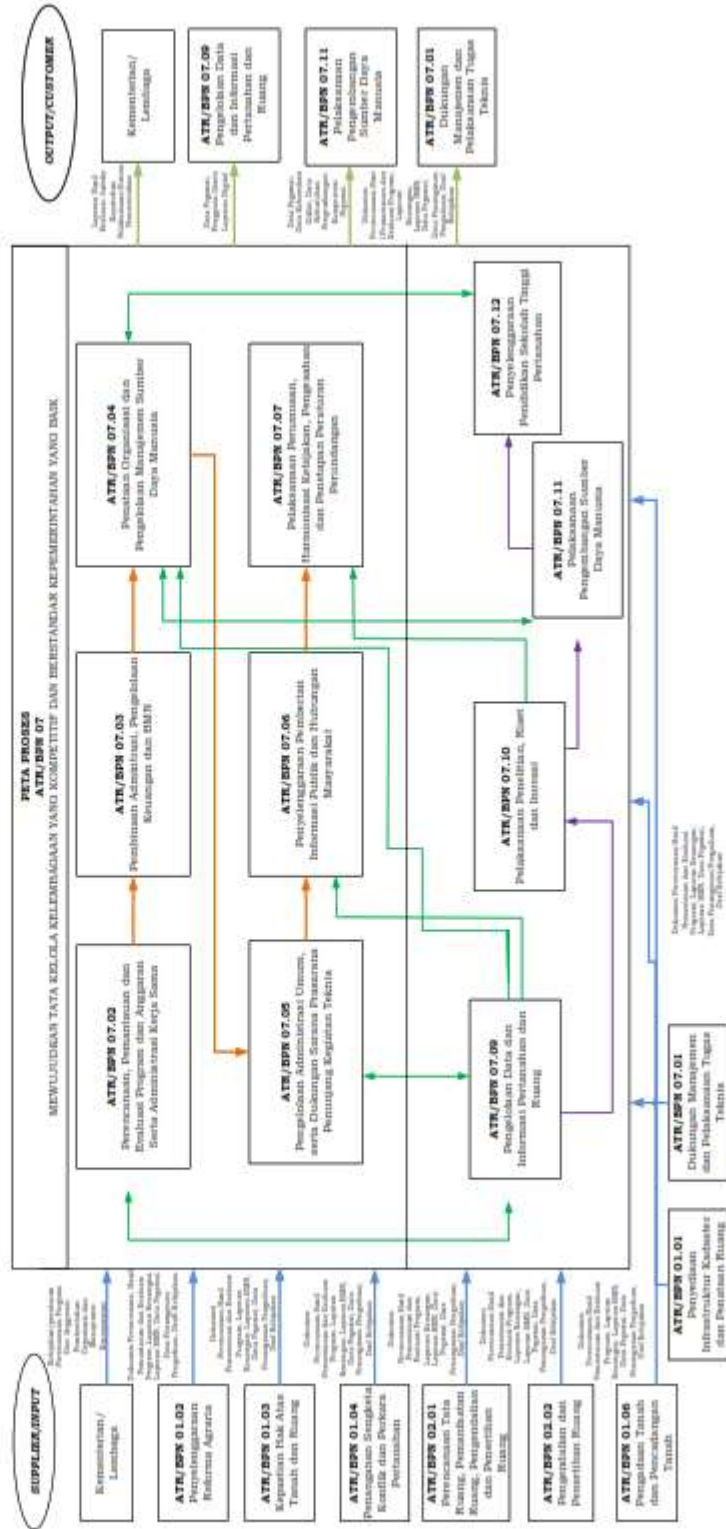
ttd.

SOFYAN A. DJALIL

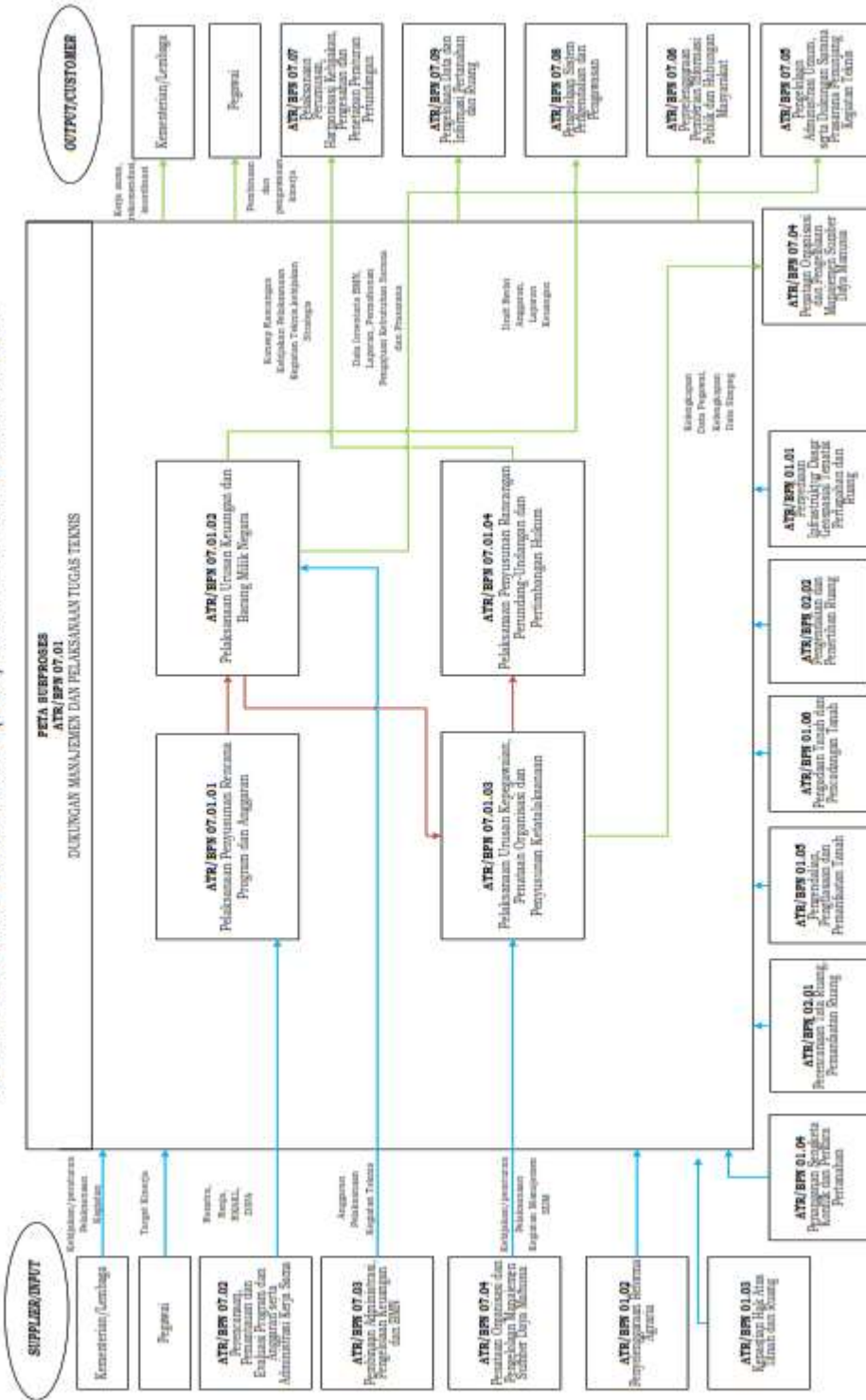
LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- 12 -

3.1. Peta Proses Bisnis Level I (Satu) Sekretariat Jenderal



3.1.1.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sekretariat Direktorat Jenderal

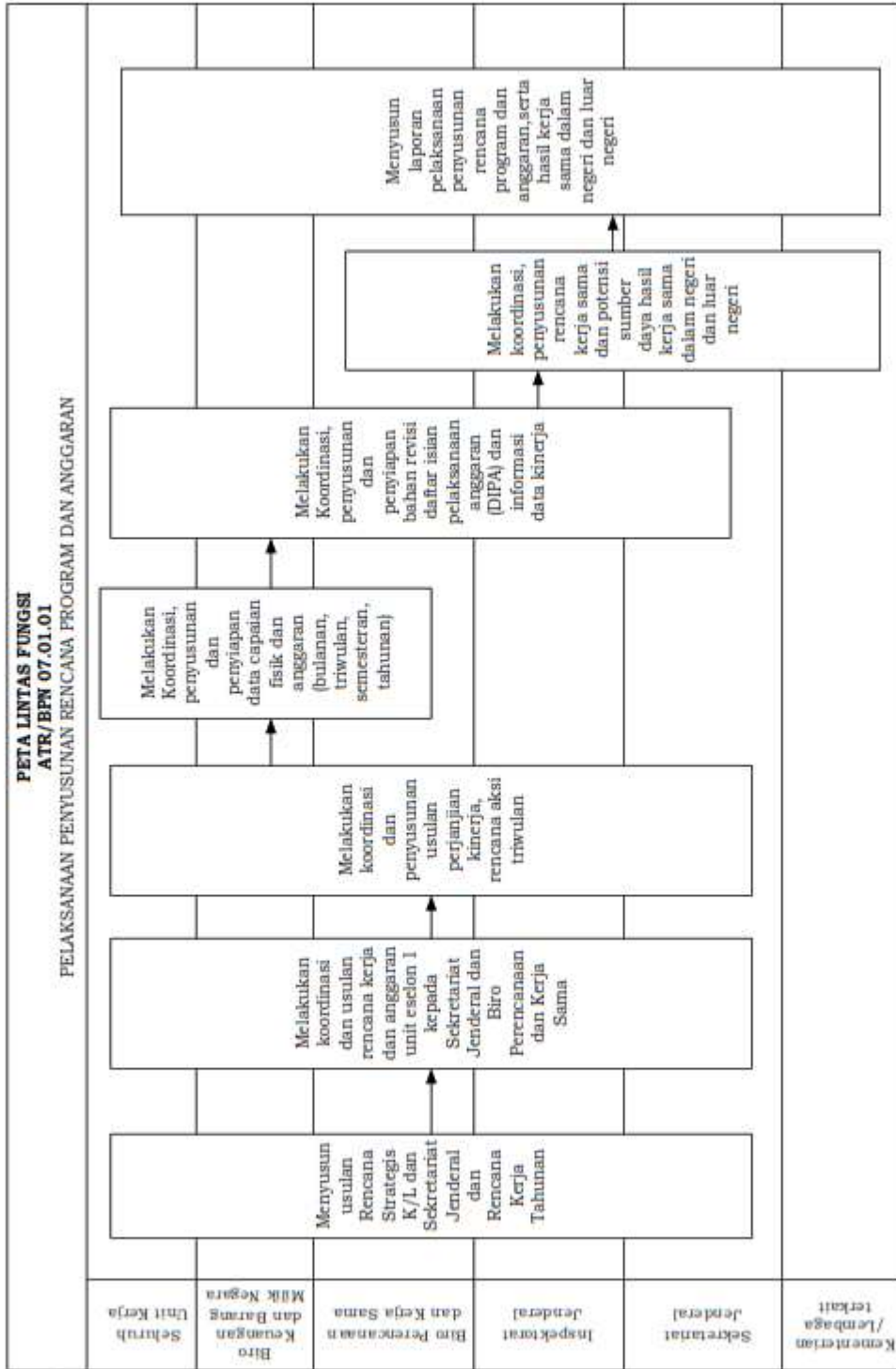


**PETA RELASI
ATR/BPN 07.01**

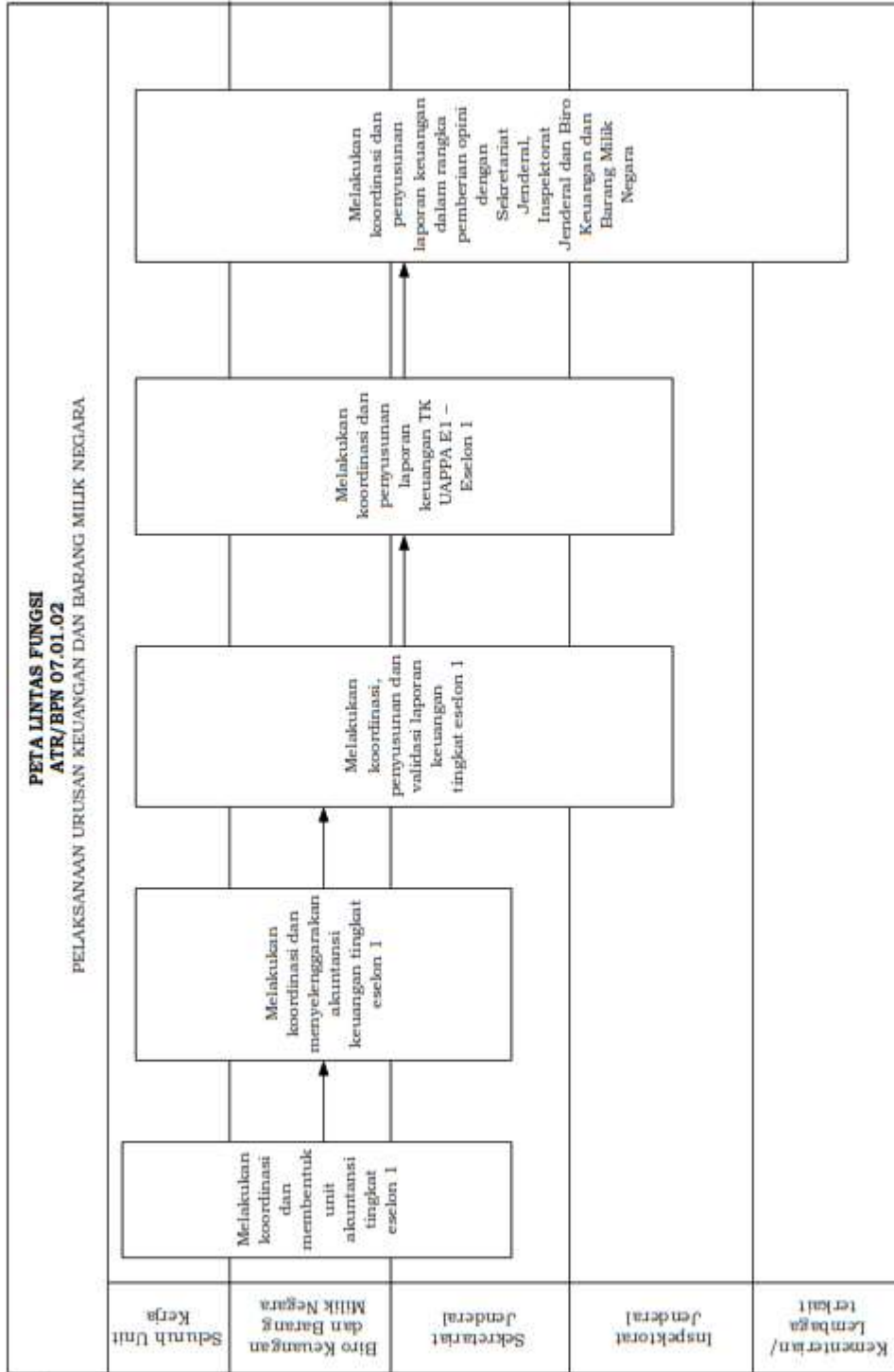
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

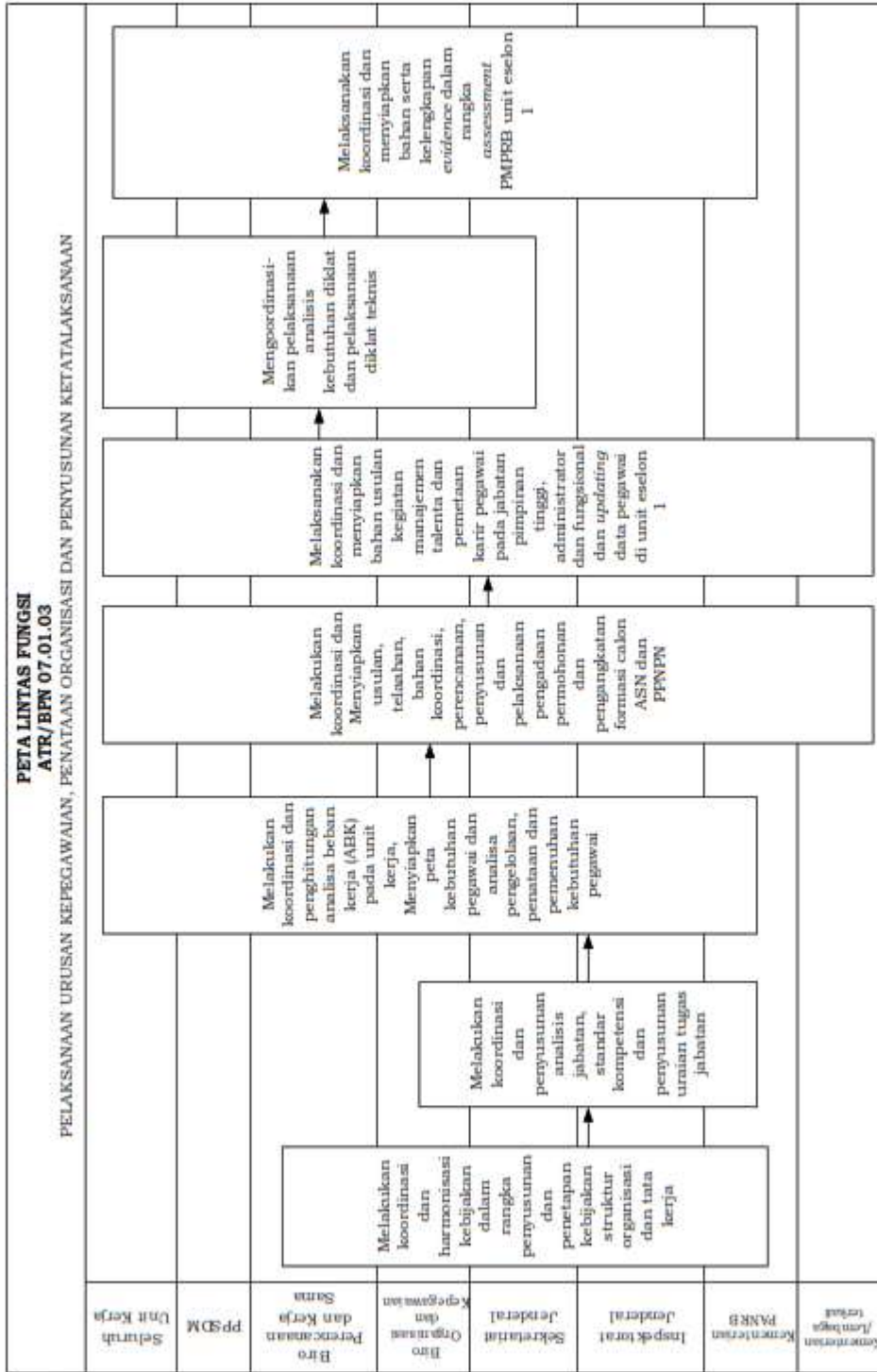
<p>ATR/BPN 07.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran</p>	<p>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</p>	<p>Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>	<p>Seluruh Unit Kerja</p>	<p>Kementerian Keuangan</p>	<p>Inspektoral Jenderal</p>		
<p>ATR/BPN 07.01.02 Pelaksanaan Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara</p>	<p>Biro Umum dan Layanan Pengaduan</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>	<p>Kementerian Keuangan</p>	<p>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</p>	<p>Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</p>	<p>Seluruh Unit Kerja</p>	<p>Inspektoral Jenderal</p>	
<p>ATR/BPN 07.01.03 Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Penyusunan Ketatalaksanaan</p>	<p>LAN</p>	<p>KASN</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>	<p>PPSDM</p>	<p>Kementerian PANRB</p>	<p>BKN</p>	<p>Seluruh Unit Kerja</p>	<p>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</p>
<p>ATR/BPN 07.01.04 Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan dan Pertimbangan Hukum</p>	<p>Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>	<p>Biro Hukum</p>	<p>Inspektoral Jenderal</p>	<p>Seluruh Unit Kerja</p>	<p>Biro Organisasi dan Kepegawaian</p>	<p>Kantor Wilayah BPN</p>	<p>Kantor Pertambangan</p>

- 15 -

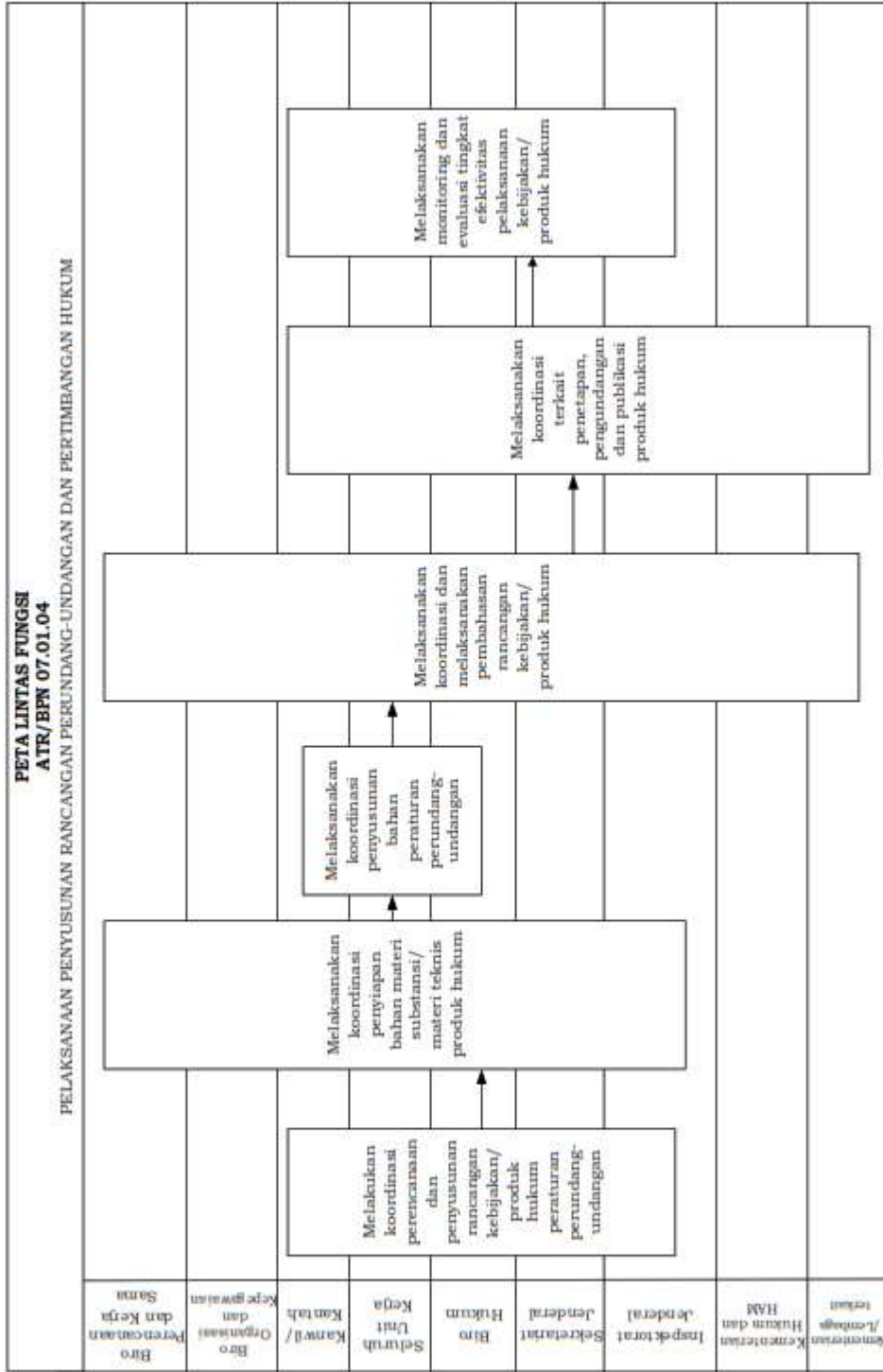


- 16 -

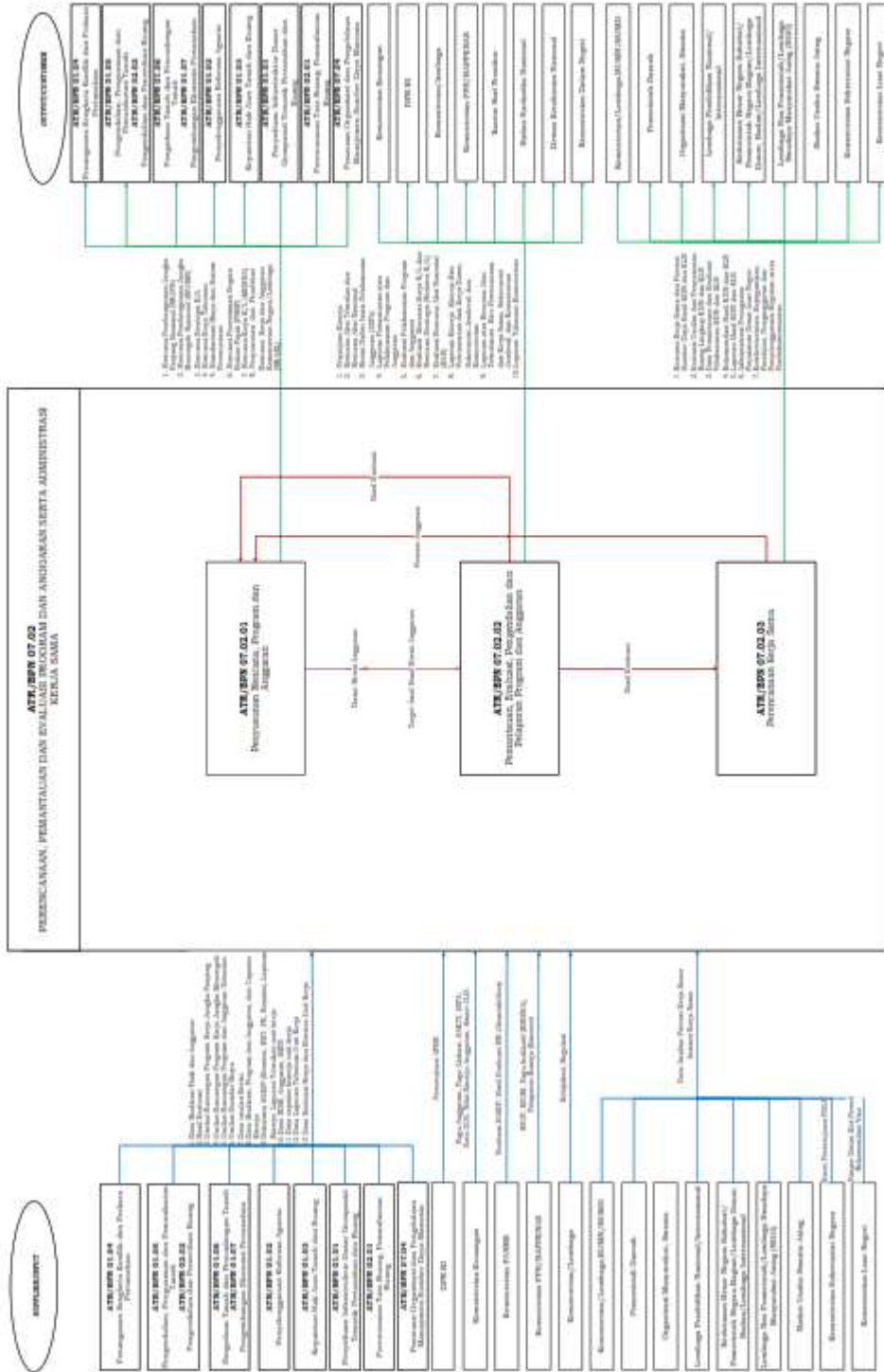




- 18 -

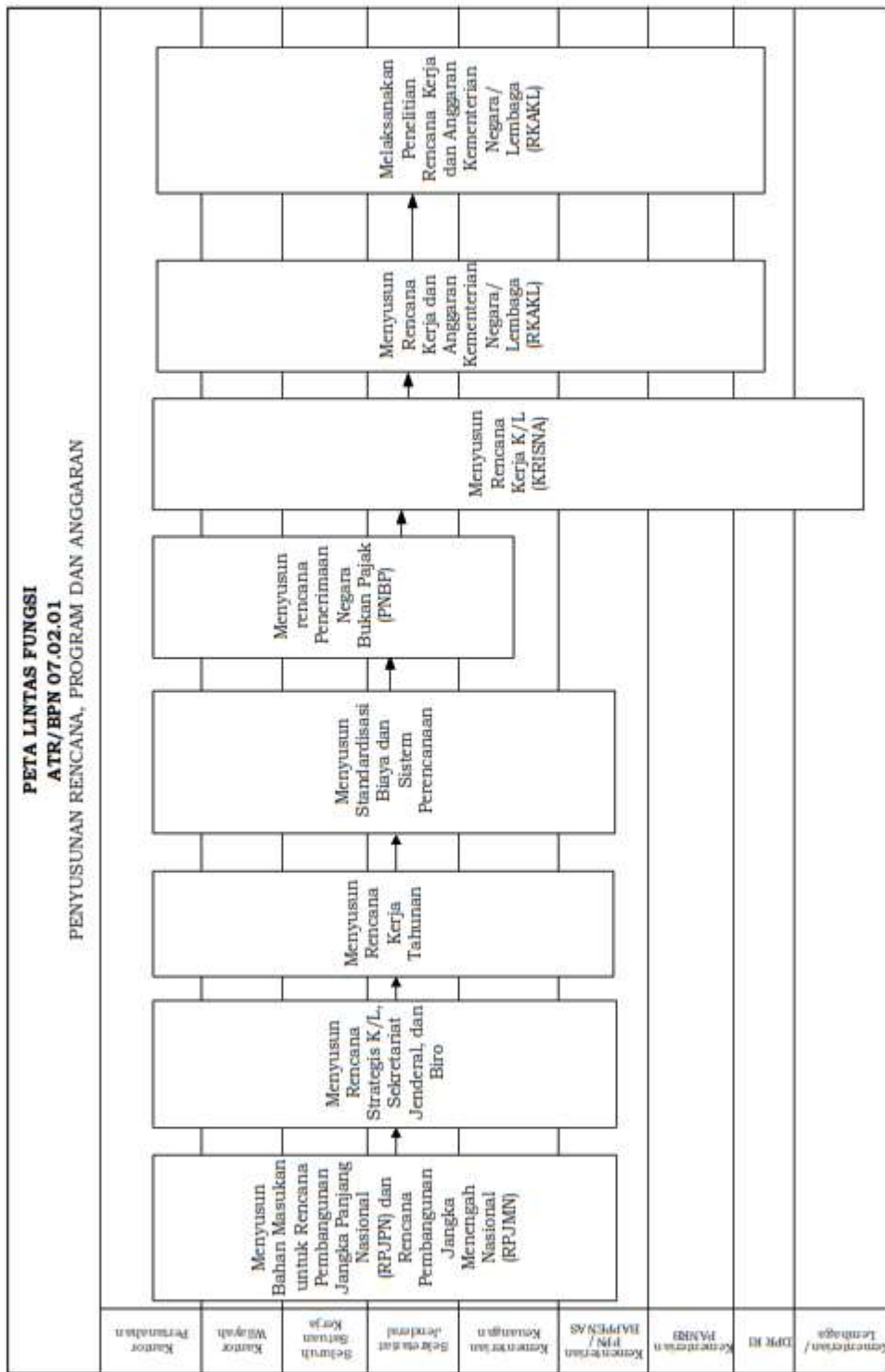


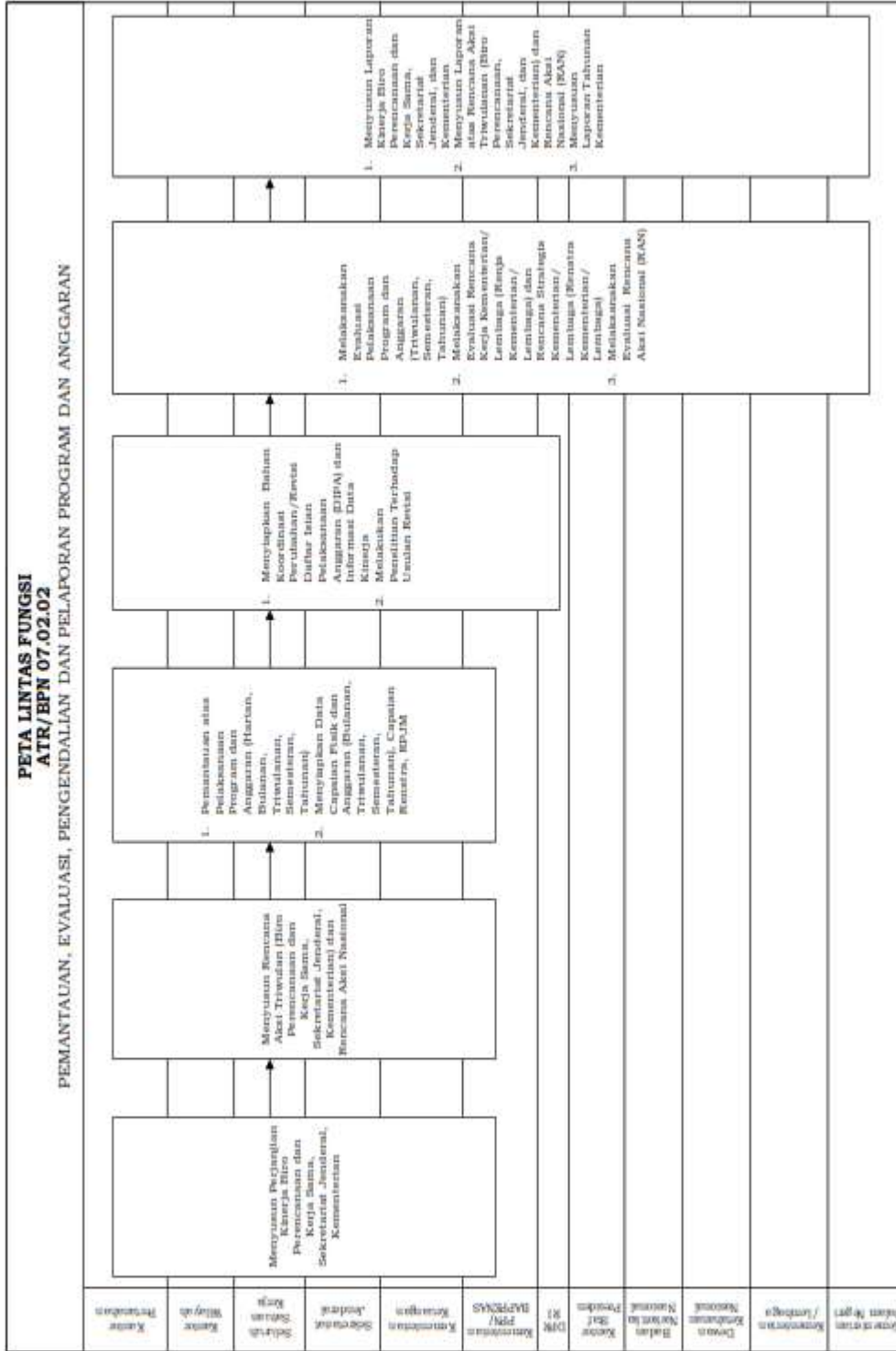
3.1.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Perencanaan dan Kerja Sama



PETA RELASI ATR/BPN 07.02 PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA ADMINISTRASI KERJA SAMA		
ATR/BPN 07.02.01 Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran	Kementerian Keuangan Kementerian PANRB Kementerian PPN/Bappenas DPR RI	Kementerian /Lembaga DPR RI
ATR/BPN 07.02.02 Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran	Kementerian Keuangan Kementerian/Lembaga Kantor Staf Presiden Dewan Ketahanan Nasional	DPR RI Kementerian PPN/Bappenas Badan Narkotika Nasional Kementerian Dalam Negeri
ATR/BPN 07.02.03 Perencanaan Kerja Sama	Pemerintah Daerah Kementerian Keuangan Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing Kedutaan Besar Negara Sahabat/Pemerintah Negara Bagian/Lembaga Donor, Badan/Lembaga Internasional	Kementerian/Lembaga Kementerian PPN/Bappenas Badan Usaha Swasta Asing Kementerian Sekretariat Negara Lembaga Pendidikan Nasional/ Internasional Kemenko Perencanaan BUMN/D Kementerian Luar Negeri

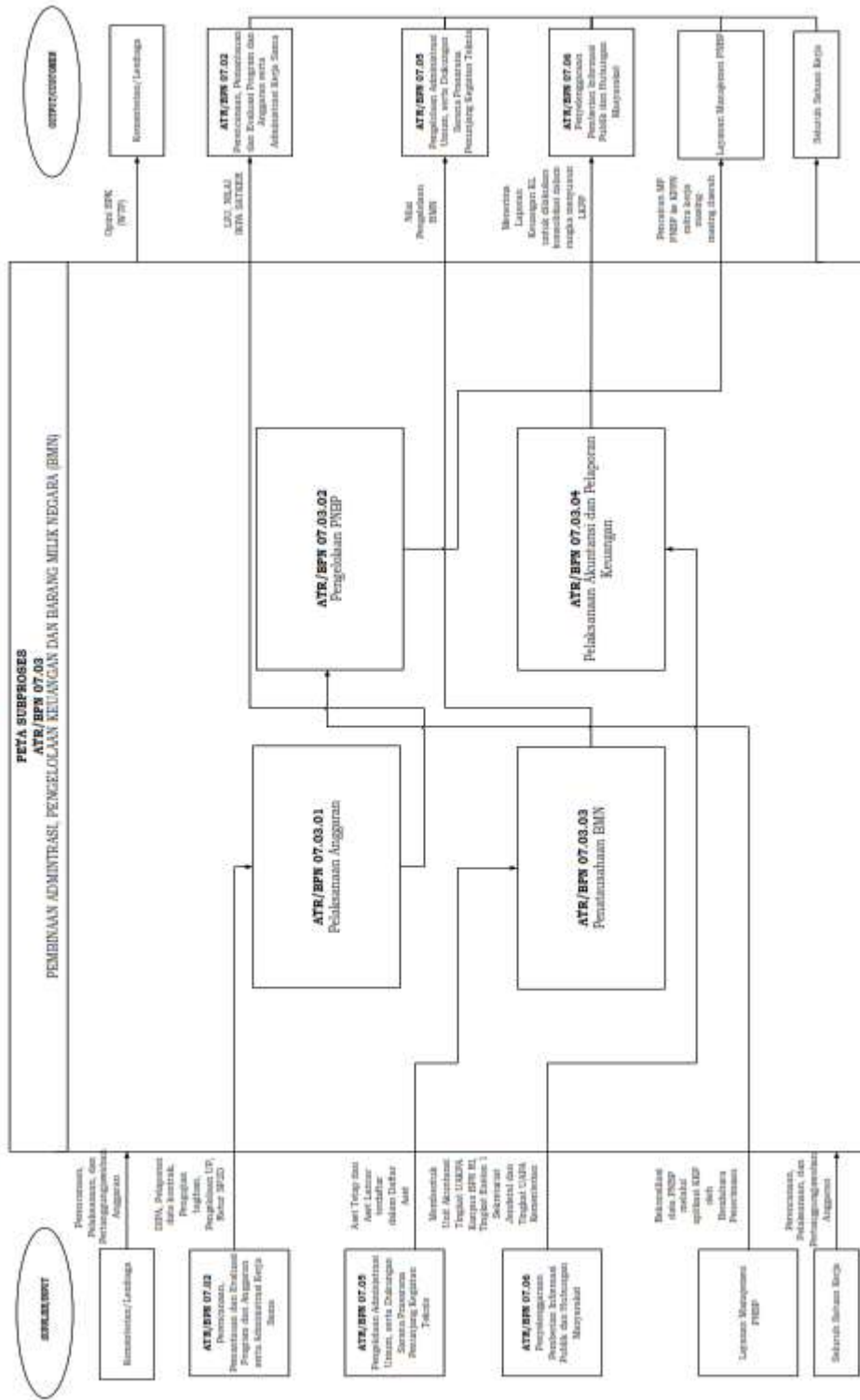
- 21 -





- 24 -

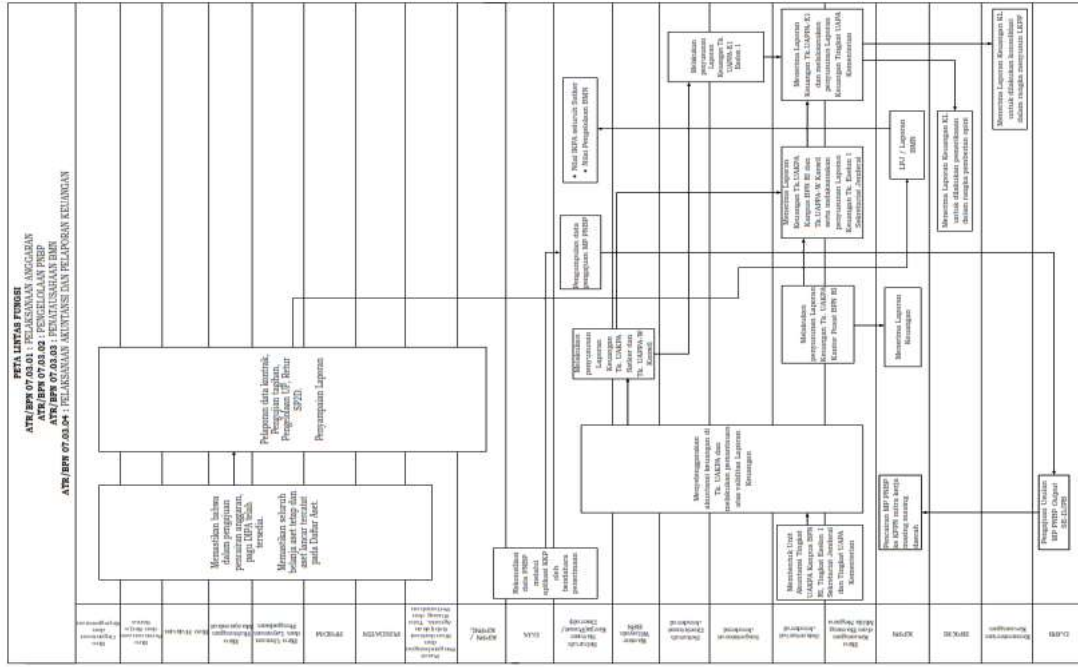
3.1.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)



- 25 -

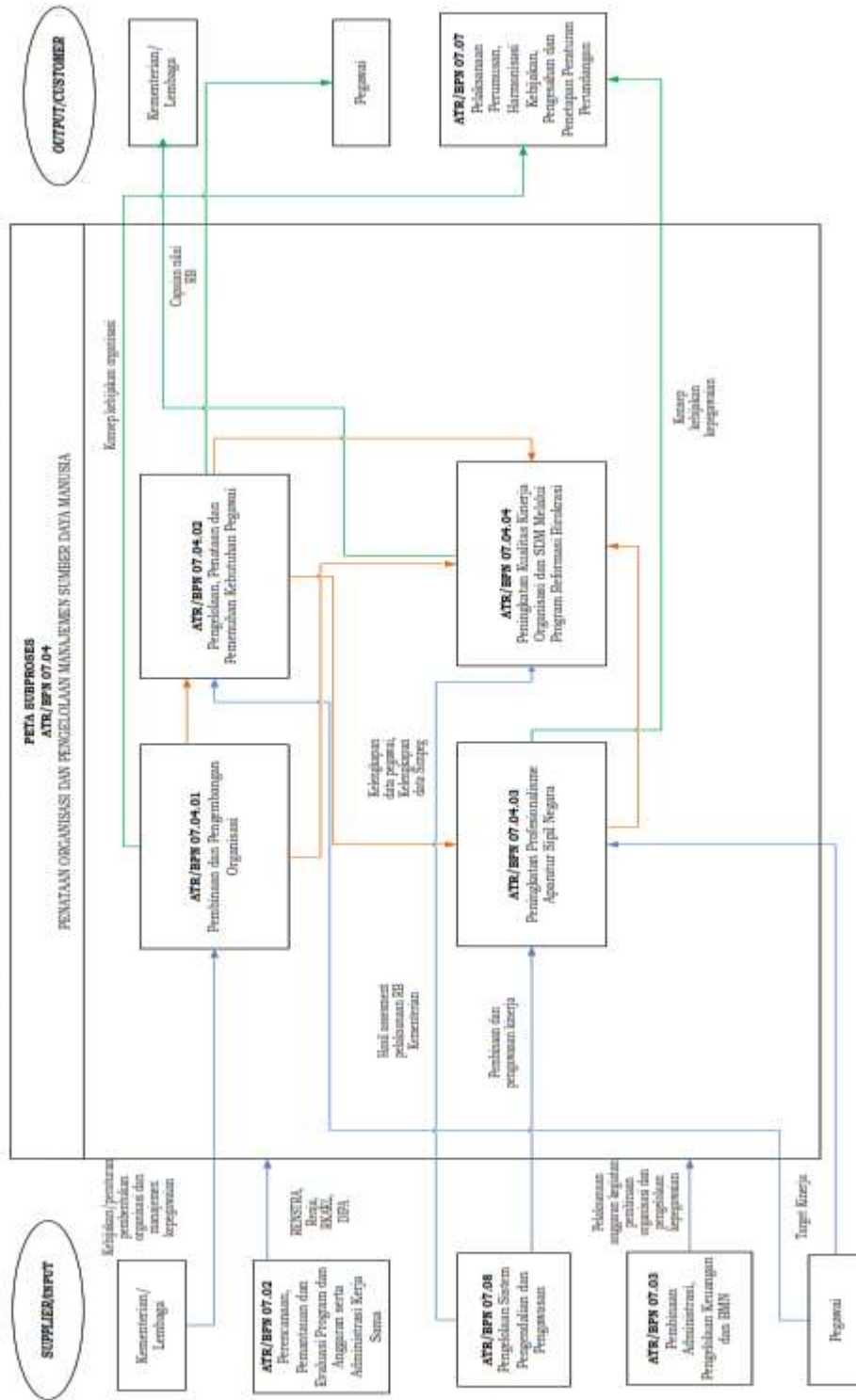
PETA RELASI ATR/BPN 07.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN																																																																																											
ATR/BPN 07.03.01 Pelaksanaan Anggaran	<table border="1"> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPE</td> <td>KPPN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> </table>	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPE	KPPN	Karwil DJPB																																																																																			
ATR/BPN 07.03.02 Pengelolaan PNEP	<table border="1"> <tr> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJPB</td> </tr> <tr> <td>KPPN</td> <td>DJA</td> </tr> </table>	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPB	KPPN	DJA																																																																																						
Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJPB																																																																																										
KPPN	DJA																																																																																										
ATR/BPN 07.03.03 Penatausahaan BMN	<table border="1"> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Hukum</td> <td>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</td> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>DJKN</td> <td>Karwil DJPB</td> </tr> </table>	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB										
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Hukum	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	DJKN	Karwil DJPB																																																																																				
ATR/BPN 07.03.04 Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	<table border="1"> <tr> <td>Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)</td> <td>Karwil BPN</td> </tr> <tr> <td>Seluruh Direktorat Jenderal</td> <td>Inspektorat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</td> </tr> <tr> <td>KPPN</td> <td>Kementerian Keuangan</td> </tr> <tr> <td>BPK RI</td> <td></td> </tr> </table>	Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	Karwil BPN	Seluruh Direktorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	KPPN	Kementerian Keuangan	BPK RI																																																																																	
Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah)	Karwil BPN																																																																																										
Seluruh Direktorat Jenderal	Inspektorat Jenderal																																																																																										
Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara																																																																																										
KPPN	Kementerian Keuangan																																																																																										
BPK RI																																																																																											

- 26 -



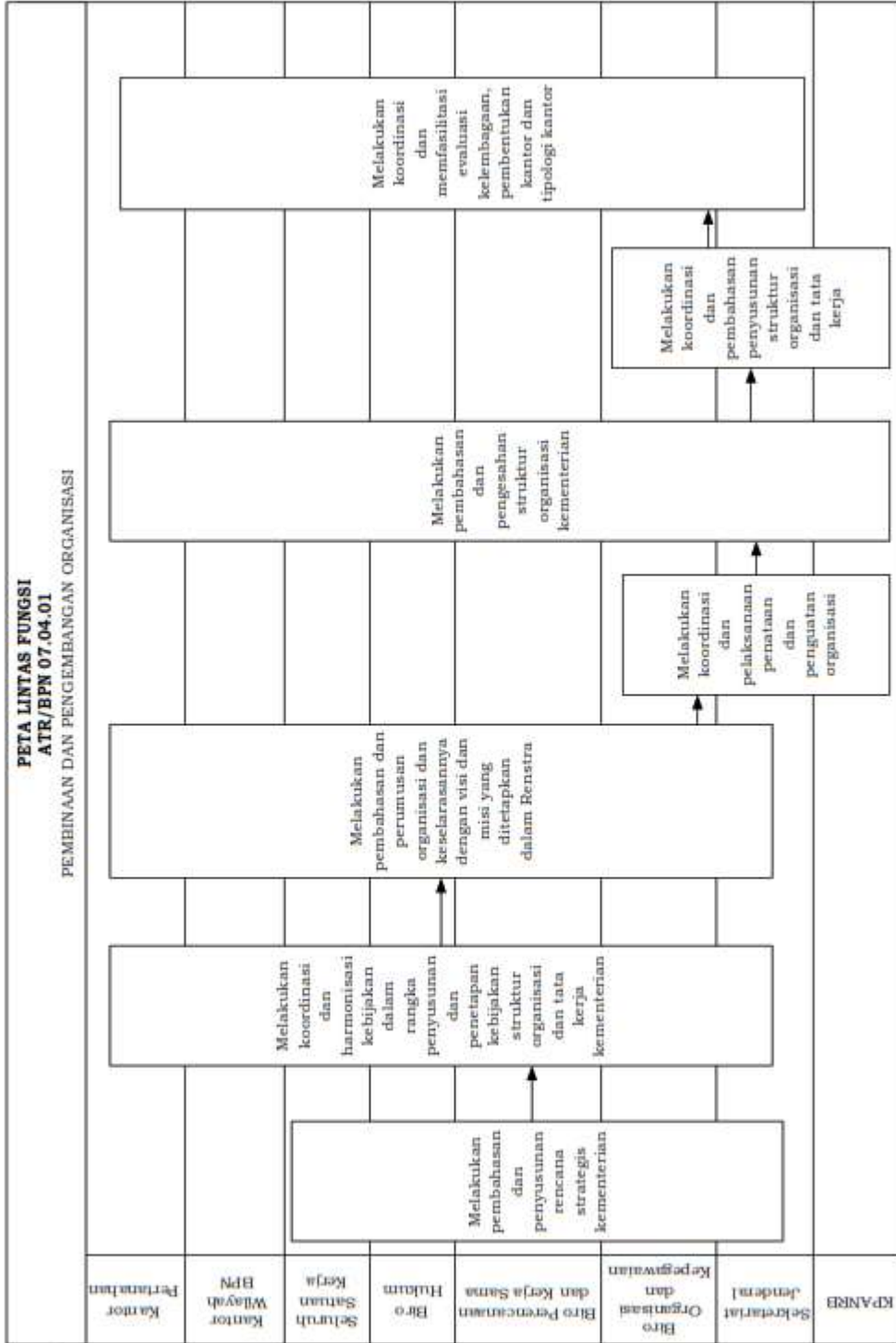
- 27 -

3.1.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Organisasi dan Kepegawaian

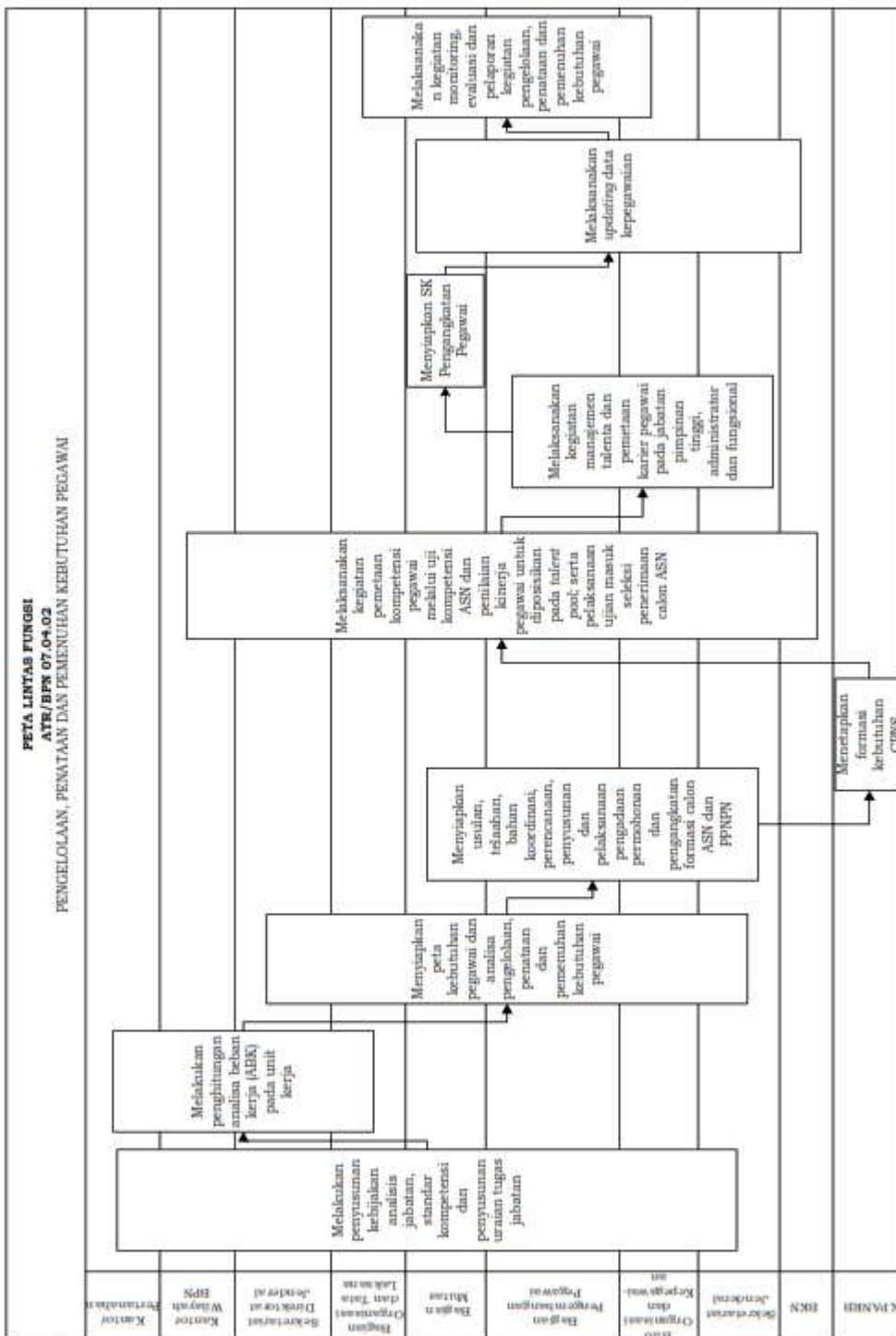


PETA RELASI ATR/BPN 07.04 PENATAAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA													
ATR/BPN 07.04.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	<table border="1"> <tr> <td>Kementerian PANRB</td> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td></td> </tr> </table>	Kementerian PANRB	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Seluruh Satuan Kerja	Biro Hukum	Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan	Kantor Wilayah BPN		Kantor Pertanahan			
Kementerian PANRB	Biro Organisasi dan Kepegawaian												
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Seluruh Satuan Kerja												
Biro Hukum	Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan												
Kantor Wilayah BPN													
Kantor Pertanahan													
ATR/BPN 07.04.02 Pengelolaan, Penataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	<table border="1"> <tr> <td>Kementerian PANRB</td> <td>BKN</td> </tr> <tr> <td>KASN</td> <td>Sekretariat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td>Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> </table>	Kementerian PANRB	BKN	KASN	Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan		
Kementerian PANRB	BKN												
KASN	Sekretariat Jenderal												
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama												
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Seluruh Satuan Kerja												
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan												
ATR/BPN 07.04.03 Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	<table border="1"> <tr> <td>LAN</td> <td>PPSDM</td> </tr> <tr> <td>KASN</td> <td>Kementerian PANRB</td> </tr> <tr> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>BKN</td> </tr> <tr> <td>Inspektoral Jenderal</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> </table>	LAN	PPSDM	KASN	Kementerian PANRB	Sekretariat Jenderal	BKN	Inspektoral Jenderal	Seluruh Satuan Kerja	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
LAN	PPSDM												
KASN	Kementerian PANRB												
Sekretariat Jenderal	BKN												
Inspektoral Jenderal	Seluruh Satuan Kerja												
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama												
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan												
ATR/BPN 07.04.04 Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi dan SDM Melalui Program Reformasi Birokrasi	<table border="1"> <tr> <td>Kementerian PANRB</td> <td>Inspektoral Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> </table>	Kementerian PANRB	Inspektoral Jenderal	Sekretariat Jenderal	Seluruh Satuan Kerja	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan				
Kementerian PANRB	Inspektoral Jenderal												
Sekretariat Jenderal	Seluruh Satuan Kerja												
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Organisasi dan Kepegawaian												
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan												

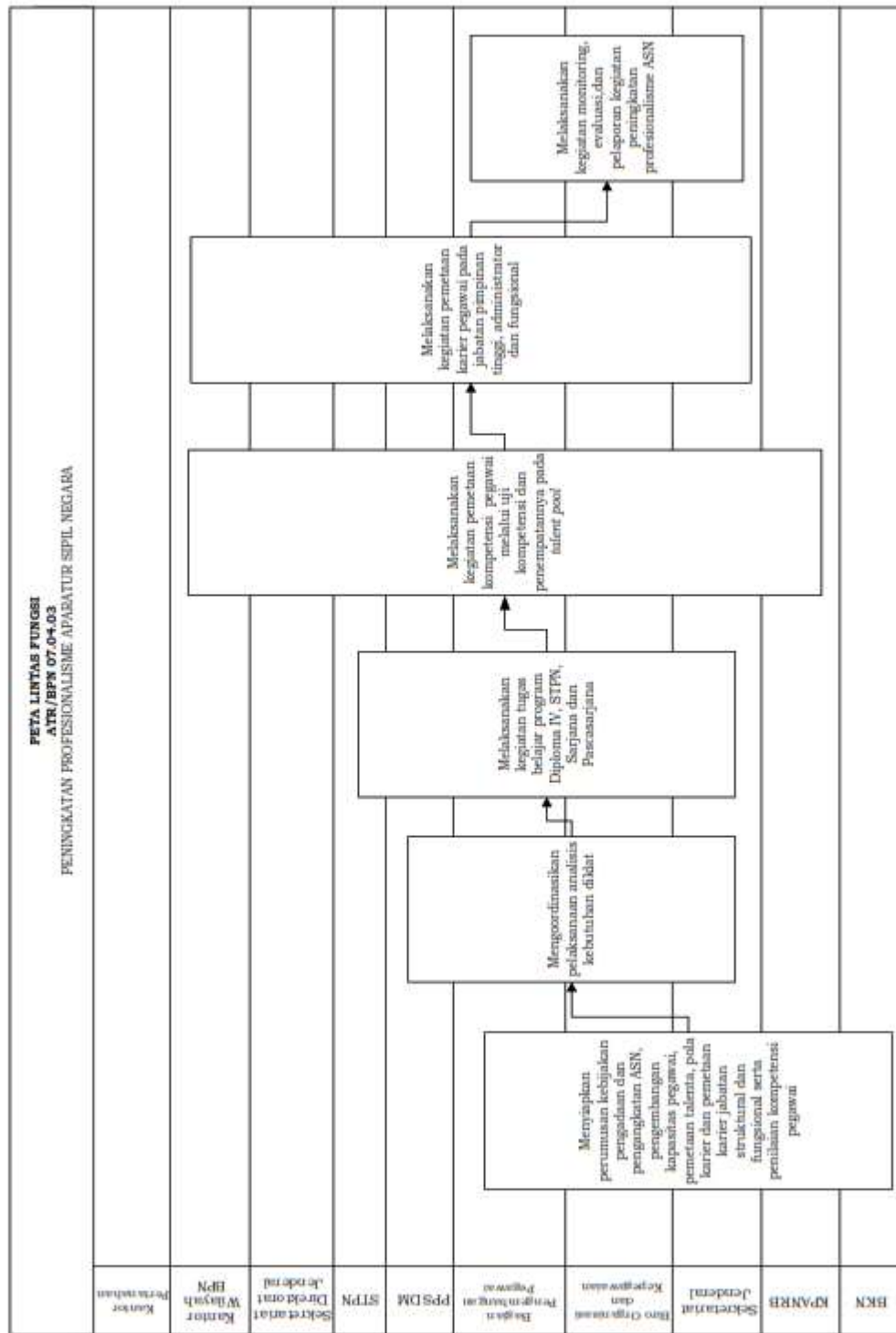
- 29 -



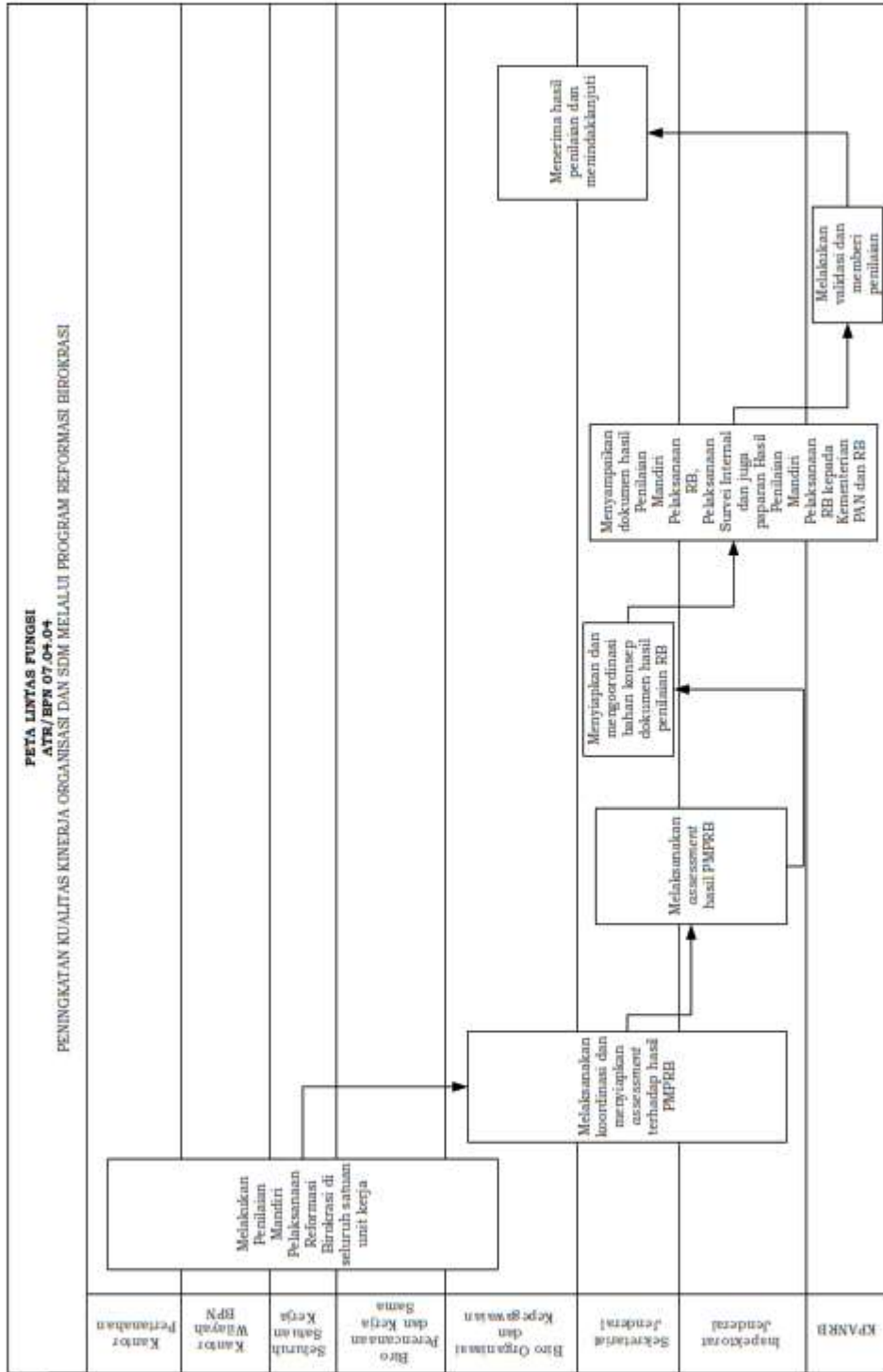
- 30 -



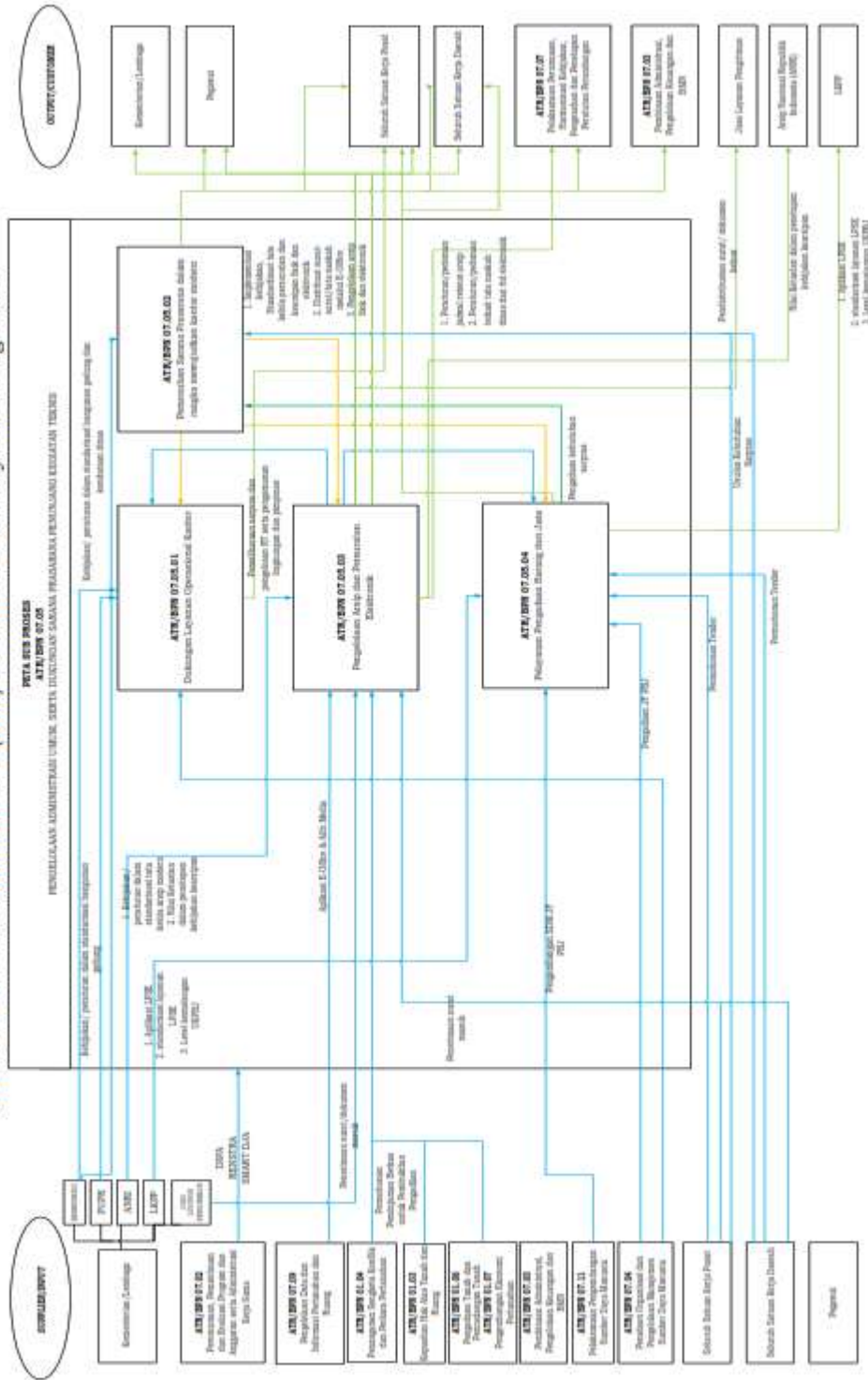
- 31 -



- 32 -

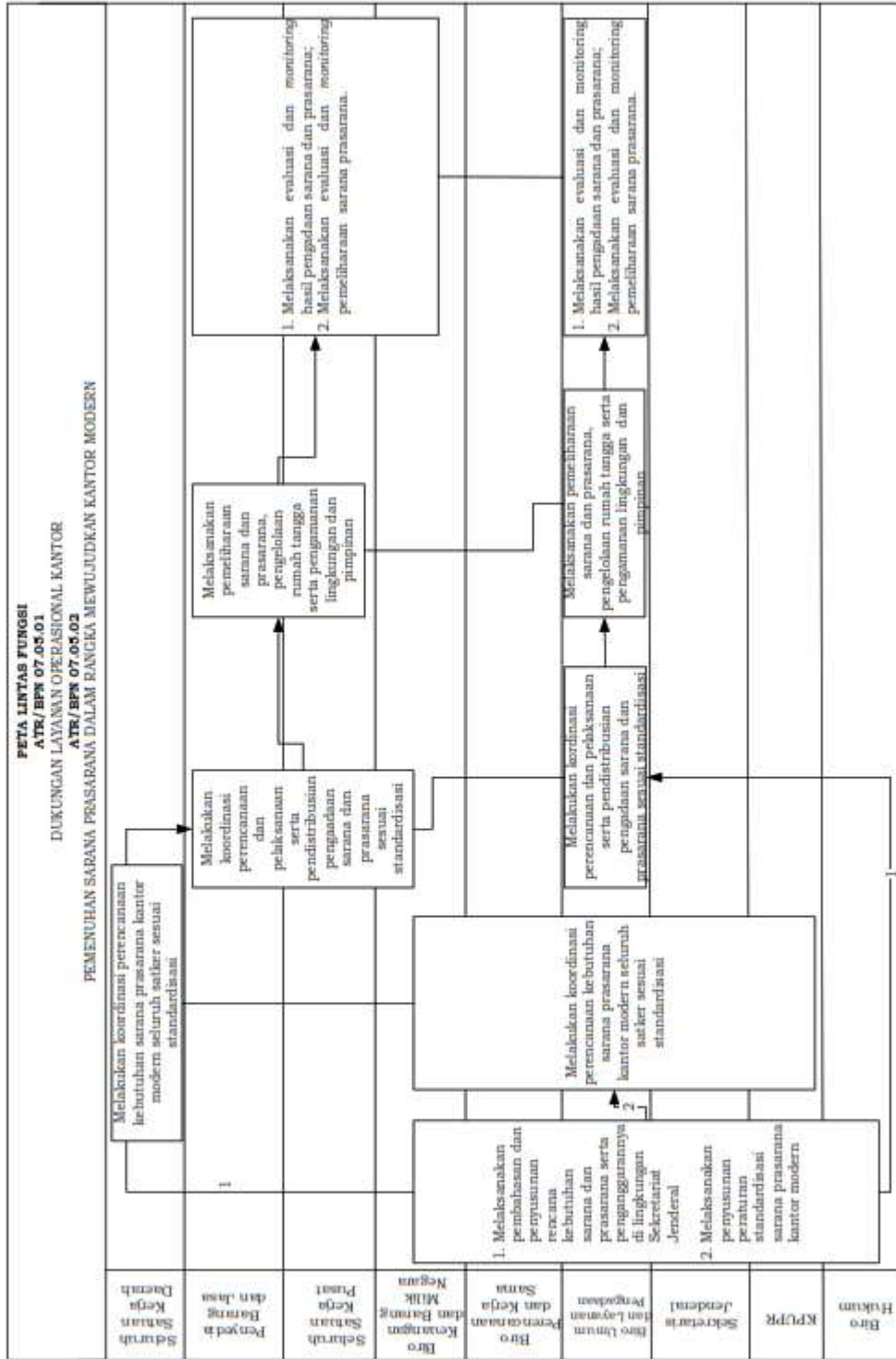


3.1.5. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Umum dan Layanan Pengadaan

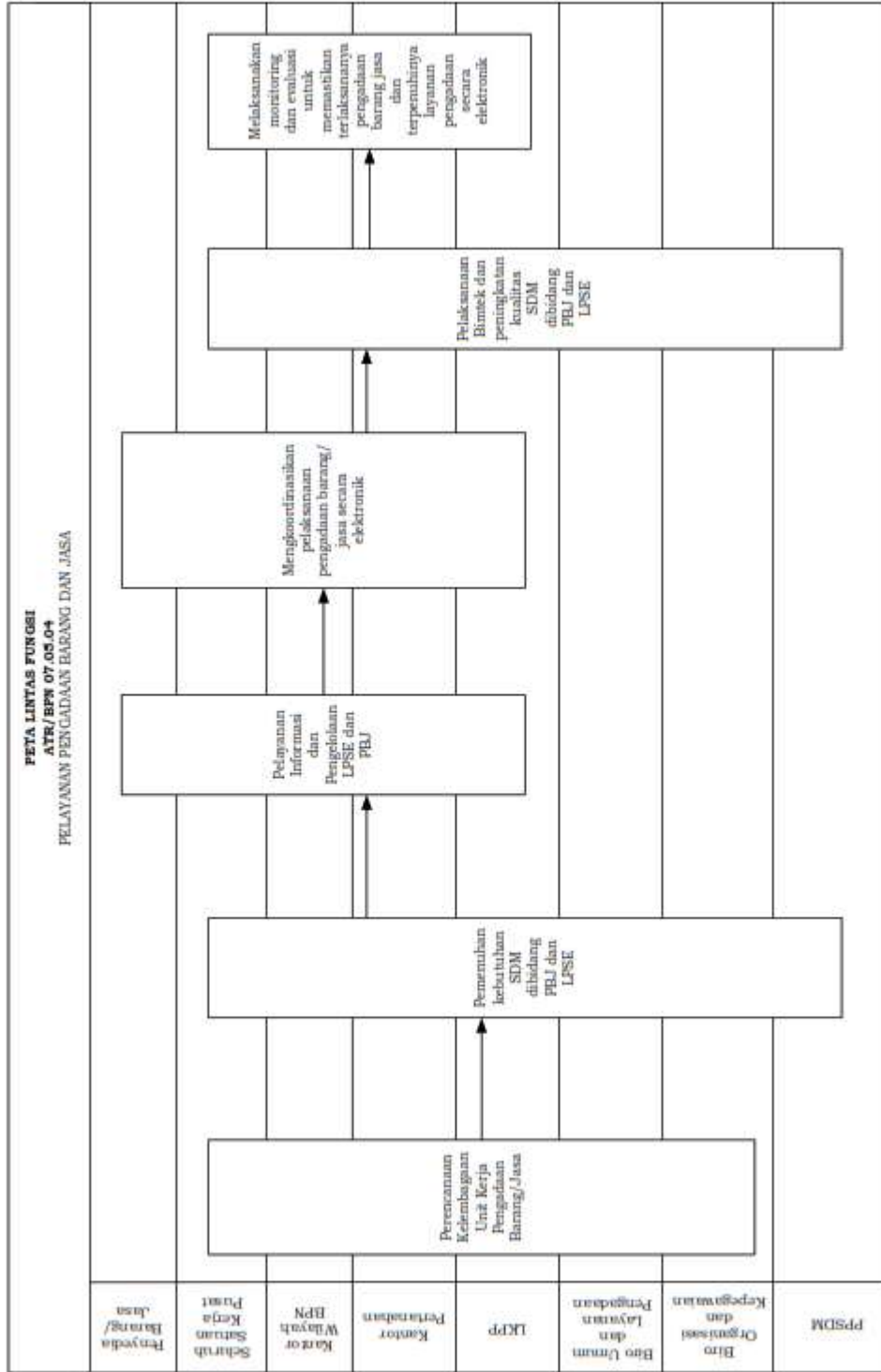


- 34 -

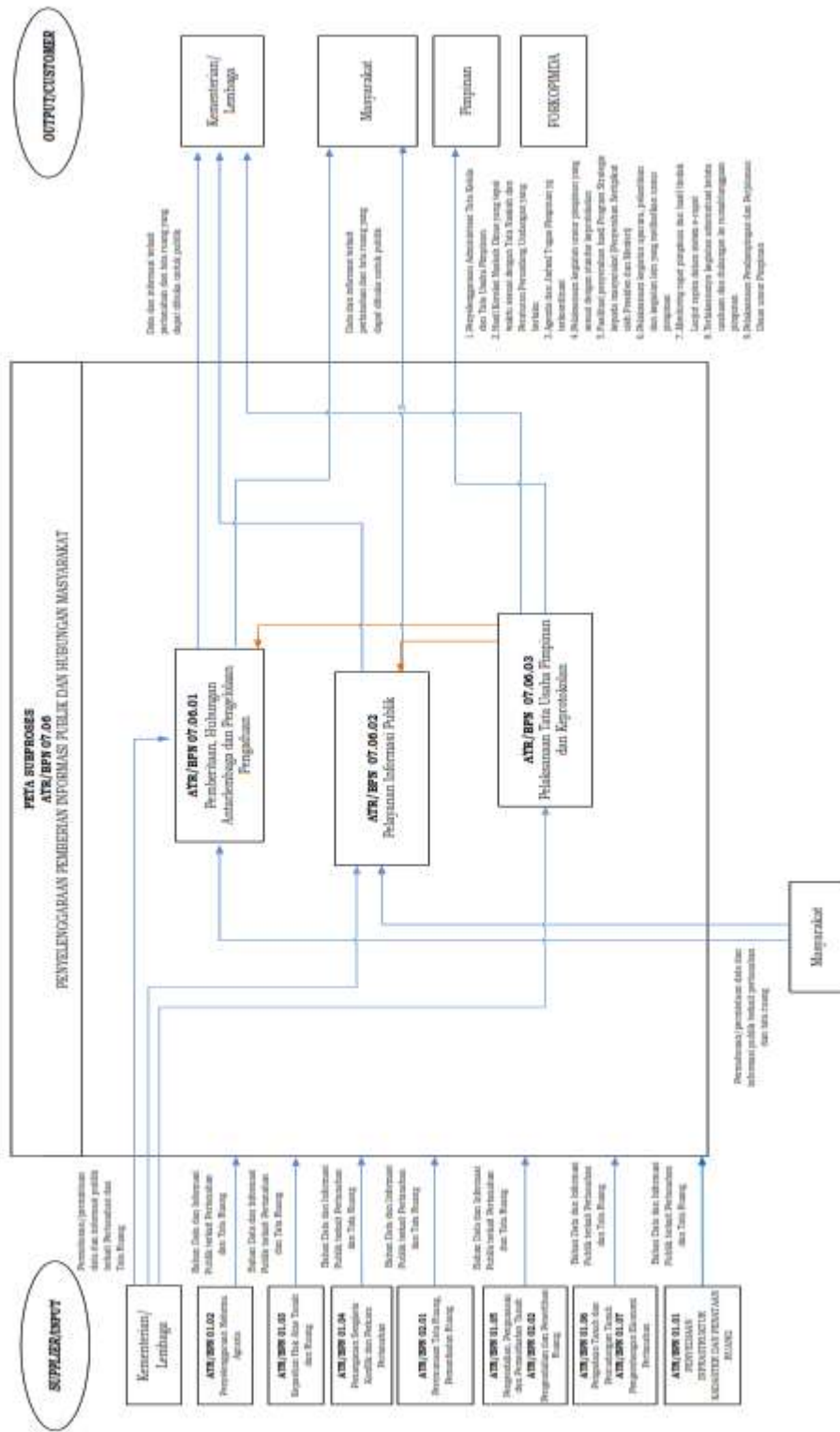
PETA RELASI ATR/BPN 07.05													
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM, SEKTA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN TEKNIS													
ATR/BPN 07.05.01 Dukungan Layanan Operasional Kantor	<table border="1"> <tr> <td>PUPR</td> <td>Sekretariat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Seluruh Satuan Kerja Pusat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</td> </tr> </table>	PUPR	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Seluruh Satuan Kerja Pusat		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara						
PUPR	Sekretariat Jenderal												
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Seluruh Satuan Kerja Pusat												
	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara												
ATR/BPN 07.05.02 Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka Mewujudkan Kantor Modern	<table border="1"> <tr> <td>KFUPR</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanian</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sekretariat Jenderal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</td> </tr> </table>	KFUPR	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama		Sekretariat Jenderal		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara				
KFUPR	Kantor Wilayah BPN												
Kantor Pertanian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama												
	Sekretariat Jenderal												
	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara												
ATR/BPN 07.05.03 Pengelolaan Arsip dan Persuratan Elektronik	<table border="1"> <tr> <td>ANRI</td> <td>Jasa Layanan Pengiriman</td> </tr> <tr> <td>BSSN</td> <td>KOMINFO</td> </tr> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Kantor Pertanian</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja Pusat</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanian</td> </tr> <tr> <td>Ditjen Penataan Agraria</td> <td></td> </tr> </table>	ANRI	Jasa Layanan Pengiriman	BSSN	KOMINFO	PUSDATIN	Kantor Pertanian	Kantor Wilayah BPN	Seluruh Satuan Kerja Pusat	Biro Hukum	Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanian	Ditjen Penataan Agraria	
ANRI	Jasa Layanan Pengiriman												
BSSN	KOMINFO												
PUSDATIN	Kantor Pertanian												
Kantor Wilayah BPN	Seluruh Satuan Kerja Pusat												
Biro Hukum	Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanian												
Ditjen Penataan Agraria													
ATR/BPN 07.05.04 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Terlaksana	<table border="1"> <tr> <td>LKPP</td> <td>Seluruh Satuan Kerja Pusat</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanian</td> </tr> <tr> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> <td>PUSDATIN</td> </tr> <tr> <td>PPSDM</td> <td></td> </tr> </table>	LKPP	Seluruh Satuan Kerja Pusat	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian	Biro Organisasi dan Kepegawaian	PUSDATIN	PPSDM					
LKPP	Seluruh Satuan Kerja Pusat												
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian												
Biro Organisasi dan Kepegawaian	PUSDATIN												
PPSDM													



- 37 -

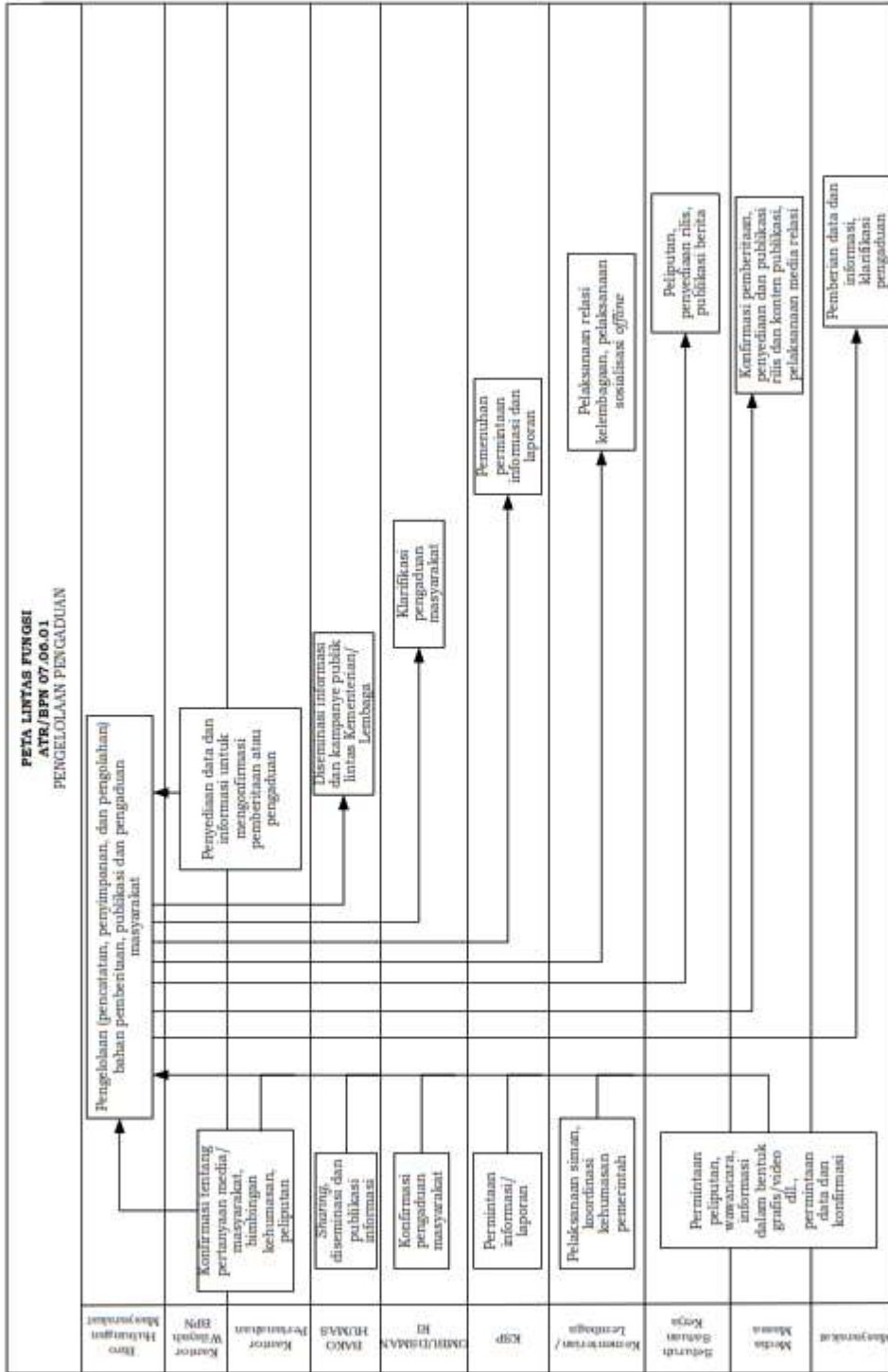


3.1.6. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Hubungan Masyarakat

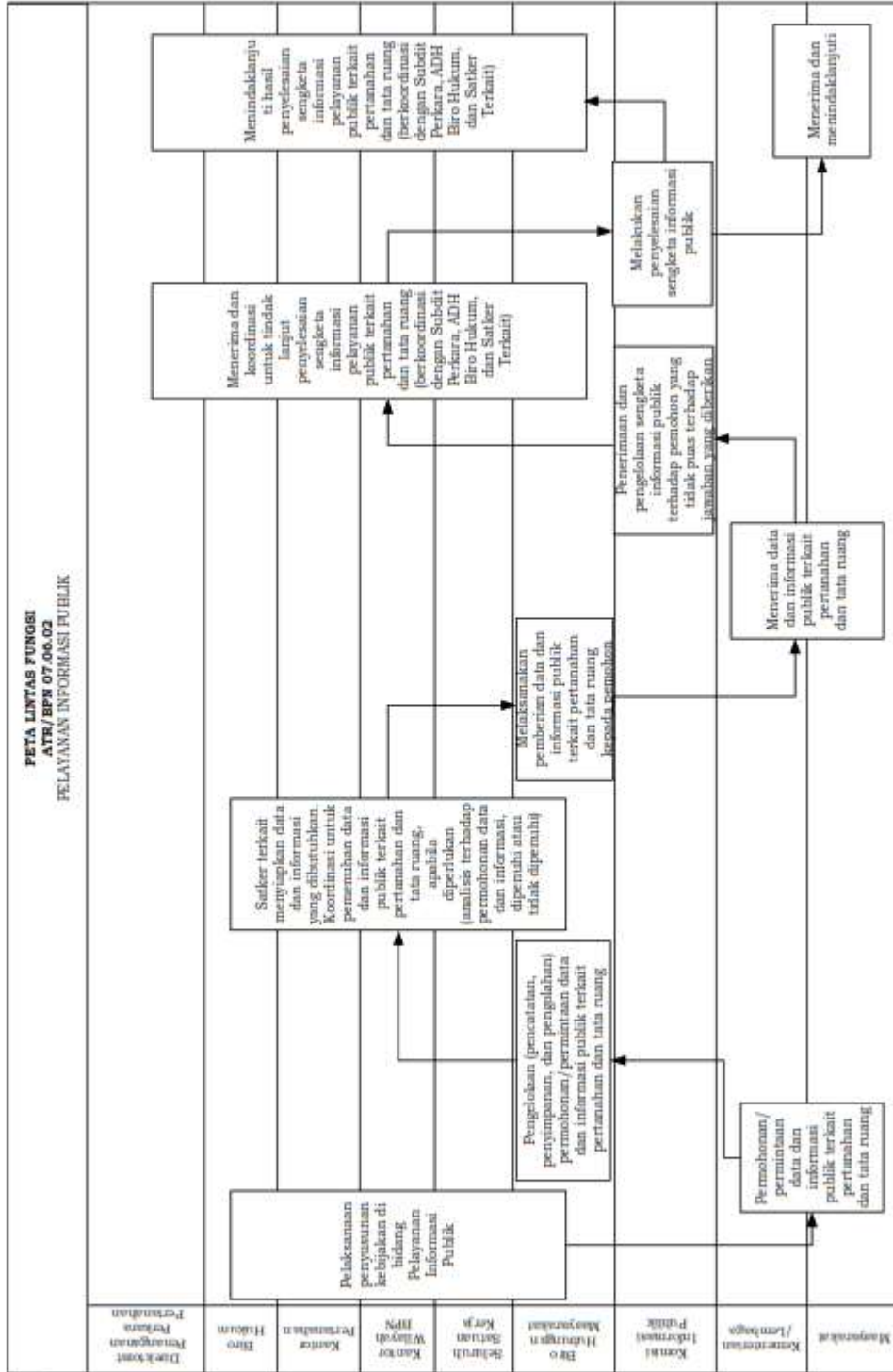


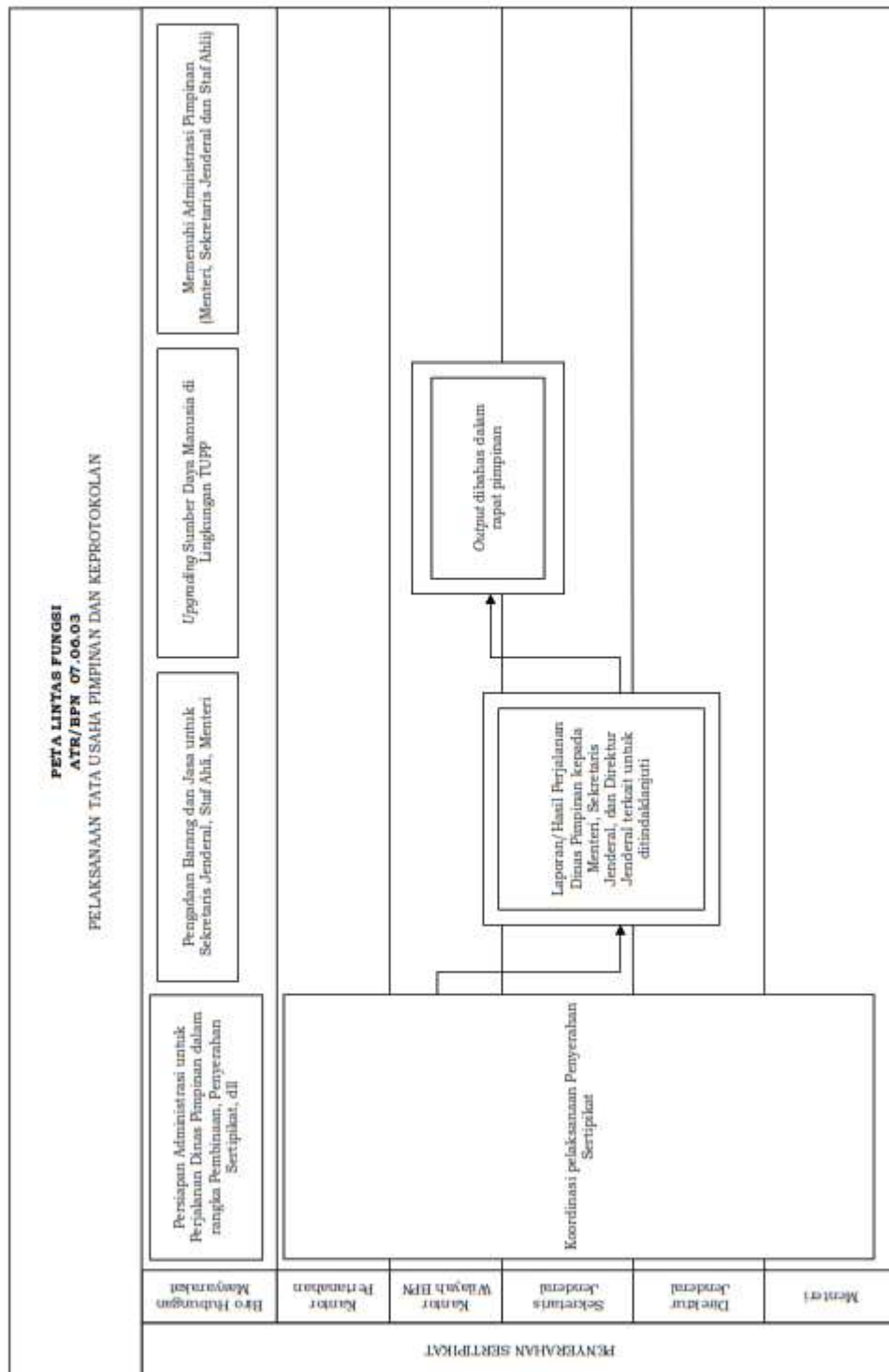
PETA RELASI ATR/BPN 07.06 PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT											
ATR/BPN 07.06.01 Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Pengelolaan Pengaduan	<table border="1"> <tr> <td>Kementerian/ Lembaga</td> <td>KOMINFO</td> </tr> <tr> <td>OMBUDSMAN RI</td> <td>KSP</td> </tr> <tr> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> <td>BAKO HUMAS</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Media Massa</td> <td>Masyarakat</td> </tr> </table>	Kementerian/ Lembaga	KOMINFO	OMBUDSMAN RI	KSP	Seluruh Satuan Kerja	BAKO HUMAS	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Media Massa	Masyarakat
Kementerian/ Lembaga	KOMINFO										
OMBUDSMAN RI	KSP										
Seluruh Satuan Kerja	BAKO HUMAS										
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan										
Media Massa	Masyarakat										
ATR/BPN 07.06.02 Pelayanan Informasi Publik	<table border="1"> <tr> <td>Kementerian/ Lembaga</td> <td>Komisi Informasi Publik</td> </tr> <tr> <td>OMBUDSMAN RI</td> <td>KOMINFO</td> </tr> <tr> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Masyarakat</td> </tr> </table>	Kementerian/ Lembaga	Komisi Informasi Publik	OMBUDSMAN RI	KOMINFO	Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Masyarakat		
Kementerian/ Lembaga	Komisi Informasi Publik										
OMBUDSMAN RI	KOMINFO										
Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN										
Kantor Pertanahan	Masyarakat										
ATR/BPN 07.06.03 Pelaksanaan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolian	<table border="1"> <tr> <td>Kementerian/ Lembaga</td> <td>PASPAMPRES</td> </tr> <tr> <td>Protokol Istana</td> <td>SEKRETARIAT NEGARA</td> </tr> <tr> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>FORKOMINDA</td> </tr> </table>	Kementerian/ Lembaga	PASPAMPRES	Protokol Istana	SEKRETARIAT NEGARA	Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	FORKOMINDA		
Kementerian/ Lembaga	PASPAMPRES										
Protokol Istana	SEKRETARIAT NEGARA										
Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN										
Kantor Pertanahan	FORKOMINDA										

- 41 -

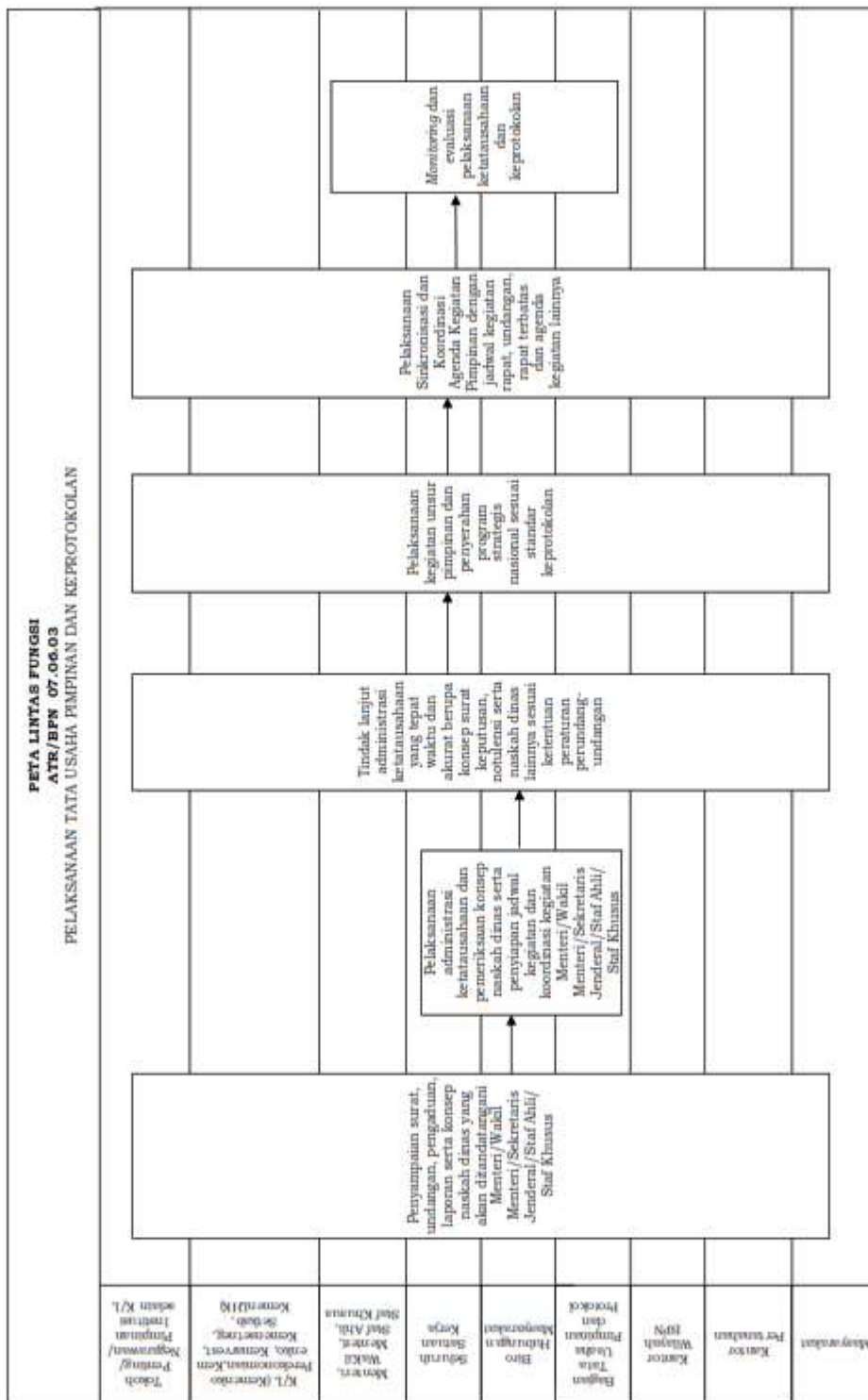


- 42 -

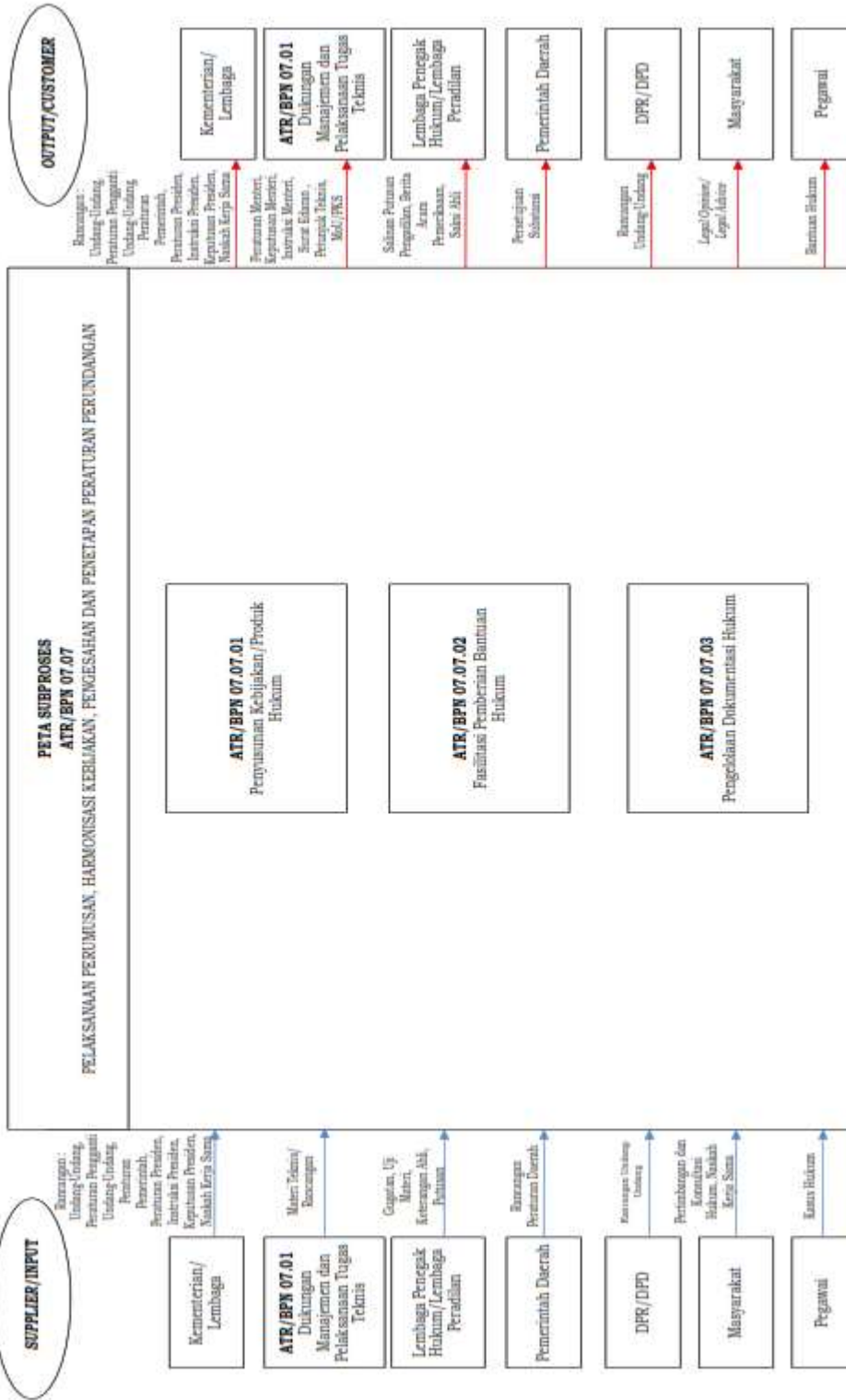




- 44 -

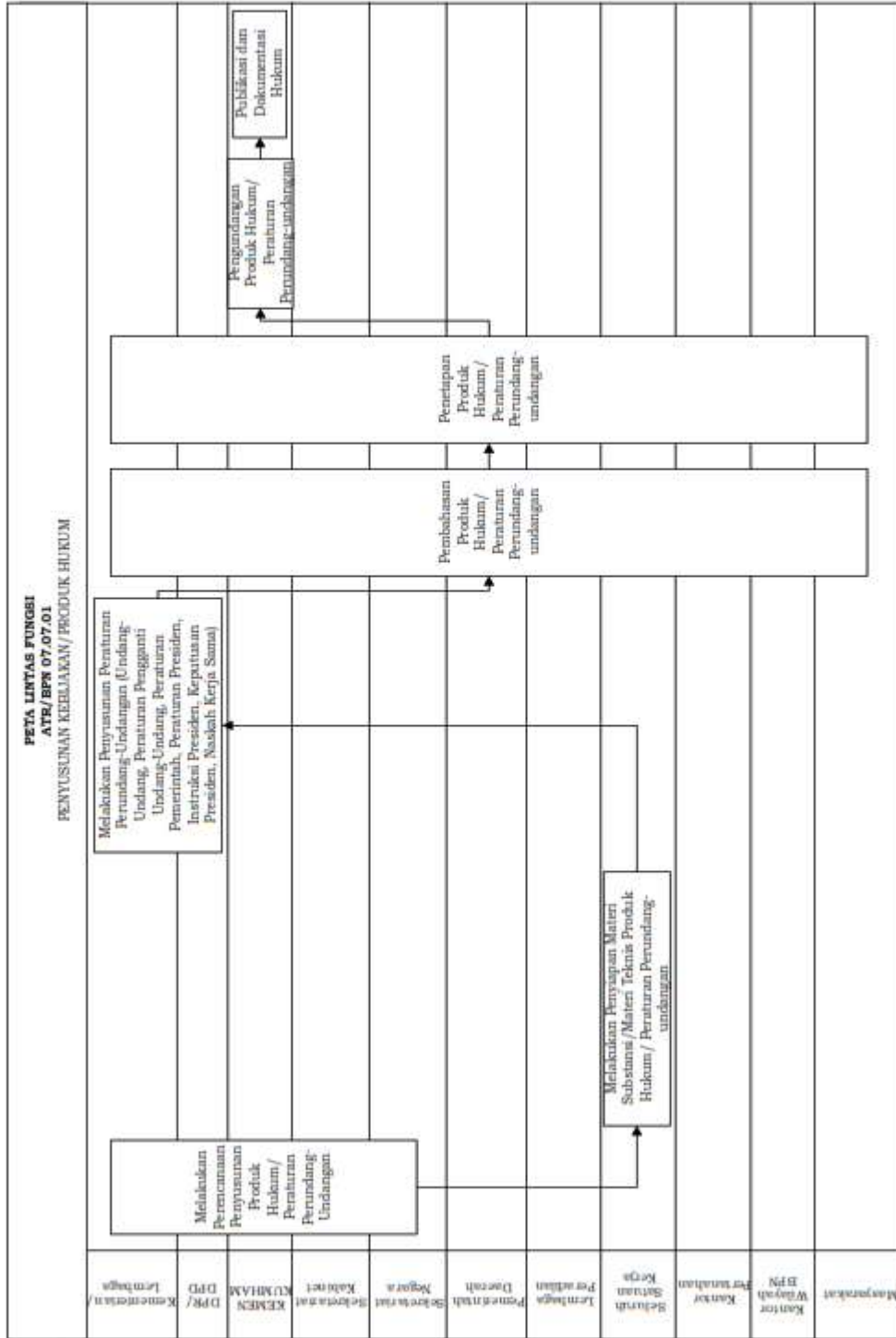


3.1.7. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Hukum

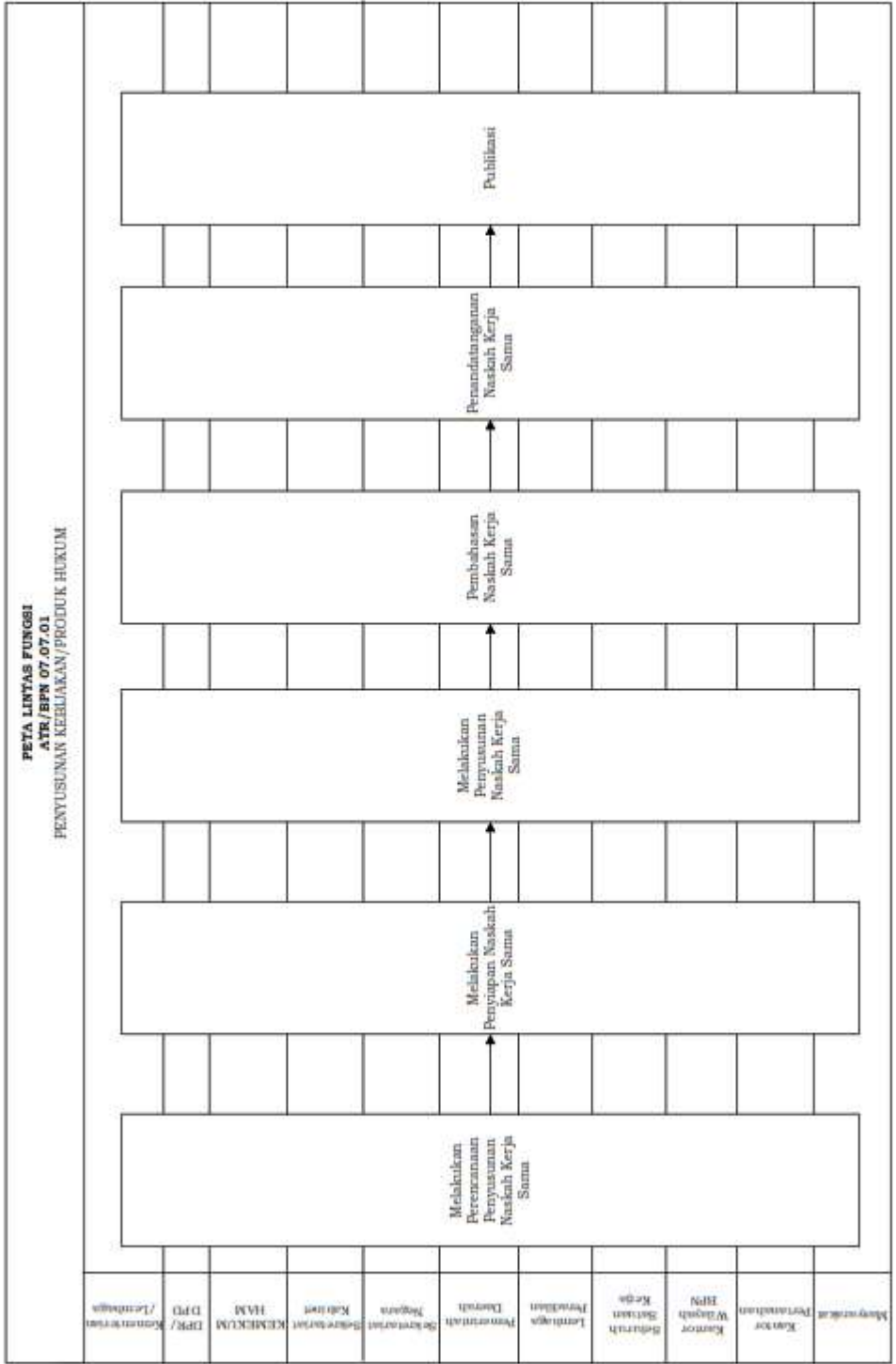


- 46 -

PELAKSANAAN PERUMUSAN, HARMONISASI KEBIJAKAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN PERATURAN PERUNDANGAN SERTA FASILITASI BANTUAN HUKUM PETA RELASI ATR/BPN 07.07																																						
ATR/BPN 07.01 Penyusunan Kebijakan/Produk Hukum	ATR/BPN 07.02 Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum	ATR/BPN 07.03 Pengelolaan Dokumentasi Hukum																																				
<table border="1"> <tr> <td>Sekretariat Negara</td> <td>Sekretariat Kabinet</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga</td> <td>Kementerian Hukum dan HAM</td> </tr> <tr> <td>DPR/DPO</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Lembaga Peradilan</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	Sekretariat Negara	Sekretariat Kabinet	Kementerian/Lembaga	Kementerian Hukum dan HAM	DPR/DPO	Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Lembaga Peradilan	Pemerintah Daerah	Masyarakat		<table border="1"> <tr> <td>Lembaga Peradilan</td> <td>Lembaga Penegak Hukum</td> </tr> <tr> <td>Pegawai</td> <td>Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> <td>Kementerian Hukum dan HAM</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga</td> <td>Sekretariat Negara</td> </tr> <tr> <td>DPR</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td></td> </tr> </table>	Lembaga Peradilan	Lembaga Penegak Hukum	Pegawai	Masyarakat	Seluruh Satuan Kerja	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian/Lembaga	Sekretariat Negara	DPR	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan		<table border="1"> <tr> <td>Sekretariat Negara</td> <td>Sekretariat Kabinet</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga</td> <td>Kementerian Hukum dan HAM</td> </tr> <tr> <td>DPR/DPD</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Lembaga Peradilan</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	Sekretariat Negara	Sekretariat Kabinet	Kementerian/Lembaga	Kementerian Hukum dan HAM	DPR/DPD	Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Lembaga Peradilan	Pemerintah Daerah	Masyarakat	
Sekretariat Negara	Sekretariat Kabinet																																					
Kementerian/Lembaga	Kementerian Hukum dan HAM																																					
DPR/DPO	Seluruh Satuan Kerja																																					
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan																																					
Lembaga Peradilan	Pemerintah Daerah																																					
Masyarakat																																						
Lembaga Peradilan	Lembaga Penegak Hukum																																					
Pegawai	Masyarakat																																					
Seluruh Satuan Kerja	Kementerian Hukum dan HAM																																					
Kementerian/Lembaga	Sekretariat Negara																																					
DPR	Kantor Wilayah BPN																																					
Kantor Pertanahan																																						
Sekretariat Negara	Sekretariat Kabinet																																					
Kementerian/Lembaga	Kementerian Hukum dan HAM																																					
DPR/DPD	Seluruh Satuan Kerja																																					
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan																																					
Lembaga Peradilan	Pemerintah Daerah																																					
Masyarakat																																						



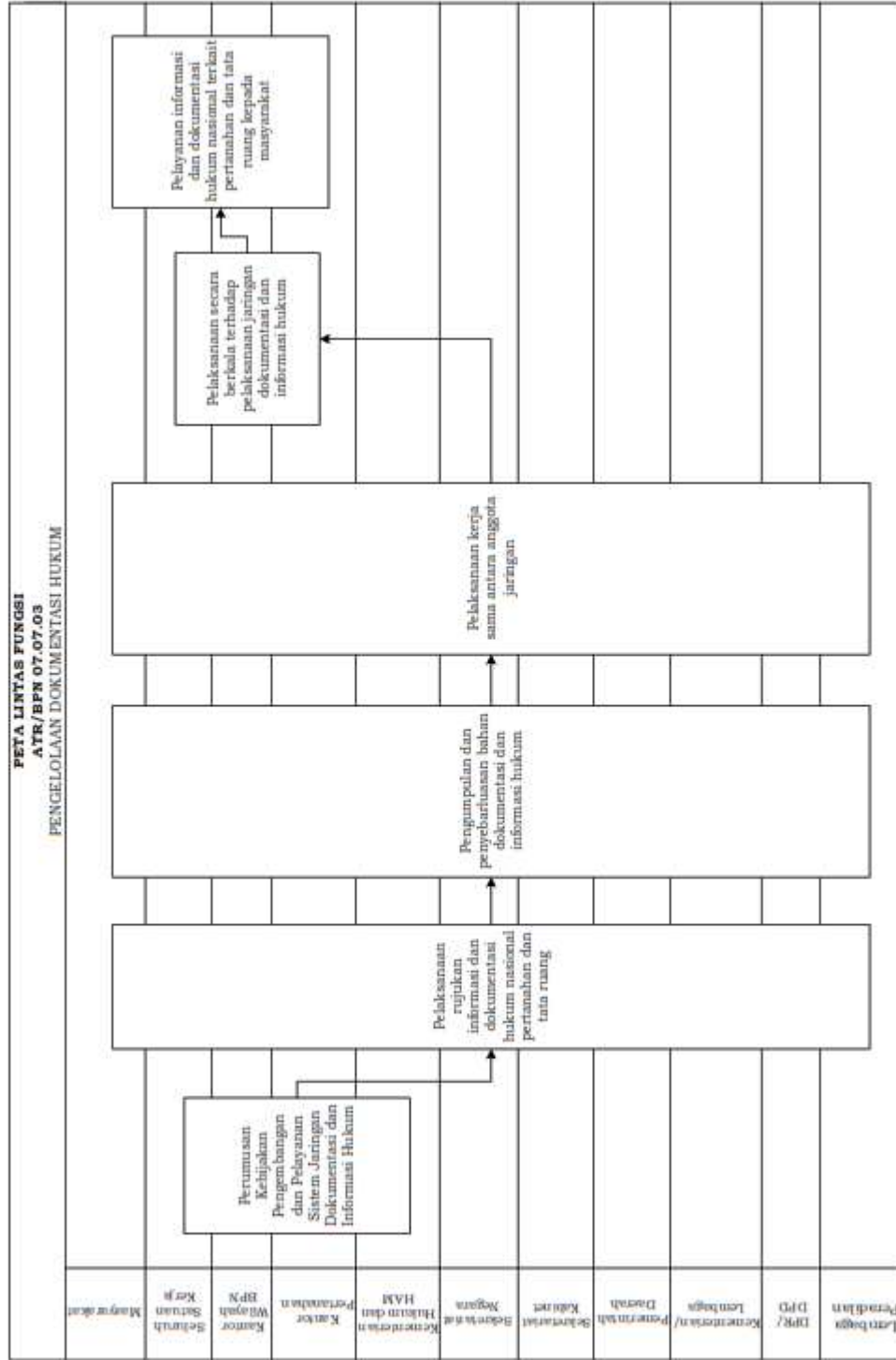
- 48 -



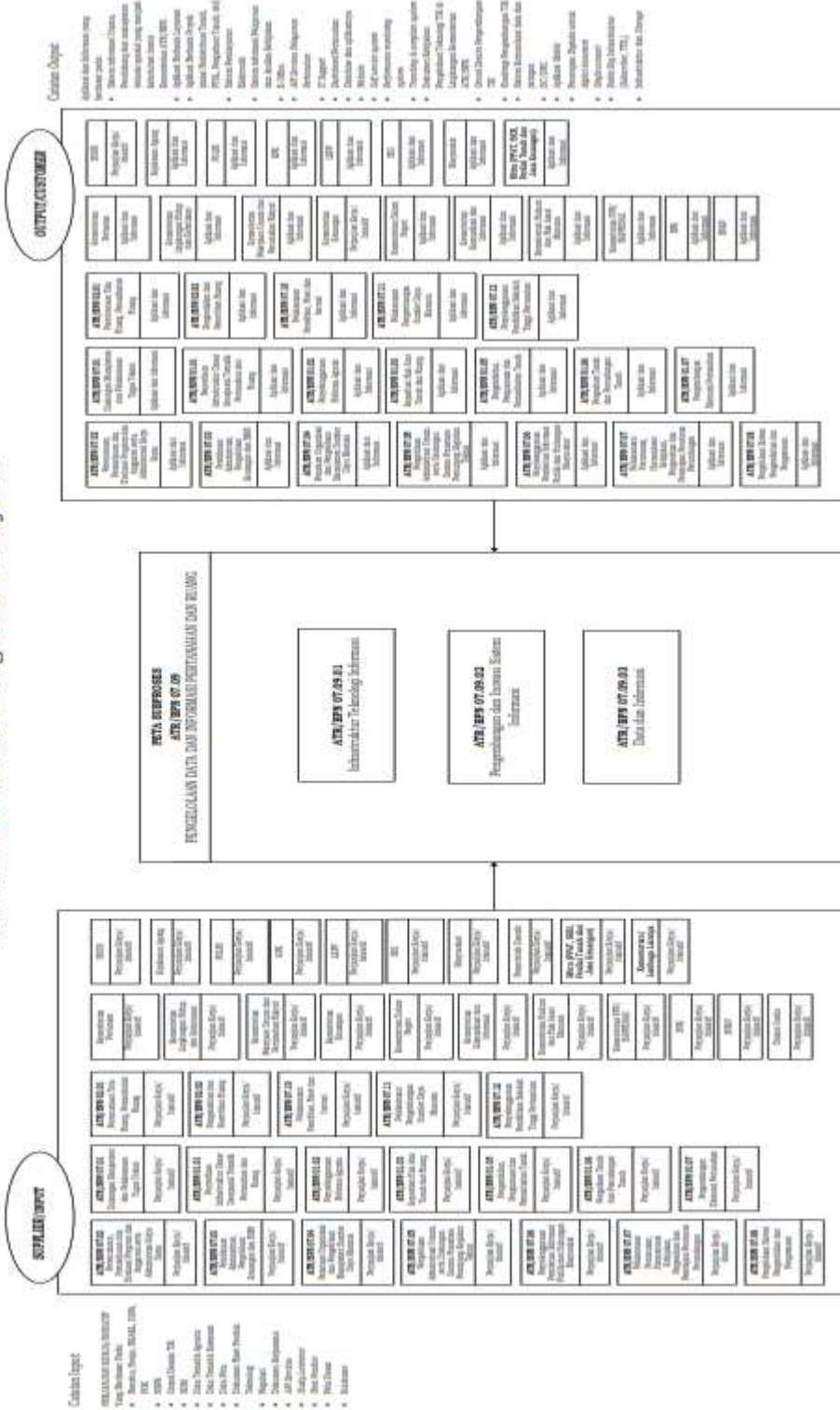
- 49 -

PEYA LINTAS FUNGSI ATR/ BPN 07.07.02 FASILITASI PEMEBERIAN BANTUAN HUKUM	
Masyarakat	Informasi/ Permintaan Keterangan Ahli/ Gugatan
Perwakilan	
Kantor Perwakilan BPN	
Kantor Perwakilan BPN	
OPPR	
Kelembagaan	Telaah/ Perghajian Informasi/ Permintaan Keterangan Ahli/ Gugatan
Kementerian/Lembaga	
KEMENDUKUMHAM	
Sekolah Tinggi Hukum	
Kelembagaan	
	Pemberian Bantuan Hukum/ Pemberian Perimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Advice)/Laporan

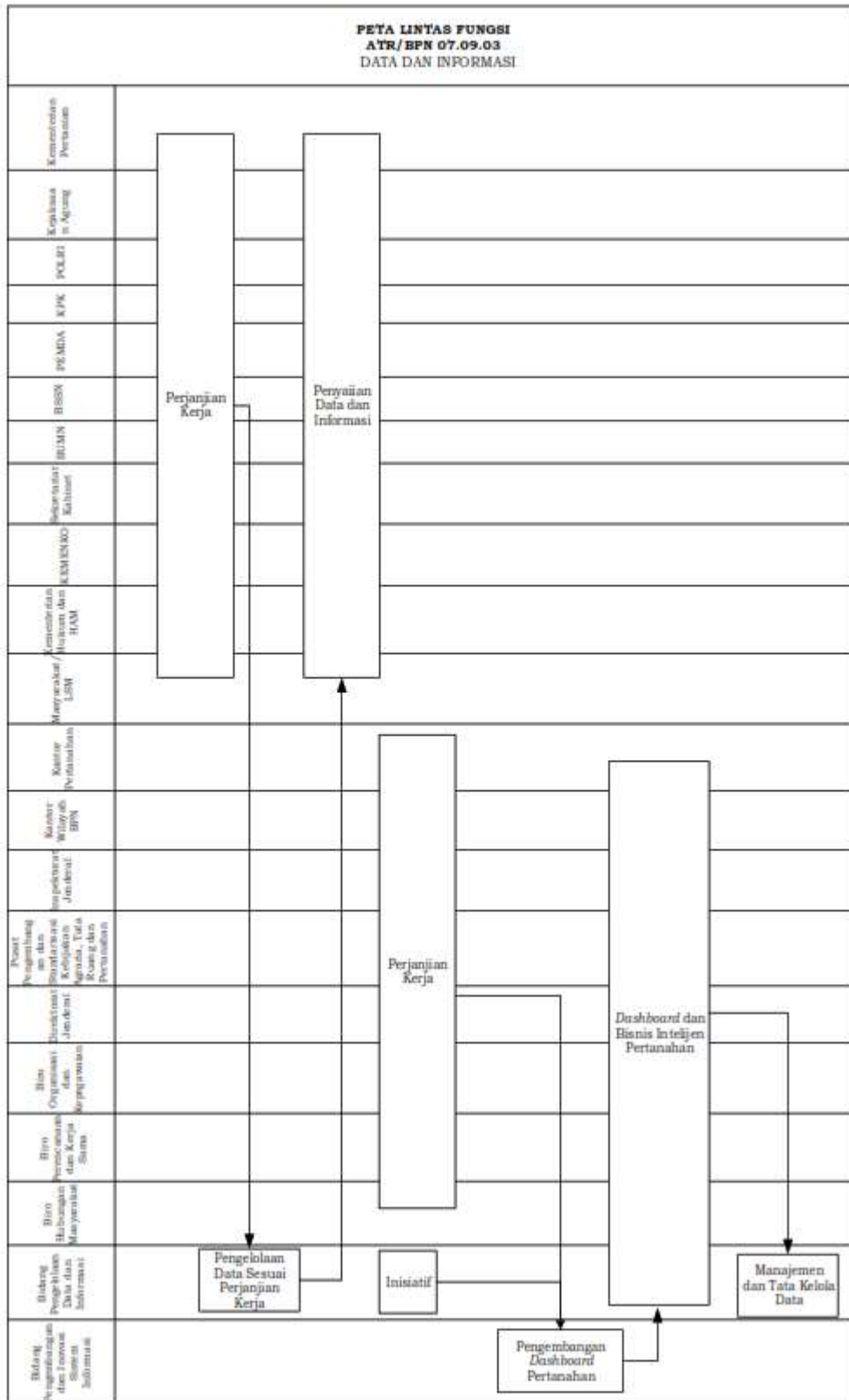
- 50 -



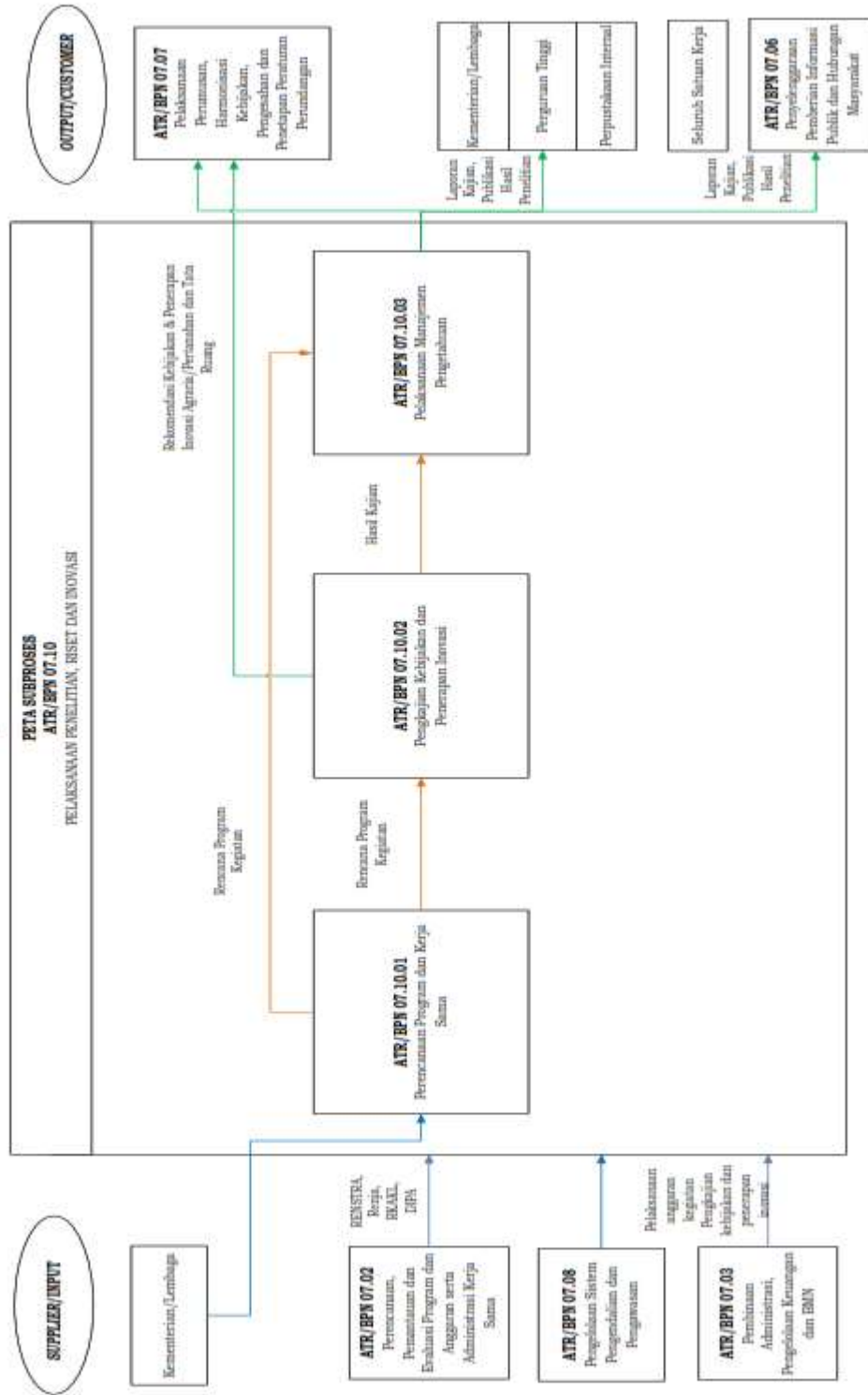
3.1.8. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



PETA RELASI ATR/BPN 07.09 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN DAN RUANG			
ATR/BPN 07.09.01 Infrastruktur Teknologi Informasi	Seluruh Satuan Kerja Pusat Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian PPN/BAPPENAS BPK BPKP Badan Usaha BSSN Kejaksaan Agung POLRI KPK	LKPP BKG Masyarakat Pemerintah Daerah Mitra (PPAT, SKR, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan) Kementerian/Lembaga Lainnya
ATR/BPN 07.09.02 Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi	Seluruh Satuan Kerja Pusat Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian PPN/BAPPENAS BPK BPKP Badan Usaha BSSN Kejaksaan Agung POLRI KPK	LKPP BKG Masyarakat Pemerintah Daerah Mitra (PPAT, SKR, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan) Kementerian/Lembaga Lainnya
ATR/BPN 07.09.03 Data dan Informasi	Seluruh Satuan Kerja Pusat Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian PPN/BAPPENAS BPK BPKP Badan Usaha BSSN Kejaksaan Agung POLRI KPK	LKPP BKG Masyarakat Pemerintah Daerah Mitra (PPAT, SKR, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan) Kementerian/Lembaga Lainnya



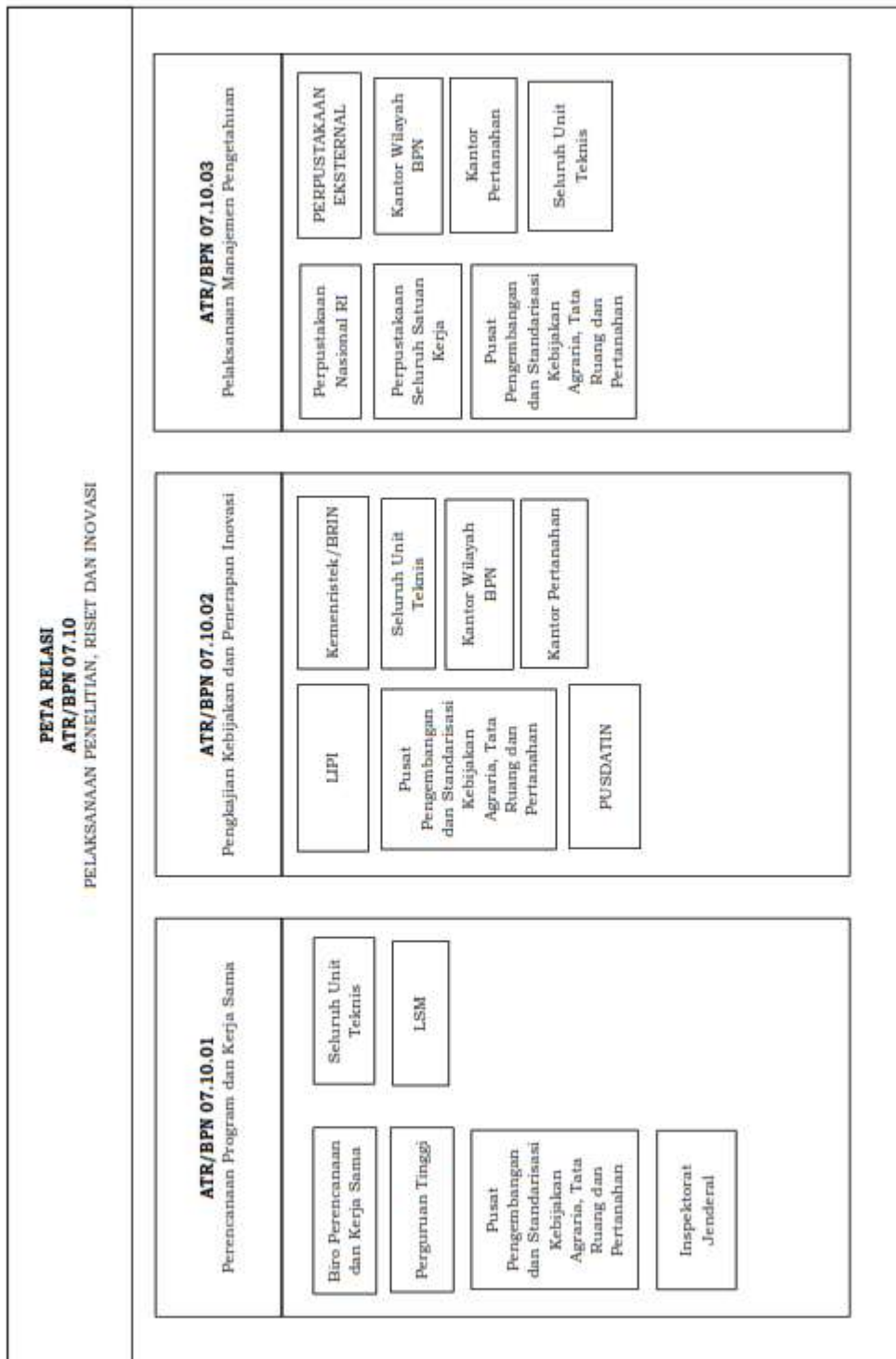
3.1.9. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanian



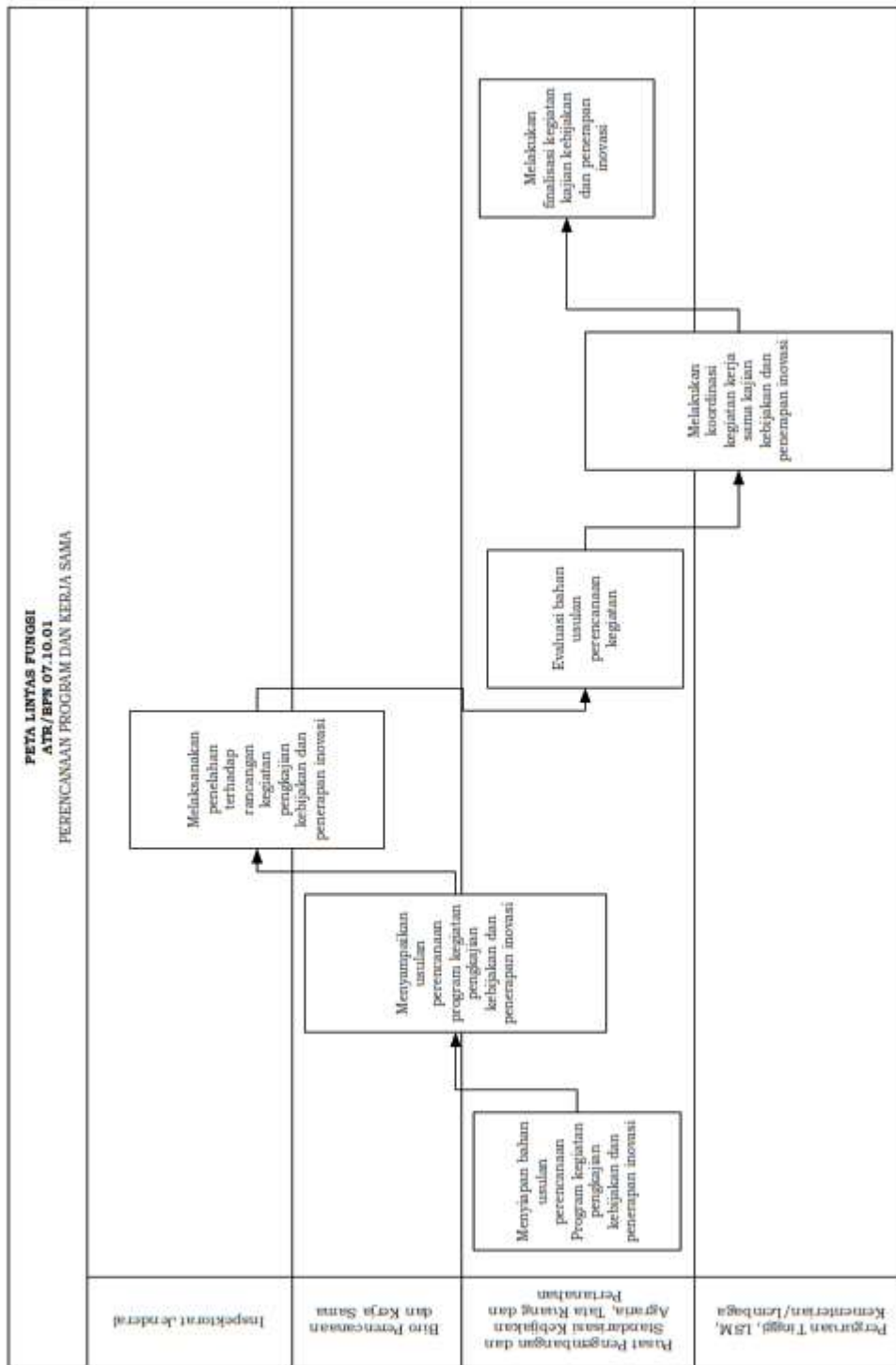
- 56 -

**PETA RELASI
ATR/BPN 07.10**

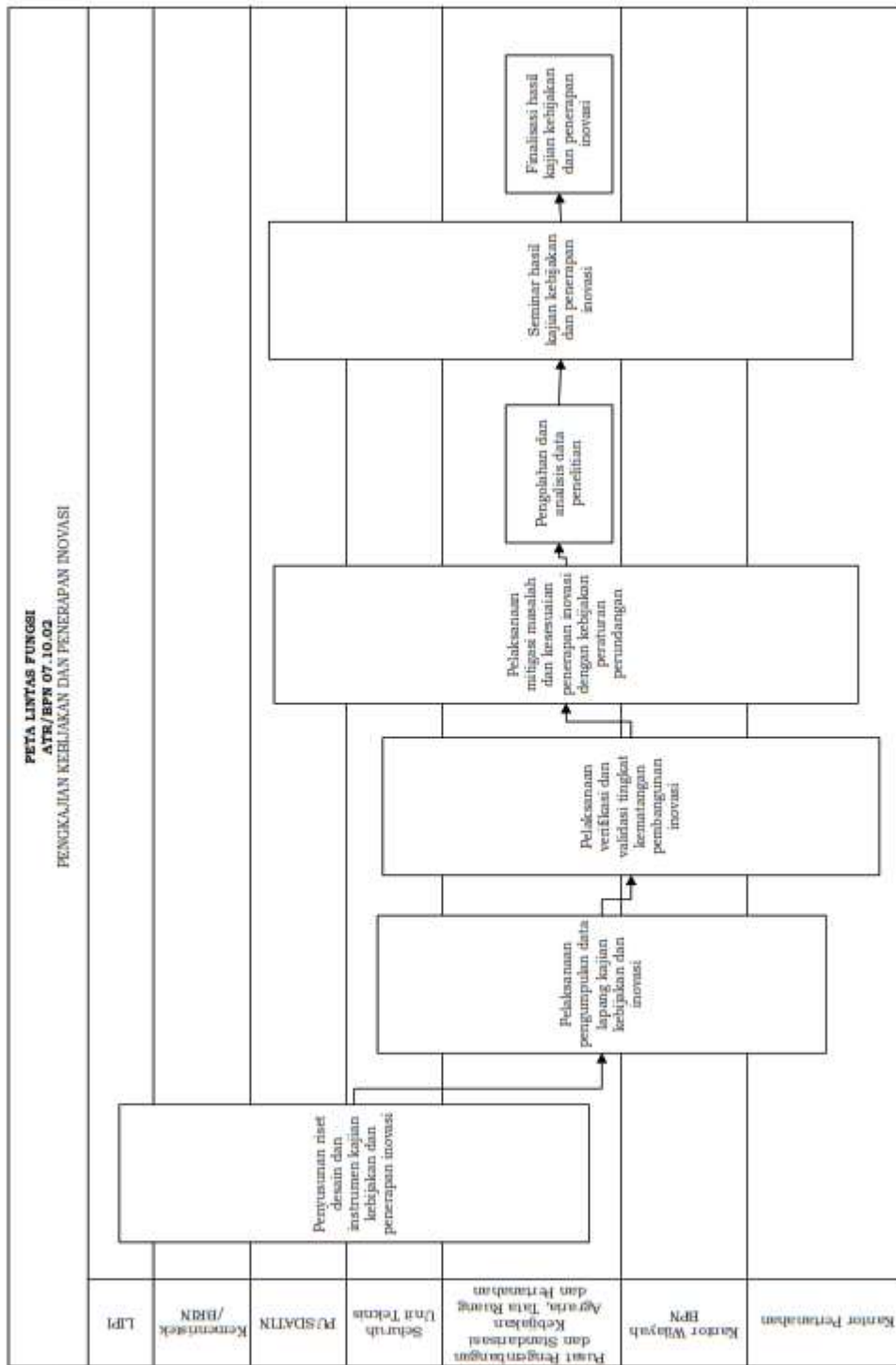
PELAKSANAAN PENELITIAN, RISET DAN INOVASI



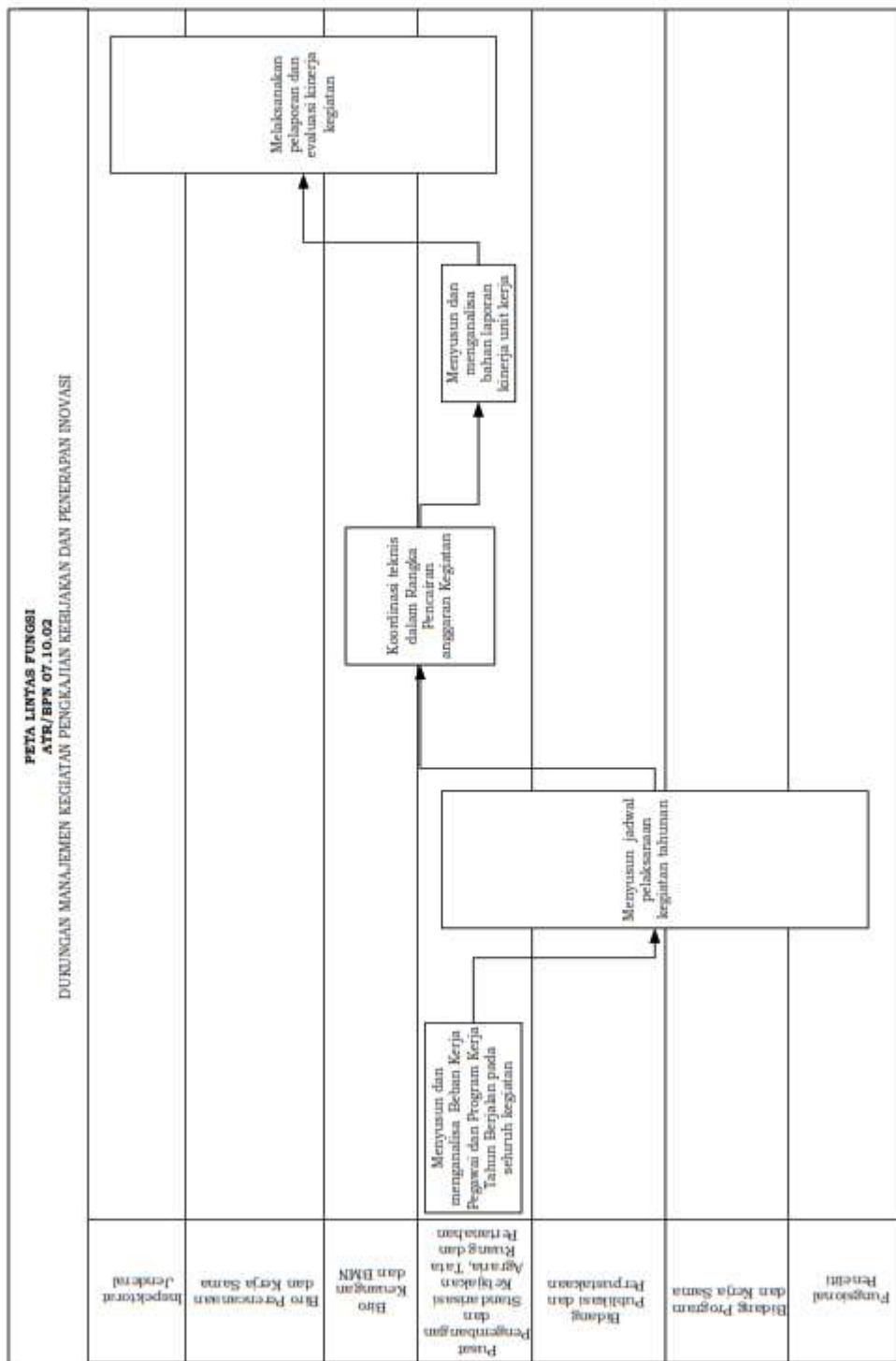
- 57 -



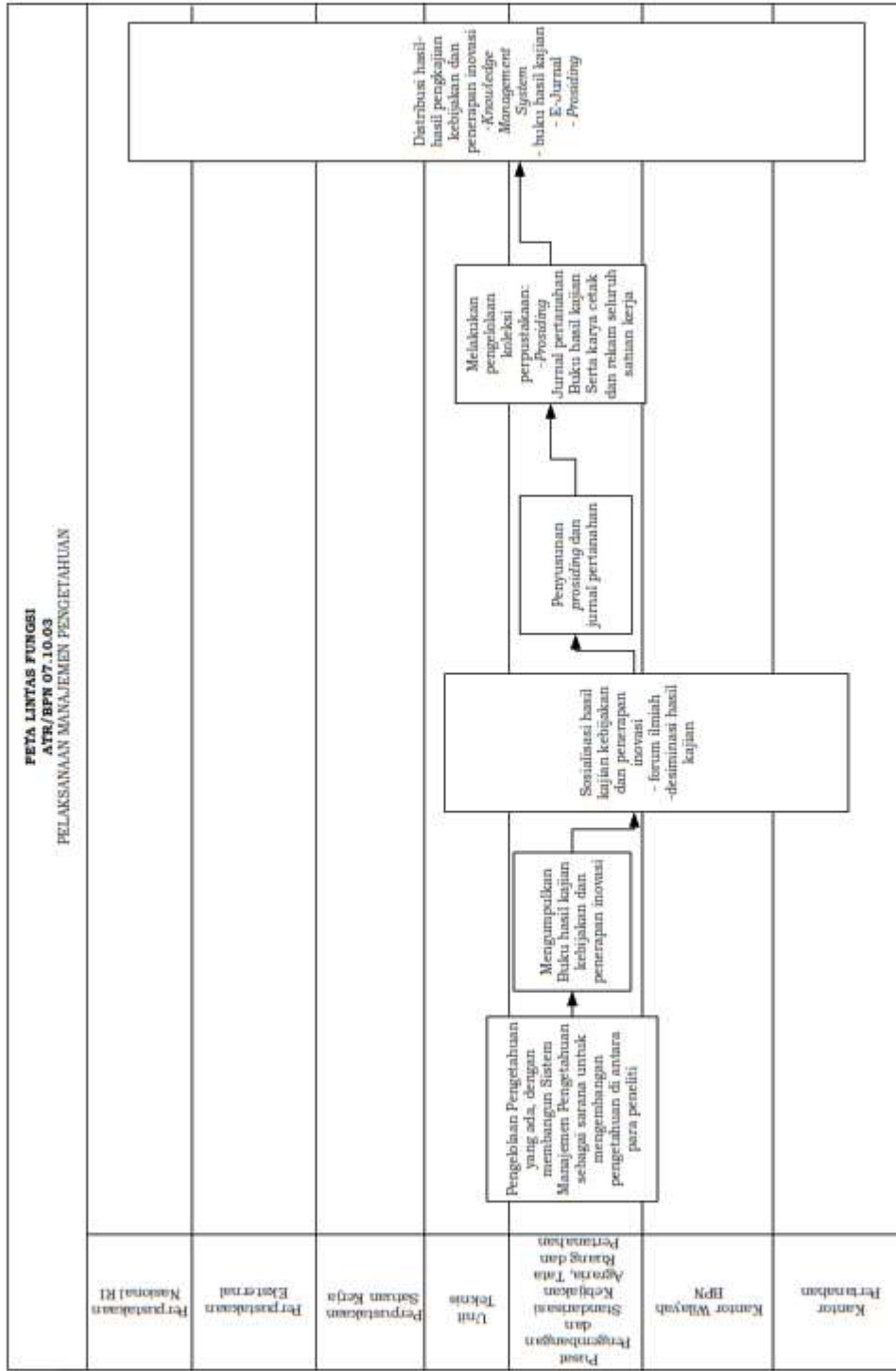
- 58 -



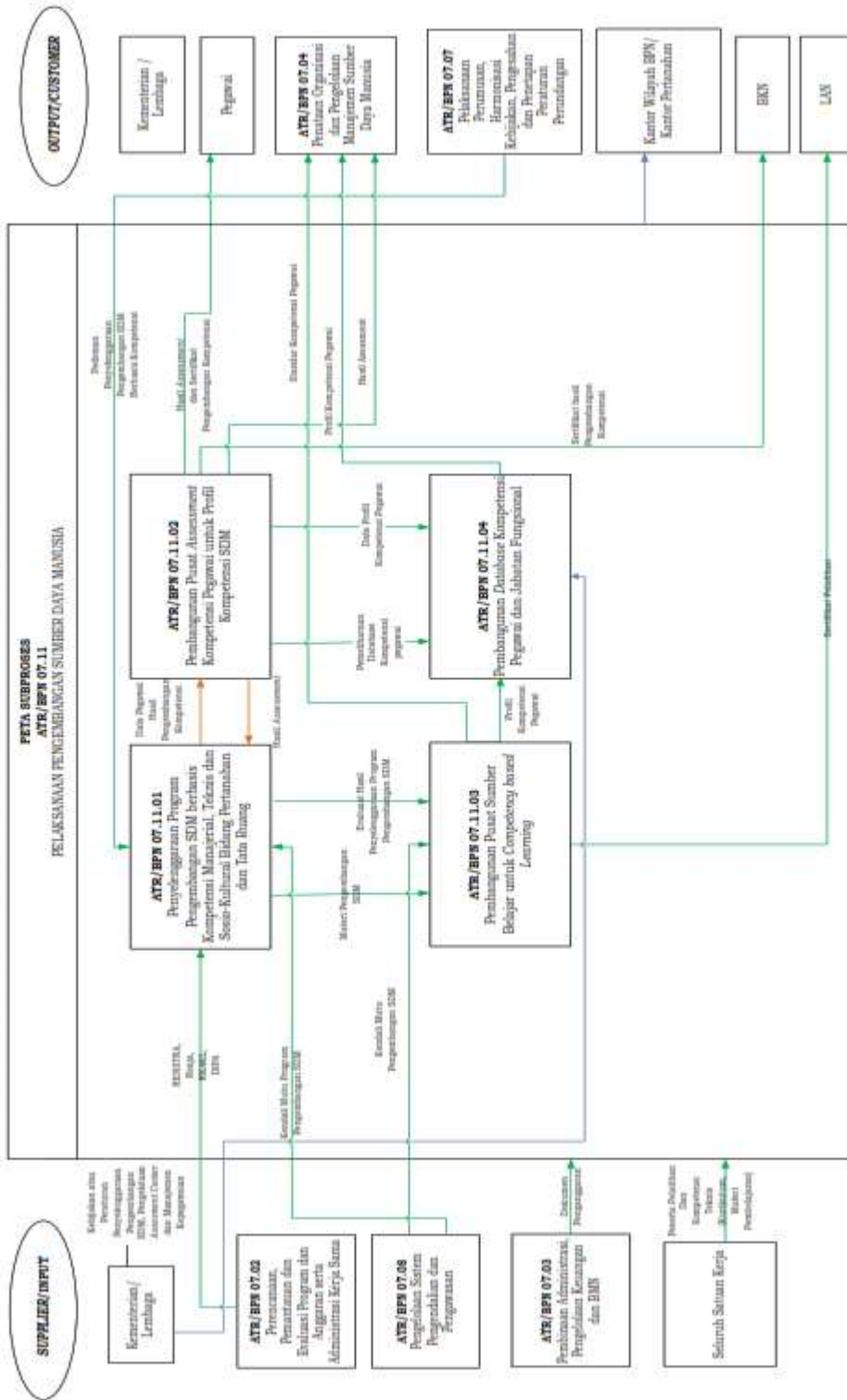
- 59 -



- 60 -

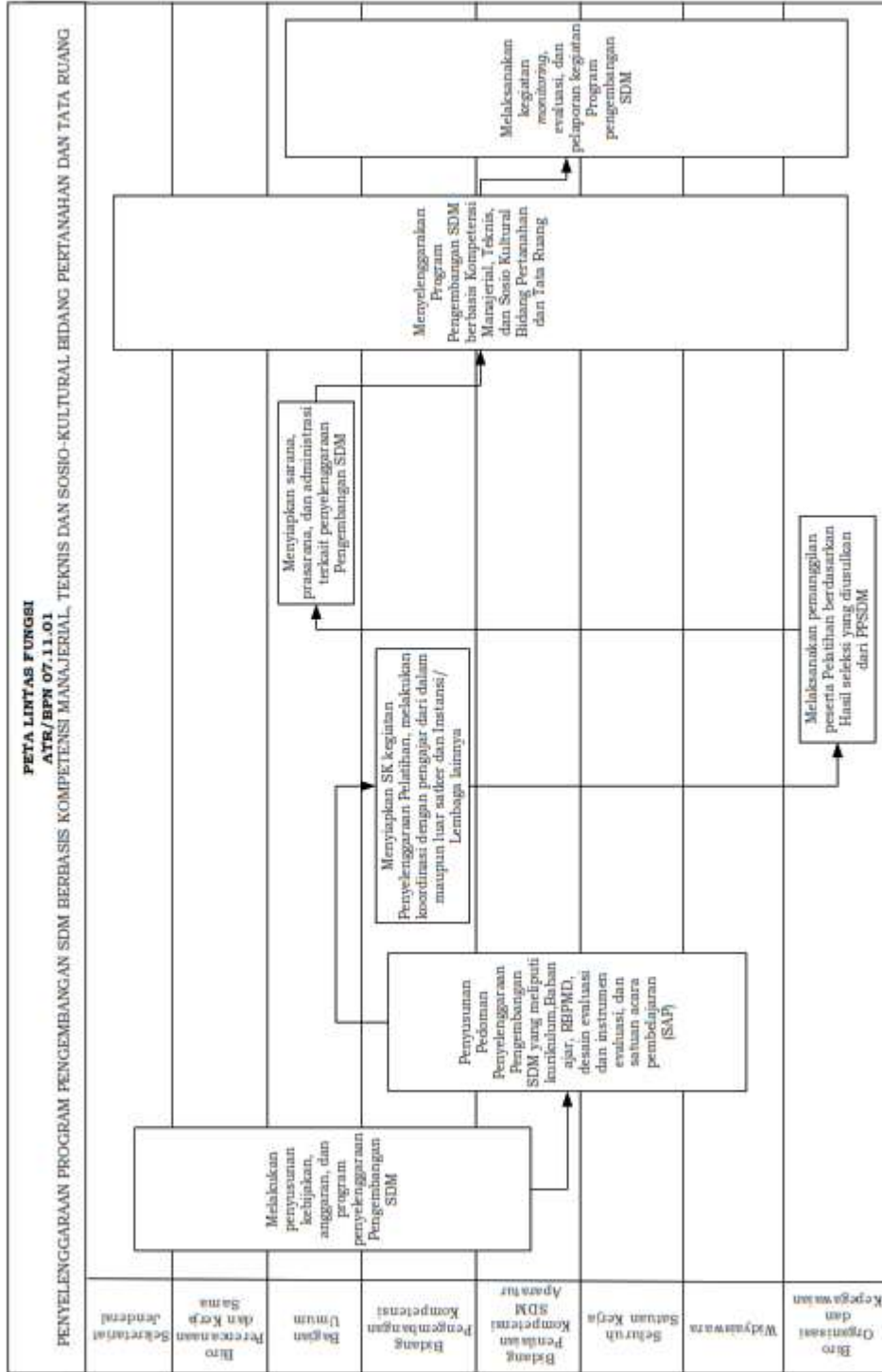


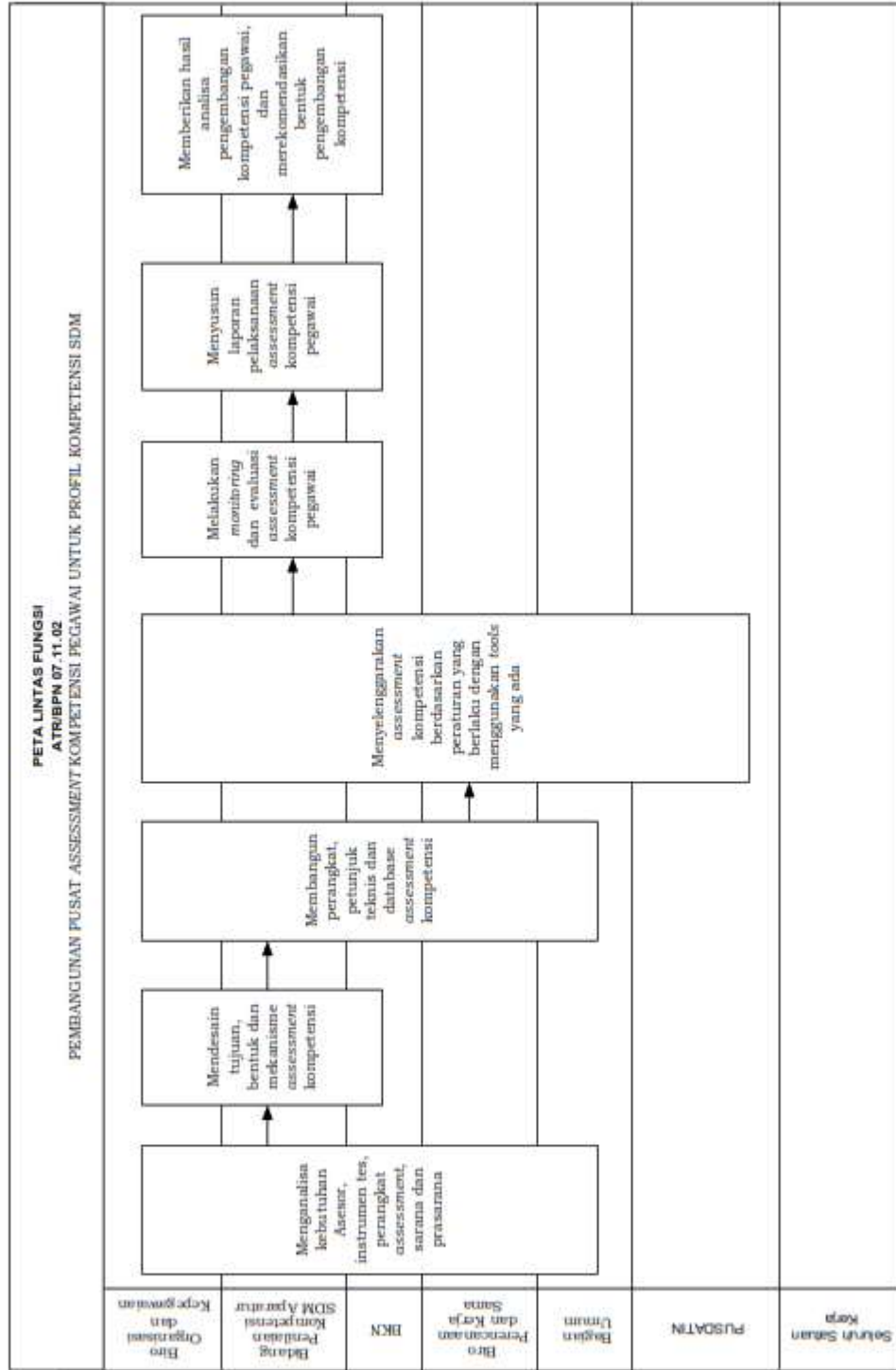
3.1.10. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

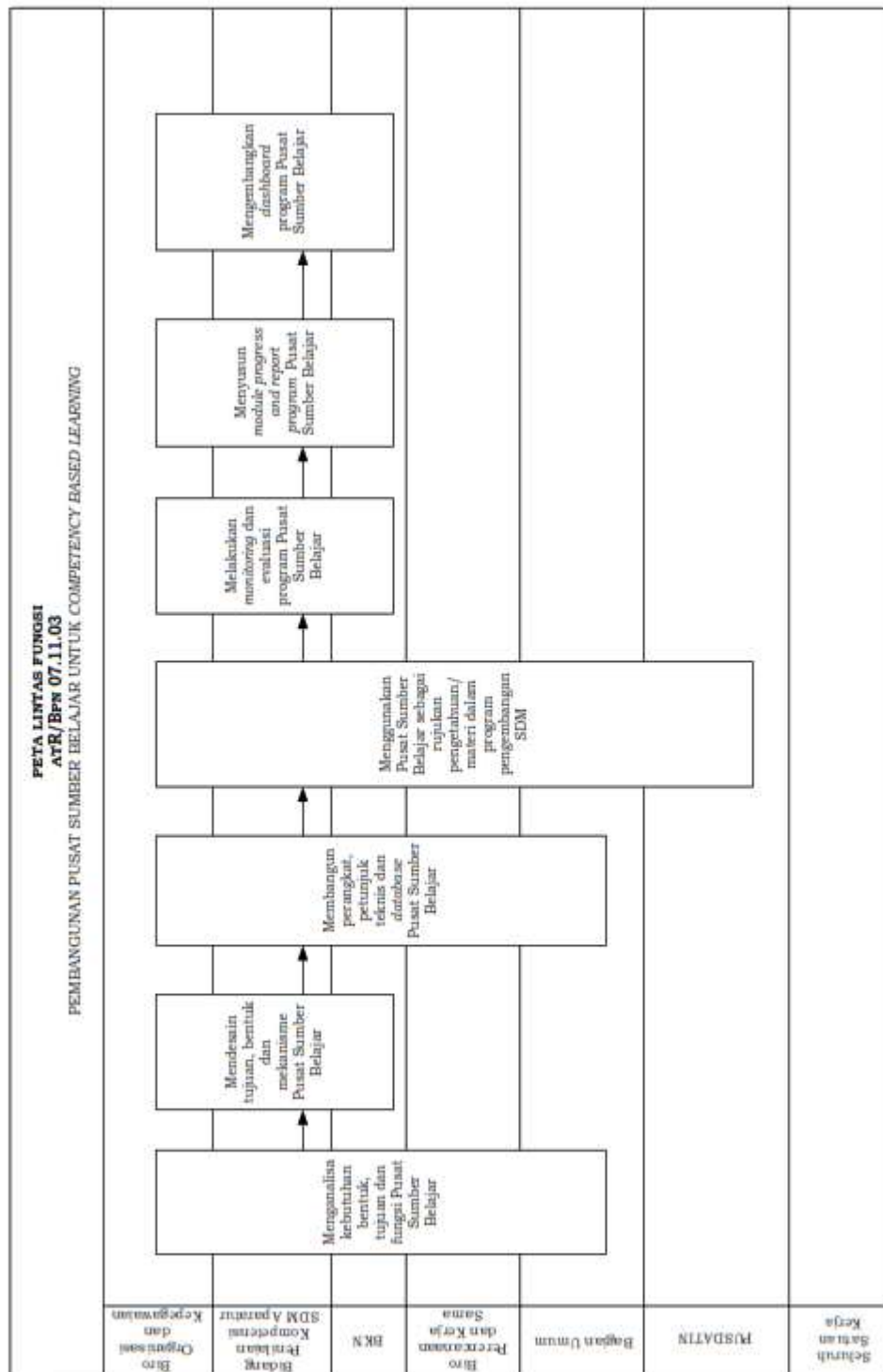


PETA RELASI ATR/BPN 07.11 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
ATR/BPN 07.11.01 Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosio-Kultural Bidang Pertanian dan Tata Ruang	<table border="1"> <tr> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Biro Hubungan Masyarakat</td> <td>Lembaga DKLAT lainnya</td> </tr> <tr> <td>PPAT</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>JFT K/L lain</td> <td>Kantor Perumahan</td> </tr> <tr> <td>Mediator</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perencana Tata Ruang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penilai Tanah</td> <td></td> </tr> </table>	Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Seluruh Satuan Kerja	Biro Hukum	Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan	Biro Hubungan Masyarakat	Lembaga DKLAT lainnya	PPAT	Kantor Wilayah BPN	JFT K/L lain	Kantor Perumahan	Mediator		Perencana Tata Ruang		Penilai Tanah	
Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kepegawaian																		
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Seluruh Satuan Kerja																		
Biro Hukum	Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan																		
Biro Hubungan Masyarakat	Lembaga DKLAT lainnya																		
PPAT	Kantor Wilayah BPN																		
JFT K/L lain	Kantor Perumahan																		
Mediator																			
Perencana Tata Ruang																			
Penilai Tanah																			
ATR/BPN 07.11.02 Pembangunan Pusat Assessment Kompetensi Pegawai untuk Profil Kompetensi SDM	<table border="1"> <tr> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>Biro Keuangan dan BMN</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>BKN</td> <td>Lembaga Assessment lainnya</td> </tr> <tr> <td>LAN</td> <td></td> </tr> </table>	Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Keuangan dan BMN	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	BKN	Lembaga Assessment lainnya	LAN							
Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kepegawaian																		
Biro Keuangan dan BMN	Biro Perencanaan dan Kerja Sama																		
PUSDATIN	Seluruh Satuan Kerja																		
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan																		
BKN	Lembaga Assessment lainnya																		
LAN																			
ATR/BPN 07.11.03 Pembangunan Pusat Sumber Belajar untuk <i>Competency based Learning</i>	<table border="1"> <tr> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>Inspektoriat Jenderal</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Biro Keuangan dan BMN</td> <td>PUSDATIN</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>BKN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Perumahan</td> </tr> <tr> <td>LAN</td> <td>Lembaga Pelatihan K/L lain</td> </tr> <tr> <td>Universitas/Akademi</td> <td></td> </tr> </table>	Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Inspektoriat Jenderal	Seluruh Satuan Kerja	Biro Keuangan dan BMN	PUSDATIN	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	BKN	Kantor Wilayah BPN	Kantor Perumahan	LAN	Lembaga Pelatihan K/L lain	Universitas/Akademi					
Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kepegawaian																		
Inspektoriat Jenderal	Seluruh Satuan Kerja																		
Biro Keuangan dan BMN	PUSDATIN																		
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	BKN																		
Kantor Wilayah BPN	Kantor Perumahan																		
LAN	Lembaga Pelatihan K/L lain																		
Universitas/Akademi																			
ATR/BPN 07.11.04 Pembangunan Database Kompetensi Pegawai dan Jabatan Fungsional	<table border="1"> <tr> <td>Sekretariat Jenderal</td> <td>Inspektoriat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Biro Keuangan dan BMN</td> <td>Seluruh Satuan Kerja</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>BKN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Perumahan</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga lain</td> <td></td> </tr> </table>	Sekretariat Jenderal	Inspektoriat Jenderal	Biro Keuangan dan BMN	Seluruh Satuan Kerja	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Organisasi dan Kepegawaian	PUSDATIN	BKN	Kantor Wilayah BPN	Kantor Perumahan	Kementerian/Lembaga lain							
Sekretariat Jenderal	Inspektoriat Jenderal																		
Biro Keuangan dan BMN	Seluruh Satuan Kerja																		
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Organisasi dan Kepegawaian																		
PUSDATIN	BKN																		
Kantor Wilayah BPN	Kantor Perumahan																		
Kementerian/Lembaga lain																			

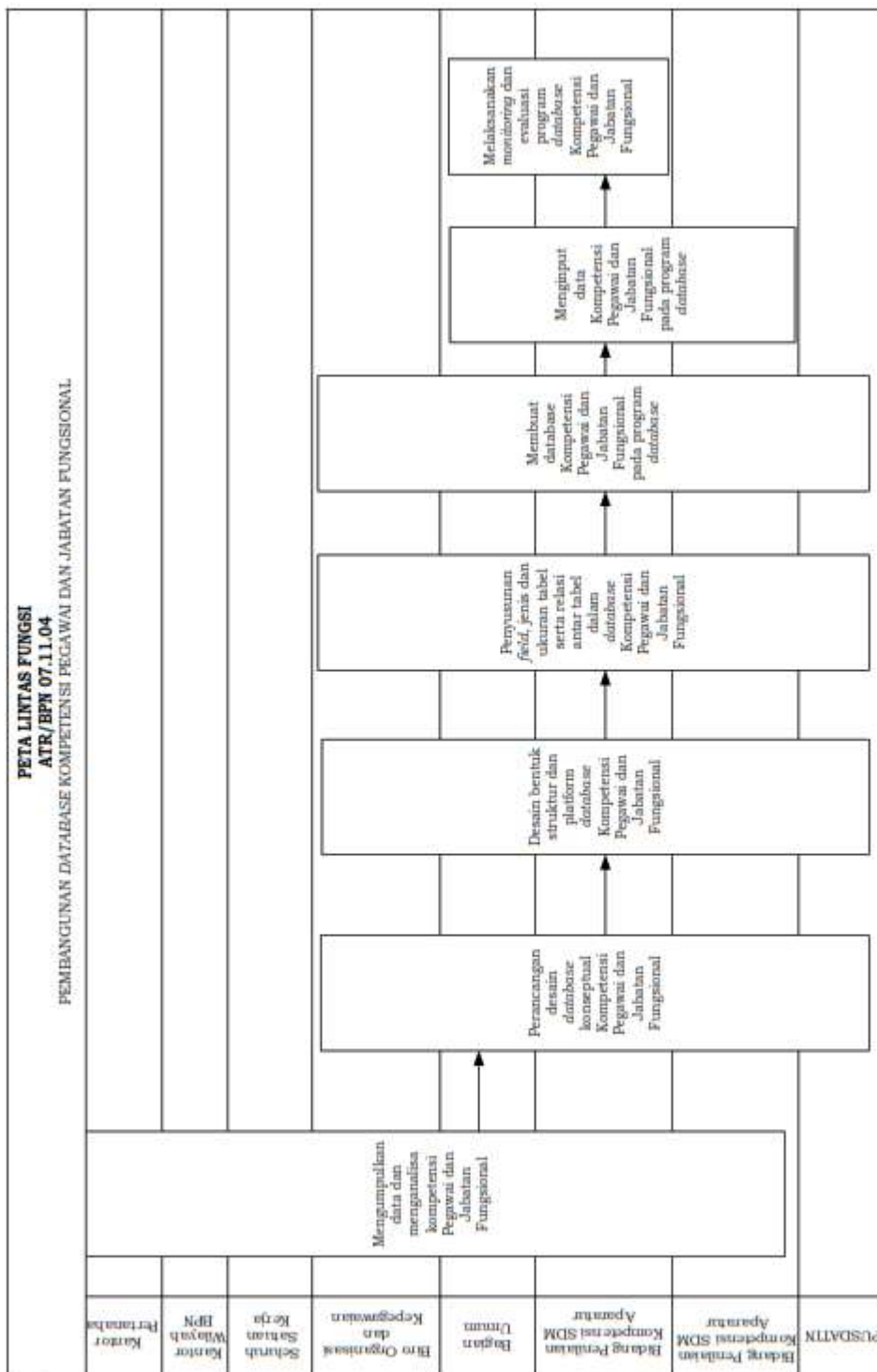
- 63 -



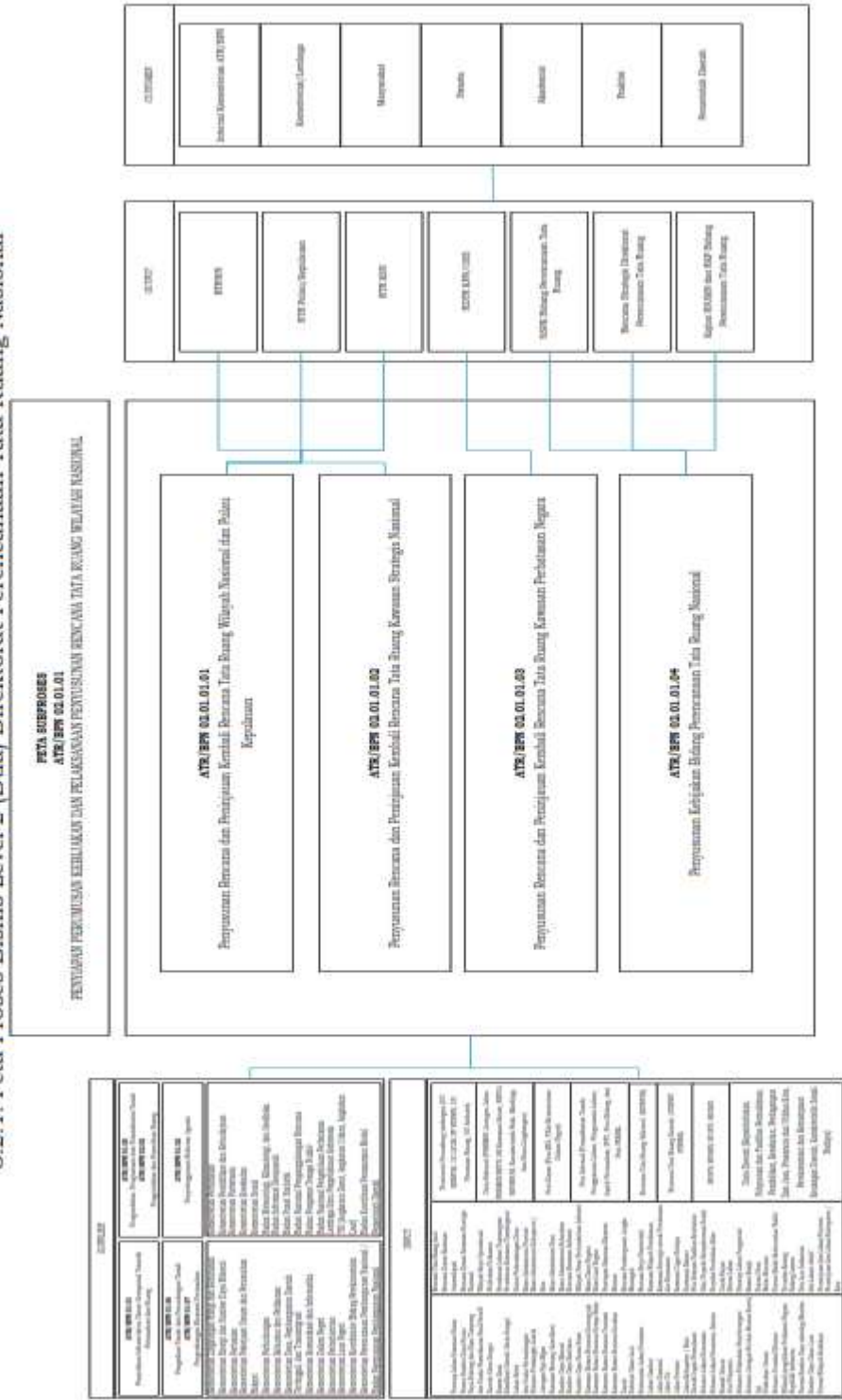




- 66 -



3.2.1.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional



PETA RELASI ATR/BPN 02.01.01 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL													
<p>ATR/BPN 02.01.01.01 Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Pulau Kepulauan</p>	<table border="1"> <tr> <td> <p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p> </td> <td> <p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Biro Hukum</p> </td> <td> <p>Masyarakat</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> </td> <td> <p>Akademisi</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>DPR</p> </td> <td> <p>Praktisi</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> </td> <td> <p>Instansi Terkait</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p> </td> </tr> </table>	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p>	<p>Biro Hukum</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>Akademisi</p>	<p>DPR</p>	<p>Praktisi</p>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Instansi Terkait</p>	<p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p>	
<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p>												
<p>Biro Hukum</p>	<p>Masyarakat</p>												
<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>Akademisi</p>												
<p>DPR</p>	<p>Praktisi</p>												
<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Instansi Terkait</p>												
<p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p>													
<p>ATR/BPN 02.01.01.02 Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional</p>	<table border="1"> <tr> <td> <p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p> </td> <td> <p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Biro Hukum</p> </td> <td> <p>Masyarakat</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> </td> <td> <p>Akademisi</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>DPR</p> </td> <td> <p>Praktisi</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> </td> <td> <p>Instansi Terkait</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p> </td> </tr> </table>	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p>	<p>Biro Hukum</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>Akademisi</p>	<p>DPR</p>	<p>Praktisi</p>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Instansi Terkait</p>	<p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p>	
<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p>												
<p>Biro Hukum</p>	<p>Masyarakat</p>												
<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>Akademisi</p>												
<p>DPR</p>	<p>Praktisi</p>												
<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Instansi Terkait</p>												
<p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p>													
<p>ATR/BPN 02.01.01.03 Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara</p>	<table border="1"> <tr> <td> <p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p> </td> <td> <p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Biro Hukum</p> </td> <td> <p>Masyarakat</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> </td> <td> <p>Akademisi</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>DPR</p> </td> <td> <p>Praktisi</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> </td> <td> <p>Instansi Terkait</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p> </td> </tr> </table>	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p>	<p>Biro Hukum</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>Akademisi</p>	<p>DPR</p>	<p>Praktisi</p>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Instansi Terkait</p>	<p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p>	
<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</p>												
<p>Biro Hukum</p>	<p>Masyarakat</p>												
<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>Akademisi</p>												
<p>DPR</p>	<p>Praktisi</p>												
<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Instansi Terkait</p>												
<p>Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</p>													
<p>ATR/BPN 02.01.01.04 Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan Tata Ruang Nasional</p>	<table border="1"> <tr> <td> <p>Masyarakat</p> </td> <td> <p>Instansi Terkait</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Akademisi</p> </td> <td> <p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Praktisi</p> </td> <td> <p>Biro Hukum</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Pemerintah Daerah</p> </td> <td> <p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> </td> </tr> </table>	<p>Masyarakat</p>	<p>Instansi Terkait</p>	<p>Akademisi</p>	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Praktisi</p>	<p>Biro Hukum</p>	<p>Pemerintah Daerah</p>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>				
<p>Masyarakat</p>	<p>Instansi Terkait</p>												
<p>Akademisi</p>	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>												
<p>Praktisi</p>	<p>Biro Hukum</p>												
<p>Pemerintah Daerah</p>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>												

- 70 -

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.01 PENYUSUNAN RENCANA DAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN PULAU KEPULAUAN	
Mayor	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)
Asisten Mayor	
Paksi	
Instansi Terkait	Meniskus pembahasan lintas sektor
Direktori Kerjasama	Mengolah dan menganalisis data
Biro Hukum	Menyusun Konsep Rencana
Biro Hukum dan HAM	Menyusun Materi teknis RTR, KLHS, dan draf Raperpres
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Biro Perencanaan	Menyusun dan Memeriksa Rancangan Peraturan
Kementerian Hukum dan HAM	Melakukan Proses Persetujuan Substansi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
DPR	Validasi KLHS
	Memberikan Keputusan

- 72 -

<p style="text-align: center;">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.02 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL</p>			
Masyarakat	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)	Melakukan pembahasan lintas sektor	Peraturan presiden RTR KSN
Akademi	Menganalisis dan menganalisis data		
Pusat		Menyusun Konsep Rencana	Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan
Instansi Terkait	Menyusun Materi teknis RTR, KLHS, dan draft Raperpres		
Direktorat/ Ruang Lingkup		Validasi KLHS	Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
Biro Hukum	Validasi KLHS		
Kementerian Hukum dan Manusia		Validasi KLHS	Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Pulp dan Industri	Validasi KLHS		
DPR		Validasi KLHS	Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan

- 73 -

PEYA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.02 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	
Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Menteri yang Mengkoordinasikan Urusan Bidang	Rencana Tata Ruang
Masyarakat	
Akademisi	
Praktisi	
Instansi Terkait	
Tim Pelaksana (Direktori Jenderal Bidang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Pertanahan dan Pengukuran)	Mengaji Rencana Tata Ruang Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Melakukan Penilaian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Merevisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.03 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA	
Masyarakat	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)
Asosiasi	
Praktisi	
Teknisi	Mejalakan pembiasaan lintas sektor
Direktor Lapangan	Menyusun Materi teknis RDTR, KLHS, dan draft Raperpres
Biro Hukum	Menyusun Konsep Rencana
Kementerian Hukum dan HAM	Mengolah dan menganalisis data
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mejalakan Proses Persetujuan Substansi
	Mejalakan harmonisasi peraturan perundang-undangan
	Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan
DPR	Validasi KLHS
	Memberikan Keputusan

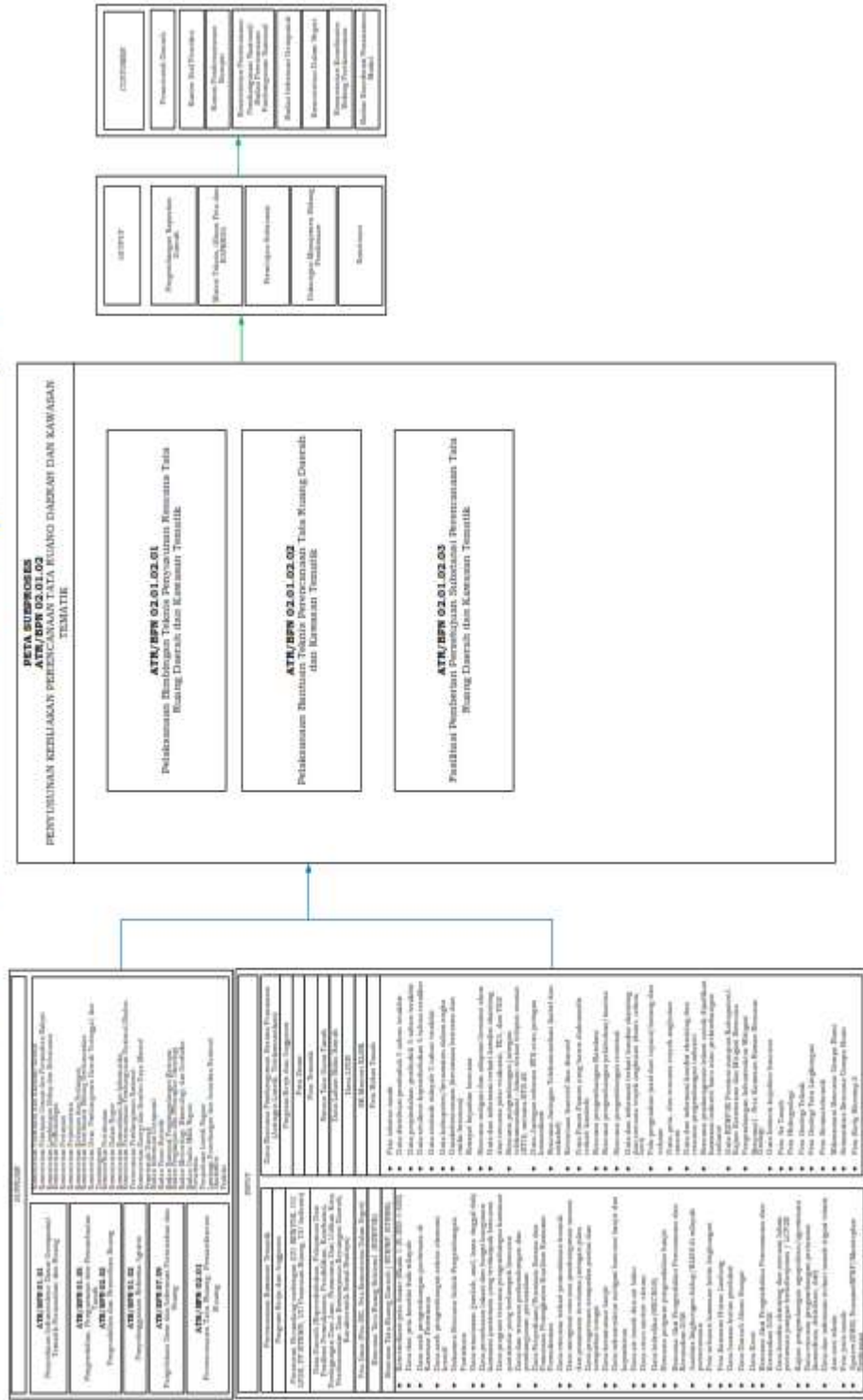
- 75 -

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.03 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA	
Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Menteri/Yang Layan Bina	Menteri/Yang Layan Bina
Masyarakat	Masyarakat
Akademisi	Akademisi
Praktisi	Praktisi
Instansi Terkait	Instansi Terkait
Tim Pelaksana (Kendali Tata Ruang, Pengawasan Fungsi Ruang, dan Lingkungan)	Tim Pelaksana (Kendali Tata Ruang, Pengawasan Fungsi Ruang, dan Lingkungan)
Mengkaji Rencana Tata Ruang	Mengkaji Rencana Tata Ruang
Mengevaluasi Rencana Tata Ruang	Mengevaluasi Rencana Tata Ruang
Melakukan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Melakukan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali	Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali
Merevisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk	Merevisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk
Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang	Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang
Rencana Tata Ruang	Rencana Tata Ruang

- 76 -

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.04 PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL		
Manajemen	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)	Peraturan Menteri NSPK
Akademi		
Praktis		
Penelitian Dasar	Melakukan perubahan lintas sektor	
Informasi		
Inspeksi		
Inspeksi Kerjasama	Mengidentifikasi Kebutuhan NSPK Mengolah dan menganalisis data Menyusun Konsep materi teknis NSPK Menyusun Materi teknis NSPK dan draft Rapermen Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan	Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan Memberikan Keputusan
Keperawatan		

3.2.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II



PETA RELASI ATR/BPN 02.01.02 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK													
<p>ATR/BPN 02.01.02.01 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Instansi Terkait</td> <td style="text-align: center;">OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> </tr> </table>	Instansi Terkait	OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang									
Instansi Terkait	OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang											
<p>ATR/BPN 02.01.02.02 Pelaksanaan Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> <td style="text-align: center;">Instansi Terkait</td> <td style="text-align: center;">OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td style="text-align: center;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DPRD</td> <td style="text-align: center;">Gubernur</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>	Masyarakat	Instansi Terkait	OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Informasi Geospasial	DPRD	Gubernur				
Masyarakat	Instansi Terkait	OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Informasi Geospasial								
DPRD	Gubernur												
<p>ATR/BPN 02.01.02.03 Fasilitasi Pemberian Persetujuan Substansi Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Instansi Terkait</td> <td style="text-align: center;">Menteri ATR/ Kepala BPN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> </tr> </table>	OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Instansi Terkait	Menteri ATR/ Kepala BPN	Direktorat Jenderal Tata Ruang								
OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Instansi Terkait	Menteri ATR/ Kepala BPN	Direktorat Jenderal Tata Ruang										

- 79 -

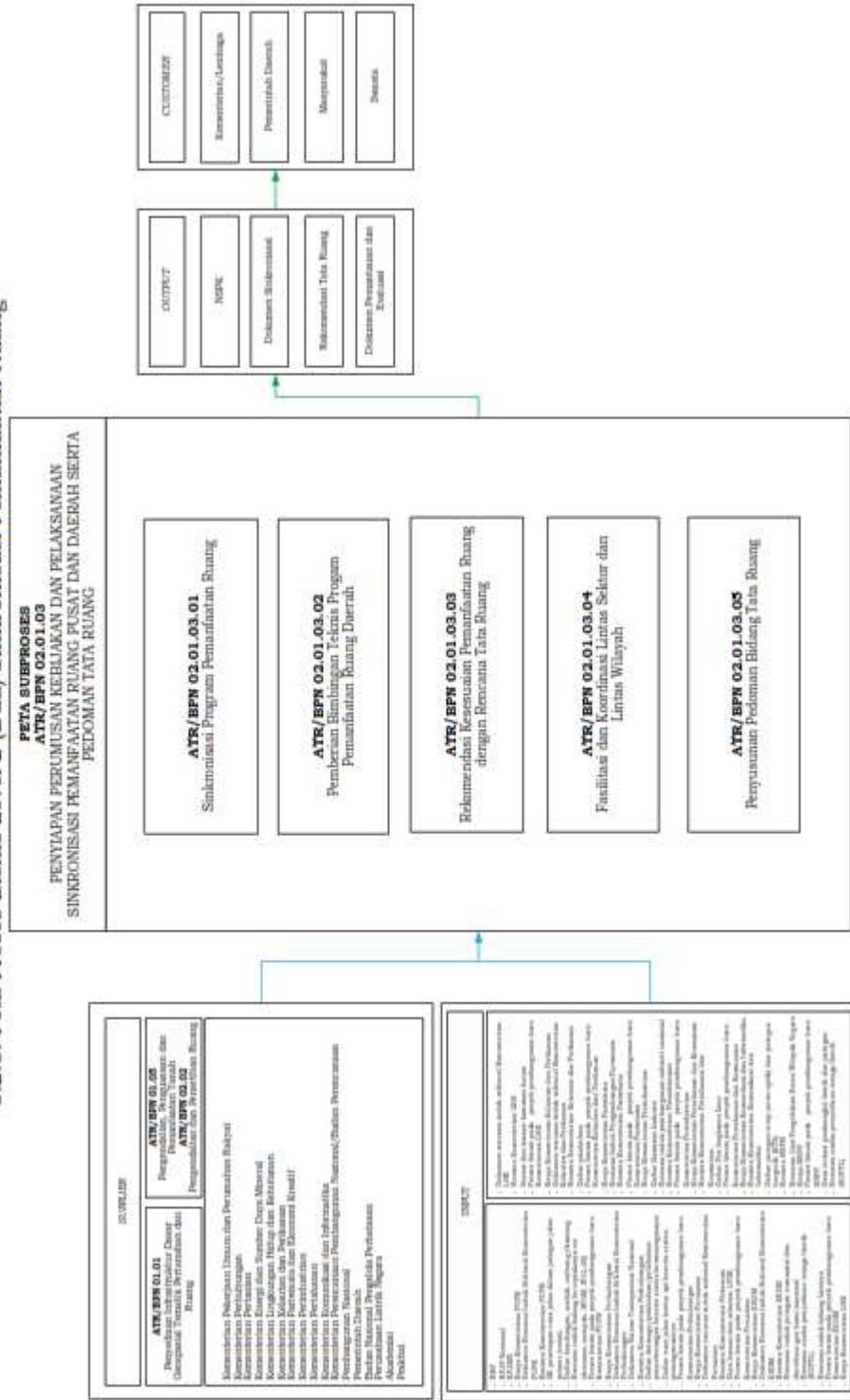
PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.02.01 PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK	
Instansi Terkait	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Mengikuti Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang</div>
OPD yang Menyajikan Urusan Ruang	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Melakukan Konsultasi Perencanaan Tata Ruang</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Menyusun Materi Teknis Rencana Tata Ruang</div> </div>
Direktorat Jenderal Tata Ruang	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Menyiapkan Konsep Materi Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Melakukan Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Menguatirisi Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Melakukan Evaluasi Awal Subtansi Perencanaan Tata Ruang</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Menyampaikan Materi Pendampingan Perencanaan Tata Ruang</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Melakukan Pendampingan Perencanaan Tata Ruang</div> </div>

- 81 -

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.02.03 FASILITASI PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK			
Instansi Terkait		Pembahasan Lintas Sektor	
OP yang Menjalankan Urusan Bidang Perencanaan Ruang	Mengirim Permohonan Persetujuan Substansi	Perbaikan Substansi hasil pembahasan lintas sektor	Persiapan dokumen permohonan persetujuan substansi
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi, serta evaluasi substansi materi muatan		Memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi
Menjen ATR/ Kepala BPN			Memberikan persetujuan konsep surat persetujuan Substansi
			Menandatangani Surat Persetujuan Substansi

- 82 -

3.2.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang



PETA RELASI ATR/BPN 02.01.03 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG PUSAT DAN DAERAH SERTA PEDOMAN TATA RUANG		
ATR/BPN 02.01.03.01 Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Masyarakat Instansi Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang Pemerintah Pusat/Daerah	ATR/BPN 02.01.03.02 Pemberian Bimbingan Teknis Program Pemanfaatan Ruang Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang Akademisi Pemerintah Daerah	ATR/BPN 02.01.03.03 Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang OPD/Kepala Daerah/BUMN/Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Tata Ruang Seluruh Dinas Terkait Menteri/Direktur Jenderal a.n. Menteri
ATR/BPN 02.01.03.04 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah Instansi Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang Pemerintah Daerah	ATR/BPN 02.01.03.05 Penyusunan Pedoman Bidang Tata Ruang Masyarakat Instansi Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	

- 84 -

<p>PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.01 SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</p>	
<p>Keperencanaan</p>	<p>Melakukan penyempulatan rancangan PRIMA BARATA</p>
<p>Instansi Terkait</p>	<p>Melakukan peninjauan kembali PRITA BARATA dengan K/L</p>
<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>	<p>Melakukan penyempulatan rancangan program pemanfaatan ruang tahunan (PRITA BARATA)</p> <p>Melakukan peninjauan kembali program T+2 aspek perencanaan, persiapan program dan pelaksanaan program)</p> <p>Melakukan penyempulatan rancangan PRIMA BARATA</p> <p>Menyiapkan rancangan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah (PRIMA BARATA)</p> <p>Melakukan sinkronisasi keterpaduan program</p>
<p>Direktorat Pusat / Daerah</p>	<p>Mengidentifikasi arahan spasial</p> <p>Melakukan inventarisasi pemanfaatan ruang</p> <p>Mertumuskan rencana terpadu</p>

- 85 -

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.02 PEMBERIAN BEMINGAN TEKNIS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG DAERAH		
Instansi Terkait	<div data-bbox="669 1510 984 1677" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Identifikasi NSPK issue permasalahan berdasarkan kebutuhan dan dinamika daerah </div> <div data-bbox="669 1268 984 1472" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Menentukan list kebutuhan data primer dan sekunder </div> <div data-bbox="669 1016 984 1216" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Menyusun materi teknis NSPK </div>	<div data-bbox="480 775 1183 969" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Melakukan pembahasan penyusunan muatan materi teknis Bimtek </div> <div data-bbox="487 608 1183 730" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pelaksanaan Bimtek </div> <div data-bbox="683 441 984 583" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Laporan Pelaksanaan Bimtek </div>
	Direktorat Jenderal Tata Ruang	
		Akademi

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.03 REKOMENDASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA TATA RUANG	
OPD /Kepala Daerah/BLMN/ Kementerian/Lembaga	<div data-bbox="443 1455 667 1647" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Mengirimkan Surat permohonan untuk Rekomendasi Tata Ruang </div> <div data-bbox="459 1049 948 1241" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Mengumpulkan kebutuhan data untuk kajian pada titik lokasi wilayah yang akan ditindaklanjuti </div> <div data-bbox="716 1248 948 1440" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Menzerina dan menghubungi pemohon rekomendasi Tata Ruang </div> <div data-bbox="716 849 948 1041" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Membuat Kajian terkait wilayah terkait </div> <div data-bbox="459 650 948 842" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Rapat Pembahasan dan/ atau survei </div> <div data-bbox="716 483 948 642" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Berita Acara Kesepakatan/ Notulensi Rapat </div>
Menteri/Direktur Jenderal a.n. Menteri	<div data-bbox="1029 483 1235 642" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Menetapkan rekomendasi/ tanggapan </div>

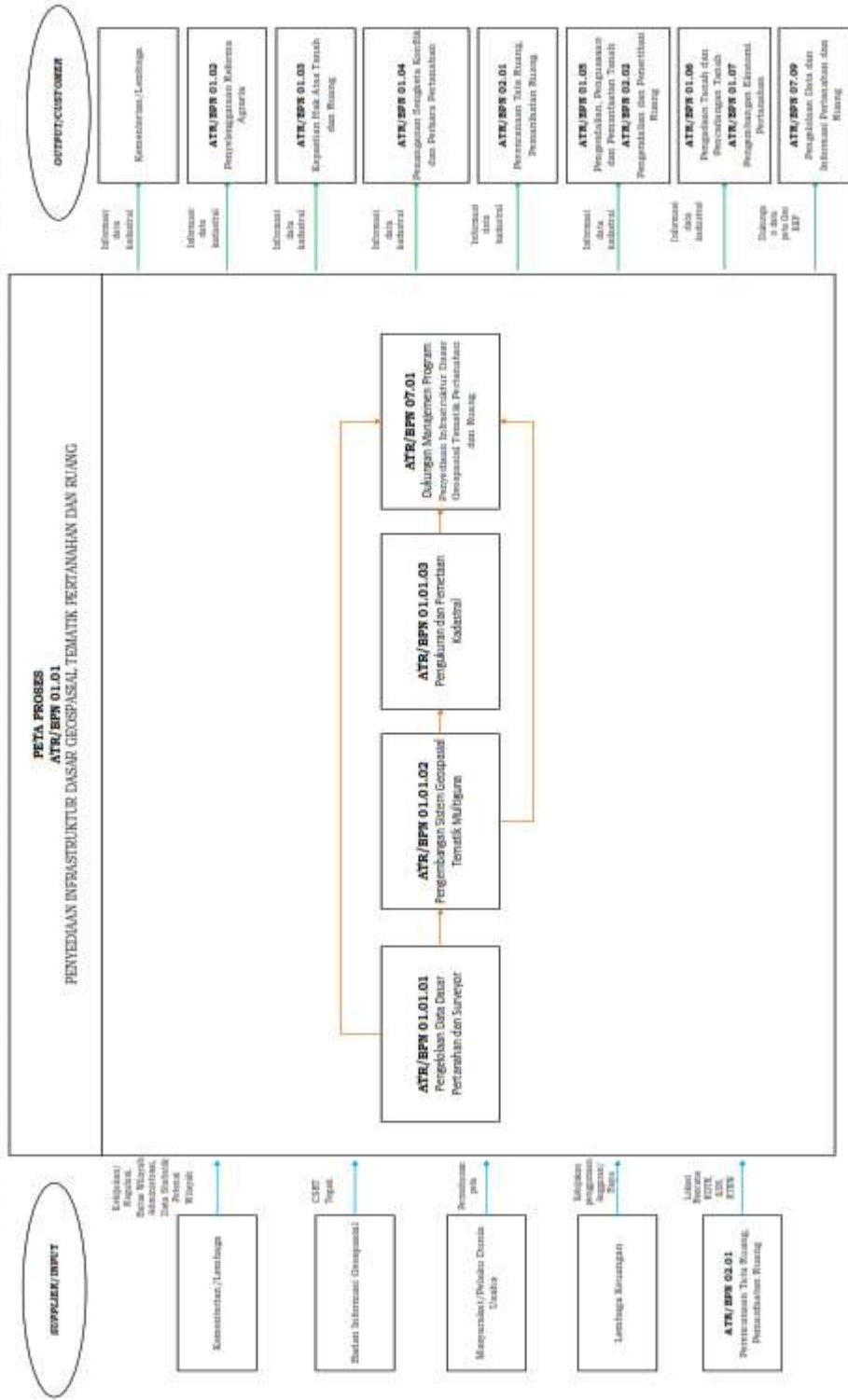
- 87 -

<p>PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.04 FASILITASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS WILAYAH</p>	
<p>Perangkat Daerah</p>	<p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Mendokumentasikan laporan pelaksanaan penyajian bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p>
<p>Direktori Internal Tata Ruang</p>	<p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Mendokumentasikan laporan pelaksanaan penyajian bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p>
<p>Instansi Terkait</p>	<p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas persiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p> <p>Mendokumentasikan laporan pelaksanaan penyajian bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah</p>

- 88 -

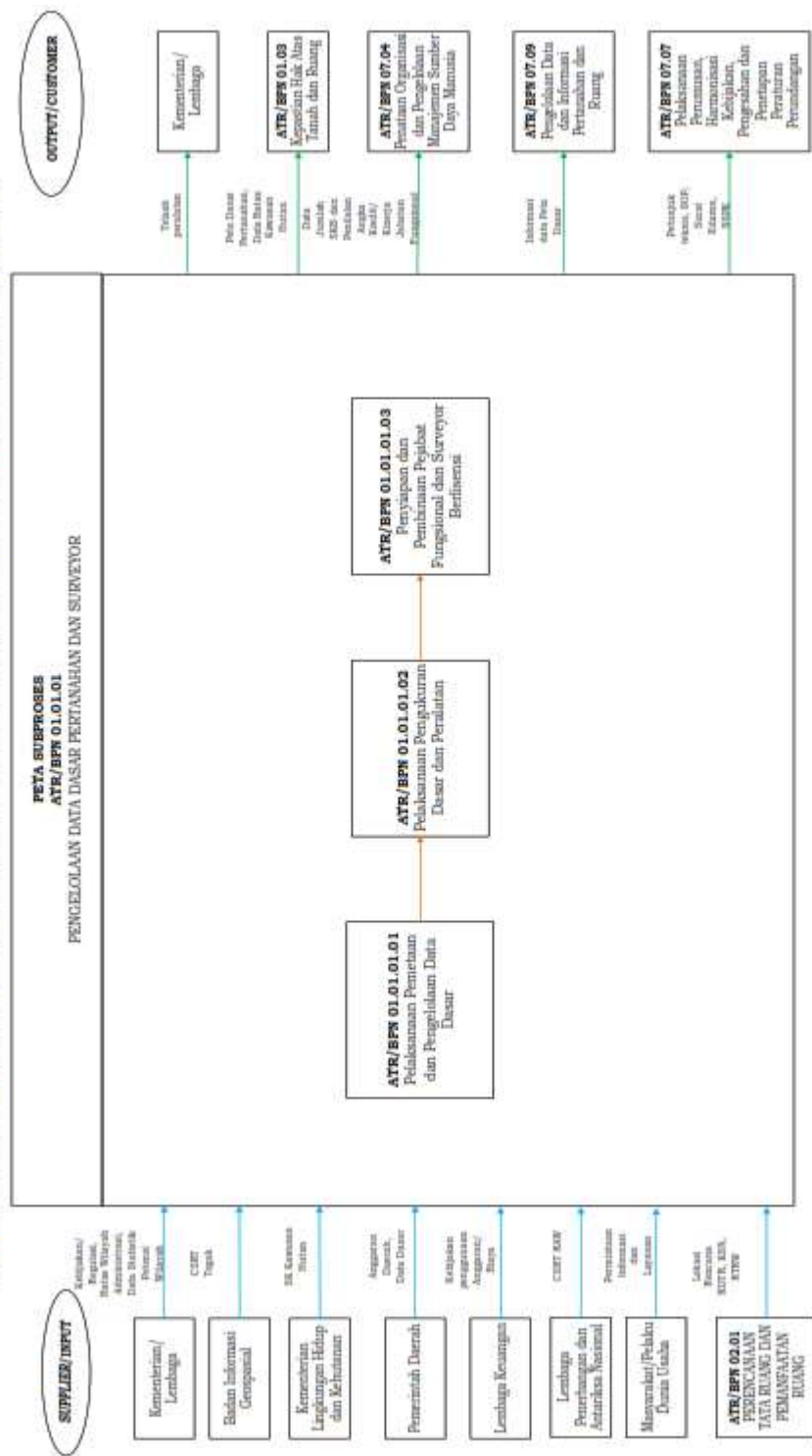
PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.05 PENYUSUNAN PEDOMAN BIDANG TATA RUANG	
Pemerintah Daerah	
Instansi Terkait	Memberikan data dan informasi data sekunder dan data primer
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Mengidentifikasi NSPK berdasarkan family tree Mengidentifikasi NSPK berdasarkan kebutuhan dan dinamika di daerah Menentukan list kebutuhan data primer dan sekunder Menentukan NSPK prioritas Mengolah dan menganalisis data terkait penyusunan NSPK Menyusun materi teknis NSPK Melakukan pembahasan peninjauan mutuan materi teknis
	Menyusun Rapermen Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan
AKADEMISI	

3.3. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanian dan Ruang



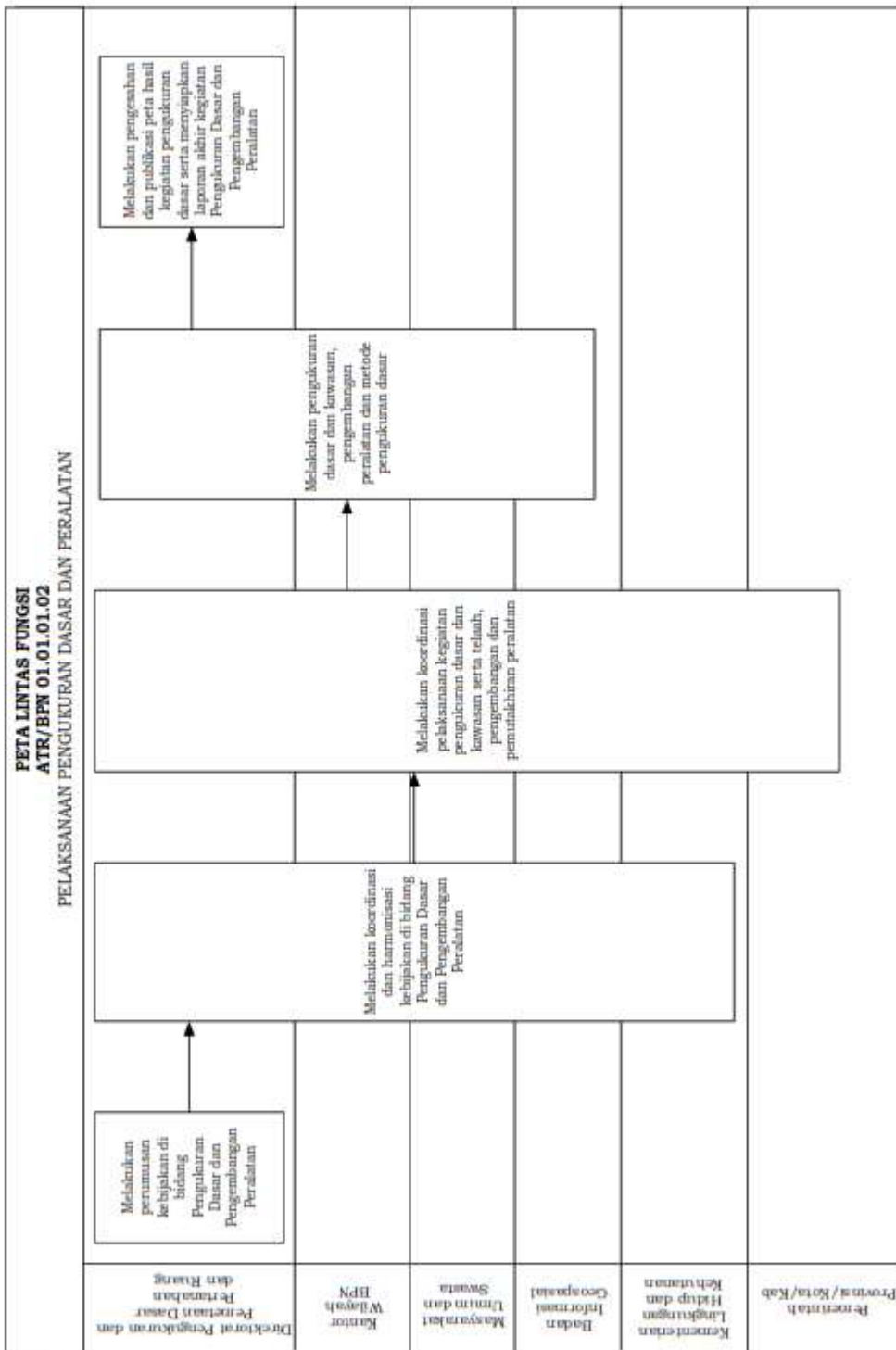
- 90 -

3.3.1.1. **Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan**

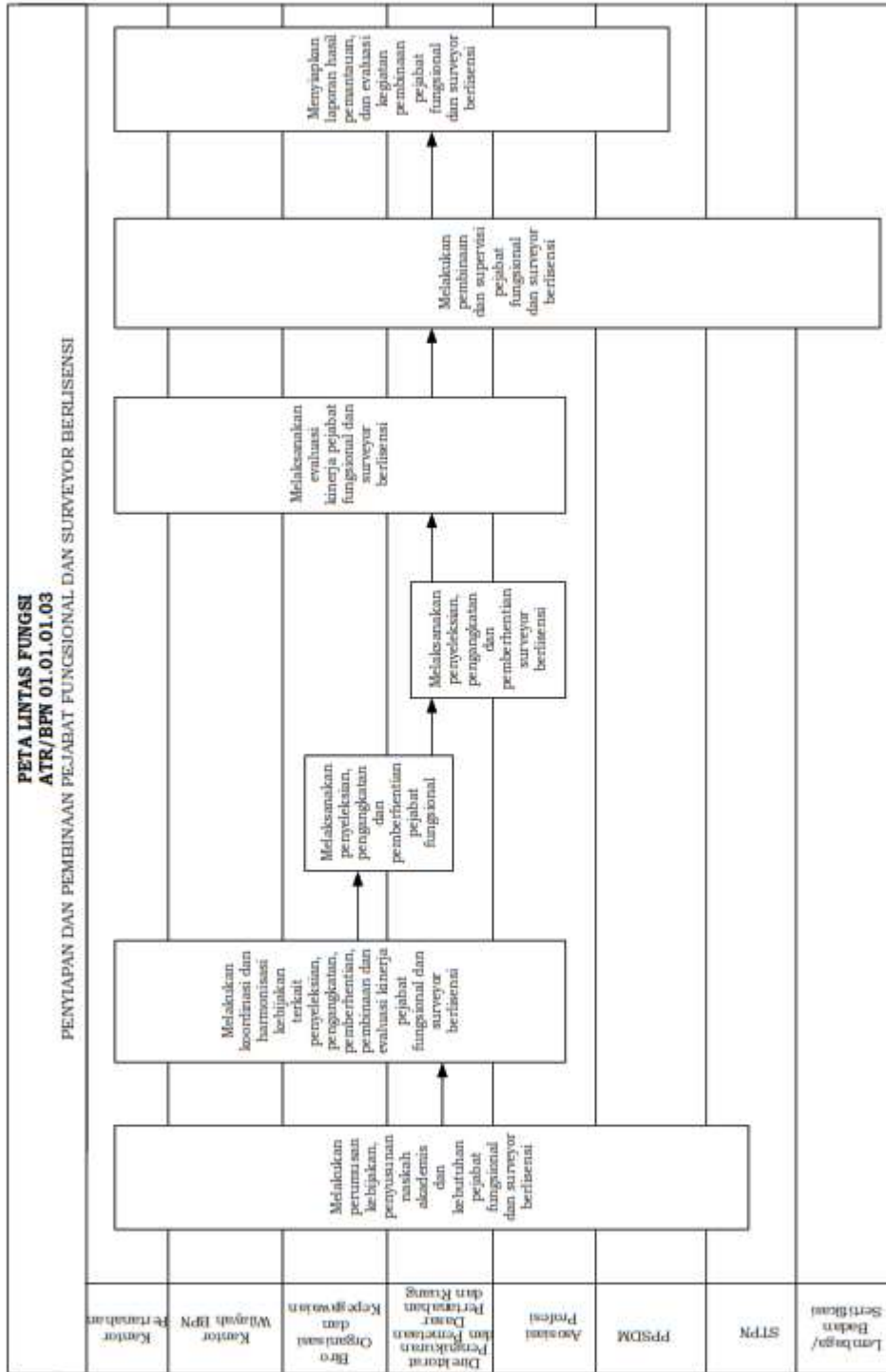


PETA RELASI ATR/BPN 01.01.01 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA DASAR PERTANAHAN DAN SURVEYOR													
ATR/BPN 01.01.01.01 Pelaksanaan Pemetaan dan Pengelolaan Data Dasar	<table border="1"> <tr> <td>Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemertanahan Tanah dan Ruang</td> <td>PUSDATIN</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penanaman Agraria</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Badan Informasi Geospasial</td> <td>LAPAN</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Daerah</td> <td>Masyarakat/Swasta</td> </tr> </table>	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemertanahan Tanah dan Ruang	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Informasi Geospasial	LAPAN	Pemerintah Daerah	Masyarakat/Swasta
Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengembangan Pertanahan												
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemertanahan Tanah dan Ruang	PUSDATIN												
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria												
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan												
Badan Informasi Geospasial	LAPAN												
Pemerintah Daerah	Masyarakat/Swasta												
ATR/BPN 01.01.01.02 Pelaksanaan Pengukuran Dasar dan Peralatan	<table border="1"> <tr> <td>Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td>Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat Umum dan Swasta</td> <td></td> </tr> </table>	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Informasi Geospasial	Masyarakat Umum dan Swasta							
Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN												
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Informasi Geospasial												
Masyarakat Umum dan Swasta													
ATR/BPN 01.01.01.03 Penyisipan dan Pembinaan Pejabat Fungsional dan Surveyor Berlisensi	<table border="1"> <tr> <td>PPSDM</td> <td>Biro Organisasi dan Kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>STPN</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Lembaga/Badan Sertifikasi</td> </tr> <tr> <td>Asosiasi Profesi</td> <td></td> </tr> </table>	PPSDM	Biro Organisasi dan Kepegawaian	STPN	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Lembaga/Badan Sertifikasi	Asosiasi Profesi					
PPSDM	Biro Organisasi dan Kepegawaian												
STPN	Kantor Wilayah BPN												
Kantor Pertanahan	Lembaga/Badan Sertifikasi												
Asosiasi Profesi													

- 93 -

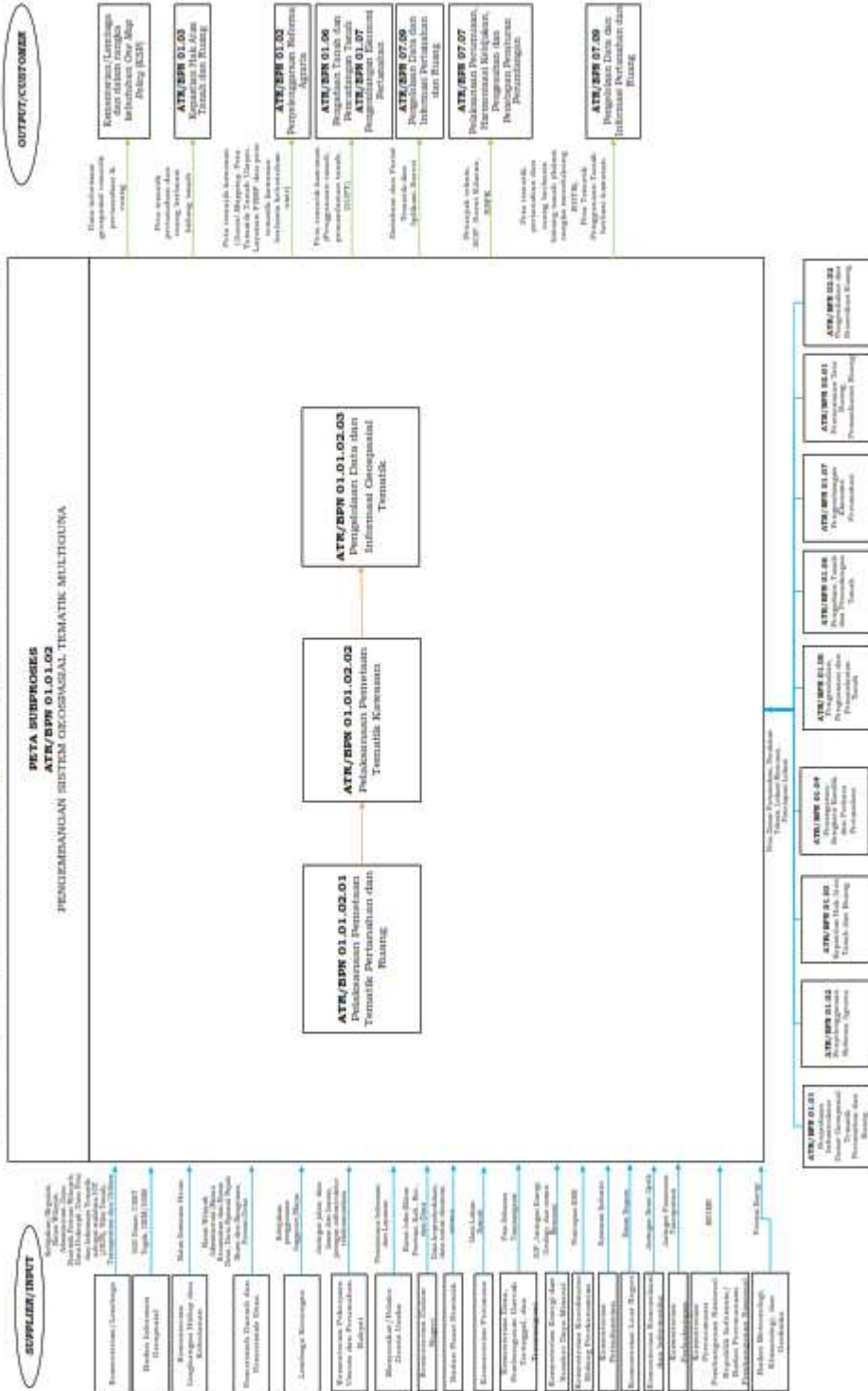


- 94 -

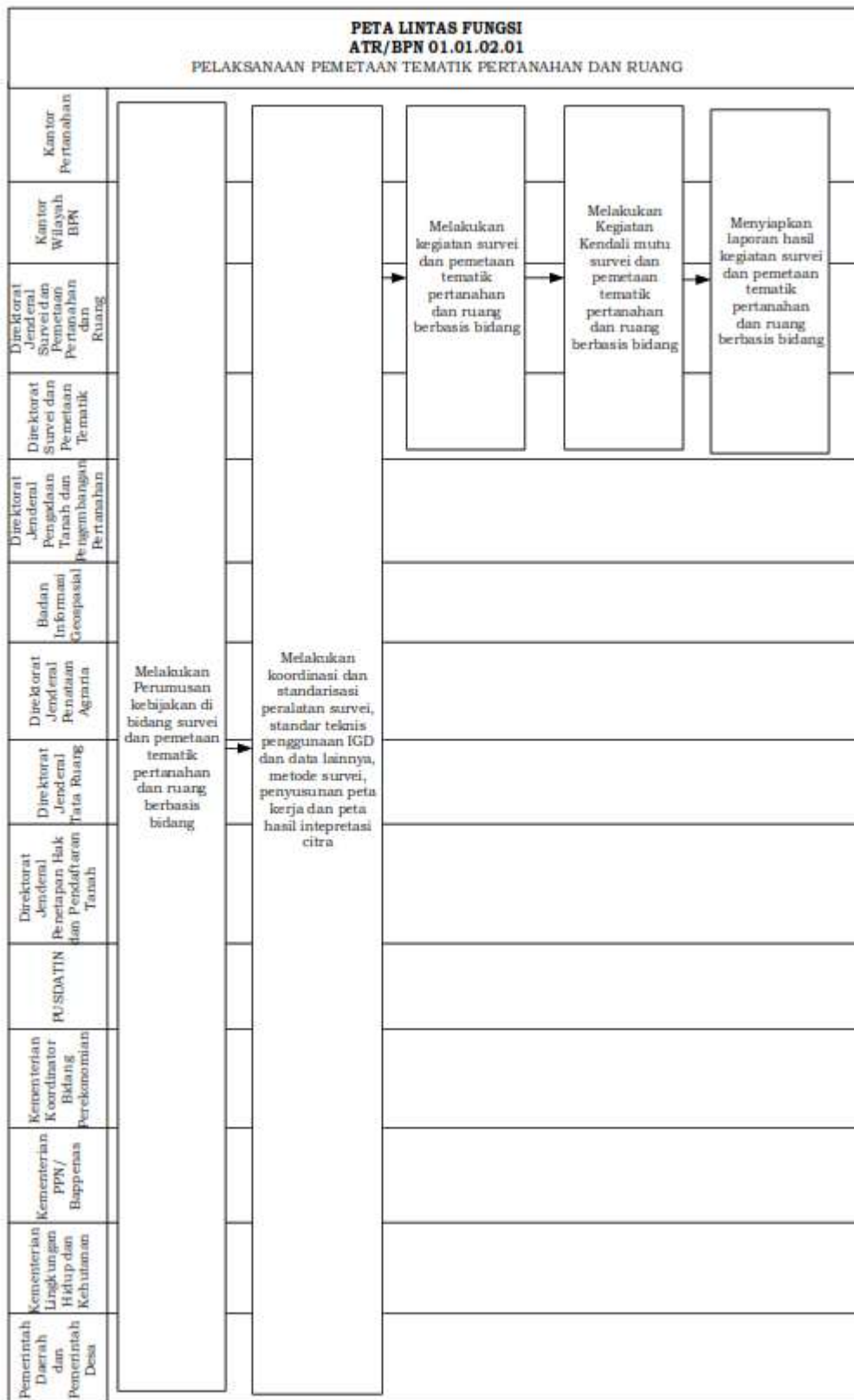


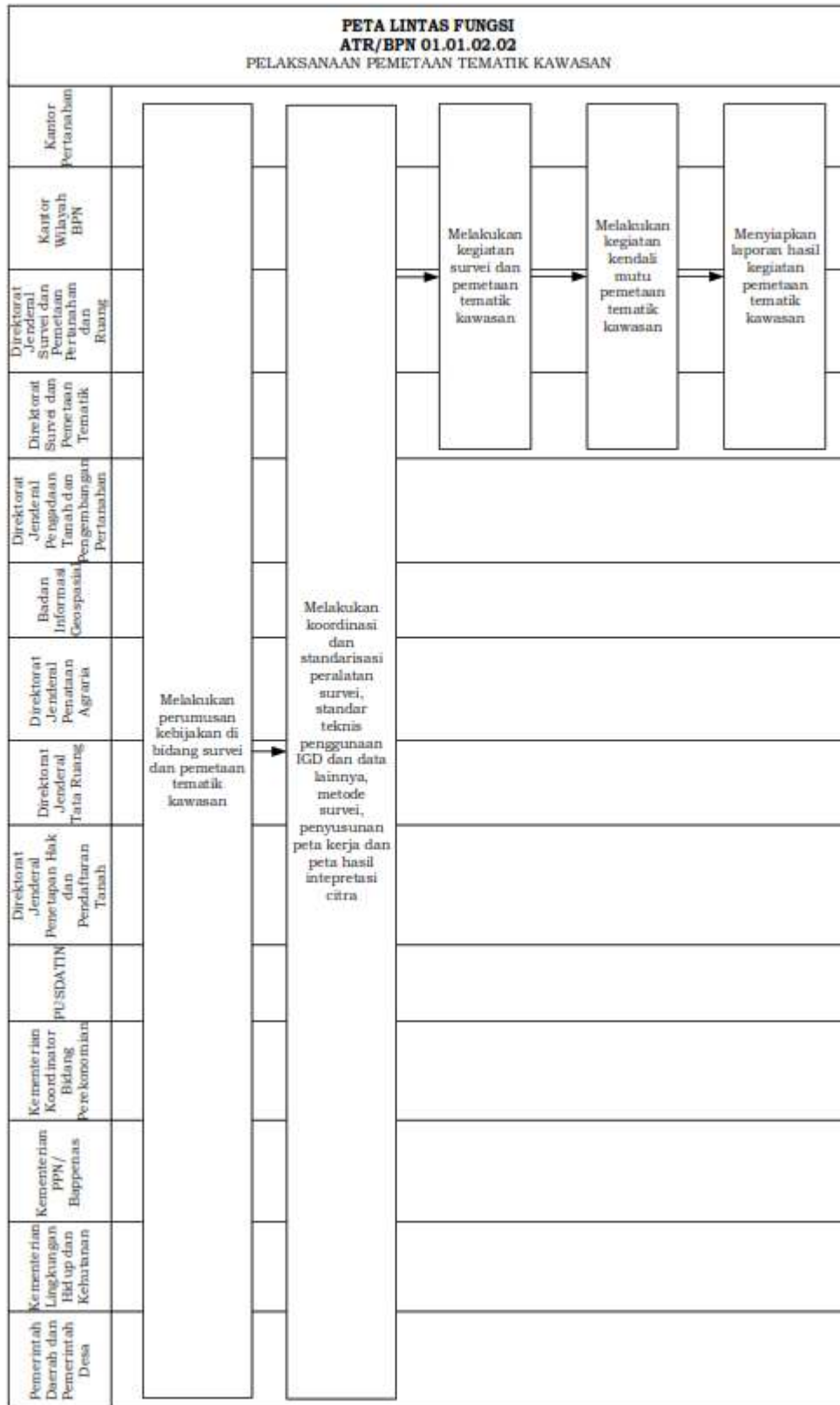
- 95 -

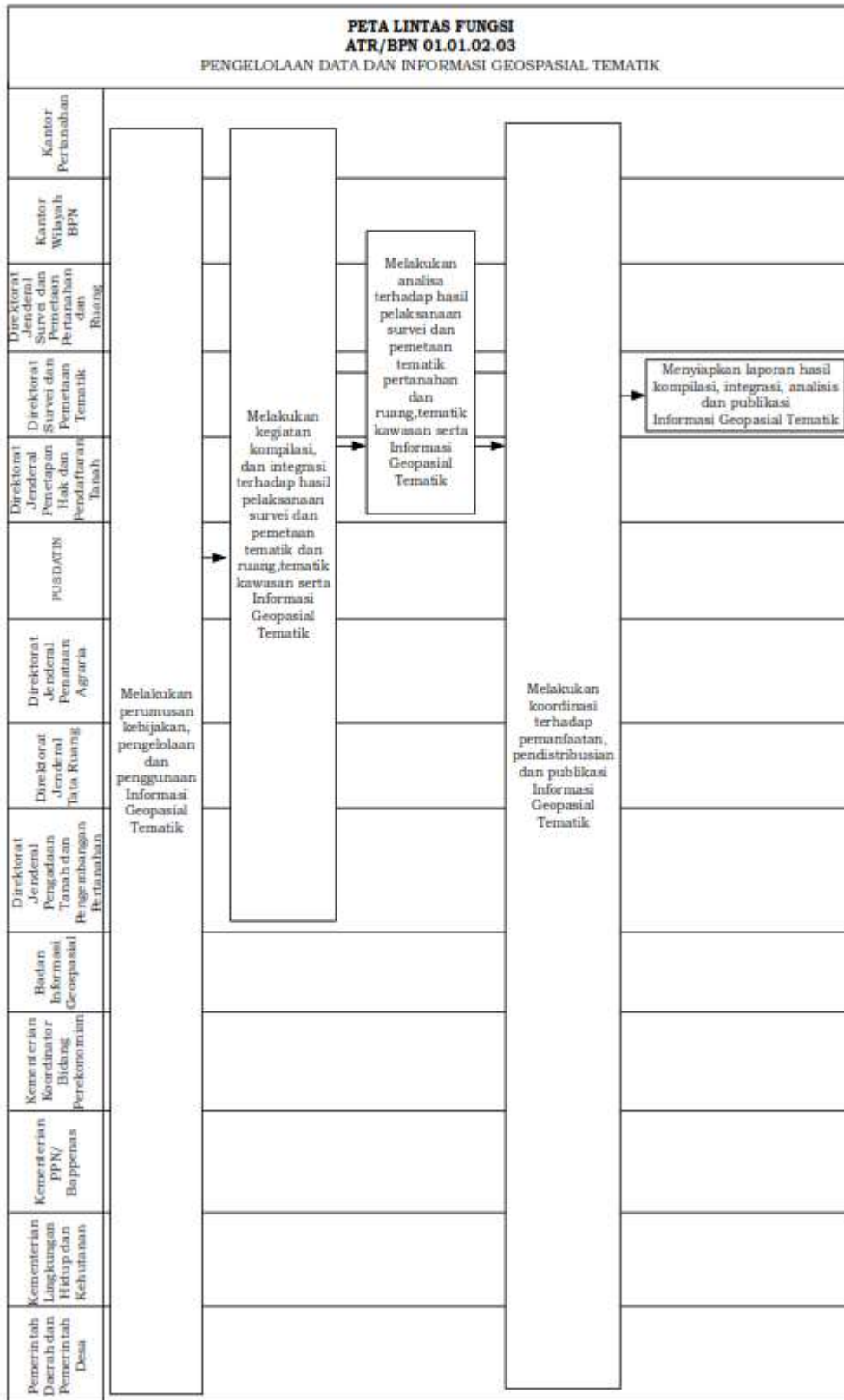
3.3.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik



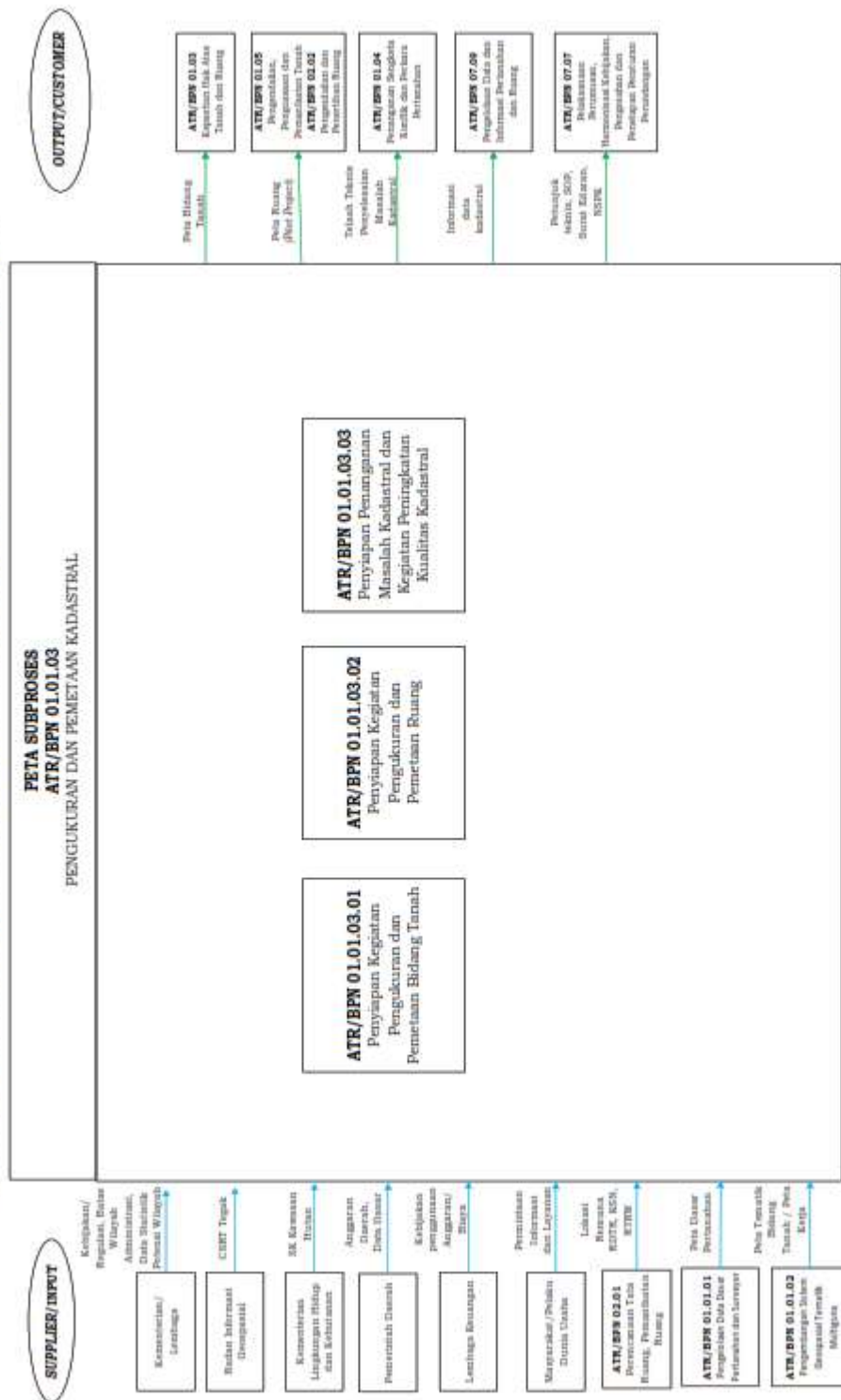
PETA RELASI ATR/BPN 01.01.02 PENGEMBANGAN SISTEM GEOSPASIAL TEMATIK MULTIGUNA																																												
ATR/BPN 01.01.02.01 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang	ATR/BPN 01.01.02.02 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Kawasan	ATR/BPN 01.01.02.03 Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik																																										
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penanaman Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan</td> <td style="text-align: center;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian PPN/Bappenas</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa</td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	Badan Informasi Geospasial	Kementerian PPN/Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penanaman Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan</td> <td style="text-align: center;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian PPN/Bappenas</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa</td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	Badan Informasi Geospasial	Kementerian PPN/Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penanaman Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan</td> <td style="text-align: center;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian PPN/Bappenas</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa</td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	Badan Informasi Geospasial	Kementerian PPN/Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah																																											
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria																																											
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik																																											
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN																																											
Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																																											
Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	Badan Informasi Geospasial																																											
Kementerian PPN/Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa																																											
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah																																											
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria																																											
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik																																											
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN																																											
Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																																											
Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	Badan Informasi Geospasial																																											
Kementerian PPN/Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa																																											
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah																																											
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria																																											
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik																																											
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN																																											
Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																																											
Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	Badan Informasi Geospasial																																											
Kementerian PPN/Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa																																											





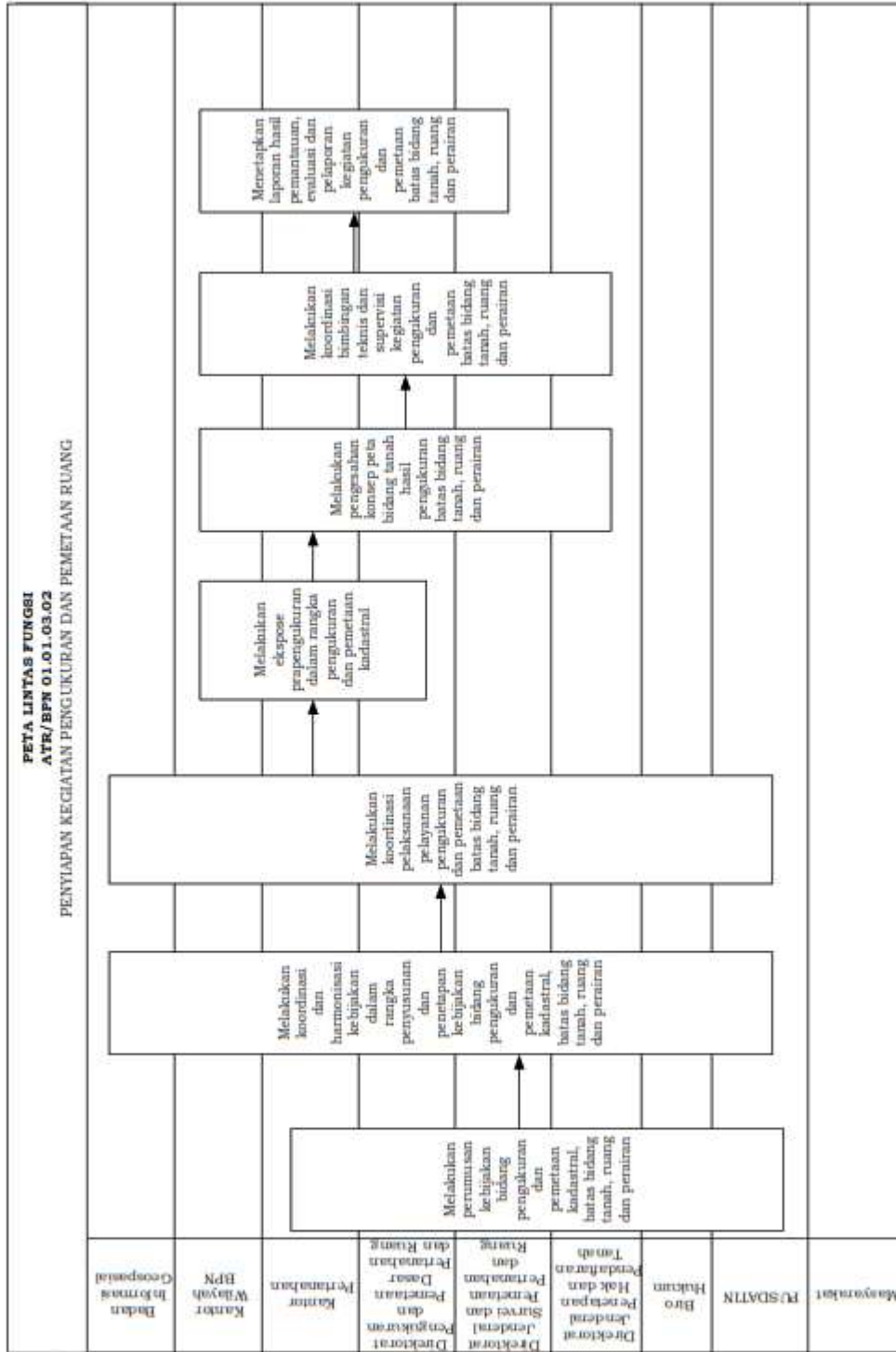


3.3.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral



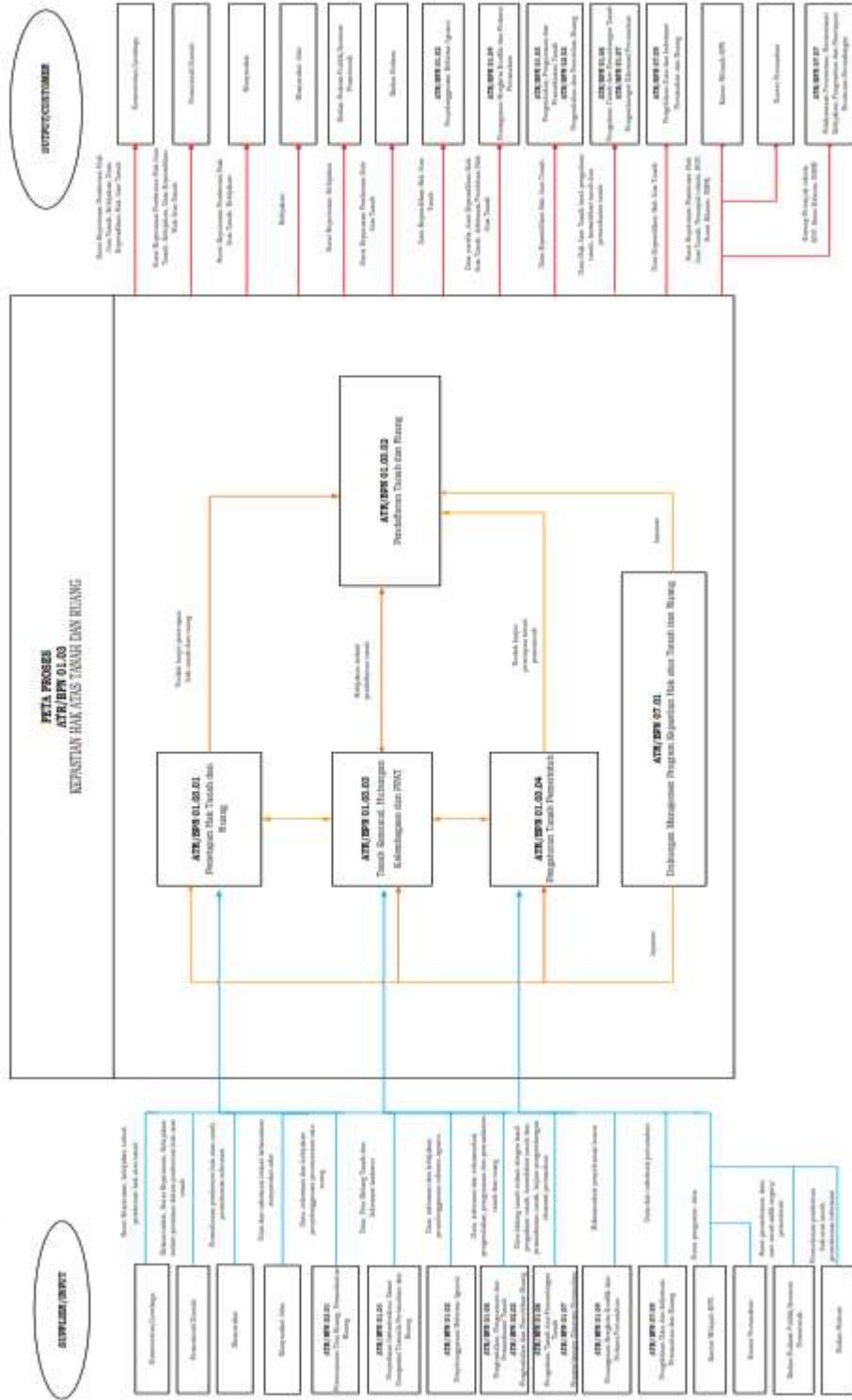
PETA RELASI ATR/BPN 01.01.03 PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL											
ATR/BPN 01.01.03.01 Penyajian Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Informasi Geospasial	Masyarakat	
PUSDATIN	Biro Hukum										
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang										
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN										
Kantor Pertanahan	Badan Informasi Geospasial										
Masyarakat											
ATR/BPN 01.01.03.02 Penyajian Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Ruang	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Informasi Geospasial	Masyarakat	
PUSDATIN	Biro Hukum										
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang										
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN										
Kantor Pertanahan	Badan Informasi Geospasial										
Masyarakat											
ATR/BPN 01.01.03.03 Penyajian Perancangan Masalah Kadastral dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kadastral	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Informasi Geospasial	Masyarakat	
PUSDATIN	Biro Hukum										
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang										
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN										
Kantor Pertanahan	Badan Informasi Geospasial										
Masyarakat											

- 103 -

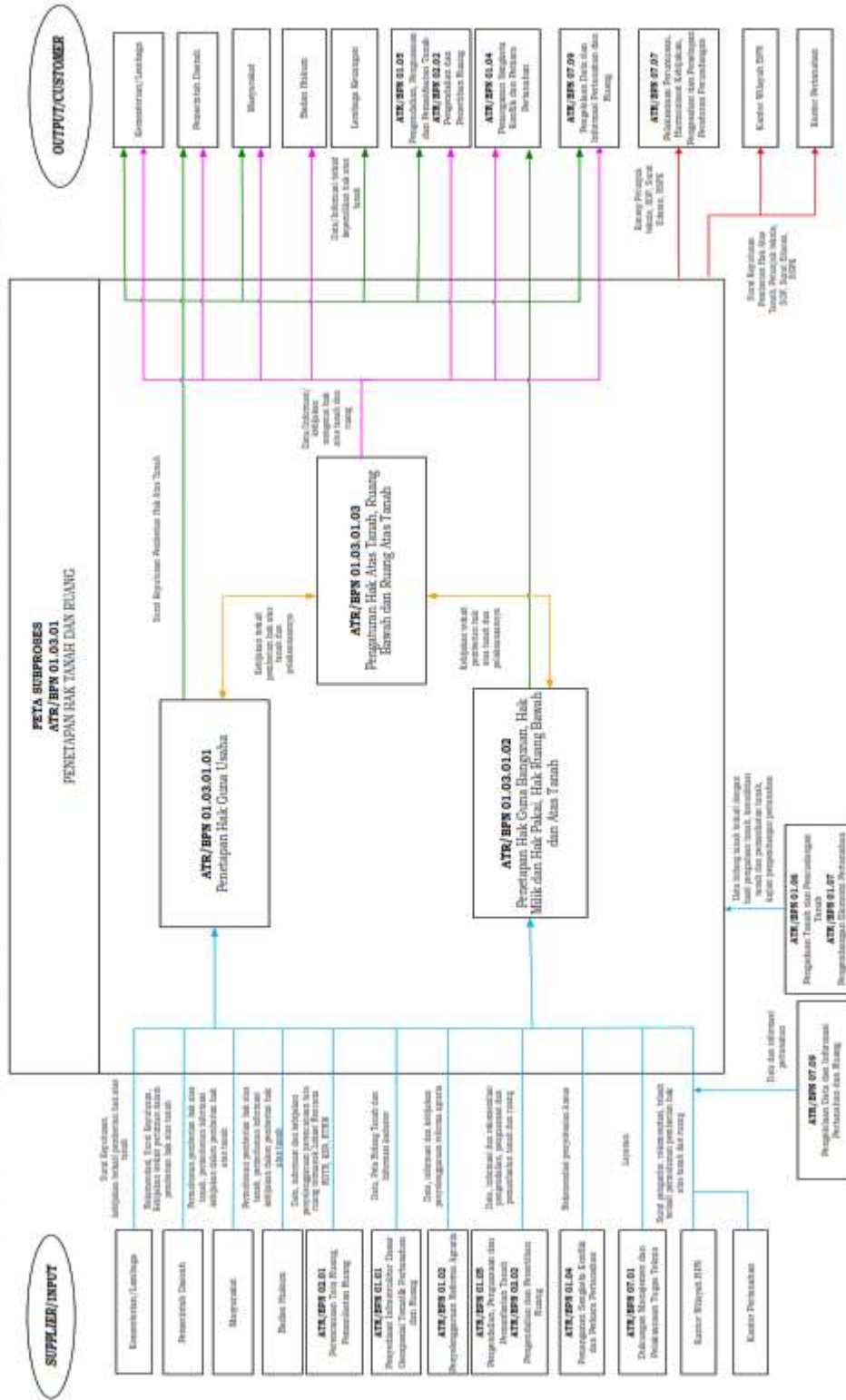


PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.03.03 PENYIAPAN PEMANGANAN MASALAH KADASTRAL DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KADASTRAL	
Badan Kerjasama Cooperatif	
Kantor Wilayah EPN	
Kantor Perbatasan	
Direktorat Pengukuran dan Pertemuan Dasar Ruang	Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan bidang pengukuran ruang dan kegiatan penanganan masalah masalah kadastral
Direktorat Survei dan Pertemuan Ruang	Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan ruang
Direktorat Jendral Perencanaan Tanah	Melakukan ekapose pem traahan permasalahan kadastral
Biro Hukum	
PUSDATN	
Masayarakat	Menetapkan laporan hasil inventarisasi permasalahan kadastral

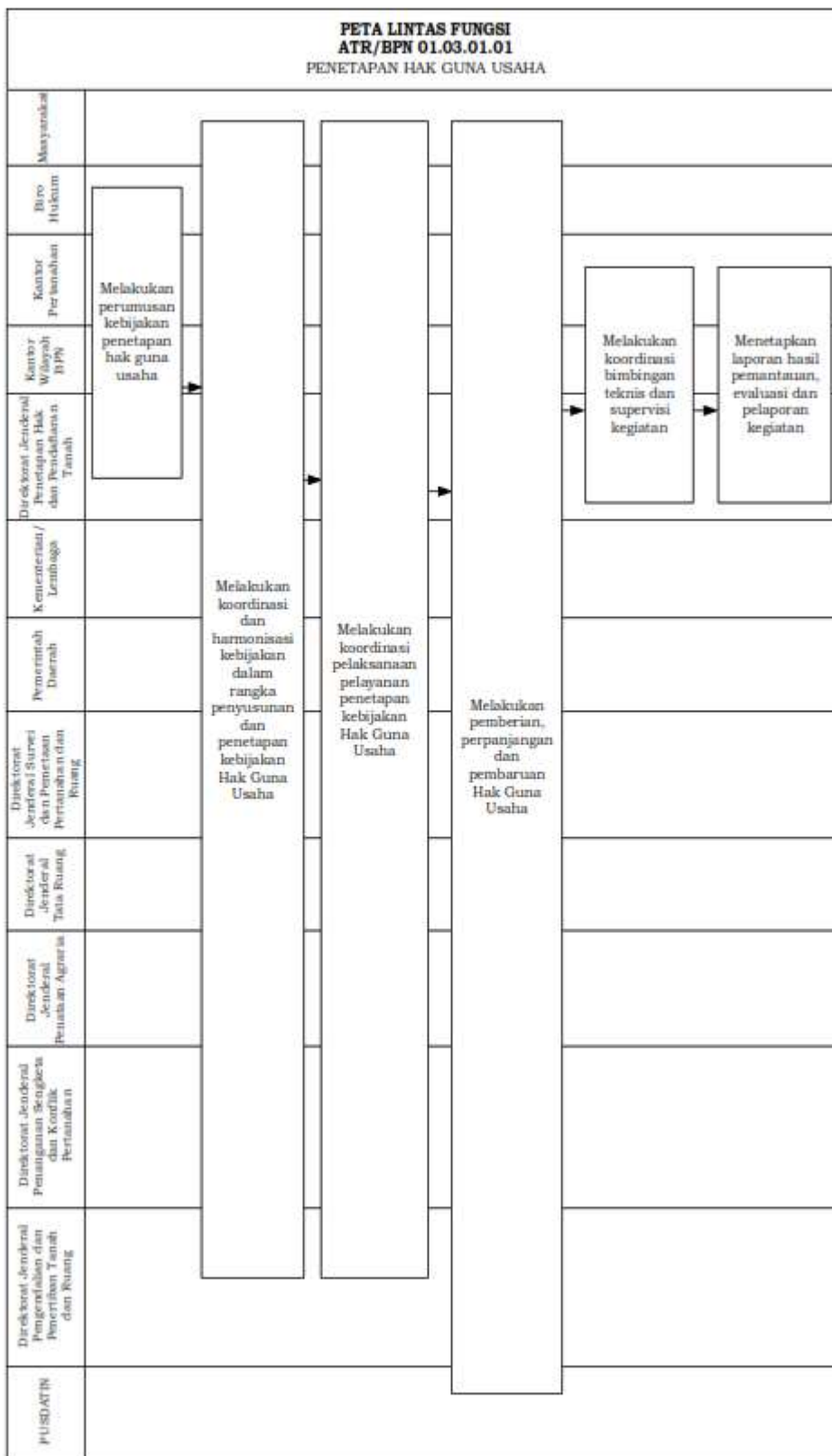
3.4. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

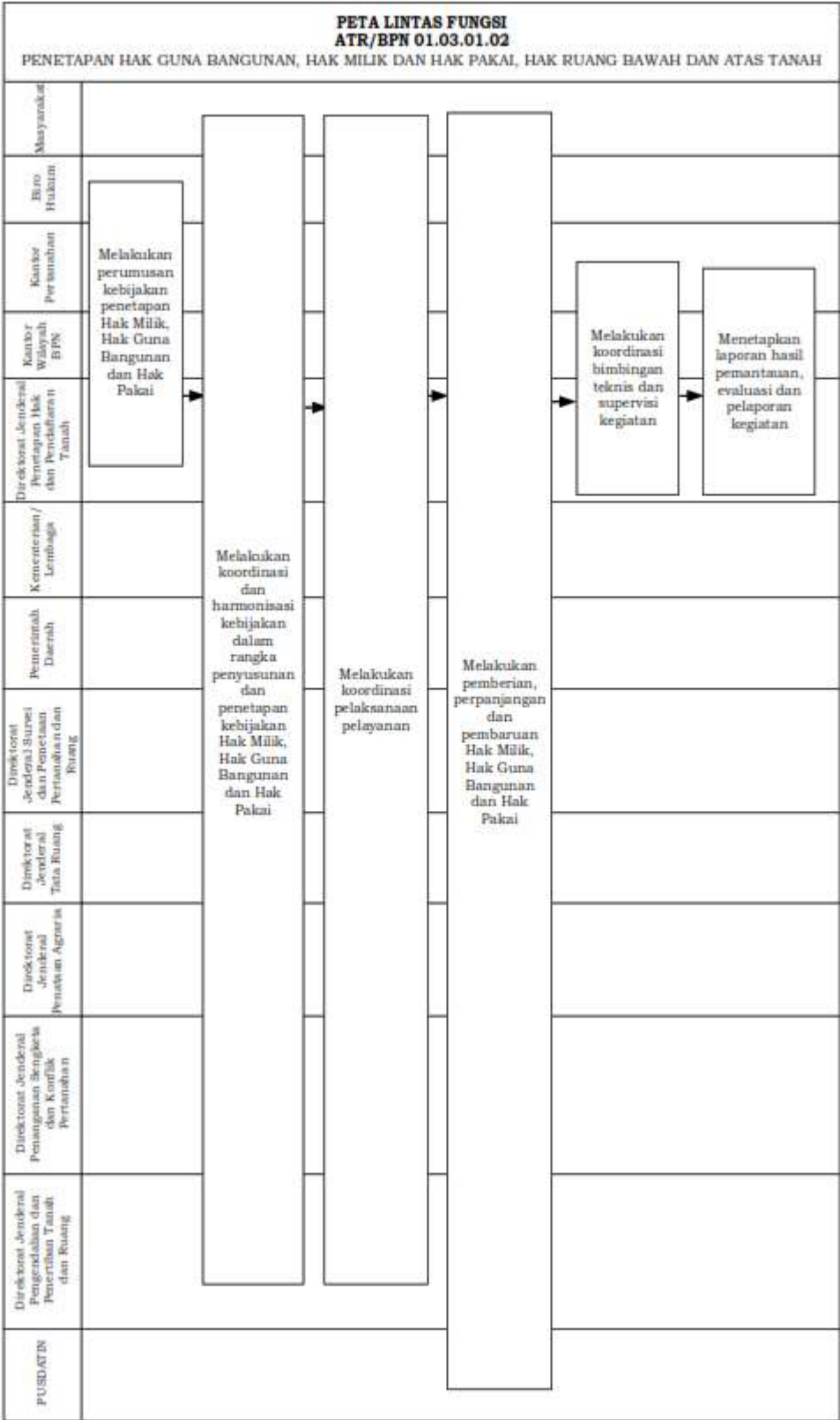


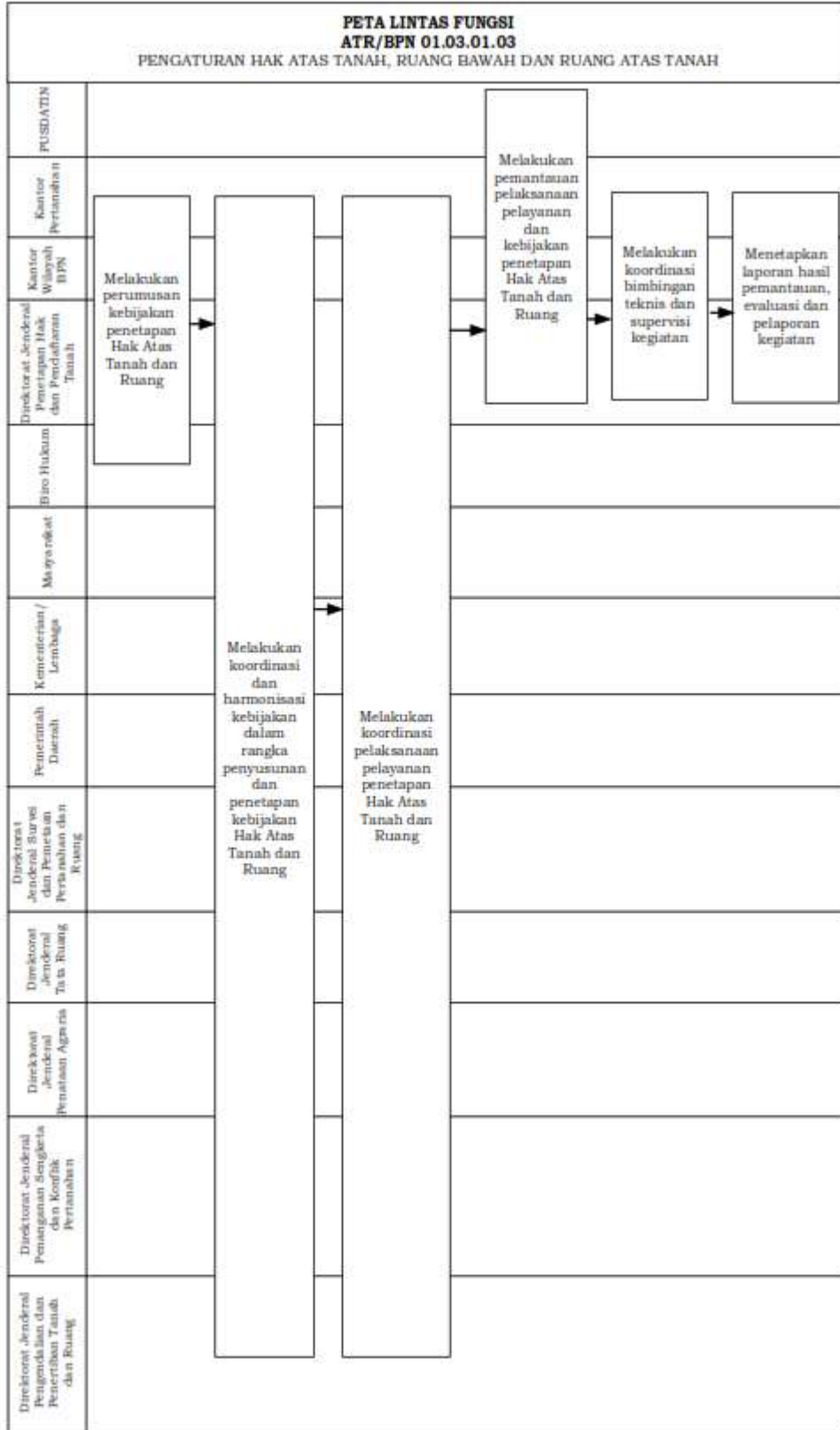
3.4.1.1. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang



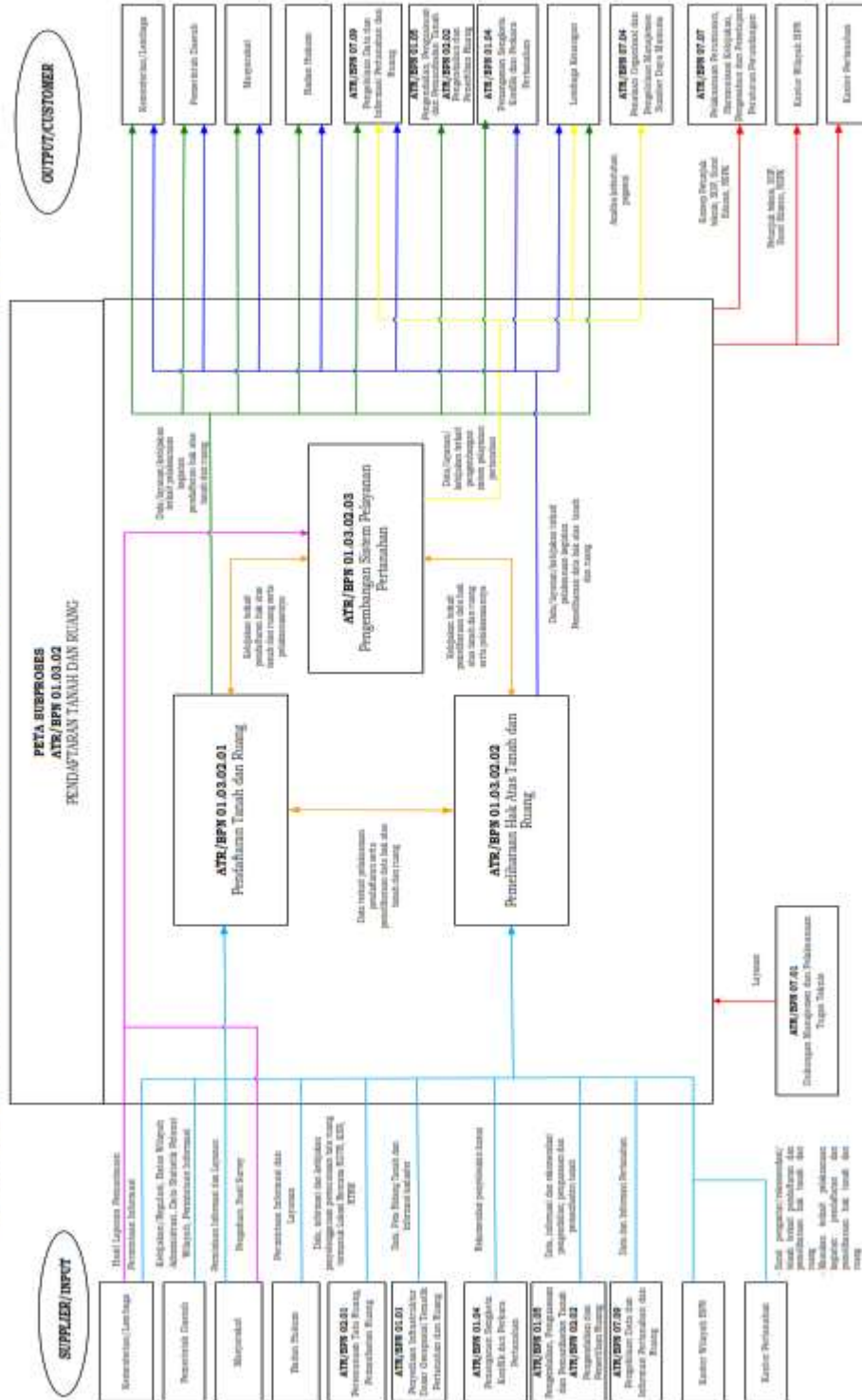
PETA RELASI ATR/BPN 01.03.01 PENETAPAN HAK TANAH DAN RUANG															
ATR/BPN 01.03.01.01 Penetapan Hak Guna Usaha	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian/Lembaga</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum														
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan														
Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah														
Masyarakat															
ATR/BPN 01.03.01.02 Penetapan Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Pakai, Hak Ruang Bawah dan Atas Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian/Lembaga</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum														
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan														
Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah														
Masyarakat															
ATR/BPN 01.03.01.03 Pengaturan Hak Atas Tanah, Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian/Lembaga</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum														
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan														
Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah														
Masyarakat															



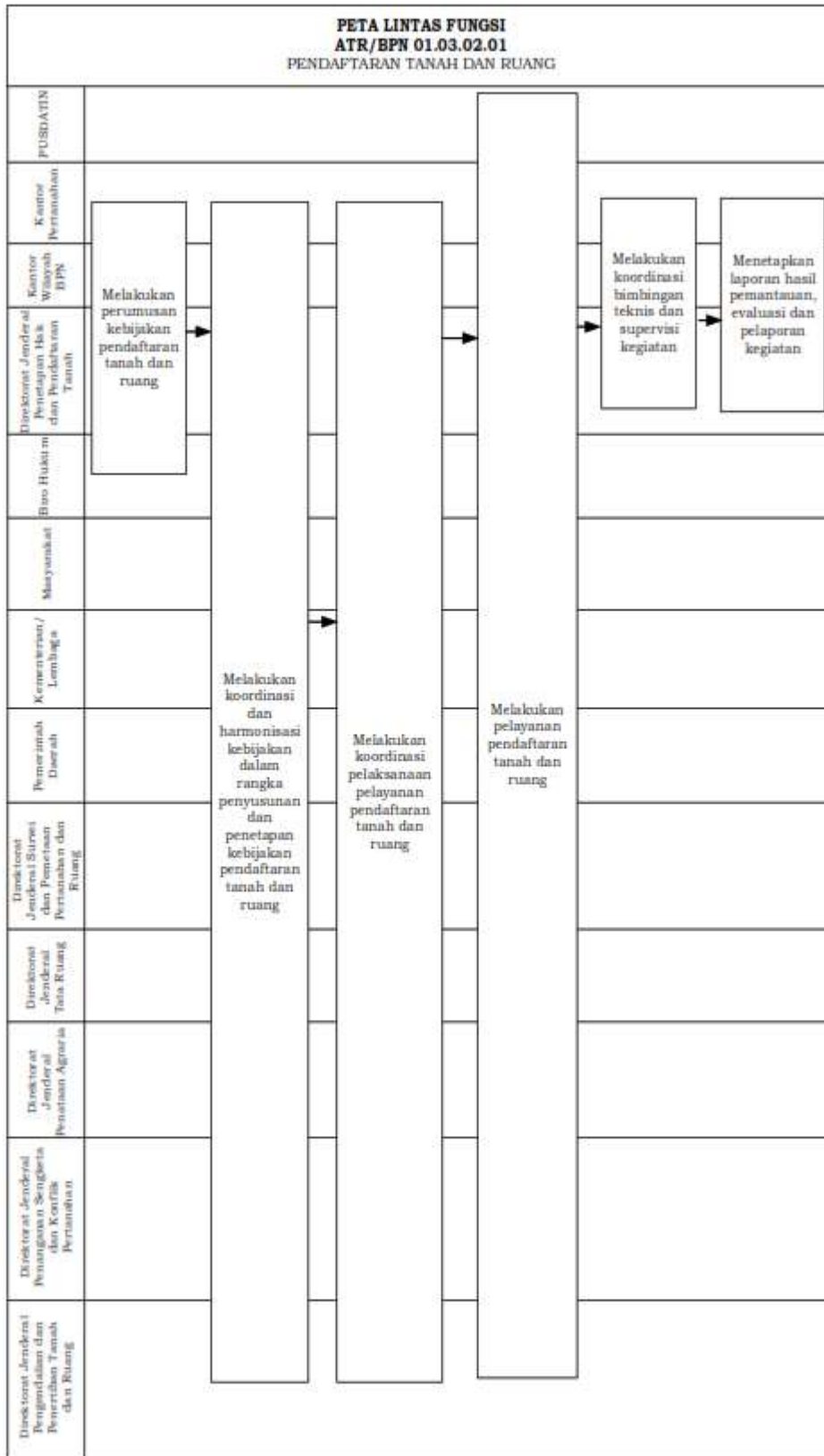


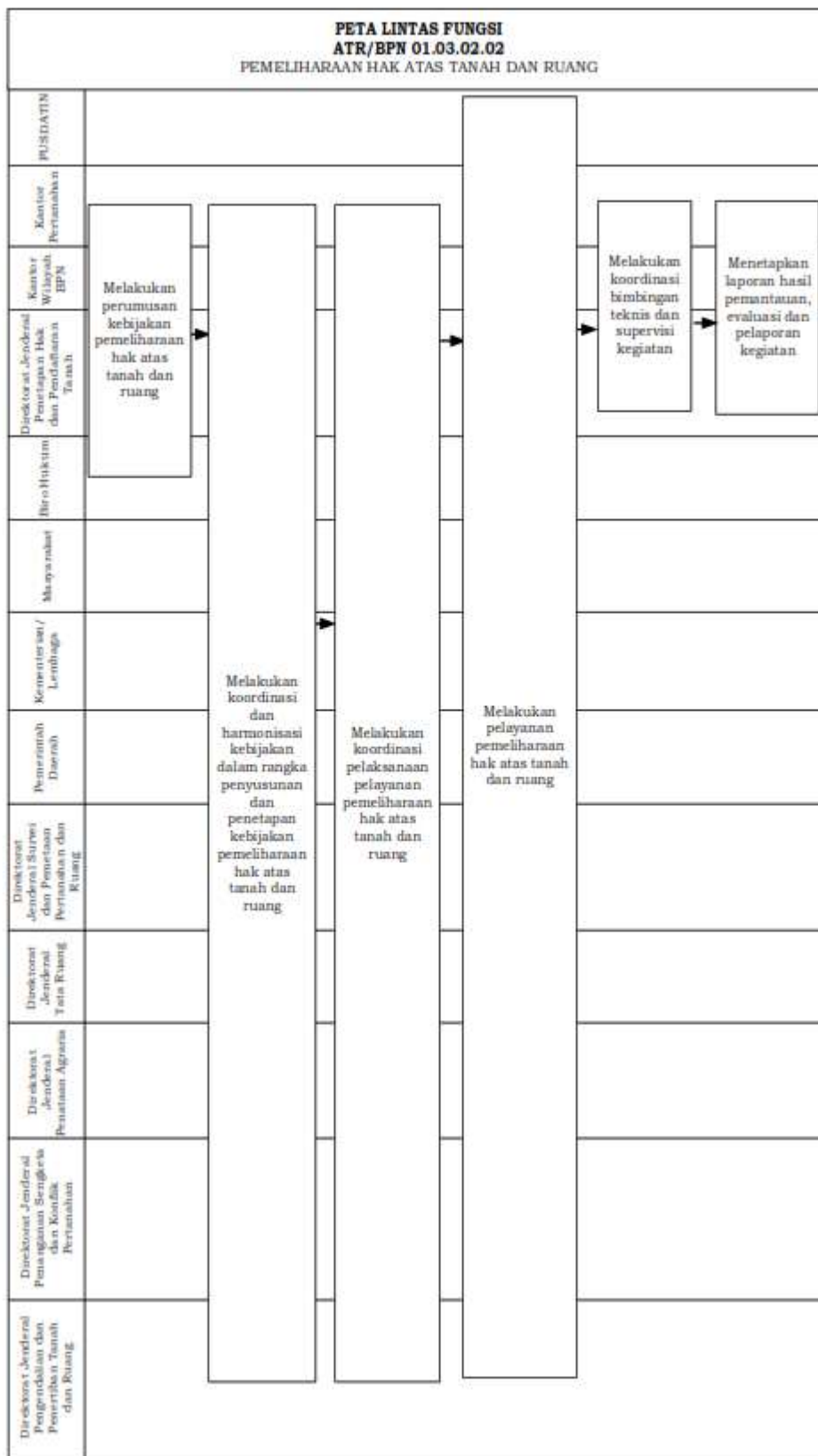


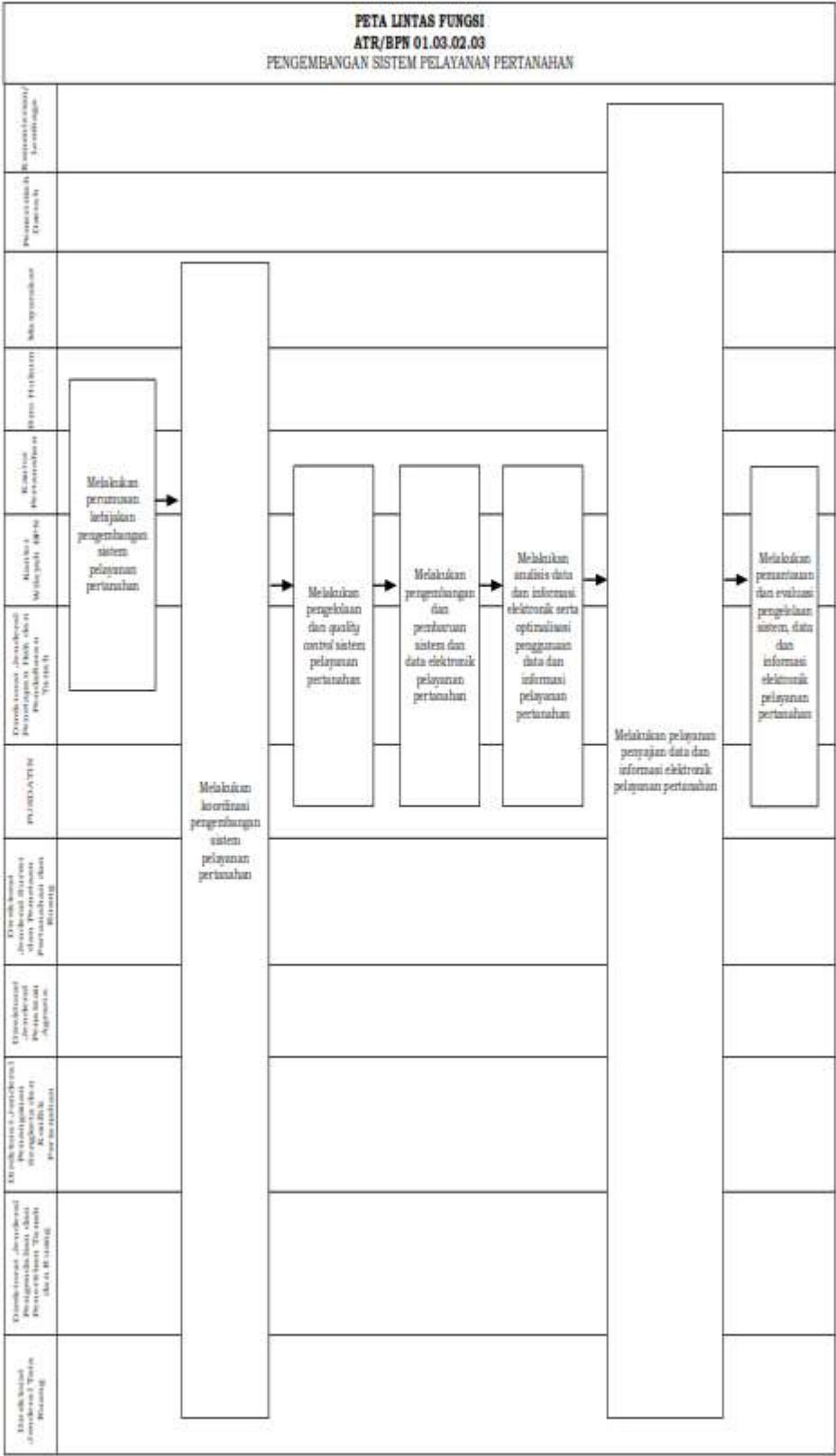
3.4.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang



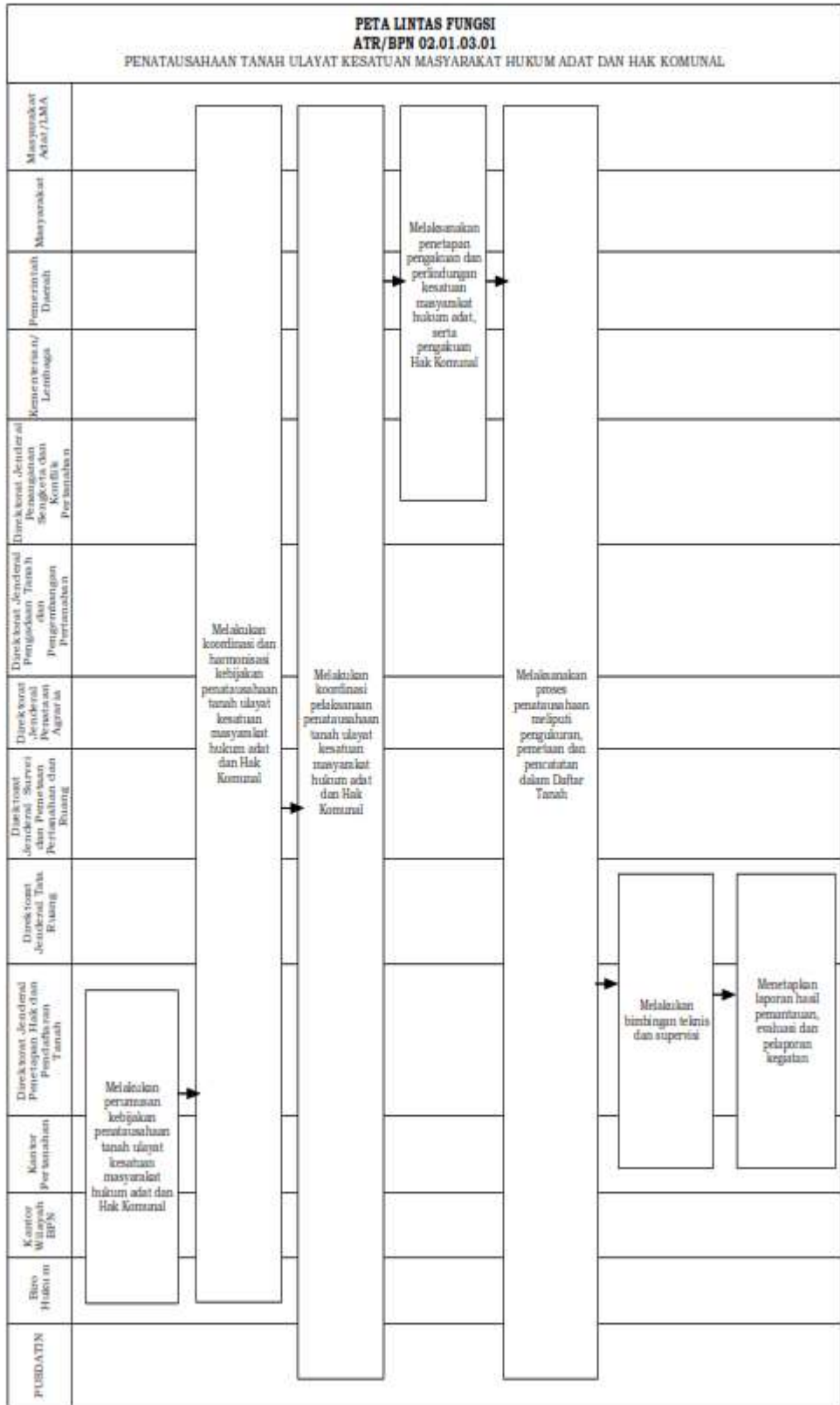
PETA RELASI ATR/BPN 01.03.02 PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG															
ATR/BPN 01.03.02.01 Pendaftaran Tanah dan Ruang	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td>Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum														
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan														
Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah														
Masyarakat															
ATR/BPN 01.03.02.02 Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td>Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum														
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan														
Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah														
Masyarakat															
ATR/BPN 01.03.02.03 Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td>Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang														
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum														
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan														
Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah														
Masyarakat															



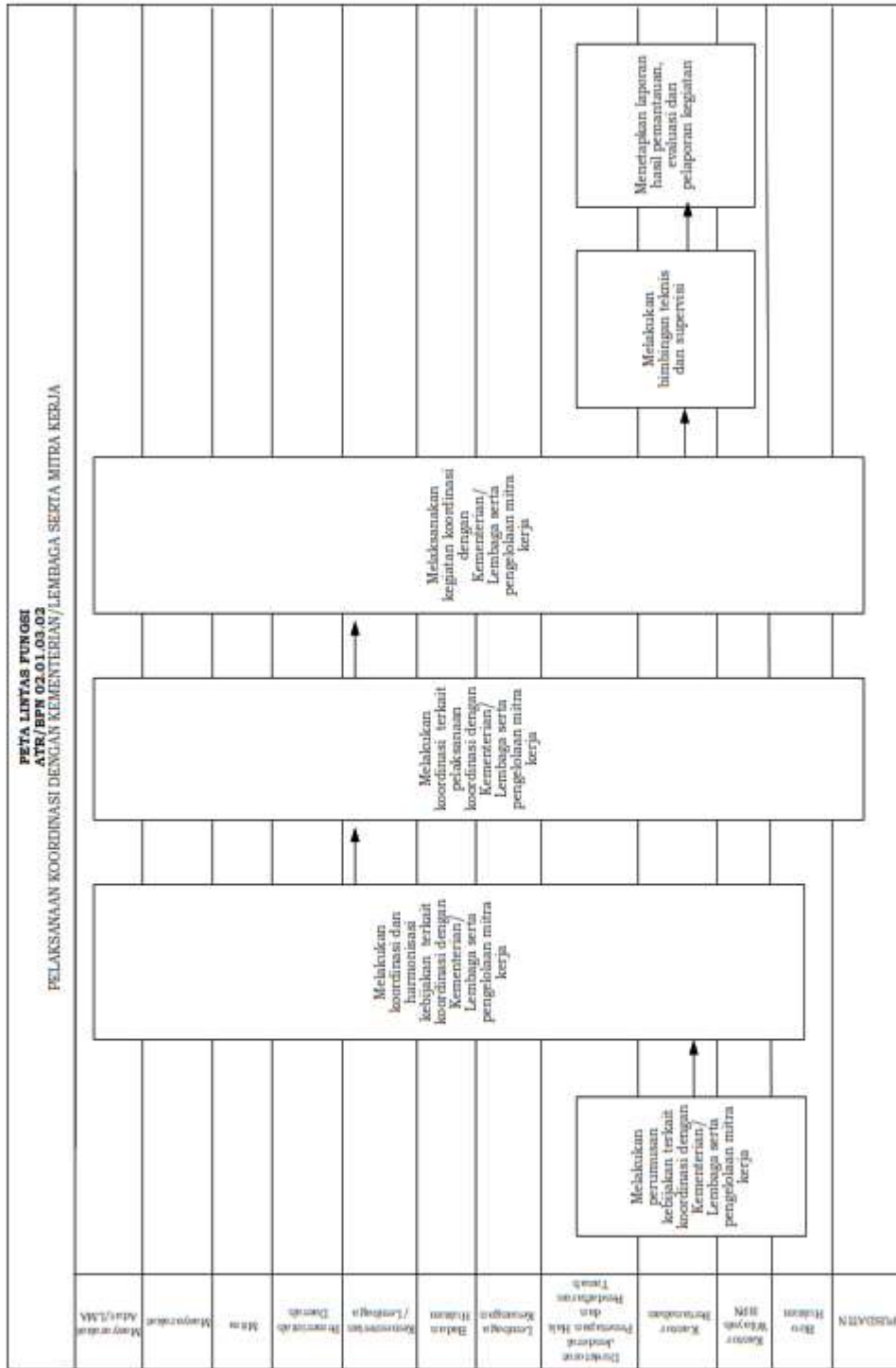




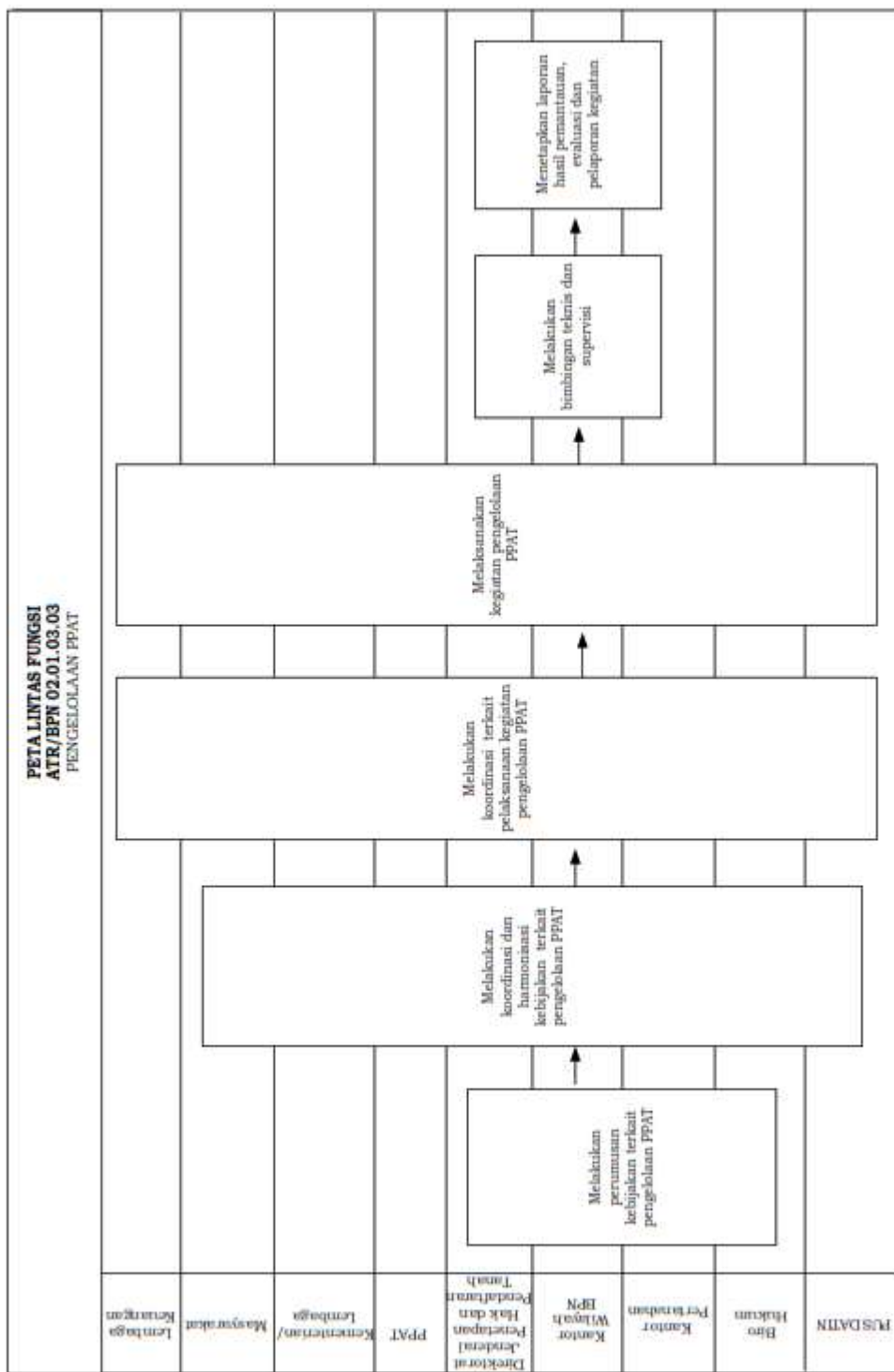
PETA RELASI ATR/BPN 01.03.03 TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT															
ATR/BPN 02.01.03.01 Penatusahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Dirjen Pertanahan Agraria</td> <td>Deputi Dirjen Tanah Ruang</td> </tr> <tr> <td>Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td>Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Daerah</td> <td>Kementerian/Lembaga</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td>Masyarakat Adat/LMA</td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Dirjen Pertanahan Agraria	Deputi Dirjen Tanah Ruang	Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Biro Hukum	Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Kantor Pertanahan	Kantor Wilayah BPN	Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Masyarakat	Masyarakat Adat/LMA
PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan														
Dirjen Pertanahan Agraria	Deputi Dirjen Tanah Ruang														
Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan														
Biro Hukum	Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan														
Kantor Pertanahan	Kantor Wilayah BPN														
Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga														
Masyarakat	Masyarakat Adat/LMA														
ATR/BPN 02.01.03.02 Pelaksanaan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Mitra Kerja	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Kementerian/Lembaga</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Daerah</td> <td>Masyarakat Adat/LMA</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td>Badan Hukum</td> </tr> <tr> <td>Lembaga Keuangan</td> <td>Mitra</td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	Masyarakat Adat/LMA	Masyarakat	Badan Hukum	Lembaga Keuangan	Mitra		
PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan														
Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN														
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga														
Pemerintah Daerah	Masyarakat Adat/LMA														
Masyarakat	Badan Hukum														
Lembaga Keuangan	Mitra														
ATR/BPN 02.01.03.03 Pengelolaan PPAT	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Kementerian/Lembaga</td> </tr> <tr> <td>Lembaga Keuangan</td> <td>Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>PPAT</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Lembaga Keuangan	Masyarakat	PPAT					
PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan														
Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN														
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga														
Lembaga Keuangan	Masyarakat														
PPAT															



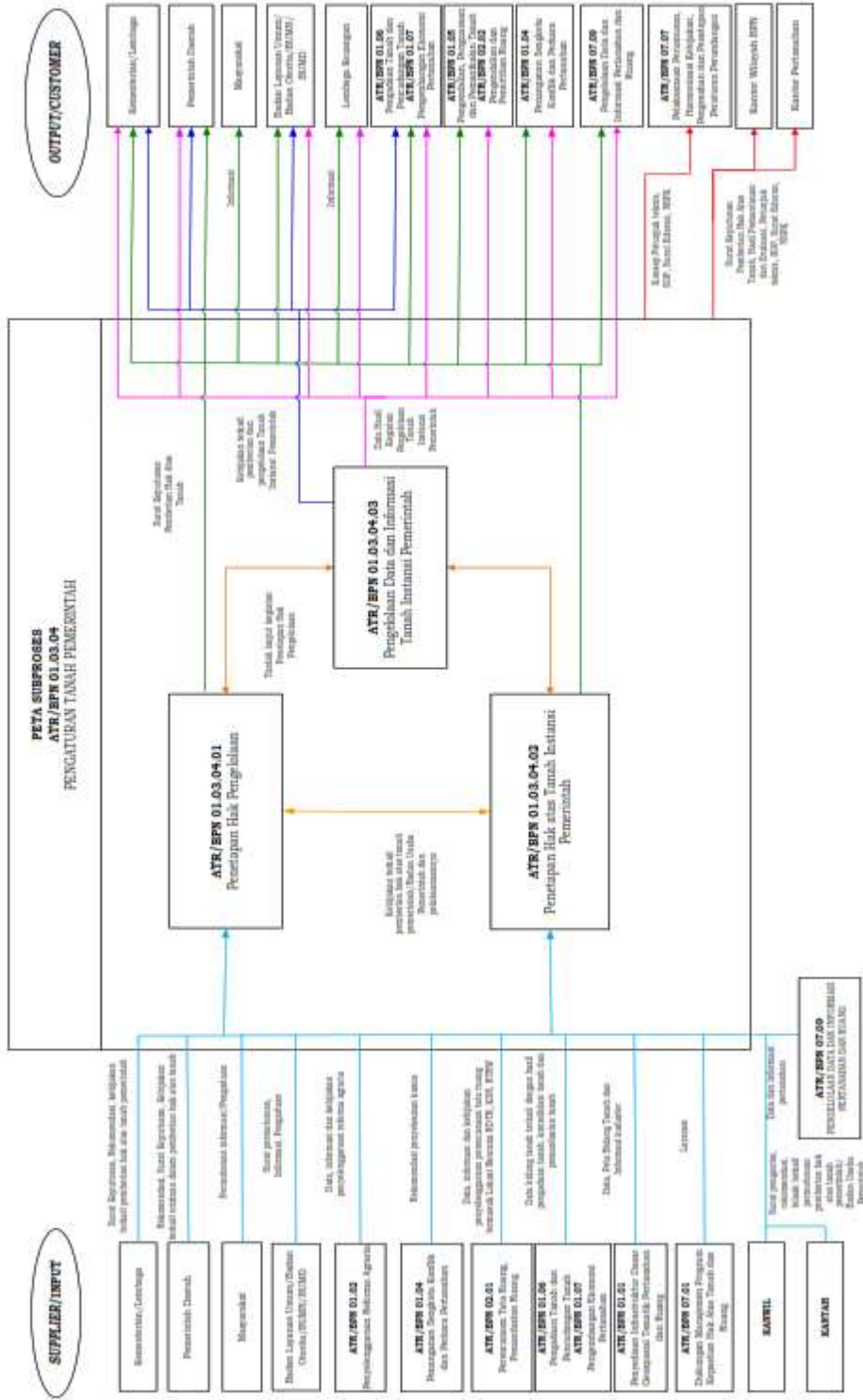
- 119 -



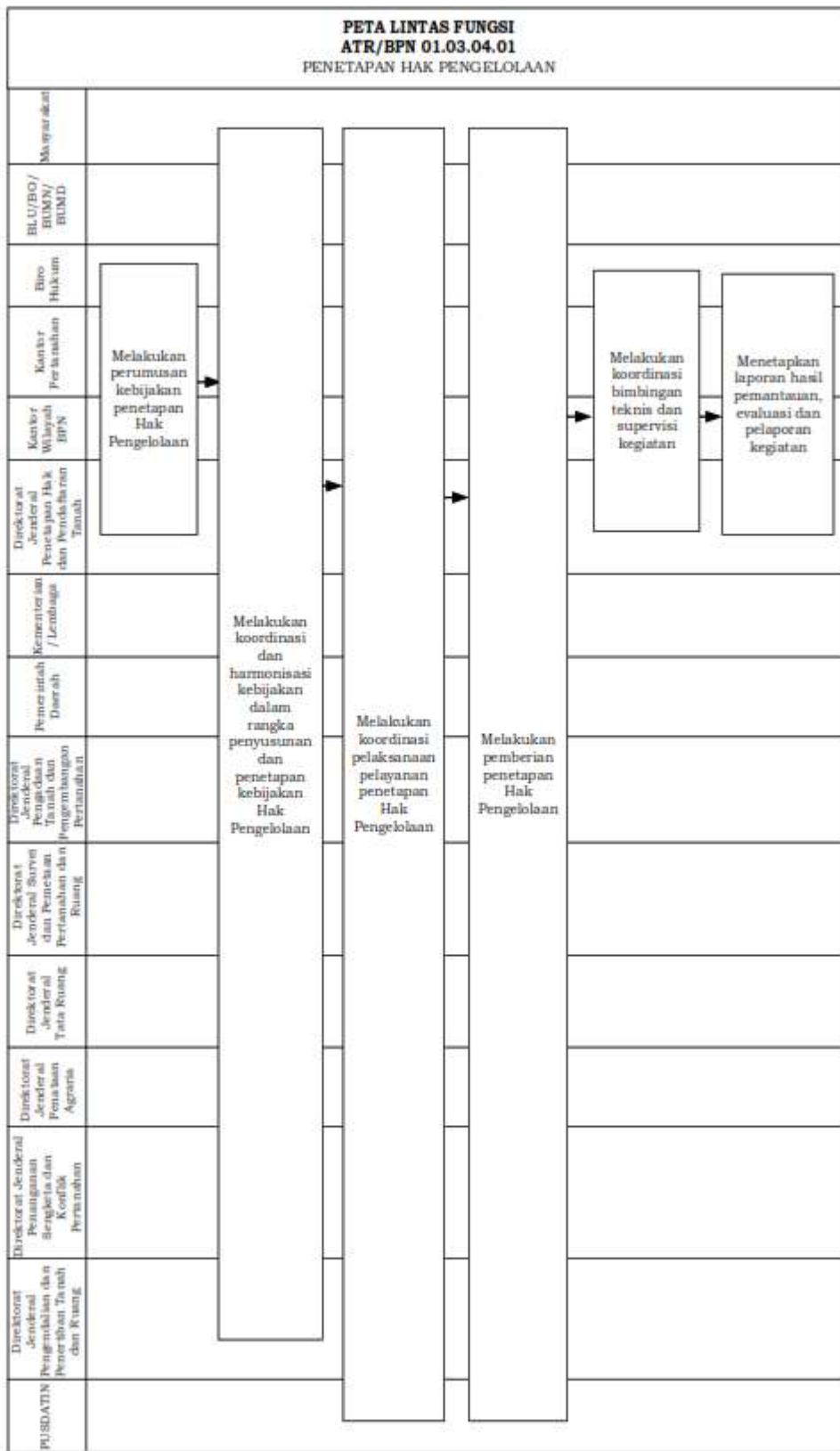
- 120 -

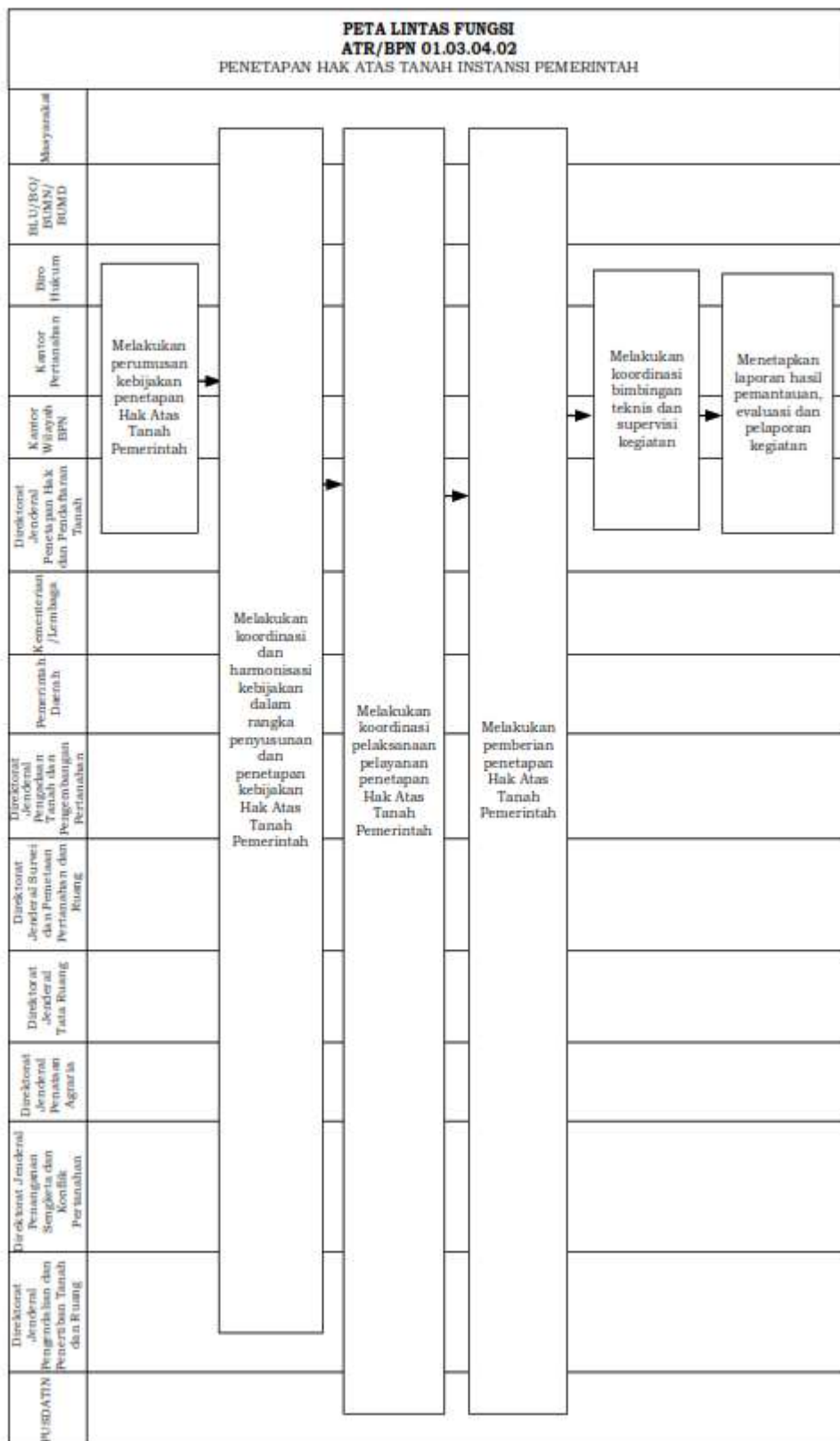


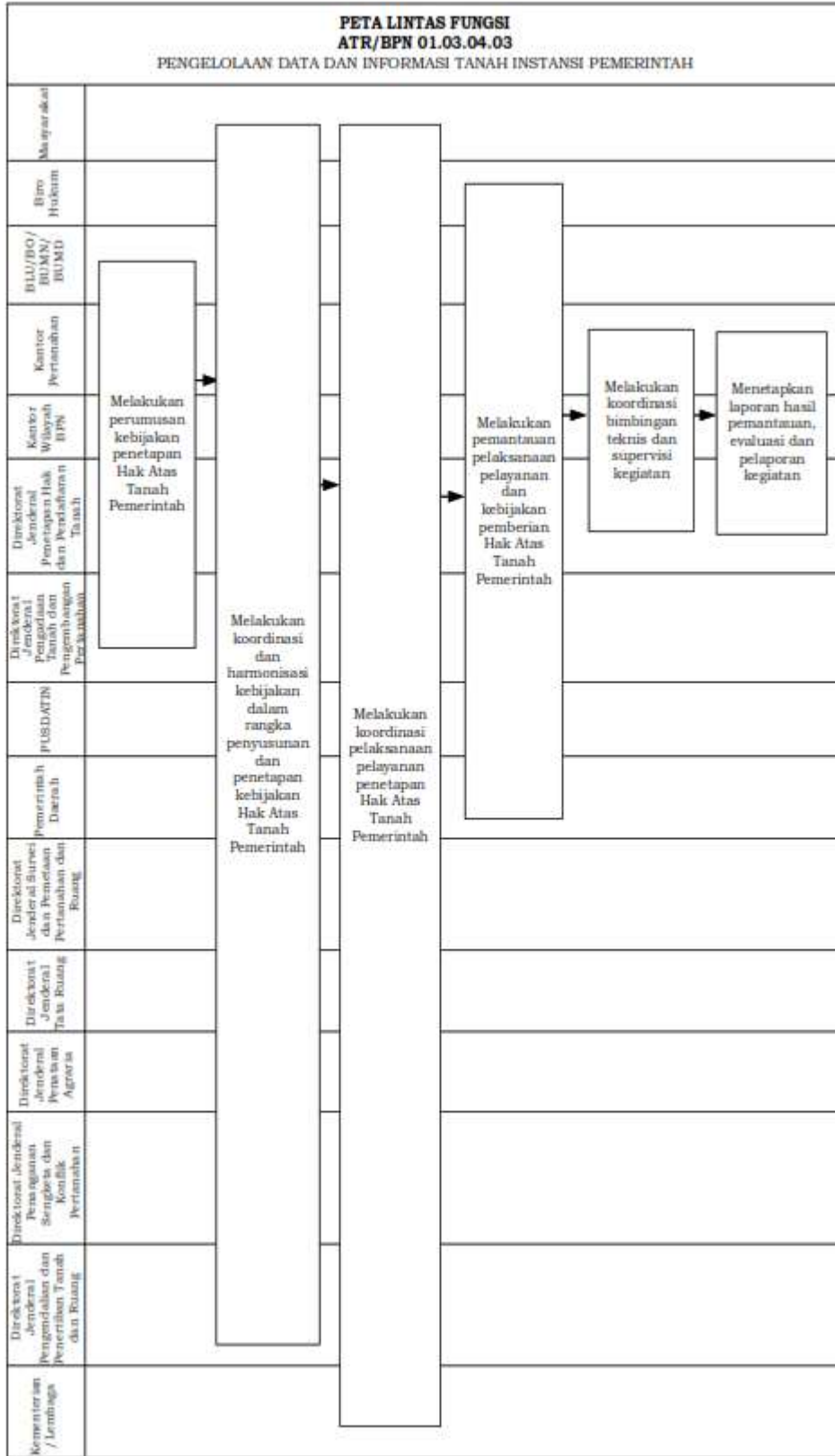
3.4.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah



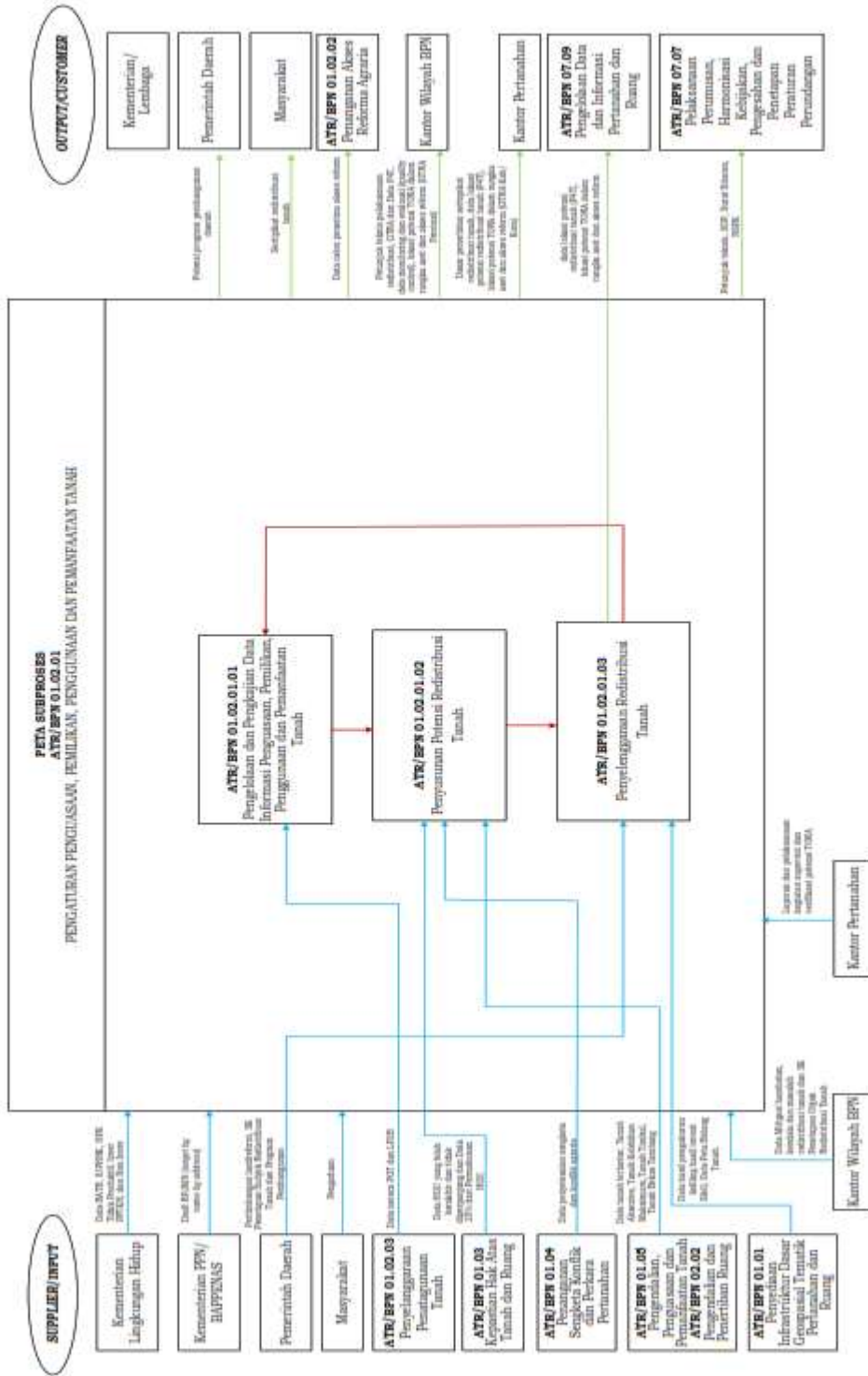
PEVA RELASI ATR/BPN 01.03.04 PENGATURAN TANAH PEMERINTAH																	
ATR/BPN 01.03.04.01 Pencatapan Hak Pengalihan	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Penataan Agraria</td> <td>Direktori Jenderal Tata Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang</td> <td>Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Kementerian/Lembaga</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Daerah</td> <td>BLU/BO/BUMN/BUMD</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktori Jenderal Penataan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang	Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang	Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan																
Direktori Jenderal Penataan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang																
Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang	Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah																
Biro Hukum	Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan																
Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang	Kantor Wilayah BPN																
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga																
Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD																
Masyarakat																	
ATR/BPN 01.03.04.02 Pencatapan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Penataan Agraria</td> <td>Direktori Jenderal Tata Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang</td> <td>Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Kementerian/Lembaga</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Daerah</td> <td>BLU/BO/BUMN/BUMD</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktori Jenderal Penataan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang	Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang	Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan																
Direktori Jenderal Penataan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang																
Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang	Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah																
Biro Hukum	Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan																
Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang	Kantor Wilayah BPN																
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga																
Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD																
Masyarakat																	
ATR/BPN 01.03.04.03 Pengelolaan Data dan Informasi Tanah Instansi Pemerintah	<table border="1"> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td>Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Penataan Agraria</td> <td>Direktori Jenderal Tata Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang</td> <td>Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Kementerian/Lembaga</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Daerah</td> <td>BLU/BO/BUMN/BUMD</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktori Jenderal Penataan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang	Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang	Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Biro Hukum	Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD	Masyarakat	
PUSDATIN	Direktori Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan																
Direktori Jenderal Penataan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang																
Direktori Jenderal Survei dan Pengukuran pertanahan dan ruang	Direktori Jenderal Pencatapan Hak dan Pendaftaran Tanah																
Biro Hukum	Direktori Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan																
Direktori Jenderal Pengalihan dan Pendaftaran tanah dan ruang	Kantor Wilayah BPN																
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga																
Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD																
Masyarakat																	



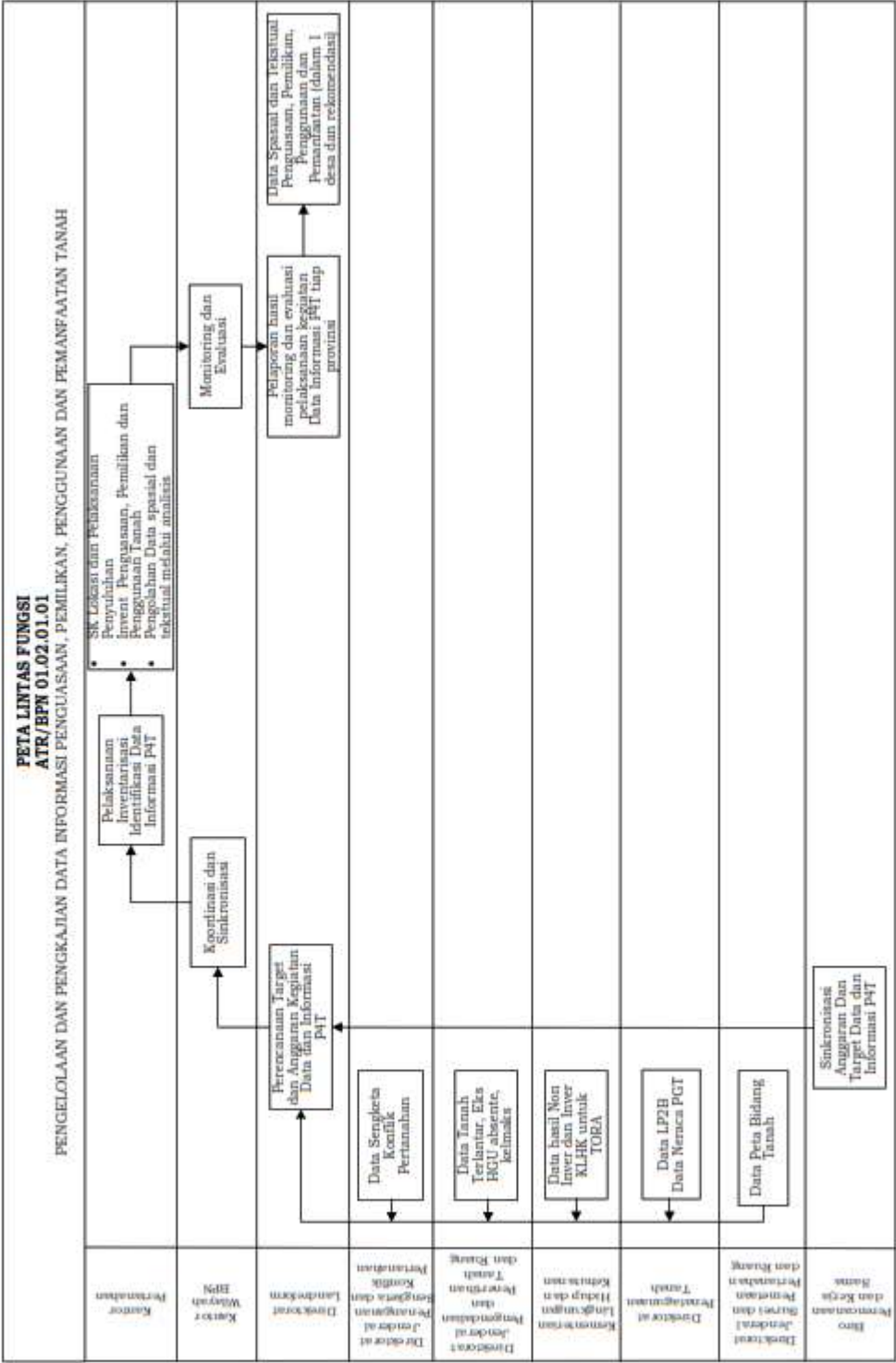


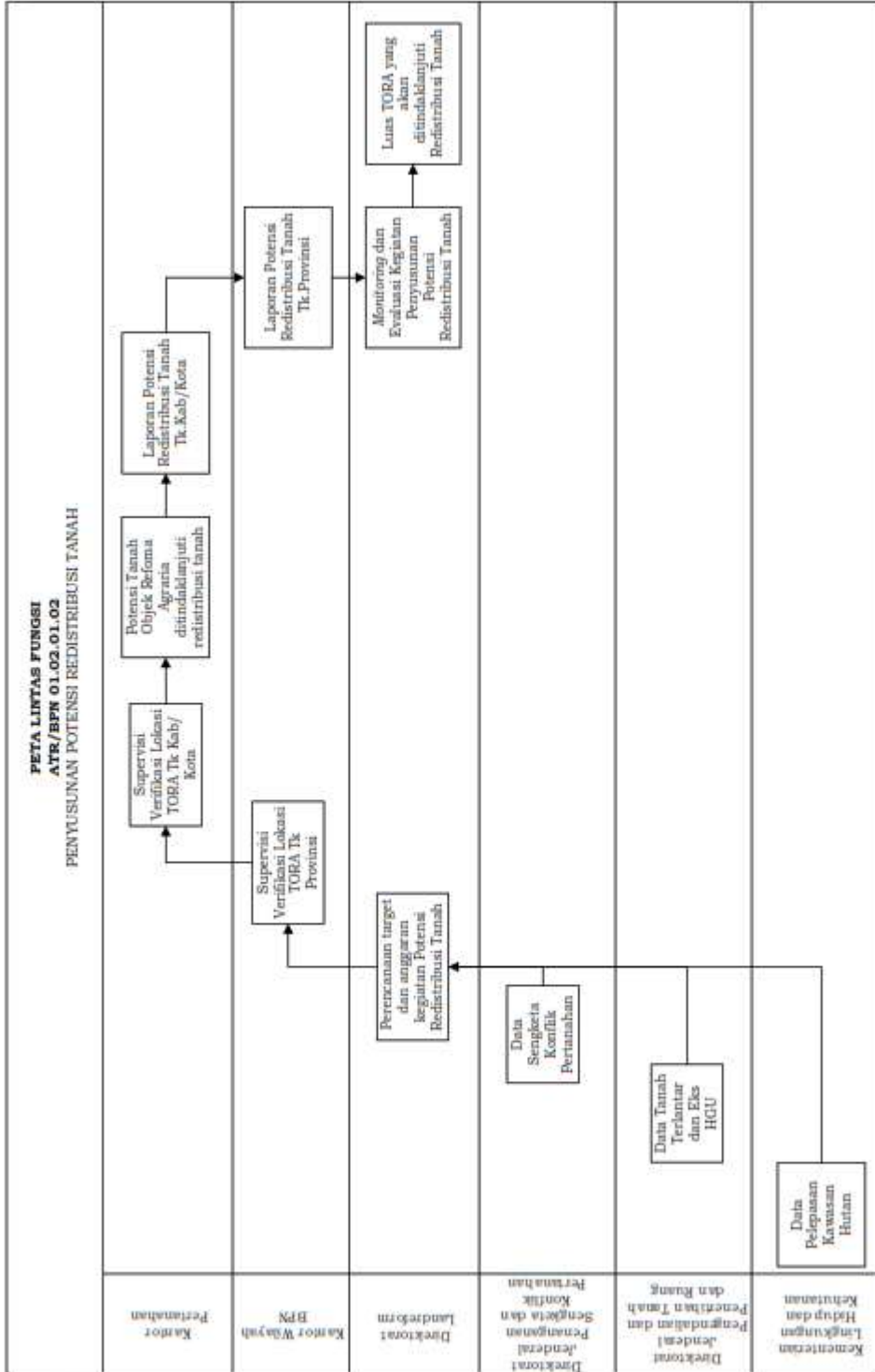


3.5.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Redistribusi Tanah

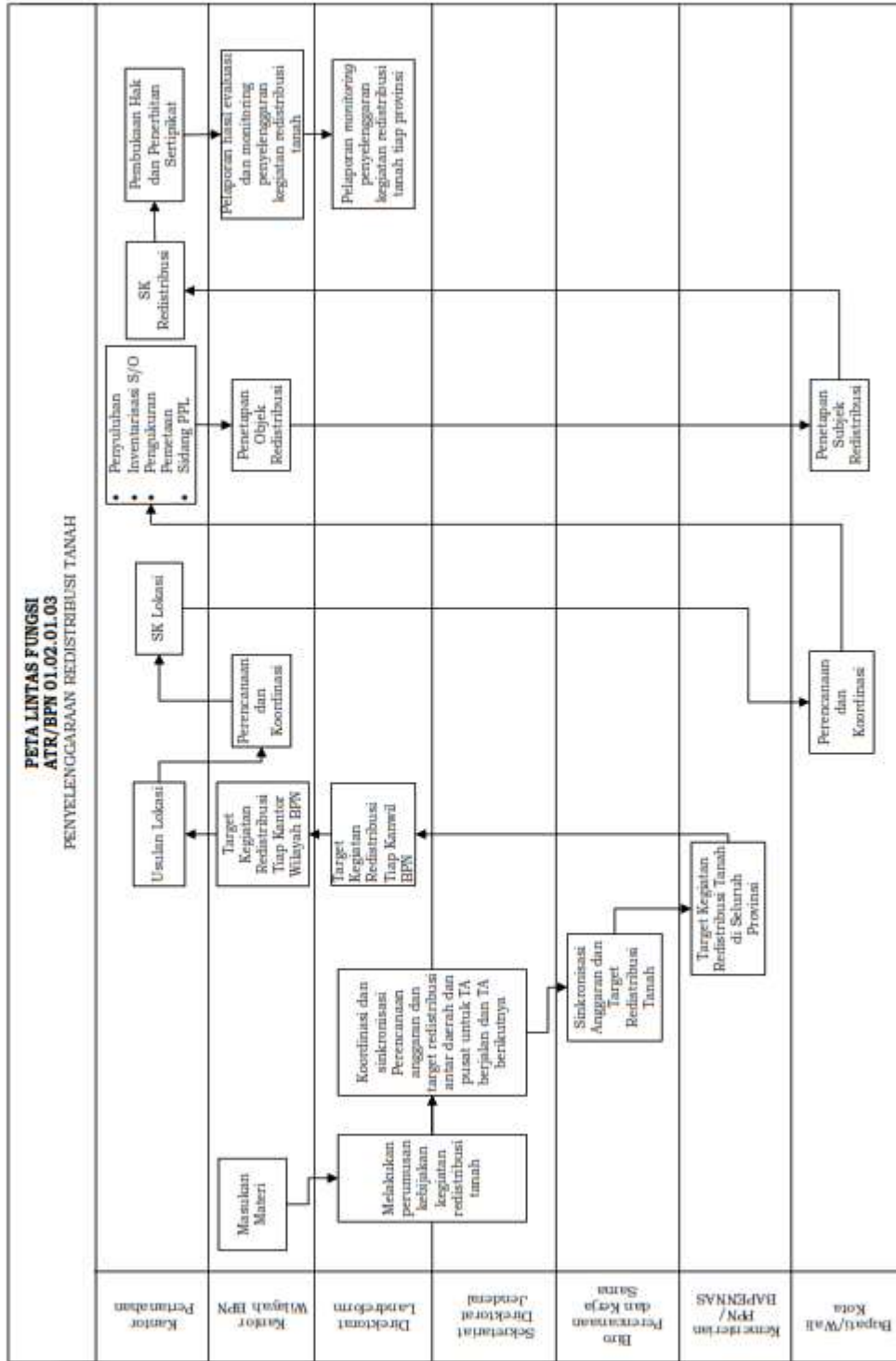


PETA RELASI ATR/BPN 01.03.02 PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG											
ATR/BPN 01.02.01.01 Pengelolaan dan Pengkajian Data Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Sekretariat Direktorat Jenderal</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Penatagunaan Tanah</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Landreform</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Penatagunaan Tanah	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Landreform	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan										
Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama										
Direktorat Penatagunaan Tanah	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang										
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
Direktorat Landreform	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang										
ATR/BPN 01.02.01.02 Penyusunan Potensi Redistribusi Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Sekretariat Direktorat Jenderal</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Kementerian BPN/BAPENWAS</td> <td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pertanian</td> <td>Direktorat Landreform</td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kementerian BPN/BAPENWAS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Direktorat Landreform
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan										
Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama										
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang										
Kementerian BPN/BAPENWAS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
Kementerian Pertanian	Direktorat Landreform										
ATR/BPN 01.02.01.03 Penyelenggaraan Redistribusi Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Sekretariat Direktorat Jenderal</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> <td>Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td>Bupati/Wali Kota</td> </tr> <tr> <td>Kementerian PPN/BAPENNAS</td> <td>Direktorat Landreform</td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bupati/Wali Kota	Kementerian PPN/BAPENNAS	Direktorat Landreform
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan										
Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama										
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat										
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bupati/Wali Kota										
Kementerian PPN/BAPENNAS	Direktorat Landreform										



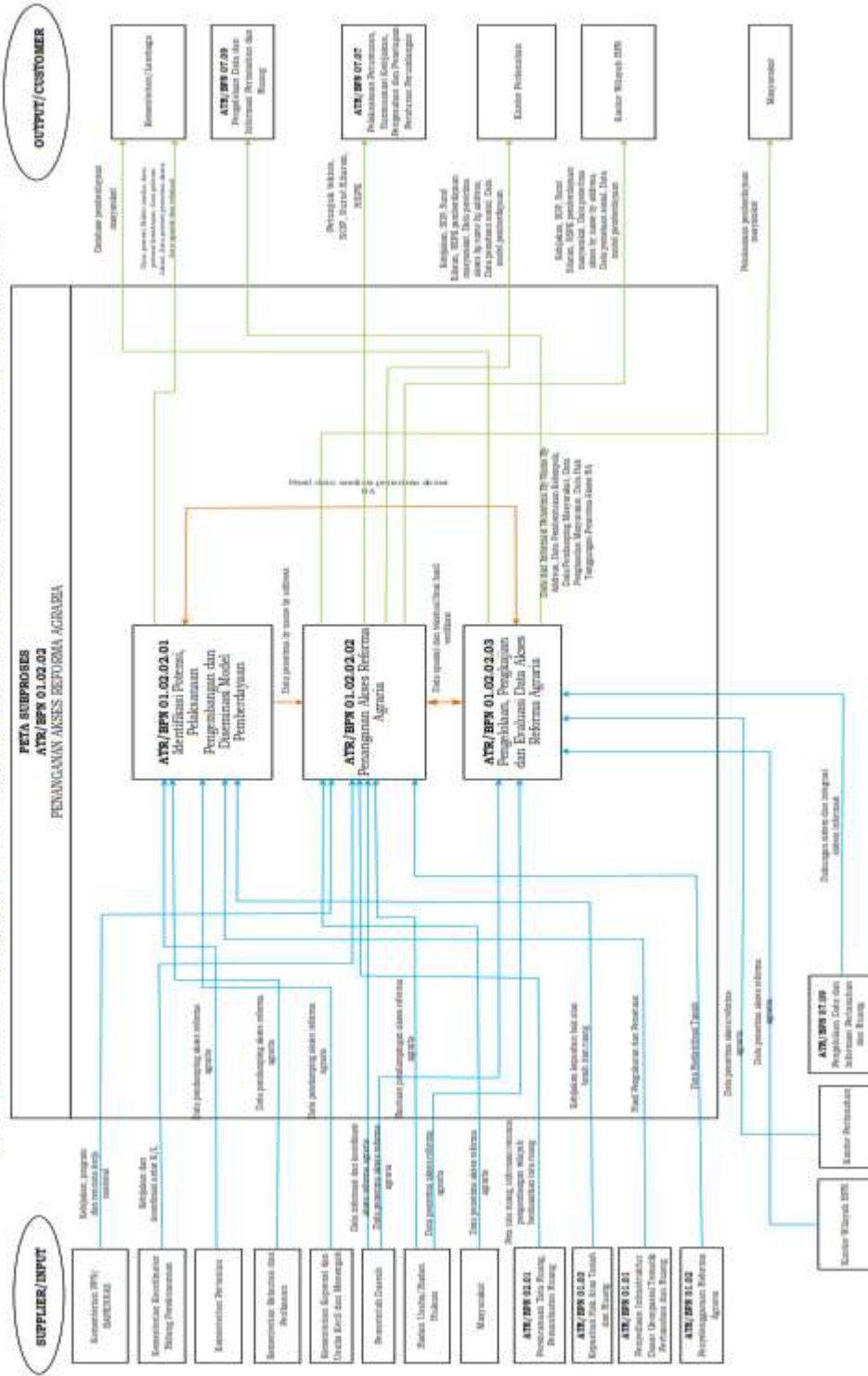


- 131 -



- 132 -

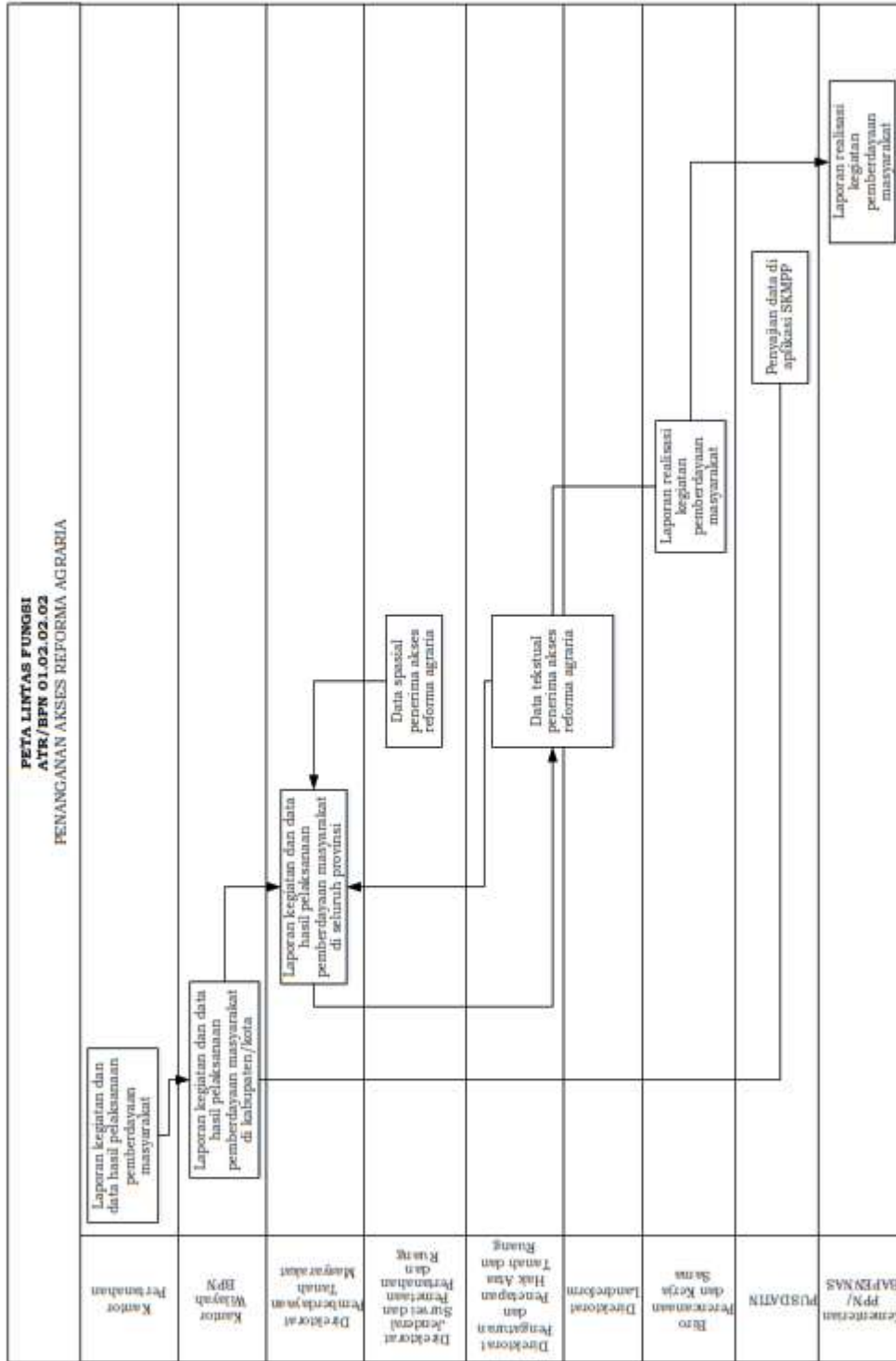
3.5.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat

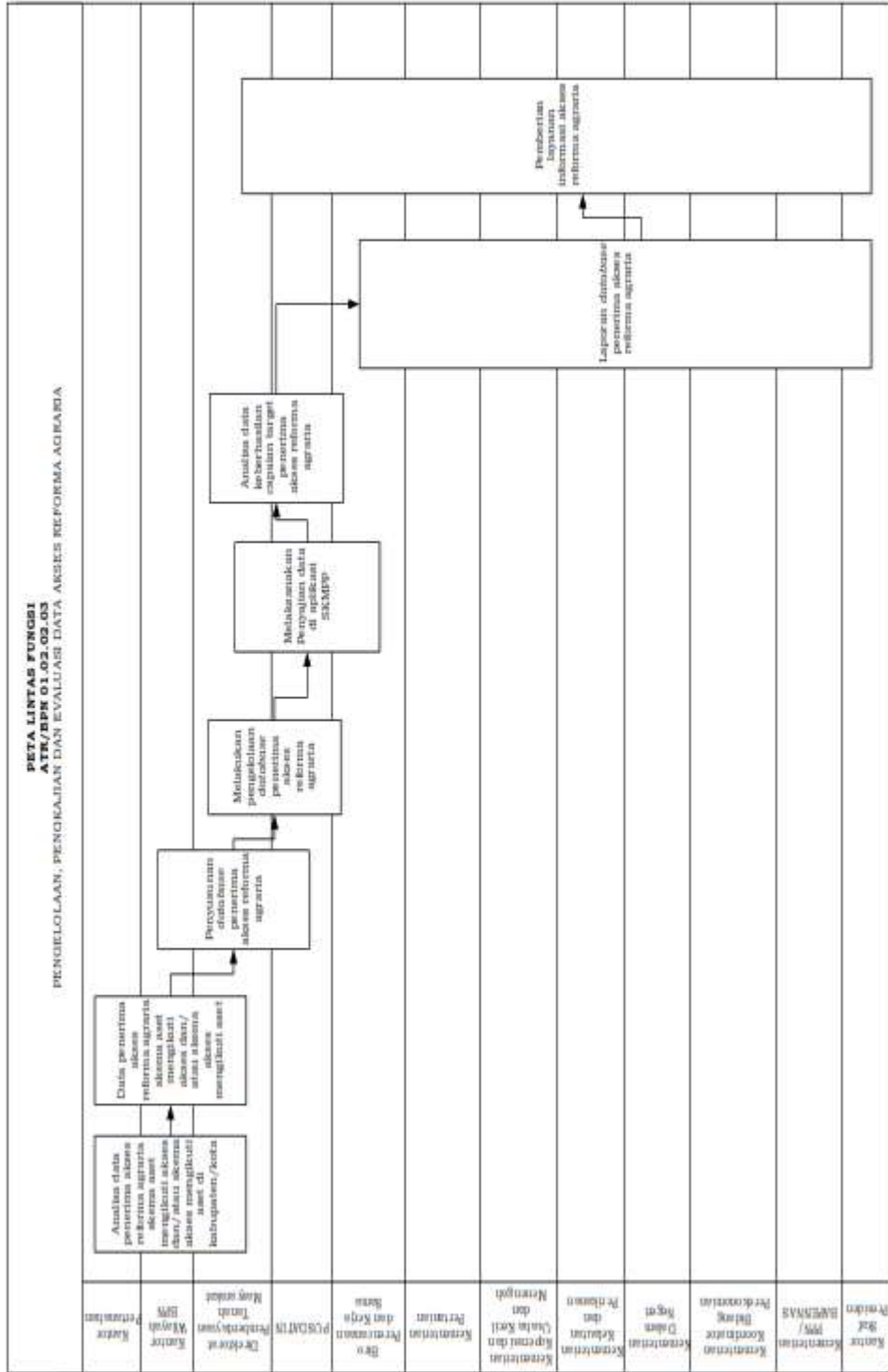


- 133 -

PETA RELASI ATR/BPN 01.02.02 PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA											
ATR/BPN 01.02.02.01 Identifikasi Potensi, Pelaksanaan Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan	<table border="1"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanian</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat</td> <td>Direktorat Landreform</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pertanian</td> <td>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Kelautan dan Perikanan</td> <td>Kementerian PPN / BAPPENAS</td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Direktorat Landreform	Kementerian Pertanian	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian PPN / BAPPENAS		
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian										
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Direktorat Landreform										
Kementerian Pertanian	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah										
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian PPN / BAPPENAS										
ATR/BPN 01.02.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria	<table border="1"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanian</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanian dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Pringaturan dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Ruang</td> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Landreform</td> <td>Kementerian PPN / BAPPENAS</td> </tr> <tr> <td>PUSDATIN</td> <td></td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanian dan Ruang	Direktorat Pringaturan dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Ruang	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Landreform	Kementerian PPN / BAPPENAS	PUSDATIN	
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian										
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanian dan Ruang										
Direktorat Pringaturan dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Ruang	Biro Perencanaan dan Kerja Sama										
Direktorat Landreform	Kementerian PPN / BAPPENAS										
PUSDATIN											
ATR/BPN 01.02.02.03 Pengelolaan, Pengajian dan Evaluasi Data Akses Reforma Agraria	<table border="1"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanian</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat</td> <td>PUSDATIN</td> </tr> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Kementerian Pertanian</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</td> <td>Kementerian Kelautan dan Perikanan</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Dalam Negeri</td> <td>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	PUSDATIN	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Kementerian Pertanian	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanian										
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	PUSDATIN										
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Kementerian Pertanian										
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Kelautan dan Perikanan										
Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian										

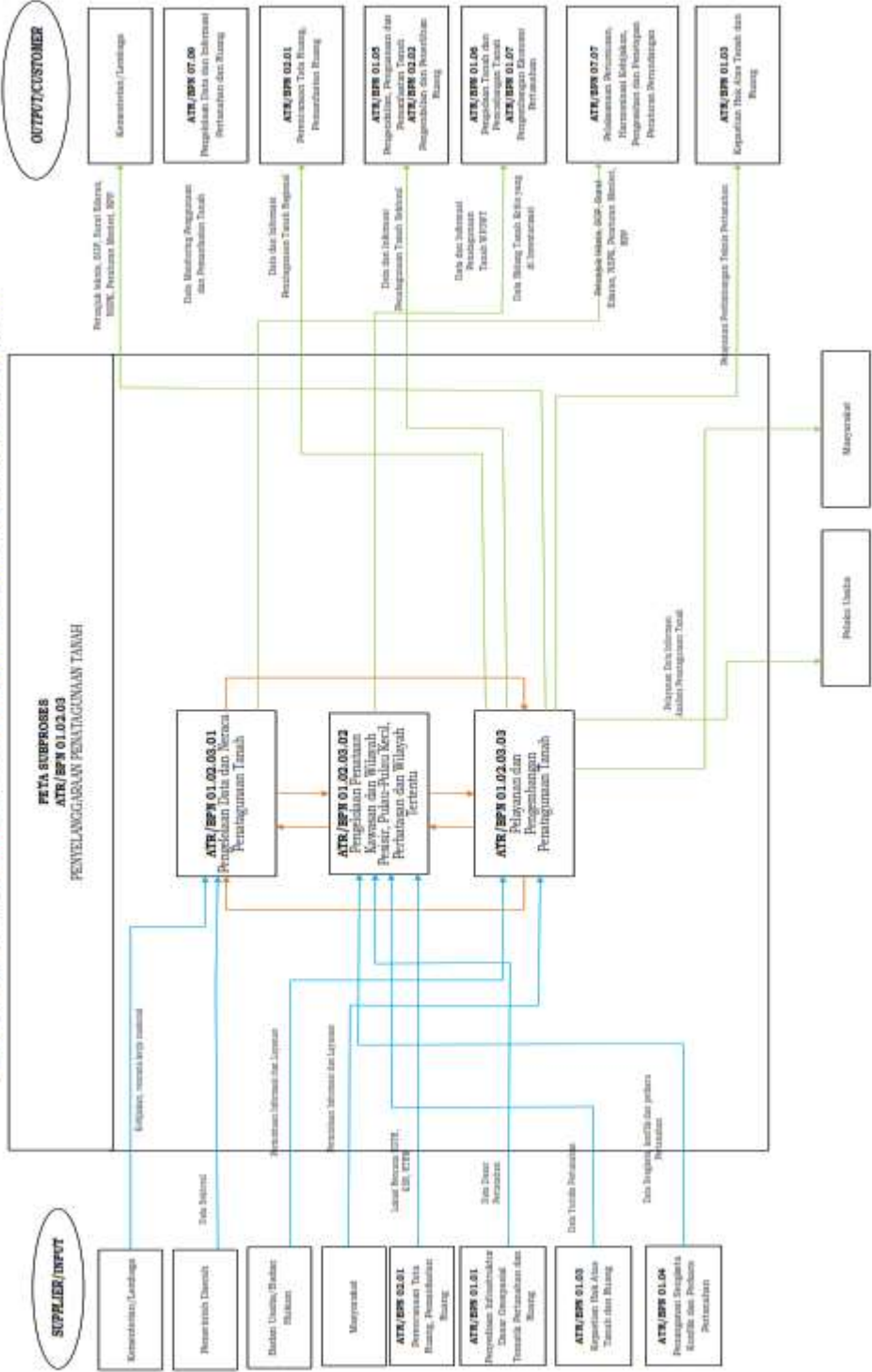
- 135 -





- 137 -

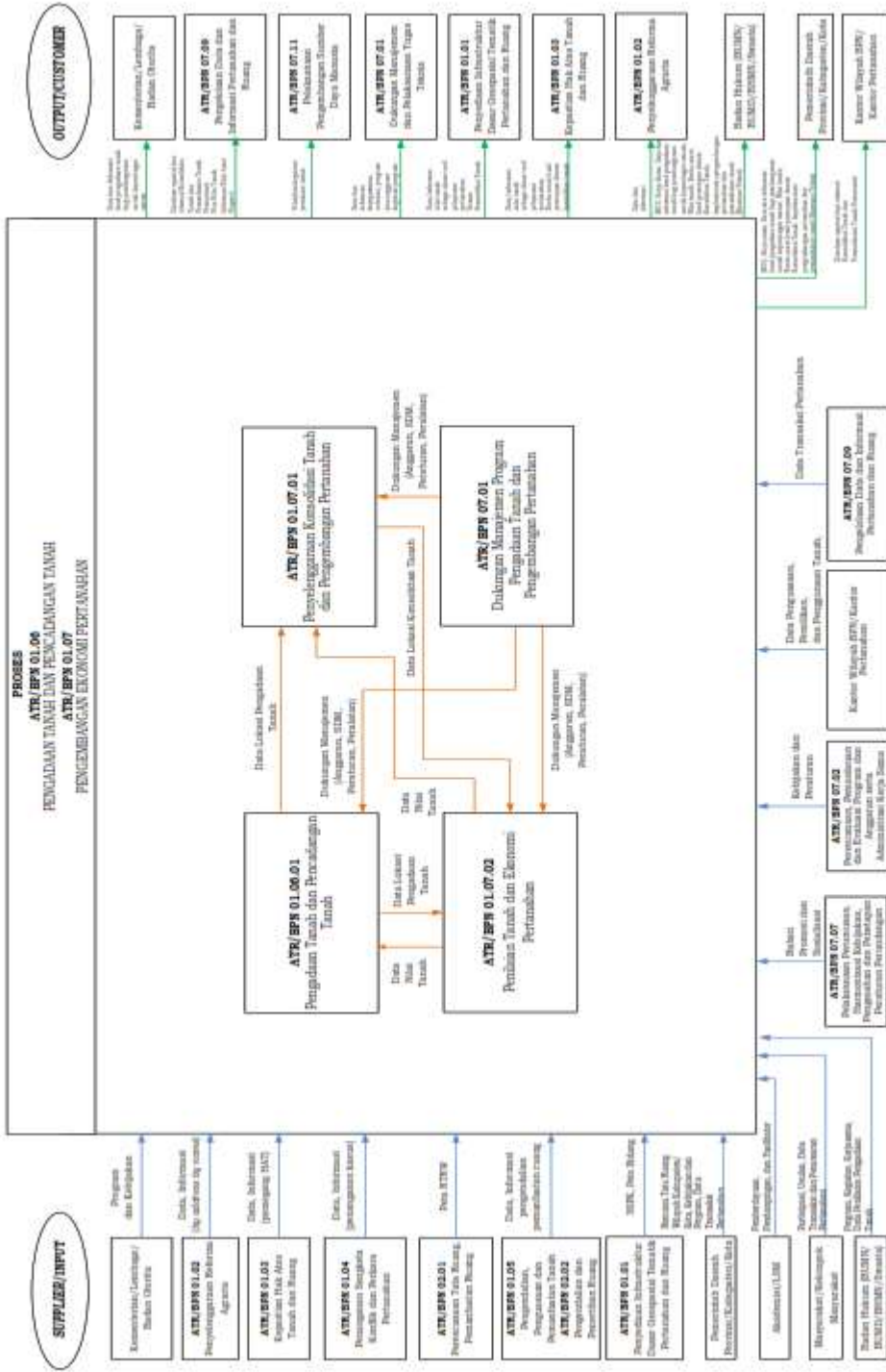
3.5.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penatanganan Tanah



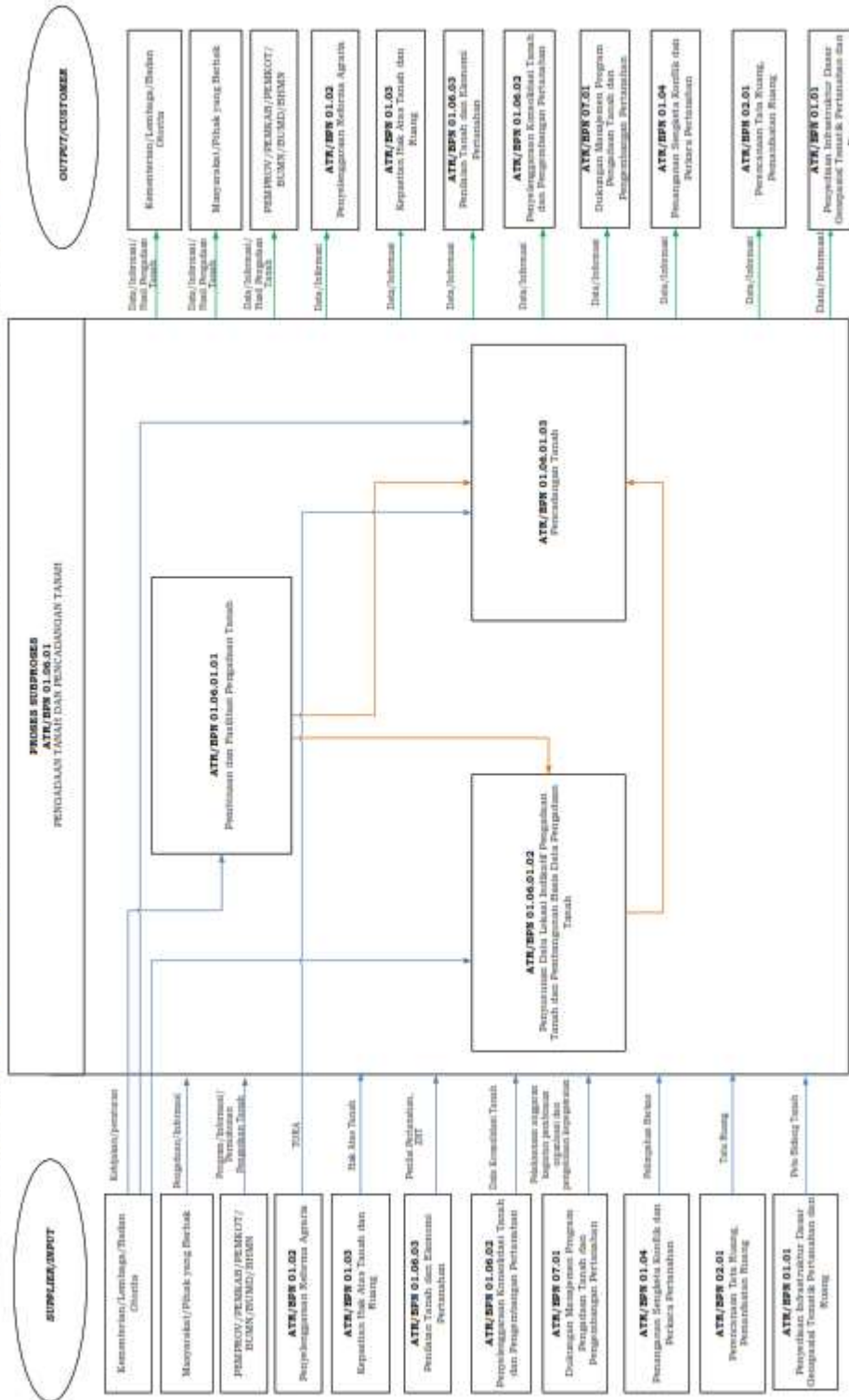
PETA RELASI ATR/BPN 01.02.03 PENYELANGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH													
ATR/BPN 01.02.03.01 Pengelolaan Data dan Neraja Penatagunaan Tanah	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Penatagunaan Tanah</td> <td>Sekretariat Direktorat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA</td> <td>KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga Terkait</td> <td></td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA	KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP	Kementerian/Lembaga Terkait	
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan												
Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal												
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang												
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang												
BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA	KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP												
Kementerian/Lembaga Terkait													
ATR/BPN 01.02.03.02 Pengelolaan Penataan Kawasan dan Wilayah Pesisir, Pulau-Palau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Penatagunaan Tanah</td> <td>Sekretariat Direktorat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA</td> <td>KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga Terkait</td> <td></td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA	KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP	Kementerian/Lembaga Terkait	
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan												
Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal												
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang												
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang												
BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA	KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP												
Kementerian/Lembaga Terkait													
ATR/BPN 01.02.03.03 Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Penatagunaan Tanah</td> <td>Sekretariat Direktorat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA</td> <td>Kementerian/Lembaga Terkait</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP</td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA	Kementerian/Lembaga Terkait	Biro Hukum	KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan												
Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal												
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang												
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang												
BKPM, KEMENKO PERKOTAAN, KEMAKMURFU, PEMDA	Kementerian/Lembaga Terkait												
Biro Hukum	KLHK, KEMENTAN, BKG, KKP												

FETA LINTAS FUNGSI ATR/BPW 01.02.03.02	
PENGLOLAAN PEMATAAN KAWASAN DAN WILAYAH PESIR, PULAU-PULAU KECIL, PERHATASAN DAN WILAYAH TERTEUTU	
Kantor Perwakilan	
Kantor Perwakilan Wilayah BBN	Melakukan Updating Data/ verifikasi/ pengumpulan data di lapangan tentang kondisi perairan pesisir
Direktorat Tanah	Mencakupin dan menataul data perancangan tanah, kerah, perancangan, penerapan, pemeliharaan kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Perumahan Tanah	Menyusun Rencana Pelaksanaan Perancangan Tanah, Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Jenderal	Melakukan Analisis perancangan tanah, pemetaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Jenderal	Melaksanakan Pembinaan dan Supervisi Perancangan Tanah, Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Jenderal	Melaksanakan Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Perancangan Tanah, Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Jenderal	Melaksanakan Melakukan Pertimbangan Tertentu Perancangan
Direktorat Jasa	Mengembangkan Penyelenggaraan Kegiatan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Jasa dan Perumahan	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Jasa dan Perumahan	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Perumahan	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Perumahan dan Ruang	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Perumahan dan Ruang	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Perumahan dan Ruang	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Perumahan dan Ruang	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT
Direktorat Perumahan dan Ruang	Mengembangkan Penyelenggaraan Perancangan dan Pemeliharaan Kawasan dan WPJ/SWT

3.6. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanian



3.6.1.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pembinaan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah



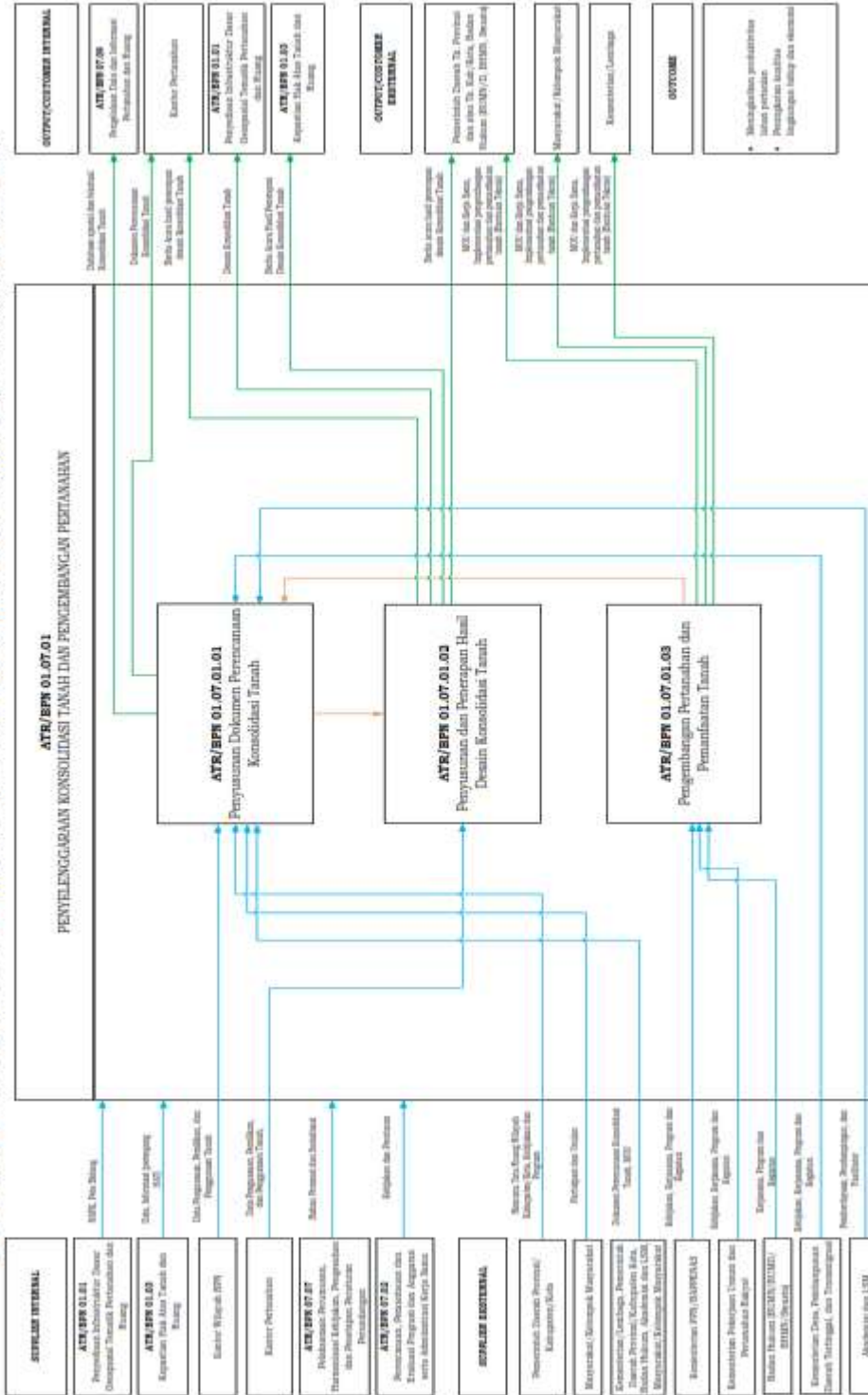
PETA RELASI ATR/BPN 01.06.01 PENGADAAN TANAH DAN PENCAKUPAN TANAH													
ATR/BPN 01.06.01.01 Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Tanah	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah </td> <td> Direktorat Jenderal Penataan Agraria </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> <td> Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Tata Ruang </td> <td> Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan </td> <td> Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang </td> </tr> <tr> <td> Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha </td> <td> Pegawai </td> </tr> <tr> <td> PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN </td> <td> Masyarakat/Pihak yang Bertak </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang	Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha	Pegawai	PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN	Masyarakat/Pihak yang Bertak
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria												
Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan												
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan												
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang												
Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha	Pegawai												
PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN	Masyarakat/Pihak yang Bertak												
ATR/BPN 01.06.01.02 Penyusunan Data Lokasi Indikator Pengadaan Tanah dan Pembangunan Basis Data Pengadaan Tanah	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah </td> <td> Direktorat Jenderal Penataan Agraria </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> <td> Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Tata Ruang </td> <td> Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan </td> <td> Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang </td> </tr> <tr> <td> Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha </td> <td> Pegawai </td> </tr> <tr> <td> PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN </td> <td> Masyarakat/Pihak yang Bertak </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang	Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha	Pegawai	PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN	Masyarakat/Pihak yang Bertak
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria												
Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan												
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan												
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang												
Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha	Pegawai												
PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN	Masyarakat/Pihak yang Bertak												
ATR/BPN 01.06.01.03 Pencadangan Tanah/Blank Tanah	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah </td> <td> Direktorat Jenderal Penataan Agraria </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> <td> Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Tata Ruang </td> <td> Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan </td> <td> Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang </td> </tr> <tr> <td> Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha </td> <td> Pegawai </td> </tr> <tr> <td> PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN </td> <td> Masyarakat/Pihak yang Bertak </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang	Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha	Pegawai	PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN	Masyarakat/Pihak yang Bertak
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria												
Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Perumahan Tanah dan Ekonomi Perumahan												
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Sekeloaat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Perumahan												
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perumahan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang												
Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha	Pegawai												
PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/DUMN/DUMDI/ BHMN	Masyarakat/Pihak yang Bertak												

- 147 -

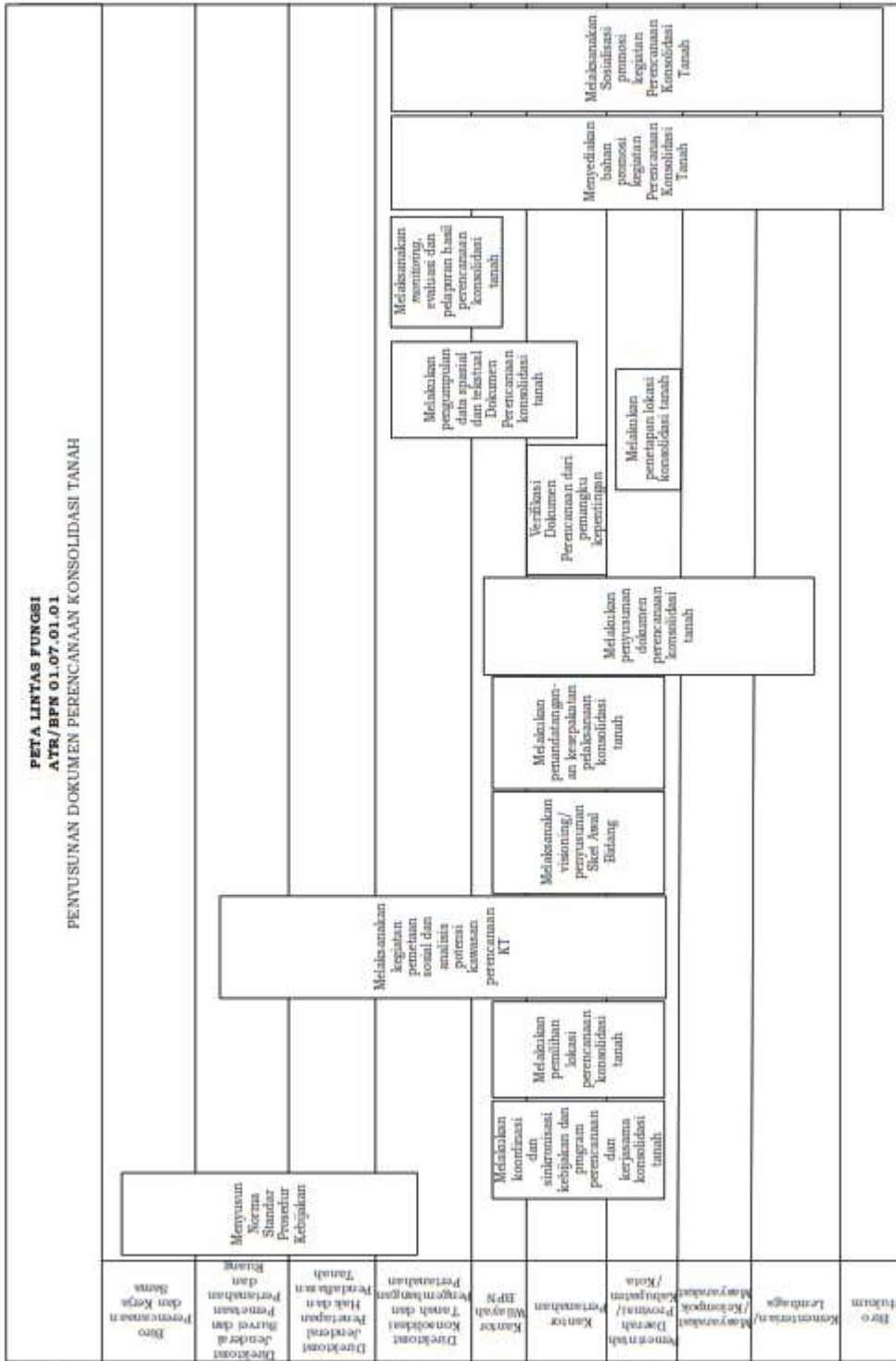
**PETA LINTAS FUNGSI
ATR/BPN 01.06.01.03
PENCADANGAN TANAH**

	Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		Kerangka/ Struktur/ Basis Kerja		
Menyusun Normas Standar Prosedur Kegiatan			Melaksanakan kegiatan pelaksanaan program tingkat pencadangan tanah		Melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap objek tanah yang diwajibkan dalam kegiatan pencadangan tanah		Melaksanakan pemantauan pemertanian tanah yang diwajibkan sebagai objek/lokasi pencadangan tanah		Melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan tanah yang diwajibkan sebagai objek/lokasi pencadangan tanah		Melaksanakan program pelayanan dan pemeliharaan tanah yang diwajibkan sebagai objek/lokasi pencadangan tanah		Melaksanakan program pendistribusian tanah yang diwajibkan sebagai objek/lokasi pencadangan tanah		Melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan pencadangan tanah		Melaksanakan		Melaksanakan		Melaksanakan		Melaksanakan		Melaksanakan
Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	
Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	
Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	
Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	

3.6.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanian



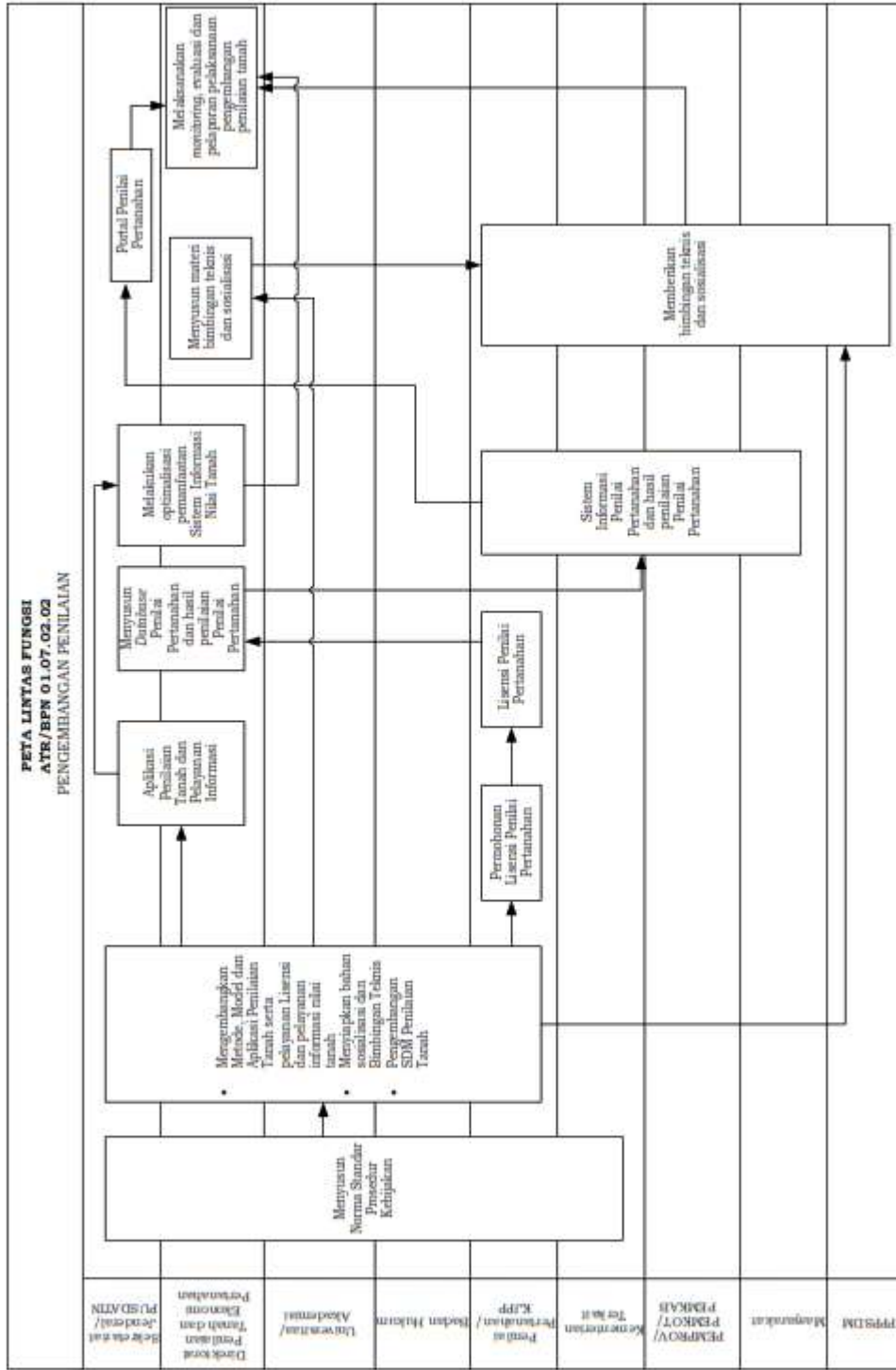
PETA RELASI ATR/BPN 01.07.01 PENVELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN											
ATR/BPN 01.07.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</td> <td>Masyarakat/Kelompok Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Kementerian/Lembaga</td> <td>Biro Hukum</td> </tr> </table>	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Masyarakat/Kelompok Masyarakat	Kementerian/Lembaga	Biro Hukum
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang										
Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan										
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan										
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Masyarakat/Kelompok Masyarakat										
Kementerian/Lembaga	Biro Hukum										
ATR/BPN 01.07.01.02 Penyusunan dan Penerapan Hasil Desain Konsolidasi Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td>Akademi dan LSM</td> <td>Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td></td> </tr> </table>	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Akademi dan LSM	Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN	
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan										
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah										
Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota										
Akademi dan LSM	Biro Hukum										
Kantor Wilayah BPN											
ATR/BPN 01.07.01.03 Pengembangan Perumahan dan Pemanfaatan Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</td> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan</td> </tr> <tr> <td>Biro Hukum</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td>Badan Hukum (BLN/ BUMD/ BHMN/ Swasta)</td> <td>Kementerian/Lembaga</td> </tr> </table>	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan	Biro Hukum	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Badan Hukum (BLN/ BUMD/ BHMN/ Swasta)	Kementerian/Lembaga		
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Perumahan dan Ruang										
Direktorat Jenderal Peretajuan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perumahan										
Biro Hukum	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota										
Badan Hukum (BLN/ BUMD/ BHMN/ Swasta)	Kementerian/Lembaga										



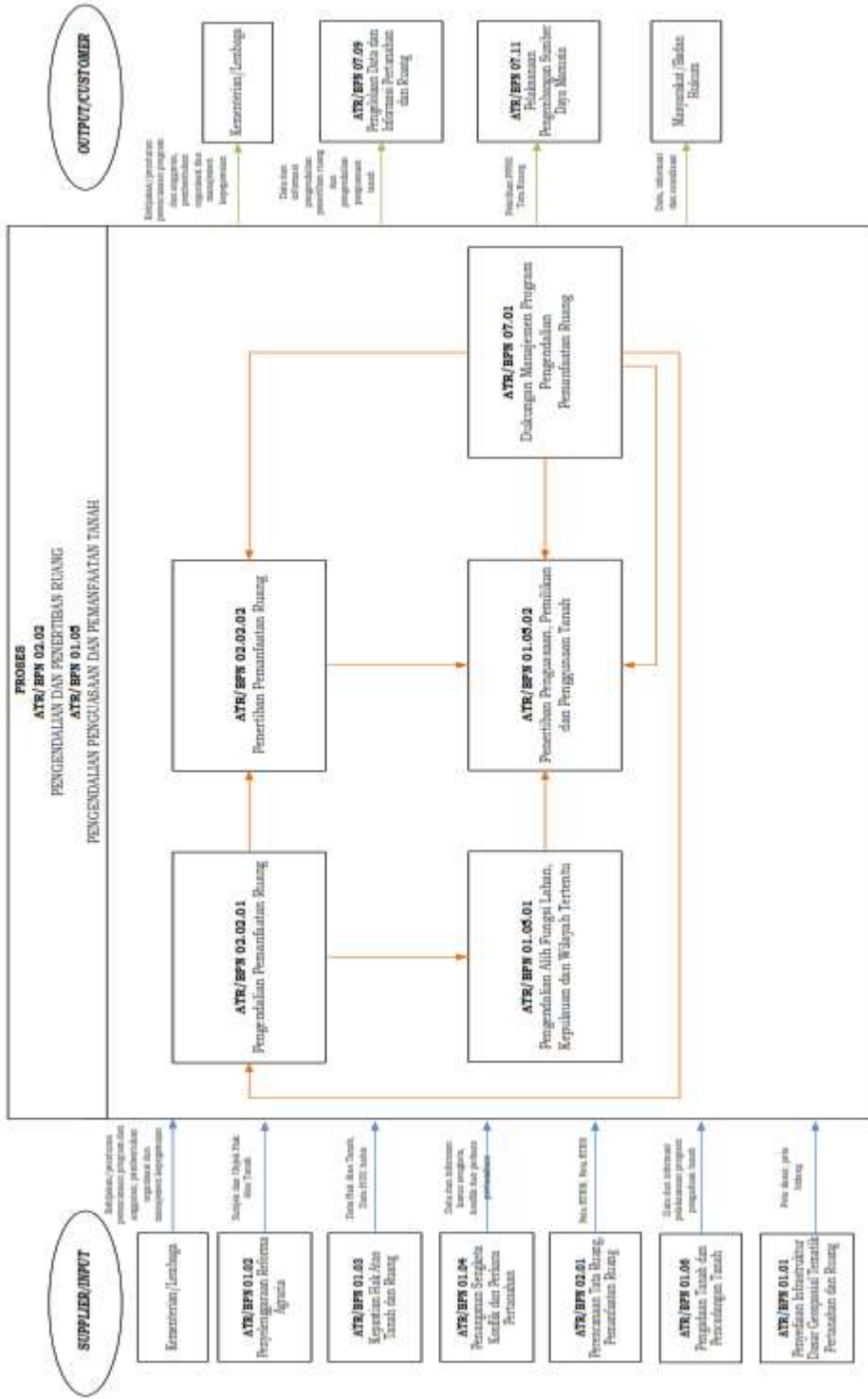
PETA LINTAS FUNGSI
ATR/BPN 01.07.01.03
PENGEMBANGAN PERTANAHAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan	Lakukan Perencanaan Ruang	Melakukan identifikasi kebutuhan basis data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Lakukan Penyelidikan dan Pengumpulan Data dari Pertanahan	Melakukan penyempurnaan dan penertarikan tanah	Lakukan Koordinasi dan Pengembangan Pertanahan	Melakukan pengumpulan data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Biro Hukum	Melakukan identifikasi kebutuhan sosialisasi dan promosi	Biro Perintah Daerah/Provinsi/Kota	Menyusun materi sosialisasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Lakukan BUMD/BUMN/Provinsi/Kota	Melaksanakan sosialisasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Komisaris/Kemendagri	Melakukan penandatanganan MOU dan PAS pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Melaksanakan berbagai sama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Tanah Teknik)	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah
---------------------------------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	------------	--	------------------------------------	---	---------------------------------	--	----------------------	---	---	---

PETA RELASI ATR/BPN 01.07.02 PENILAIAN TANAH DAN EKONOMI PERTANAHAN													
ATR/BPN 01.07.02.01 Penyediaan Informasi Nilai Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Penciptaan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Perencanaan Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BUMIN/ BUMD</td> <td style="text-align: center;">Kementerian Terkait</td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktori Jenderal Penciptaan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktori Jenderal Perencanaan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang	Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL	Masyarakat	BUMIN/ BUMD	Kementerian Terkait		
PUSDATIN	Direktori Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang												
Direktori Jenderal Penciptaan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktori Jenderal Perencanaan Agraria												
Direktori Jenderal Tata Ruang	Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan												
PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL	Masyarakat												
BUMIN/ BUMD	Kementerian Terkait												
ATR/BPN 01.07.02.02 Pengembangan Penilaian	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Universitas/Akademisi</td> <td style="text-align: center;">Badan Hukum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pegawai Pertanian/KLIPP</td> <td style="text-align: center;">Kementerian Terkait</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PPPSEM</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Universitas/Akademisi	Badan Hukum	Pegawai Pertanian/KLIPP	Kementerian Terkait	PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL	Masyarakat	PPPSEM			
PUSDATIN	Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan												
Universitas/Akademisi	Badan Hukum												
Pegawai Pertanian/KLIPP	Kementerian Terkait												
PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL	Masyarakat												
PPPSEM													
ATR/BPN 01.07.02.03 Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PUSDATIN</td> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Penciptaan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Perencanaan Agraria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktori Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian Terkait</td> <td style="text-align: center;">BUMIN/ BUMD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PPAT</td> <td></td> </tr> </table>	PUSDATIN	Direktori Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktori Jenderal Penciptaan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktori Jenderal Perencanaan Agraria	Direktori Jenderal Tata Ruang	Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL	Masyarakat	Kementerian Terkait	BUMIN/ BUMD	PPAT	
PUSDATIN	Direktori Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang												
Direktori Jenderal Penciptaan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktori Jenderal Perencanaan Agraria												
Direktori Jenderal Tata Ruang	Direktori Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan												
PEMBROV/ PEMAGOT/ PEMKAEL	Masyarakat												
Kementerian Terkait	BUMIN/ BUMD												
PPAT													



3.7. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

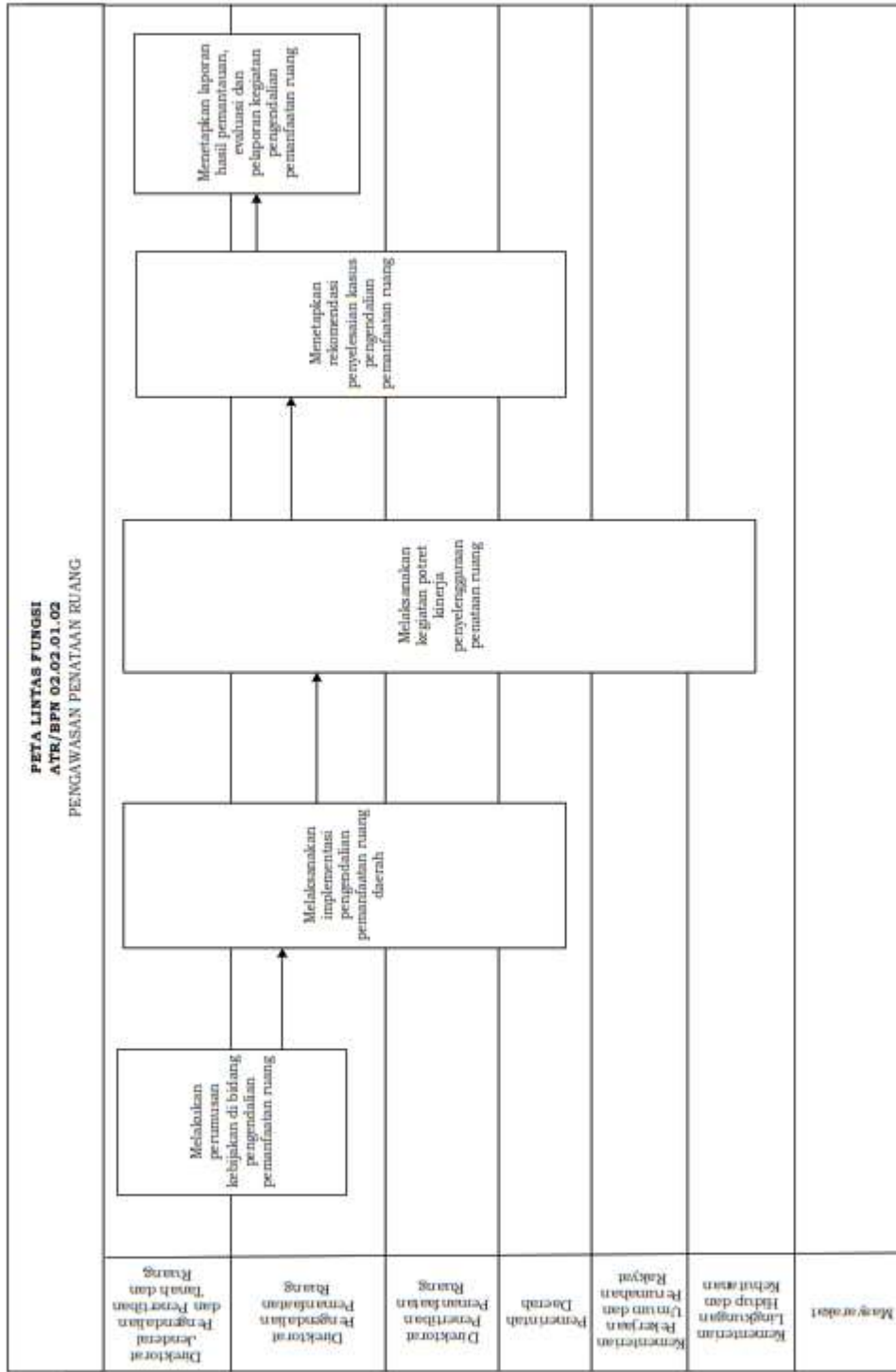


PETA RELASI ATR/BPN 02.02.01 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG																	
ATR/BPN 02.02.01.01 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<table border="1"><tr><td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td><td>Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang</td><td>Pemerintah Daerah</td><td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td></tr><tr><td>Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang</td><td>Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</td><td>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Masyarakat</td><td>Masyarakat</td><td></td><td></td></tr></table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Daerah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang			Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			Masyarakat	Masyarakat		
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Daerah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang																
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																
Masyarakat	Masyarakat																
ATR/BPN 02.02.01.02 Pengawasan Penataan Ruang	<table border="1"><tr><td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td><td>Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang</td><td>Pemerintah Daerah</td><td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td></tr><tr><td>Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang</td><td>Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</td><td>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Masyarakat</td><td>Masyarakat</td><td></td><td></td></tr></table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Daerah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang			Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			Masyarakat	Masyarakat		
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Daerah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang																
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																
Masyarakat	Masyarakat																

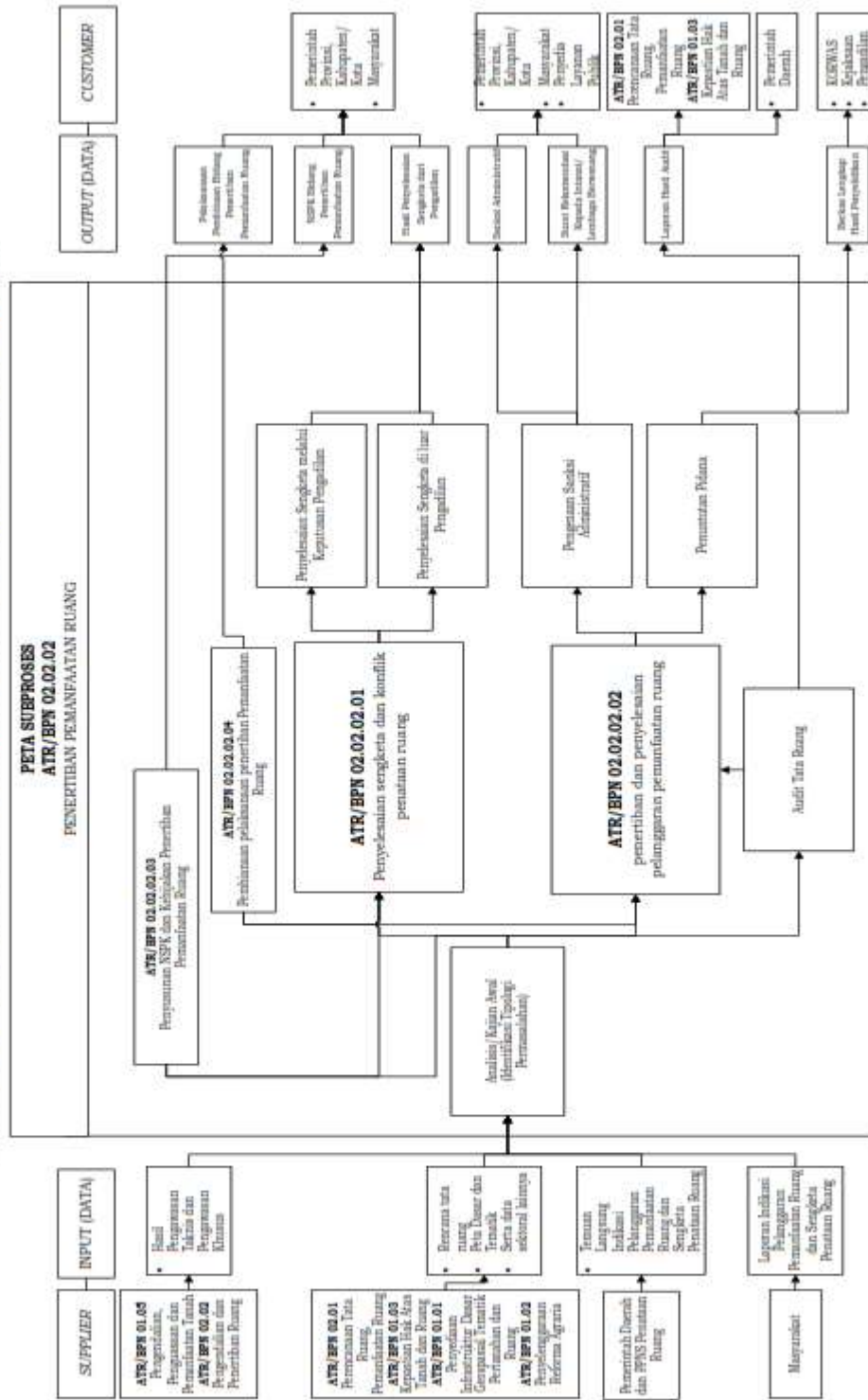
- 161 -

PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPK 02.02.01.01 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Ruang	Melakukan pertemuan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Menyusun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan bimbingan teknis instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantauan evaluasi perwujudan RTR Daerah
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan sosialisasi NSPK di bidang pengendalian pemanfaatan ruang
Pejabat Daerah	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang SDEW di DAS dan pengelohan data
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Mengembangkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Kementerian Kehutanan	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Kementerian Komunikasi dan Informatika	

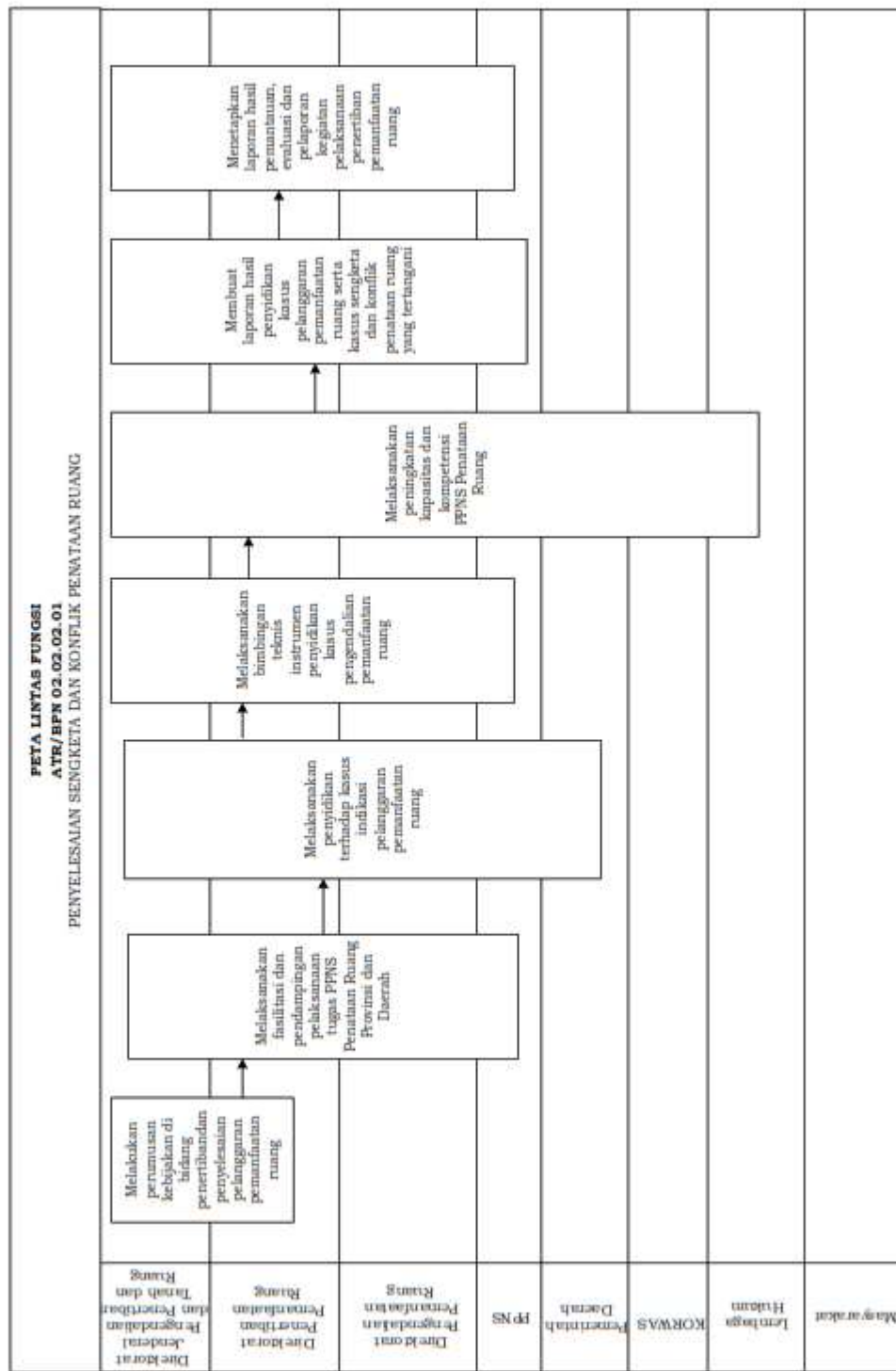
- 162 -

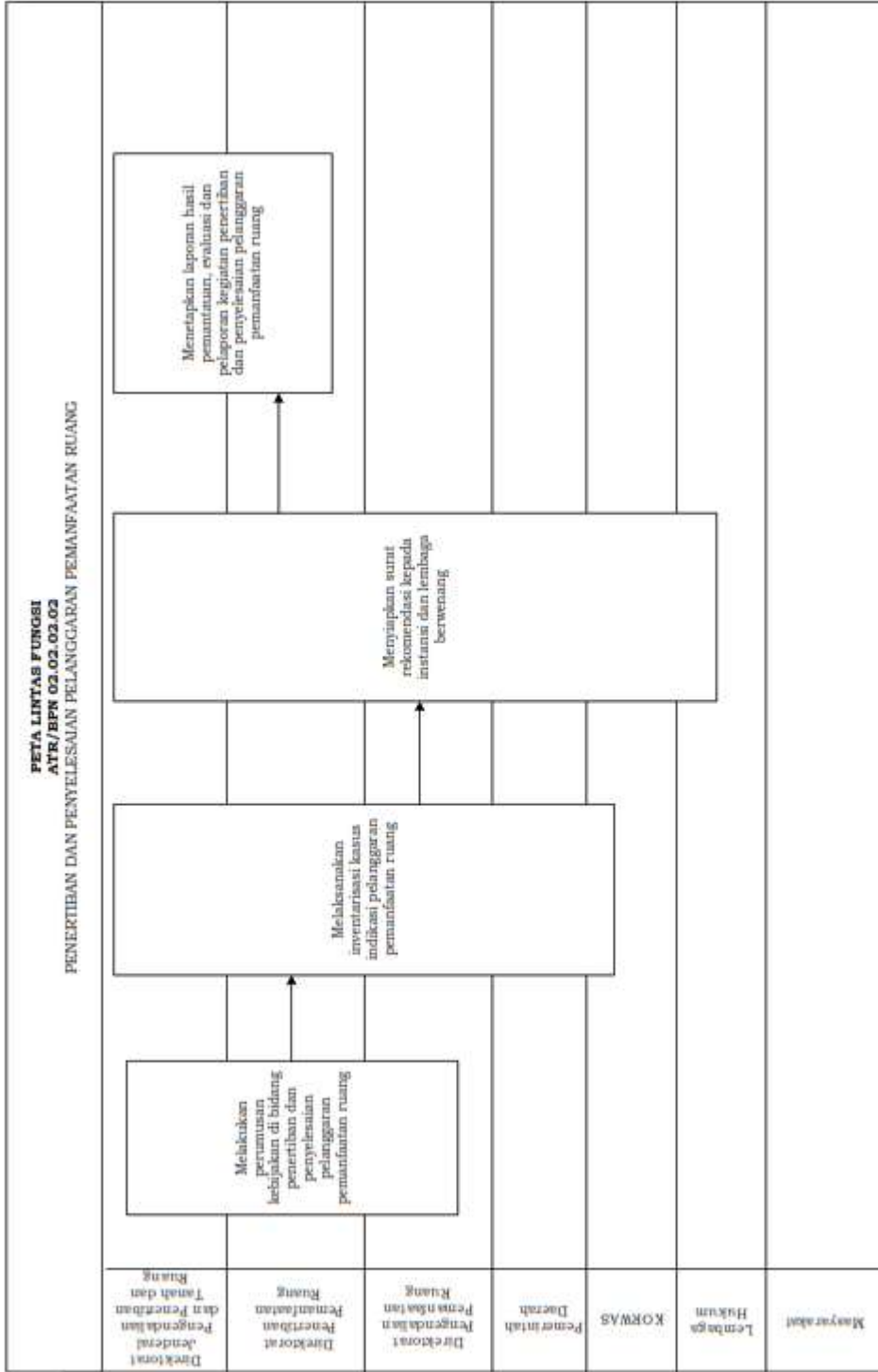


3.7.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

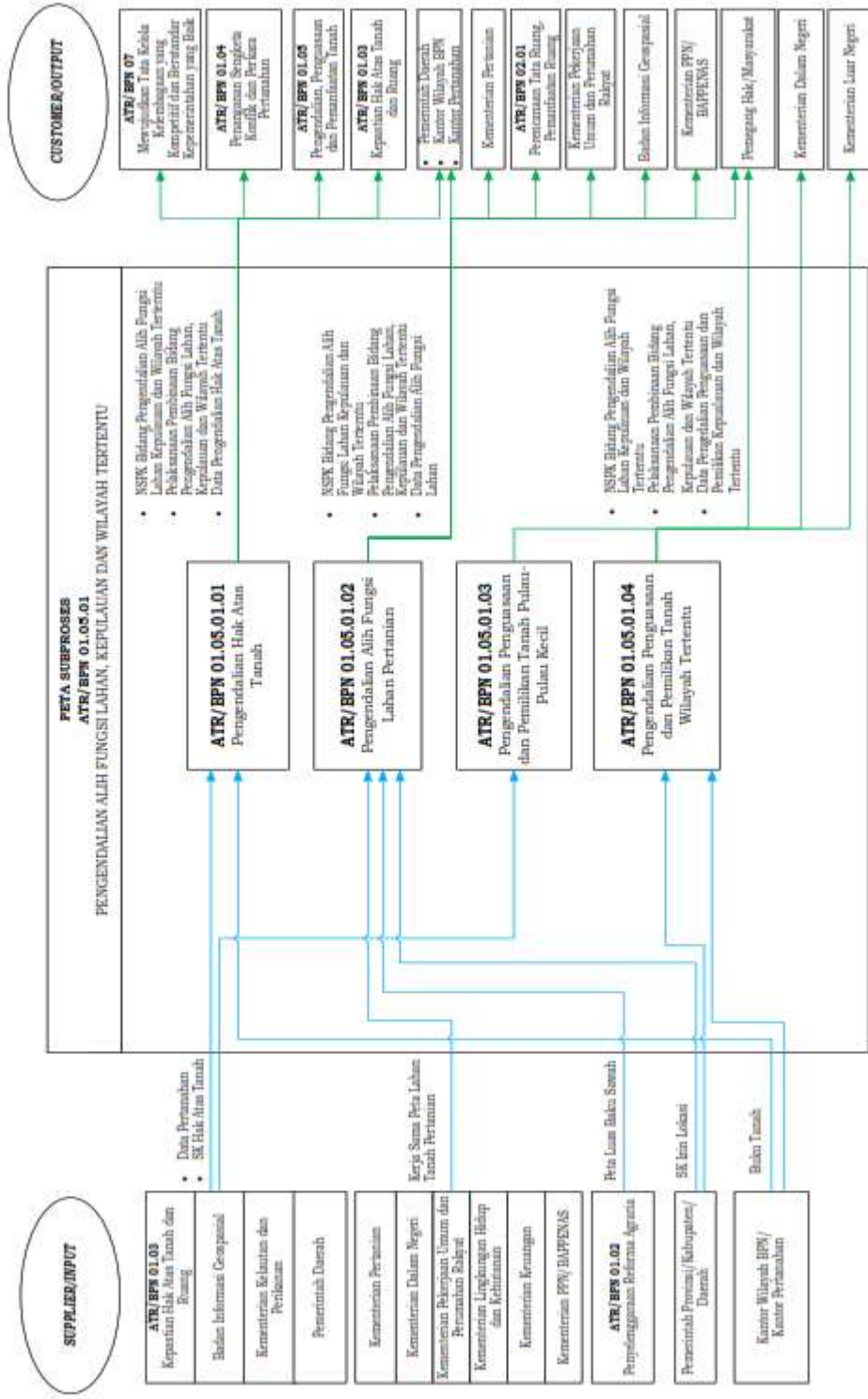


PETA RELASI ATR/BPN 02.02.02 PENERBITAN PEMANFAATAN RUANG									
ATR/BPN 02.02.02.01 Penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang	<table border="1"><tr><td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pernerbitan Tanah dan Ruang</td><td>Direktorat Pernerbitan Pemanfaatan Ruang</td></tr><tr><td>Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang</td><td>PPNS</td></tr><tr><td>Pemerintah Daerah</td><td>KORWAS</td></tr><tr><td>Lembaga Hukum</td><td>Masyarakat</td></tr></table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pernerbitan Tanah dan Ruang	Direktorat Pernerbitan Pemanfaatan Ruang	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PPNS	Pemerintah Daerah	KORWAS	Lembaga Hukum	Masyarakat
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pernerbitan Tanah dan Ruang	Direktorat Pernerbitan Pemanfaatan Ruang								
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PPNS								
Pemerintah Daerah	KORWAS								
Lembaga Hukum	Masyarakat								
ATR/BPN 02.02.02.02 penerbitan dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang	<table border="1"><tr><td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pernerbitan Tanah dan Ruang</td><td>Direktorat Pernerbitan Pemanfaatan Ruang</td><td>Pemerintah Daerah</td><td>Lembaga Hukum</td></tr><tr><td>Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang</td><td>KORWAS</td><td>Masyarakat</td><td></td></tr></table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pernerbitan Tanah dan Ruang	Direktorat Pernerbitan Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Daerah	Lembaga Hukum	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	KORWAS	Masyarakat	
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pernerbitan Tanah dan Ruang	Direktorat Pernerbitan Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Daerah	Lembaga Hukum						
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	KORWAS	Masyarakat							

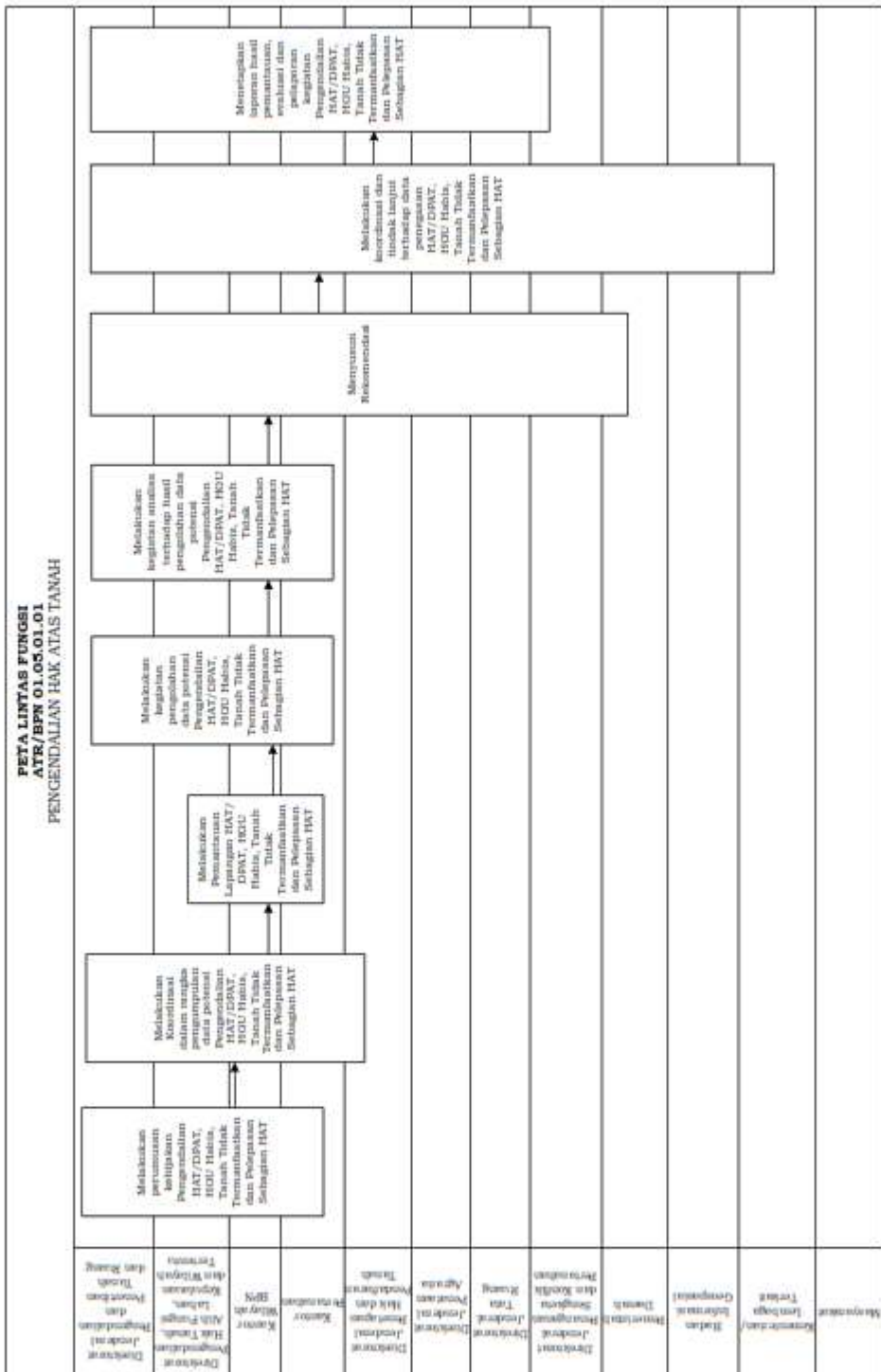


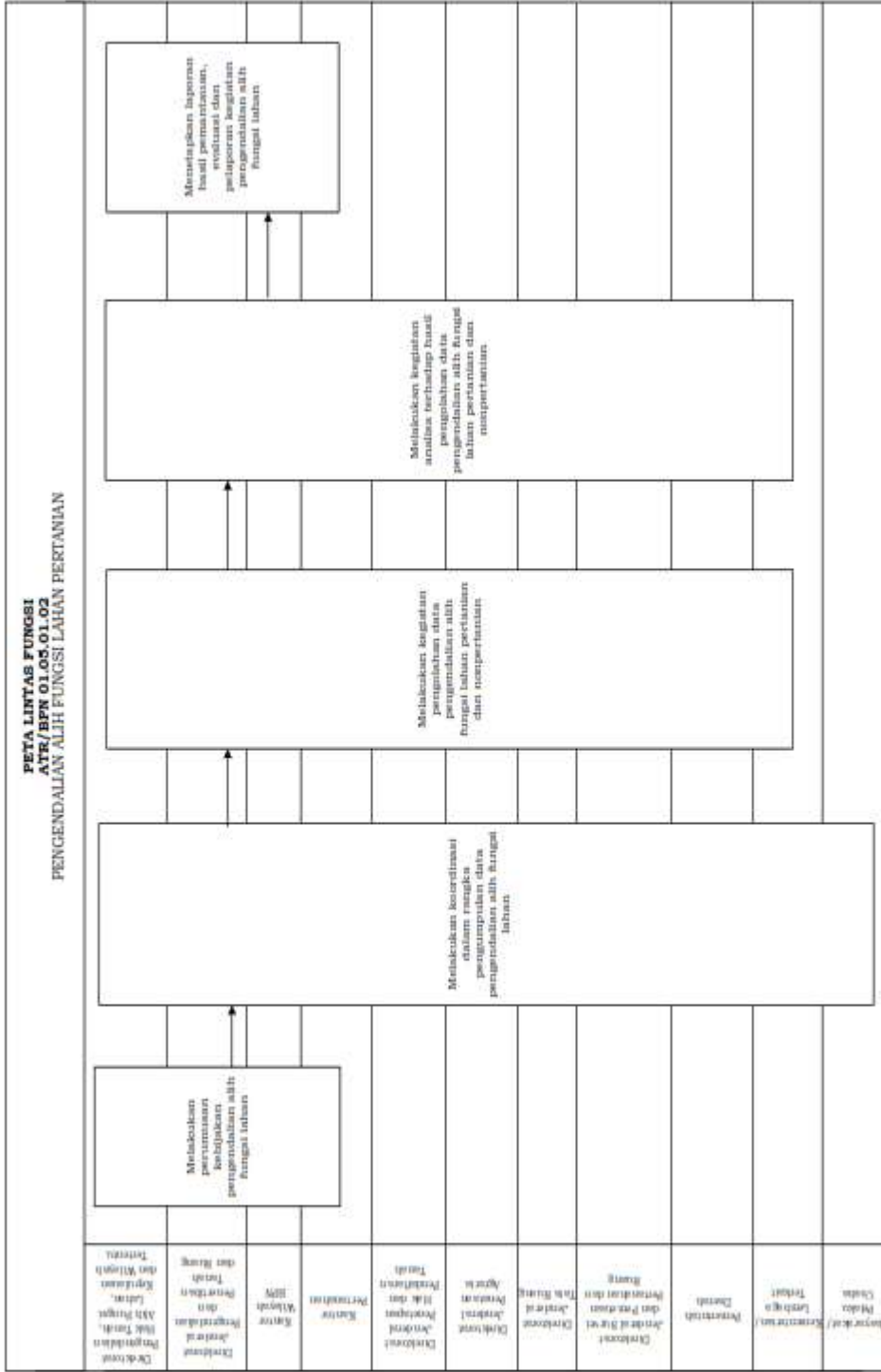


3.7.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu

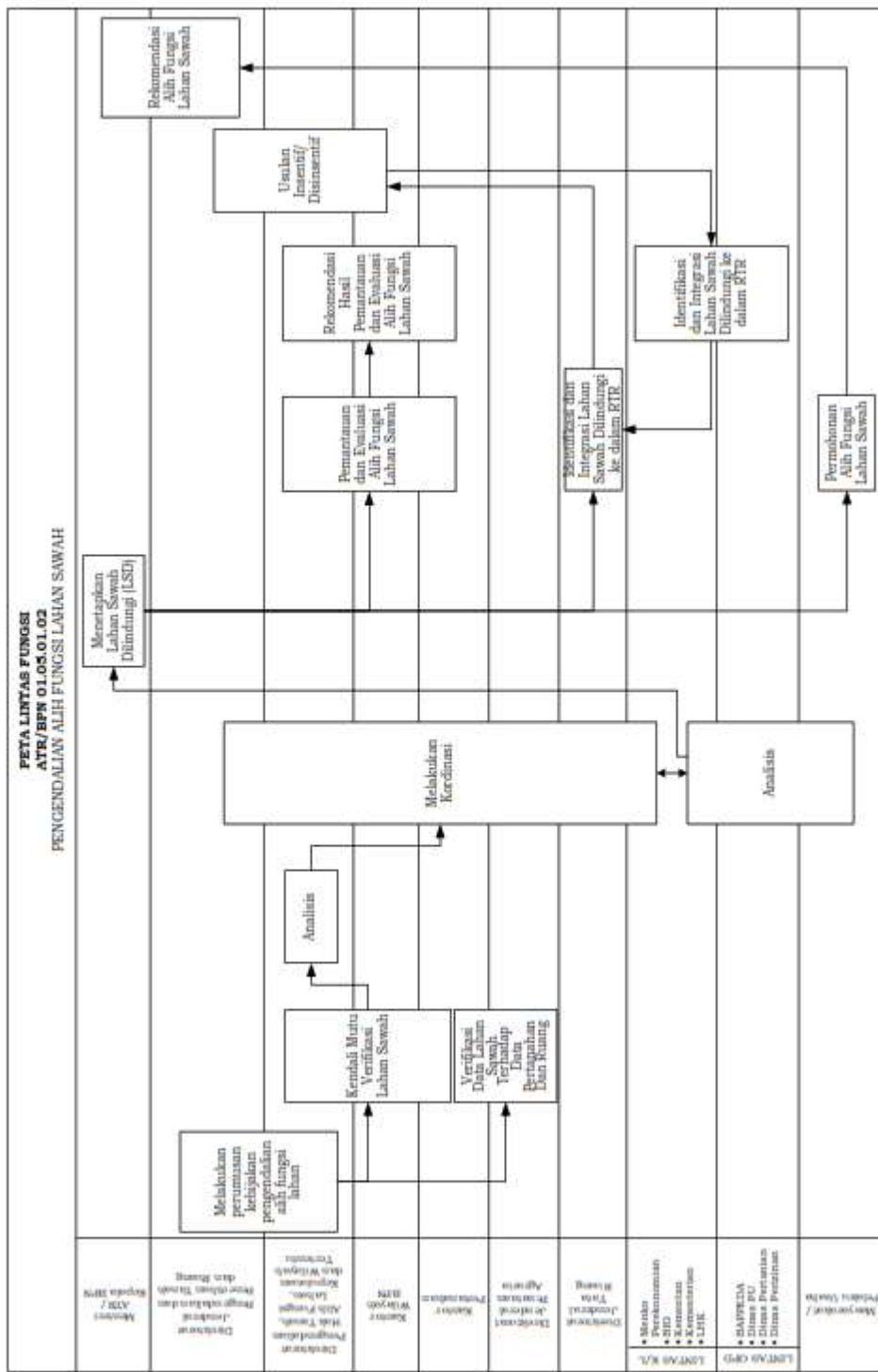


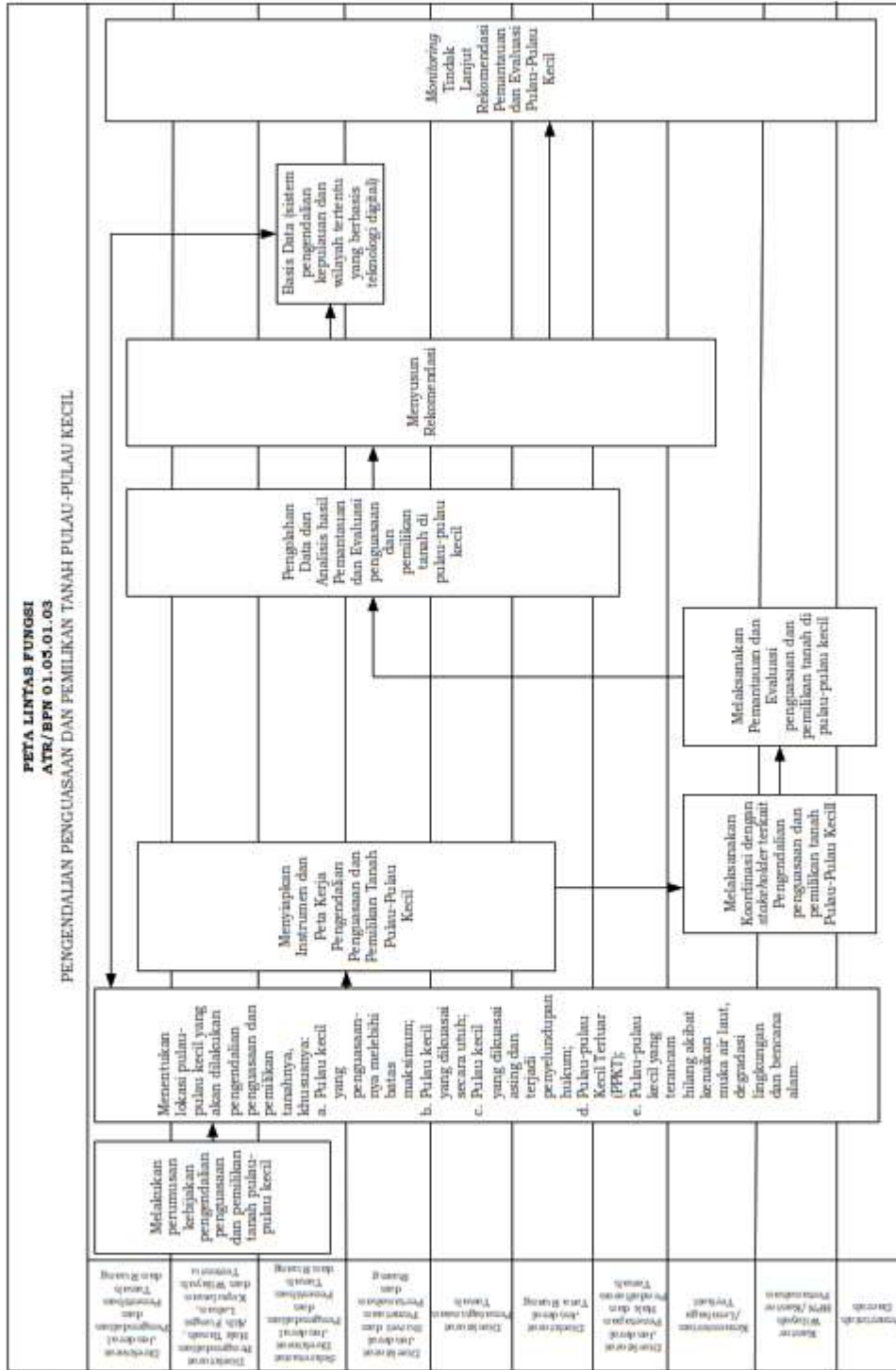
PETA RELASI ATR/BPN 01.05.01 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU															
ATR/BPN 01.05.01.01 Pengendalian Hak Atas Tanah	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Penetapan Agraria </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan </td> </tr> <tr> <td> Pemerintah Daerah </td> <td> Badan Informasi Geospasial </td> </tr> <tr> <td> Kementerian/Lembaga Terkait </td> <td> Masyarakat </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Pemerintah Daerah	Badan Informasi Geospasial	Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat		
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan														
Pemerintah Daerah	Badan Informasi Geospasial														
Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat														
ATR/BPN 01.05.01.02 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Penetapan Agraria </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Tata Ruang </td> </tr> <tr> <td> Menteri ATR/Kepyah BPN </td> <td> Menteri ATR/Kepyah BPN </td> </tr> <tr> <td> Masyarakat/Pelaku Usaha </td> <td> Masyarakat/Pelaku Usaha </td> </tr> <tr> <td> LINTAS K/L • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian LHK </td> <td> LINTAS OPD • BAPPENAS • Dinas RU • Dinas Pertanian • Dinas Perikanan </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menteri ATR/Kepyah BPN	Menteri ATR/Kepyah BPN	Masyarakat/Pelaku Usaha	Masyarakat/Pelaku Usaha	LINTAS K/L • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian LHK	LINTAS OPD • BAPPENAS • Dinas RU • Dinas Pertanian • Dinas Perikanan
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang														
Menteri ATR/Kepyah BPN	Menteri ATR/Kepyah BPN														
Masyarakat/Pelaku Usaha	Masyarakat/Pelaku Usaha														
LINTAS K/L • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian LHK	LINTAS OPD • BAPPENAS • Dinas RU • Dinas Pertanian • Dinas Perikanan														
ATR/BPN 01.05.01.03 Pengendalian Pengawasan dan Pemilikan Tanah Pulau-Pulau Kecil	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Tata Ruang </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Kementerian/Lembaga Terkait </td> </tr> <tr> <td> Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan </td> <td> Pemerintah Daerah </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kementerian/Lembaga Terkait	Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah				
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kementerian/Lembaga Terkait														
Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah														
ATR/BPN 01.05.01.04 Pengendalian Pengawasan dan Pemilikan Tanah Wilayah Tertentu	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Tata Ruang </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Kementerian/Lembaga Terkait </td> </tr> <tr> <td> Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan </td> <td> Pemerintah Daerah </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kementerian/Lembaga Terkait	Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah				
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Tata Ruang														
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kementerian/Lembaga Terkait														
Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah														



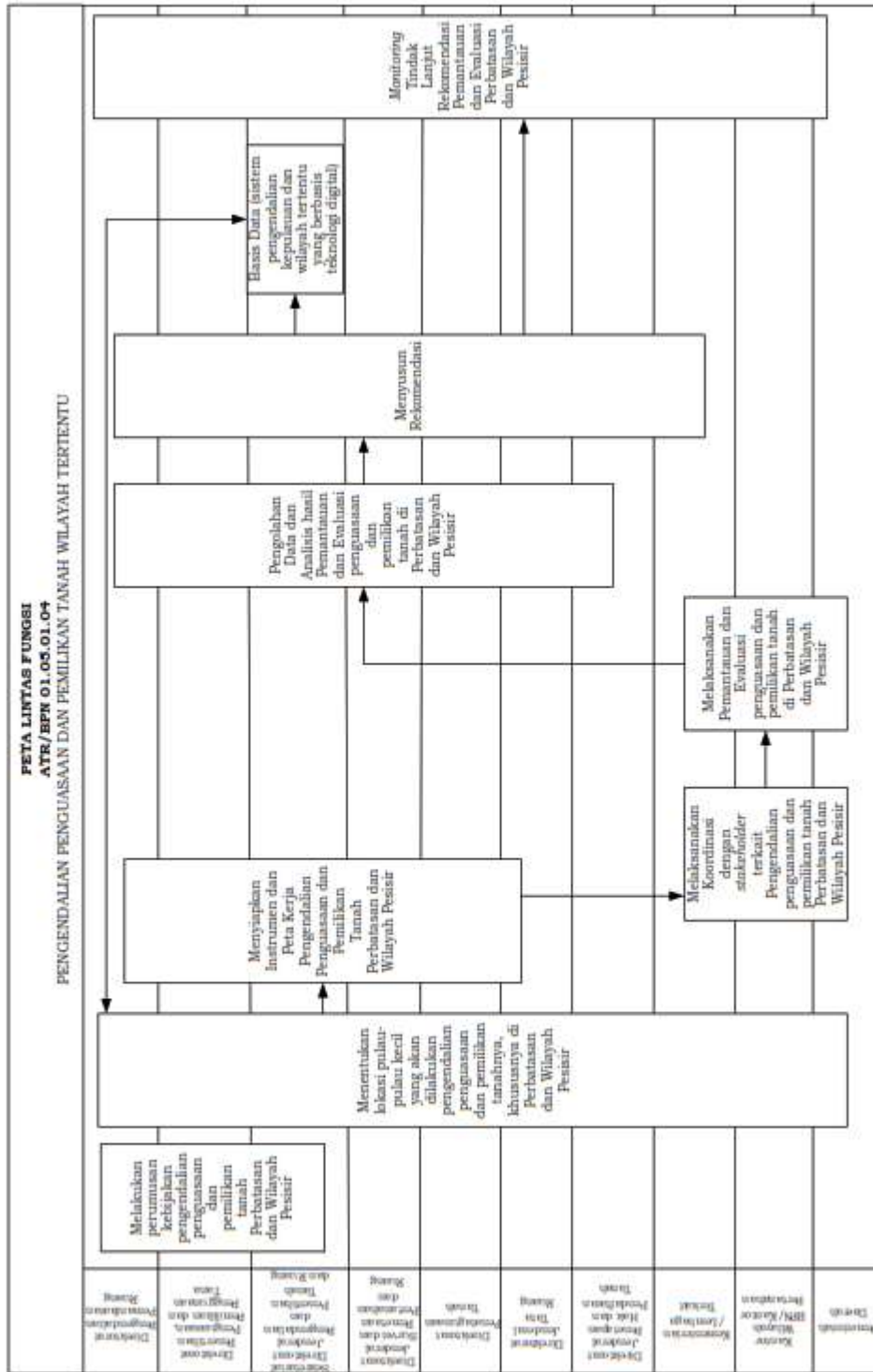


- 171 -

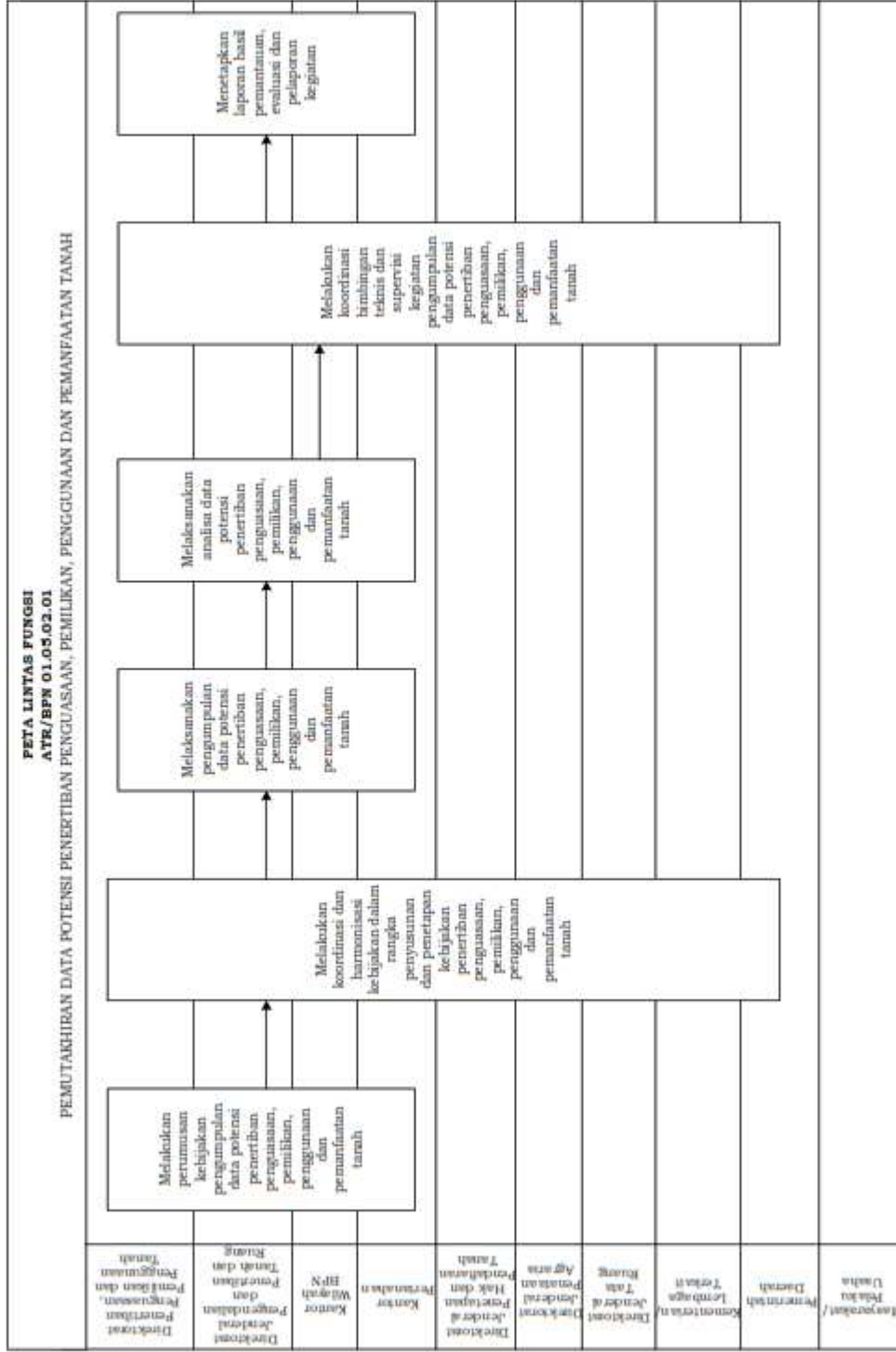


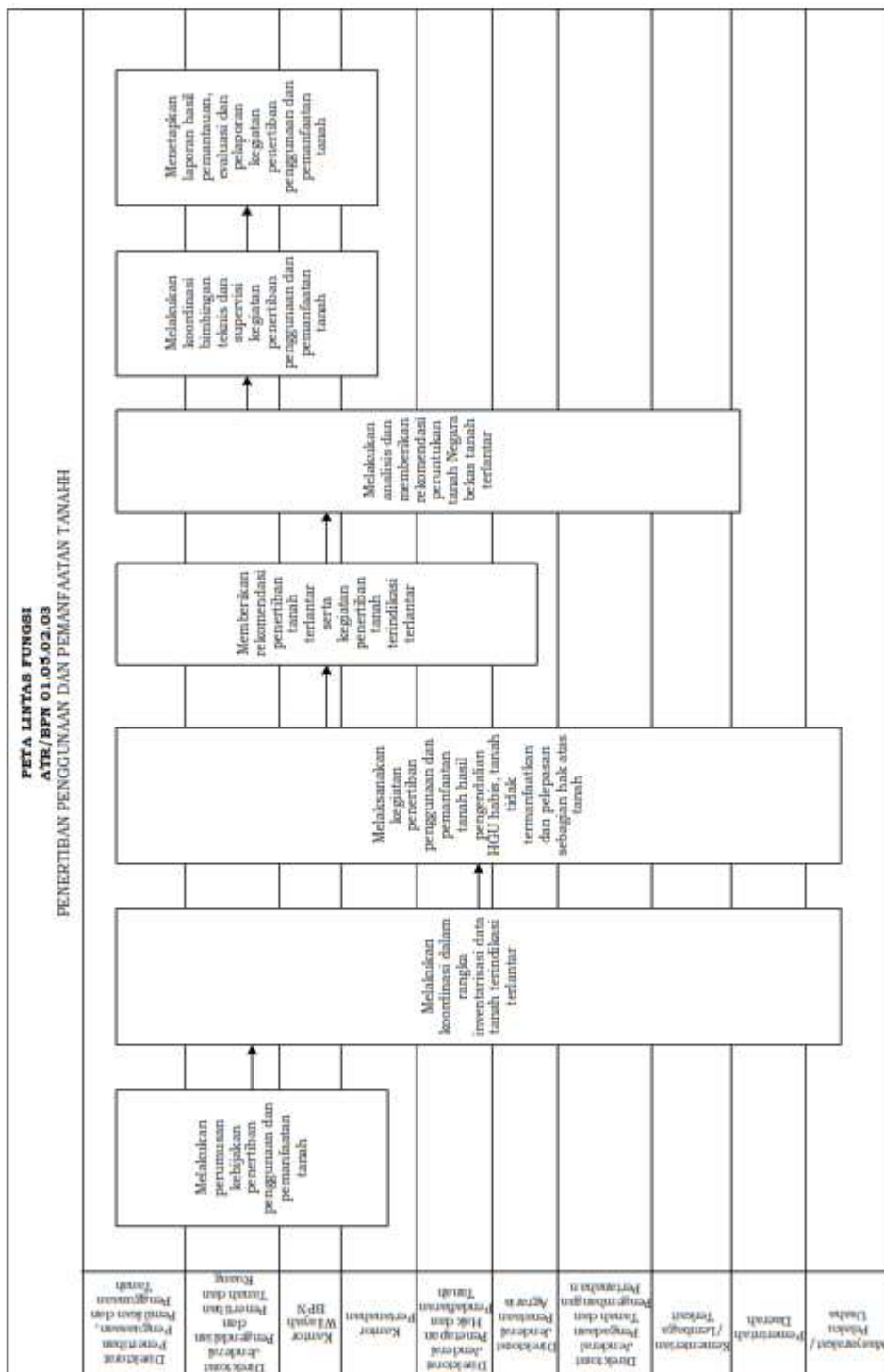


- 173 -



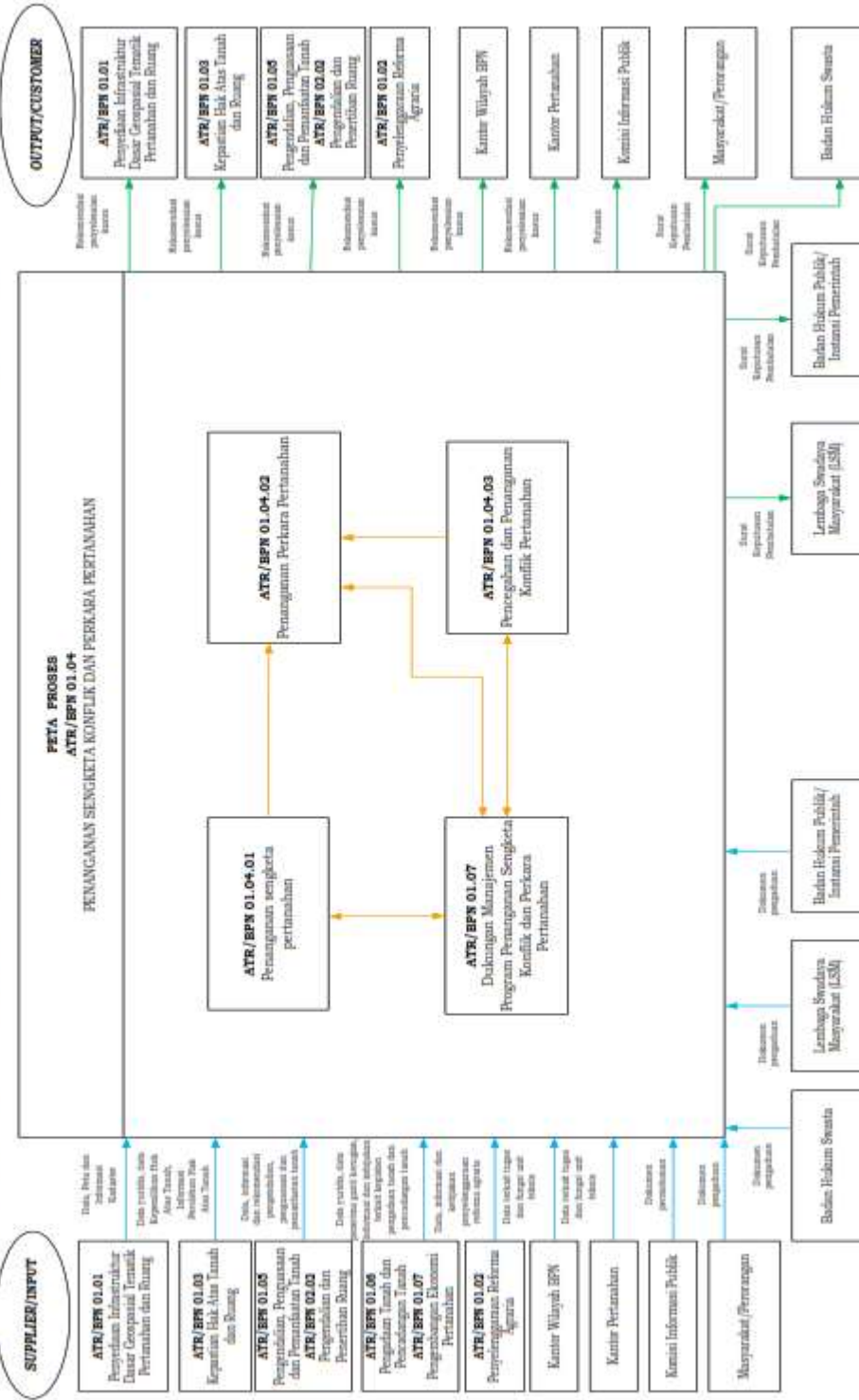
PETA RELASI ATR/BPN 01.05.02 PENERTIBAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH											
ATR/BPN 01.05.02.01 Pemutakhiran Data Potrus Penertiban Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Perumahan</td> <td style="text-align: center;">Kementerian/Lembaga Terkait</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat/Pelaku Usaha</td> <td></td> </tr> </table>	Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Pemerintah Daerah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Perumahan	Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat/Pelaku Usaha	
Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Pemerintah Daerah							
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Perumahan	Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat/Pelaku Usaha								
ATR/BPN 01.05.02.02 Penertiban Penggunaan dan Pemilikan Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Perumahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td style="text-align: center;">Kementerian/Lembaga Terkait</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat/Pelaku Usaha</td> </tr> </table>	Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Pemerintah Daerah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Perumahan	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat/Pelaku Usaha
Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Pemerintah Daerah							
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Perumahan	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat/Pelaku Usaha							
ATR/BPN 01.05.02.03 Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengembangan Tanah dan Perumahan</td> <td style="text-align: center;">Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> <td style="text-align: center;">Kantor Perumahan</td> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td style="text-align: center;">Kementerian/Lembaga Terkait</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat/Pelaku Usaha</td> </tr> </table>	Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengembangan Tanah dan Perumahan	Pemerintah Daerah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Perumahan	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat/Pelaku Usaha
Direktorat Penertiban Pengusahaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Kantor Wilayah BPN	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengembangan Tanah dan Perumahan	Pemerintah Daerah							
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Perumahan	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kementerian/Lembaga Terkait	Masyarakat/Pelaku Usaha							



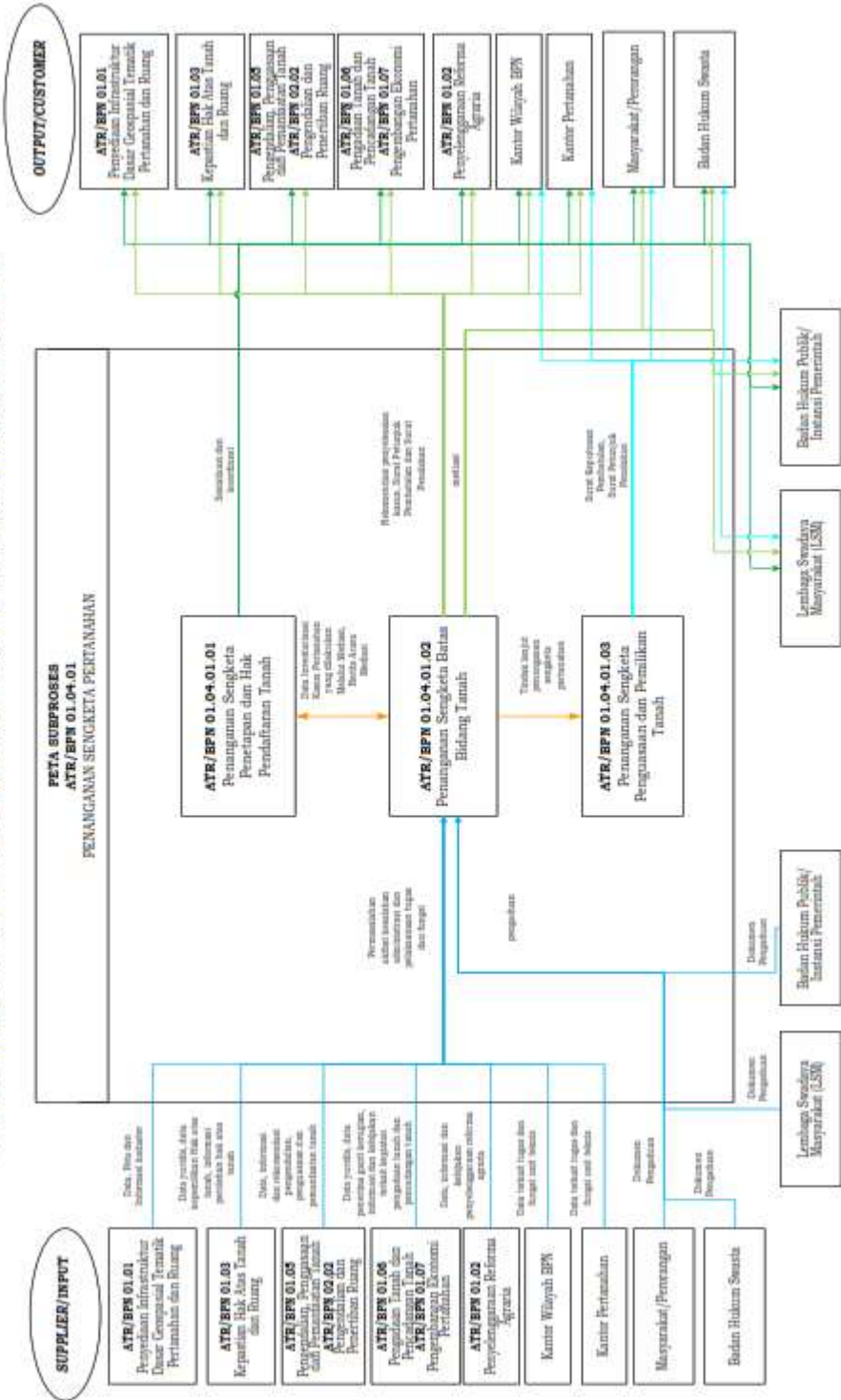


- 179 -

3.8. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan



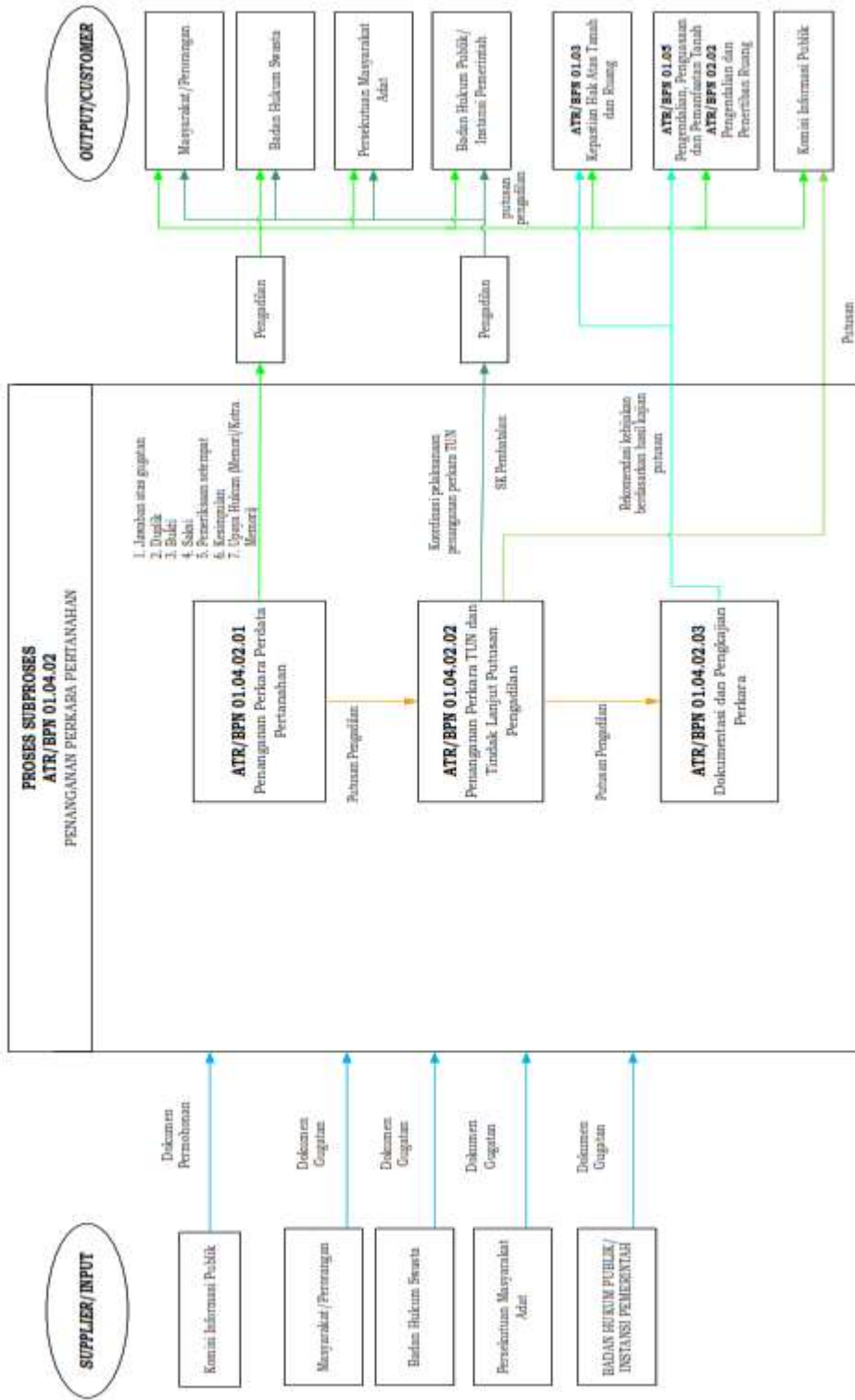
3.8.1.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penanganan Sengketa Perkara



- 181 -

PETA RELASI ATR/BPN 01.04.01 PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN																																											
ATR/BPN 01.04.01.01 Penanganan Sengketa Penetapan dan Hak Pendaftaran Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Penetapan Pertanahan dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Badan Hukum Swasta</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Persekutuan Masyarakat Adat</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Survei dan Penetapan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Kantor Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Badan Hukum Swasta	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Persekutuan Masyarakat Adat	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Survei dan Penetapan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Kantor Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Badan Hukum Swasta	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Persekutuan Masyarakat Adat	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
ATR/BPN 01.04.01.02 Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Direktorat Jenderal Survei dan Penetapan Pertanahan dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Badan Hukum Swasta</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Persekutuan Masyarakat Adat</td> <td>Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang</td> <td>Direktorat Jenderal Penetapan Agraria</td> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Survei dan Penetapan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Kantor Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Badan Hukum Swasta	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Persekutuan Masyarakat Adat	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Survei dan Penetapan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Kantor Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Badan Hukum Swasta	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
Persekutuan Masyarakat Adat	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pembertihan Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																					
ATR/BPN 01.04.01.03 Penanganan Sengketa Pengusutan dan Pemilikan Tanah	<table border="1"> <tr> <td>Kantor Wilayah BPN</td> <td>Kantor Pertanahan</td> <td>Persekutuan Masyarakat Adat</td> </tr> <tr> <td>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</td> <td>Badan Hukum Swasta</td> <td>Persekutuan Masyarakat Adat</td> </tr> <tr> <td>Masyarakat/Perorangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Persekutuan Masyarakat Adat	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat	Masyarakat/Perorangan			Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Persekutuan Masyarakat Adat																																									
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat																																									
Masyarakat/Perorangan																																											
Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah																																											

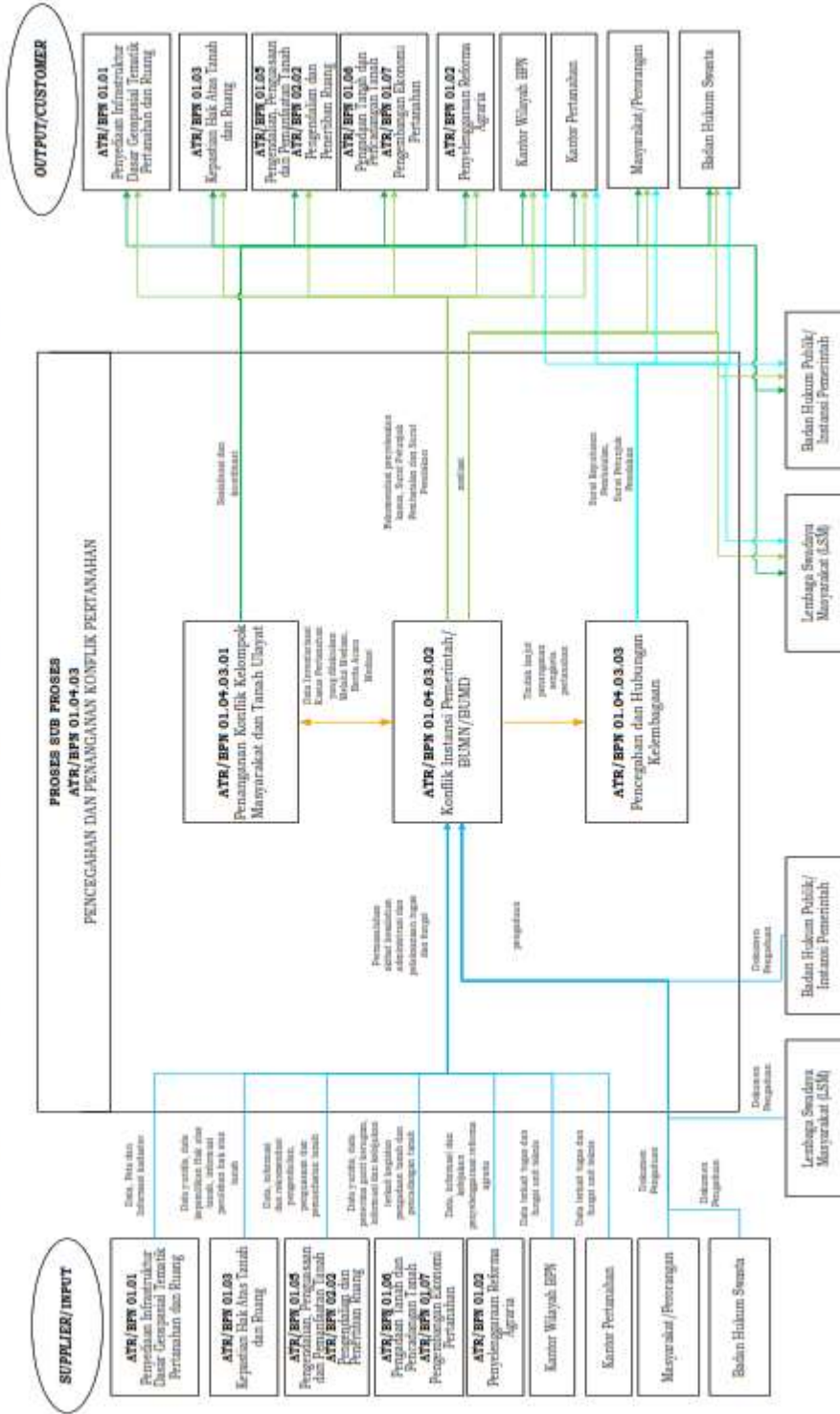
3.8.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan



PETA RELASI ATR/BPN 01.04.02 PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN											
ATR/BPN 01.04.02.01 Penanganan Perkara Perdata Pertanahan	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Komisi Informasi Publik</td> <td style="text-align: center;">Badan Hukum Swasta</td> <td style="text-align: center;">Persekutuan Masyarakat Adat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat/Perorangan</td> <td style="text-align: center;">Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> <td></td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Wilayah BPN	Komisi Informasi Publik	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Wilayah BPN	Komisi Informasi Publik	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat							
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah								
ATR/BPN 01.04.02.02 Penanganan Perkara TUN dan Tidak Lanjut Putusan Pengadilan	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="text-align: center;">Komisi Informasi Publik</td> <td style="text-align: center;">Badan Hukum Swasta</td> <td style="text-align: center;">Persekutuan Masyarakat Adat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="text-align: center;">Kantor Pertanahan</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat/Perorangan</td> <td style="text-align: center;">Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> <td></td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Wilayah BPN	Komisi Informasi Publik	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Wilayah BPN	Komisi Informasi Publik	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat							
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan	Masyarakat/Perorangan	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah								
ATR/BPN 01.04.02.03 Dokumentasi dan Pengelolan Perkara	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Badan Hukum Swasta</td> <td style="text-align: center;">Persekutuan Masyarakat Adat</td> <td style="text-align: center;">Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah</td> <td style="text-align: center;">Masyarakat/Perorangan</td> </tr> </table>	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Masyarakat/Perorangan						
Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat	Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah	Masyarakat/Perorangan								

<p style="text-align: center;">FETA LINTAS FUNGSI ATR/BFN 01.04.02.01 PENANGANAN PERKARA TUNTUTAN PERUSAHAAN PERTANAHAN ATR/BFN 01.04.02.01 PENANGANAN PERKARA TUNTUTAN PERUSAHAAN PERTANAHAN ATR/BFN 01.04.02.03 DOKUMENTASI DAN PENGKAJIAN PERKARA</p>	<p style="text-align: center;">Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan hasil pembetulan</p>	<p style="text-align: center;">Membuat dan memeriksa dokumen pendukung permohonan pembetulan</p>	<p style="text-align: center;">Membuat dan memeriksa dokumen pendukung permohonan pembetulan</p>	<p style="text-align: center;">Menyusun laporan pemeriksaan dan hasil pembetulan</p>	
Kantor Pertanahan					
Kantor Wilayah BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					
Ditjen BPN					

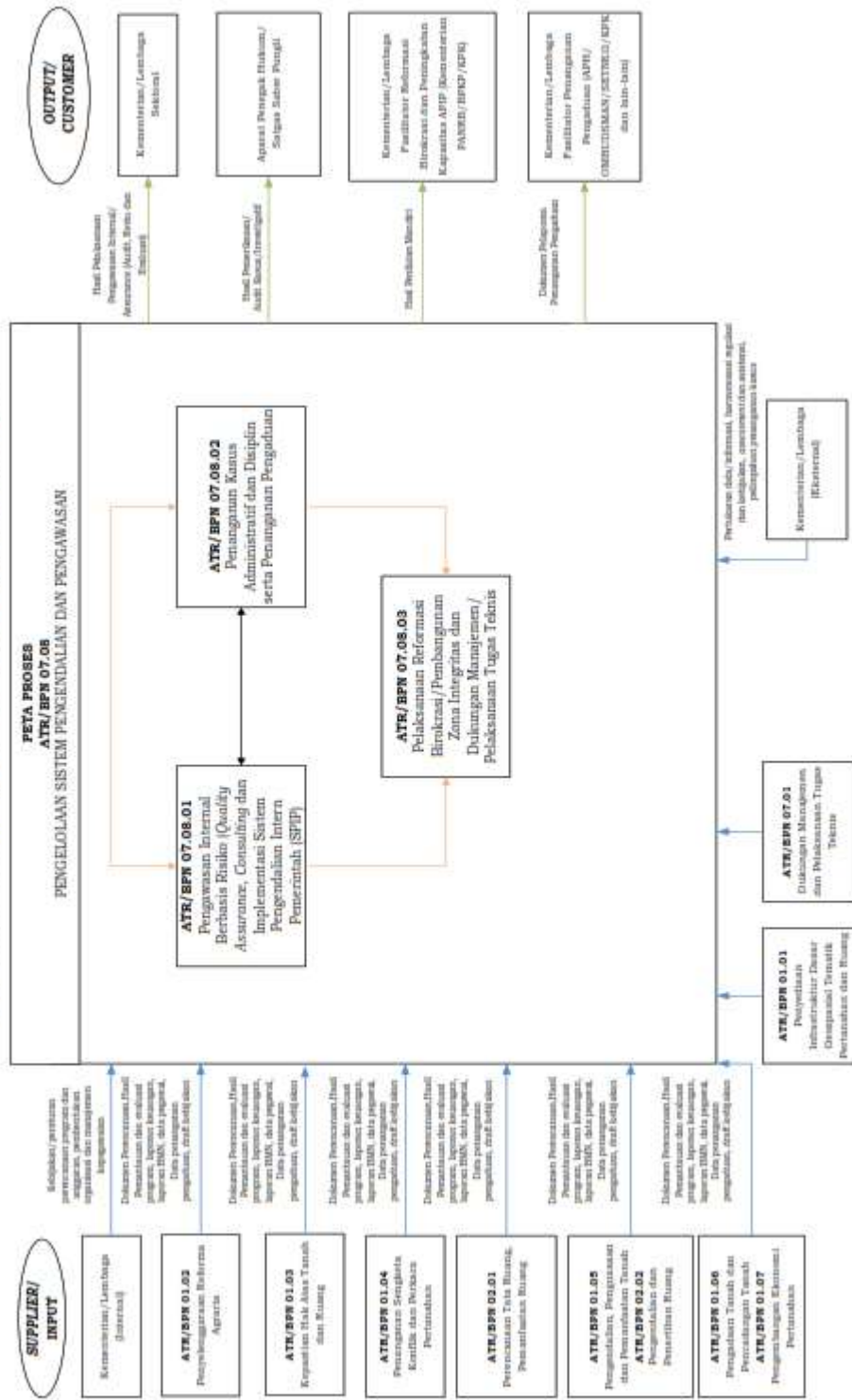
3.8.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik



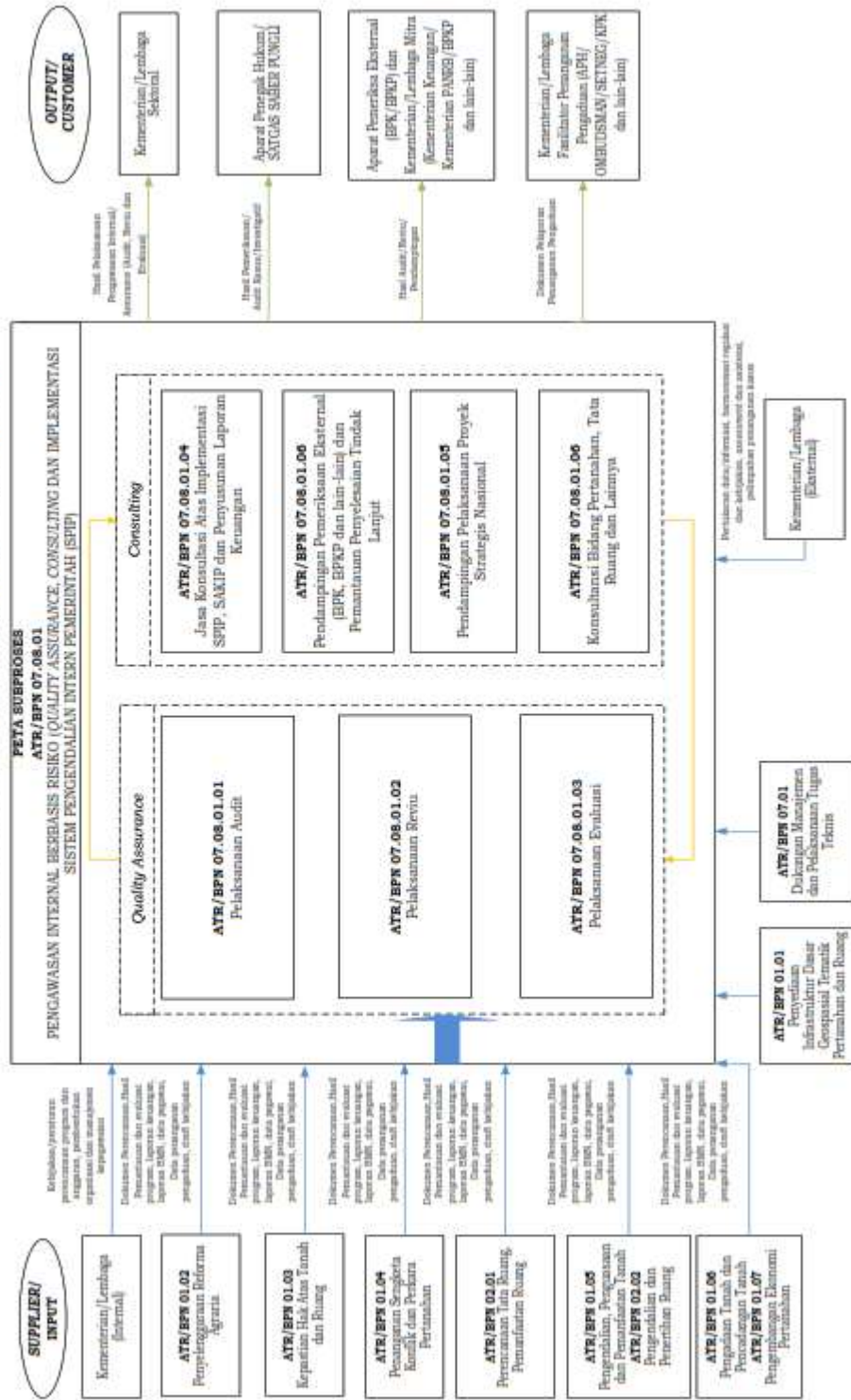
PETA RELASI ATR/BPN 01.04.03 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN																	
ATR/BPN 01.04.03.01 Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah </td> <td> Direktorat Jenderal Penanaman Agraria </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> <td> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) </td> <td> Masyarakat/ Perorangan </td> <td> Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> <td> Kantor Pertanahan </td> <td> Badan Hukum Swasta </td> <td> Masyarakat/ Perorangan </td> <td> Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah </td> <td> Persekutuan Masyarakat Adat </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Pengembangan Perumahan	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Persekutuan Masyarakat Adat
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah										
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Pengembangan Perumahan	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Persekutuan Masyarakat Adat										
ATR/BPN 01.04.03.02 Konflik Instansi Pemerintah/BUMK/BUMD	<table border="1"> <tr> <td> Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah </td> <td> Direktorat Jenderal Penanaman Agraria </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> <td> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) </td> <td> Masyarakat/ Perorangan </td> <td> Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah </td> </tr> <tr> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang </td> <td> Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Pengembangan Perumahan </td> <td> Kantor Wilayah BPN </td> <td> Kantor Pertanahan </td> <td> Badan Hukum Swasta </td> <td> Masyarakat/ Perorangan </td> <td> Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah </td> <td> Persekutuan Masyarakat Adat </td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Pengembangan Perumahan	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Persekutuan Masyarakat Adat
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penanaman Agraria	Kantor Wilayah BPN	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah										
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Pengembangan Perumahan	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Persekutuan Masyarakat Adat										
ATR/BPN 01.04.03.03 Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan	<table border="1"> <tr> <td> Kantor Wilayah BPN </td> <td> Kantor Pertanahan </td> <td> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) </td> <td> Masyarakat/ Perorangan </td> <td> Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah </td> <td> Badan Hukum Swasta </td> <td> Persekutuan Masyarakat Adat </td> </tr> <tr> <td> Kantor Wilayah BPN </td> <td> Kantor Pertanahan </td> <td> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) </td> <td> Masyarakat/ Perorangan </td> <td> Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah </td> <td> Badan Hukum Swasta </td> <td> Persekutuan Masyarakat Adat </td> </tr> </table>	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat		
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat											
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Masyarakat/ Perorangan	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	Badan Hukum Swasta	Persekutuan Masyarakat Adat											

- 189 -

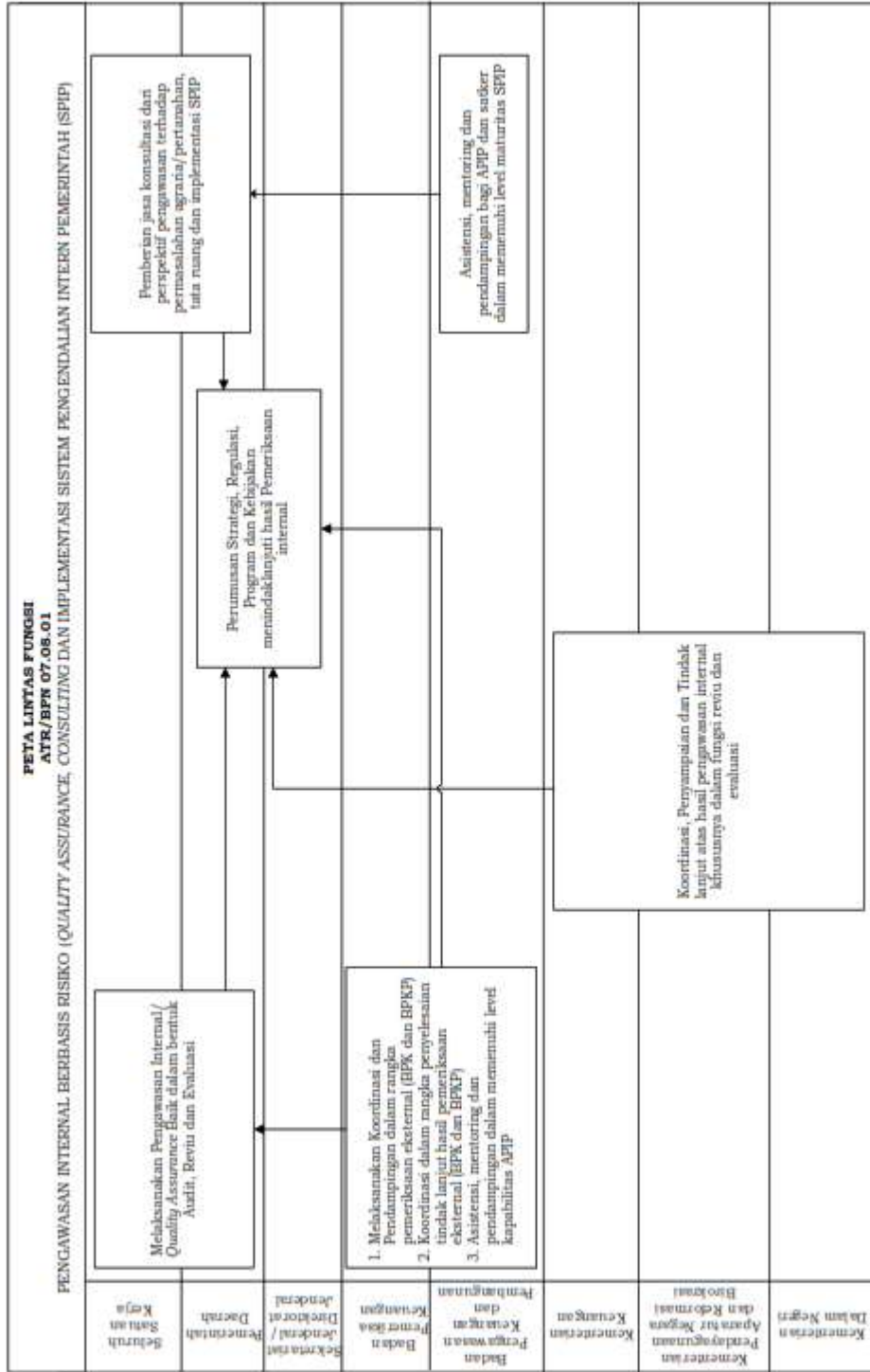
3.9. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Inspektorat Jenderal



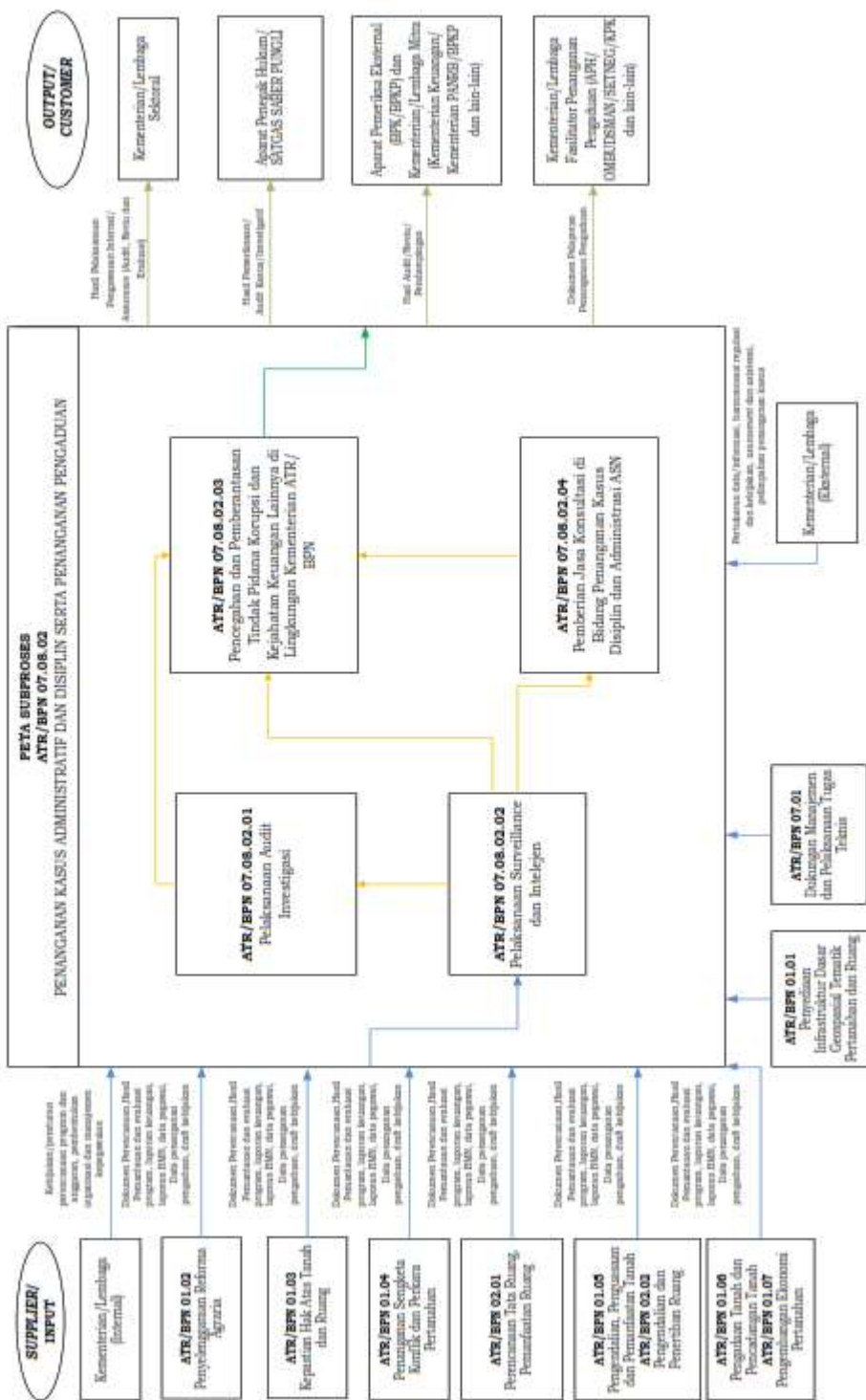
3.9.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Inspektorat Wilayah



<p>PETA RELASI ATR/BPN 07.08.01 PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS RISIKO (QUALITY ASSURANCE, CONSULTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP))</p>									
<p>ATR/BPN 07.08.01 Pengawasan Internal Berbasis Risiko (Quality Assurance, Consulting dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP))</p>	<table border="1"><tr><td>Seluruh Satuan Kerja</td><td>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</td></tr><tr><td>Kementerian Dalam Negeri</td><td>Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal</td></tr><tr><td>Kementerian Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</td><td>Pemerintah Daerah</td></tr><tr><td>Kementerian Keuangan</td><td>Badan Pemeriksa Keuangan</td></tr></table>	Seluruh Satuan Kerja	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal	Kementerian Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah	Kementerian Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan
Seluruh Satuan Kerja	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan								
Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal								
Kementerian Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah								
Kementerian Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan								



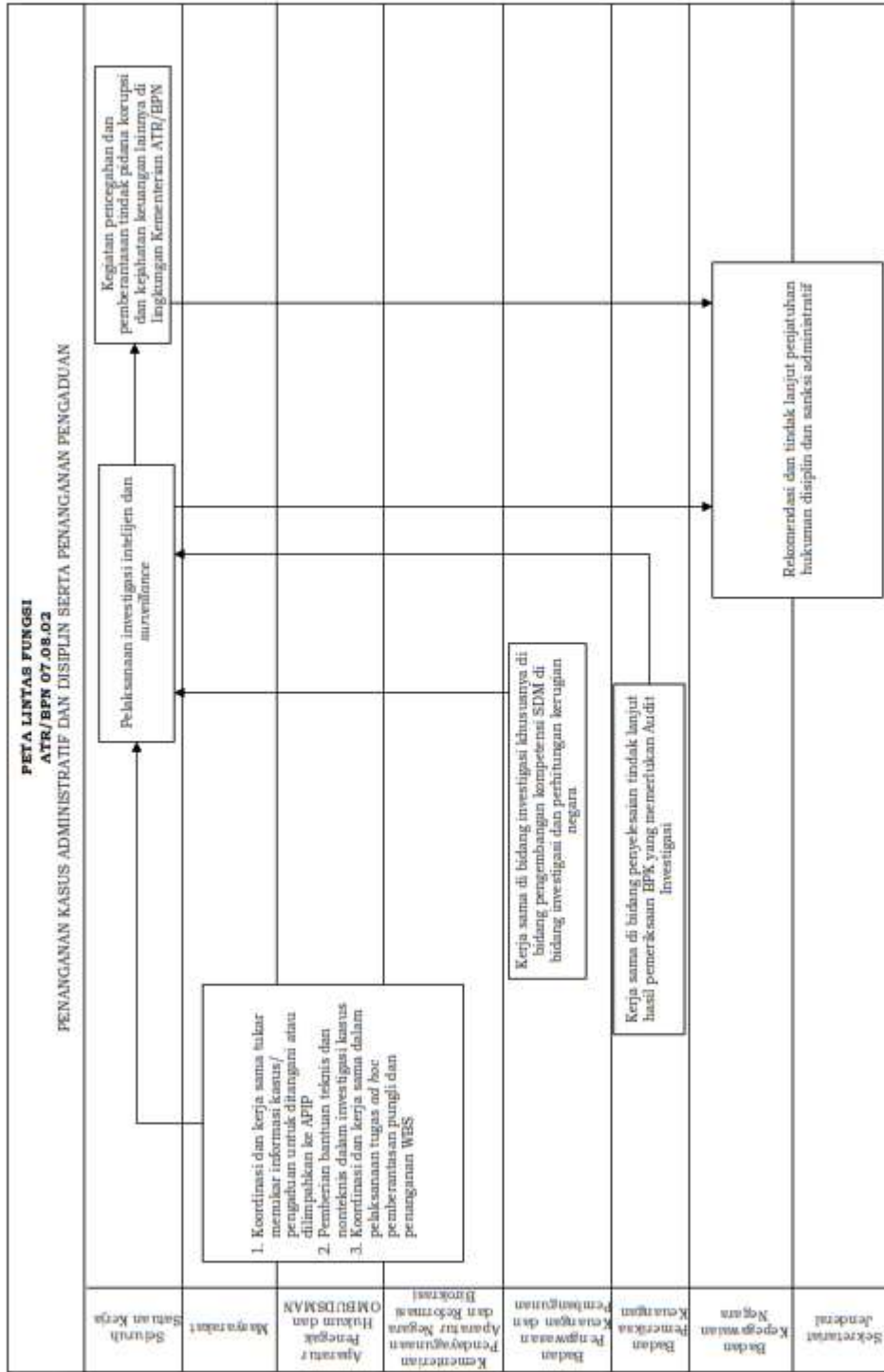
3.9.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Inspektorat Bidang Investigasi



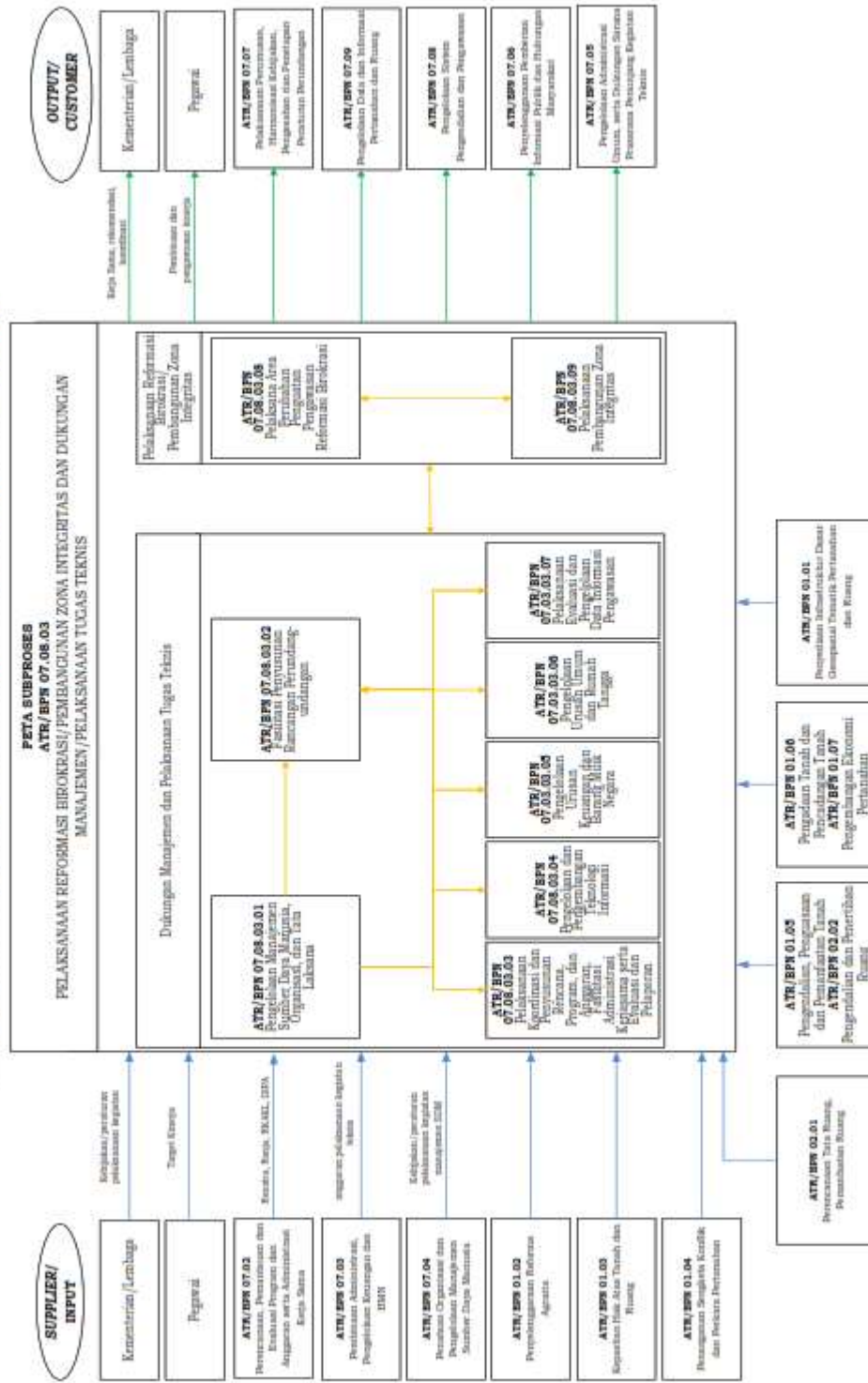
- 194 -

<p style="text-align: center;">PETA RELASI ATR/BPN 07.08.02 PENANGANAN KASUS ADMINISTRATIF DAN DISIPLIN SERTA PENANGANAN PENGADUAN</p>	
<p style="text-align: center;">ATR/BPN 07.08.02 Penanganan Kasus Administratif dan Disiplin serta Penanganan Pengaduan</p>	
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Jenderal
Aparatur Penegak Hukum dan OMBUDSMAN	Seluruh Satuan Kerja
Badan Pemeriksa Keuangan	Komisi Pemberantasan Korupsi
Masyarakat	

- 195 -



3.9.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sekretariat Inspektorat Jenderal



<p>PETA RELASI ATR/BPN 07.08.03 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI/PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN DUKUNGAN MANAJEMEN/PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS</p>							
<p>ATR/BPN 07.08.03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas dan Dukungan Manajemen/Pelaksanaan Tugas Teknis</p>	<table border="1"><tr><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</td><td>Badan Kepegawaian Negara</td></tr><tr><td>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</td><td>Sekretariat Jenderal</td></tr><tr><td>Seluruh Satuan Kerja</td><td>Kementerian Keuangan</td></tr></table>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Negara	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Jenderal	Seluruh Satuan Kerja	Kementerian Keuangan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Negara						
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Jenderal						
Seluruh Satuan Kerja	Kementerian Keuangan						

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI/PEMBAHANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN DUKUNGAN MANAJEMEN/PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS	
Sekretariat Jenderal	<p>1. Koordinasi pelaksanaan fungsi di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, evaluasi dan penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan</p> <p>3. Pengumpulan data hasil pengawasan dan pengembangan sistem informasi pengawasan</p>
Sekretaris Utama	<p>Koordinasi pelaksanaan mandat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATK/DPN (termasuk seluruh unit Eselon I)</p> <p>Pelaksanaan pembazaraan dan pendataan mandiri Zona Integritas</p>
Kementerian Koordinator Agraria dan Ruminasi	<p>Penyempakan, koordinasi hasil evaluasi kinerja dan Reformasi hasil pengawasan</p> <p>1. Penyempakan Hasil Penelitian, Monev dan Pembinaan ZI 2. Pendampingan dalam penilaian RIZ dan ZI</p>
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<p>Pengembangan kompetensi SDM Pegawai dan pembinaan jabatan fungsional audit</p>
Badan Kepegawaian Negara	<p>Koordinasi pelaksanaan kepegawaian</p>
Kementerian Keuangan	<p>Koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan persiapan keuangan</p>

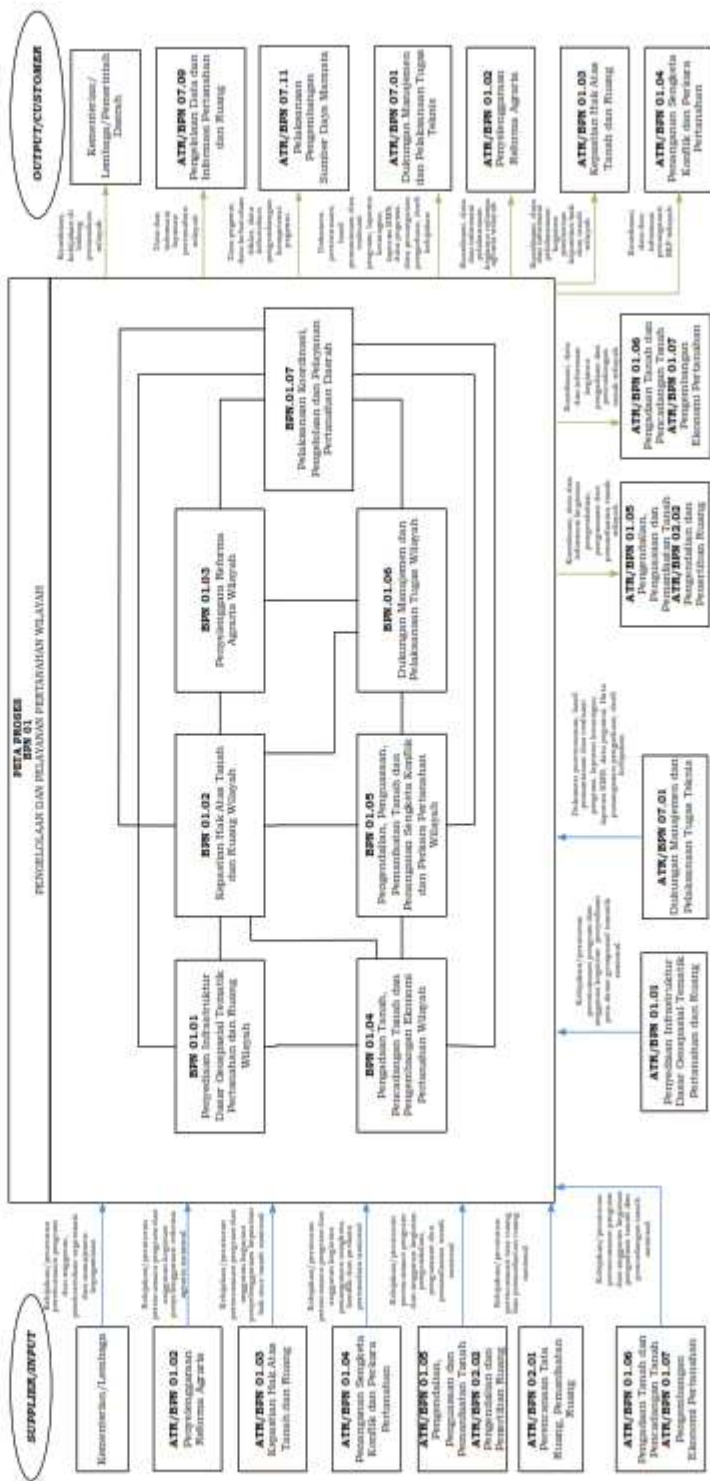
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

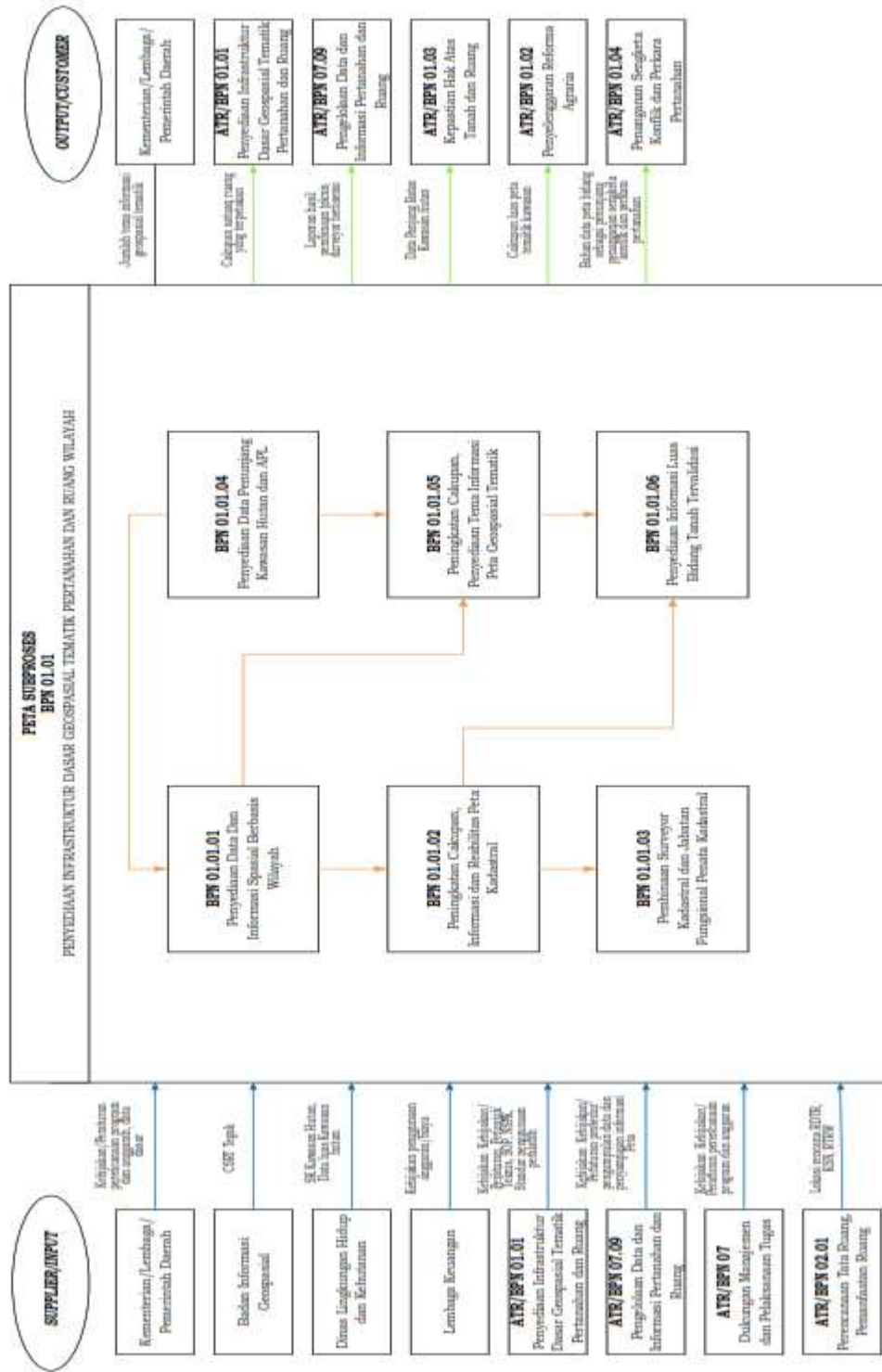
SOFYAN A. DJALIL

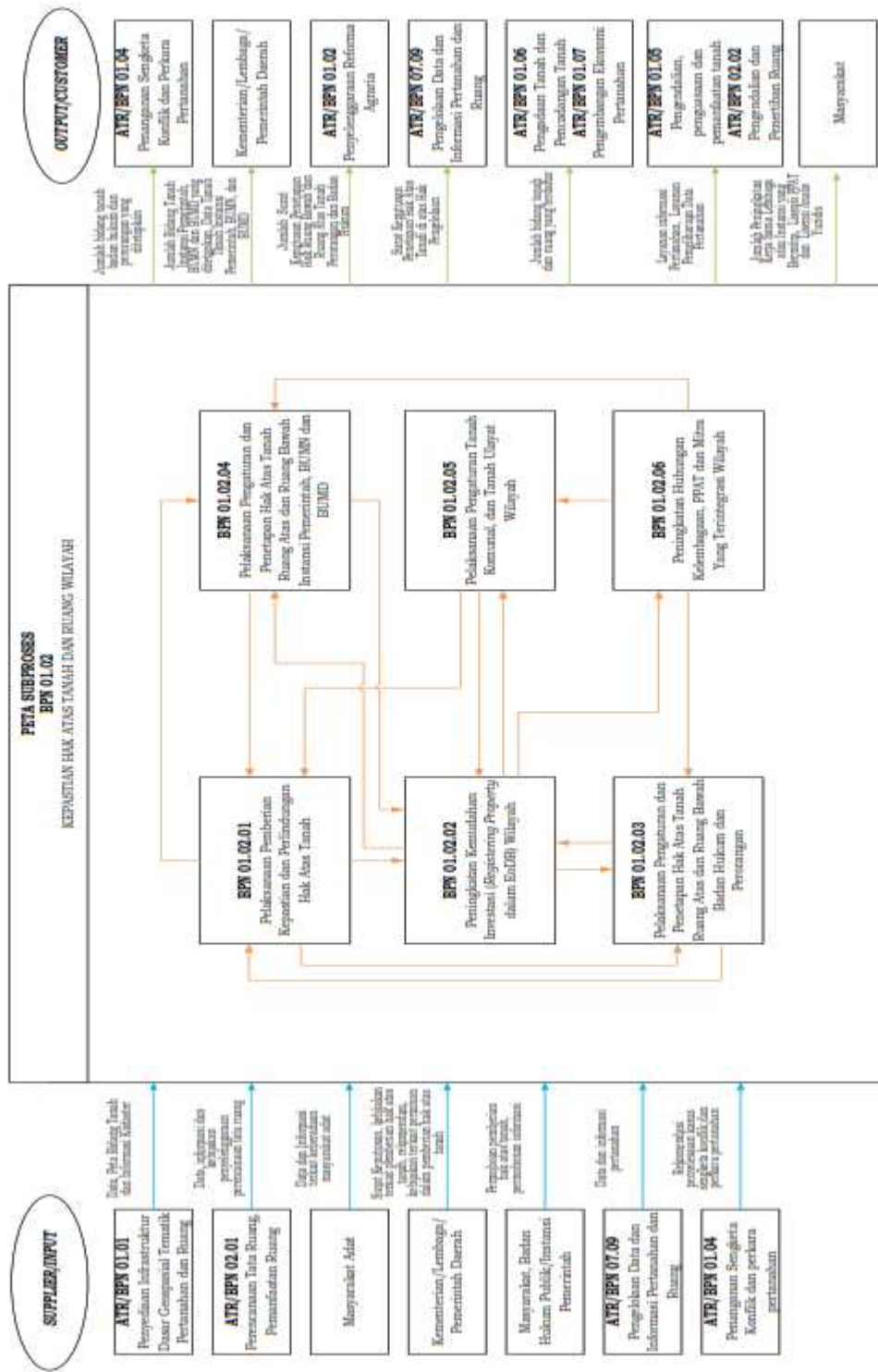
LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4.1 Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



- 200 -





- 202 -

